# POTRET BURAM POLITIK

# INDONESIA

**DR. Bambang Istianto HP. M.Si**

Mitra
Wacana
Media
PENERBIT

**POTRET BURAM POLITIK INDONESIA**

**DR. Bambang Istianto HP. M.Si**

Mitra Wacana Media
PENERBIT

**Edisi Asli**
**Hak Cipta © 2014, Penerbit Mitra Wacana Media**
Telp. : (021) 824-31931
Faks. : (021) 824-31931
Website : http//www.mitrawacanamedia.com
E-mail : mitrawacanamedia@gmail.com

**Hak cipta dilindungi undang-undang**. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

| **UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA** |
|---|
| 1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama **7 (tujuh) tahun** dan/atau denda paling banyak **Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)**. |
| 2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama **5 (lima) tahun** dan/atau denda paling banyak **Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**. |

Istianto, Bambang

Potret Buram Politik Indonesia/Bambang Istianto

Edisi Pertama
—Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014
1 jil., 17 x 24 cm, 296 hal.

ISBN: 978-602-1353-58-5

1. Sosial Politik 2. Potret Buram Politik Indonesia
I. Judul II. Bambang Istianto

# Kata Pengantar

Sebagai pengantar dalam buku ini, teriring ucapan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, dapat menyelesaikan penulisan buku yang diberi judul **"POTRET BURAM POLITIK INDONESIA"**. Penyusunan buku ini merupakan buah pemikiran kritis tentang politik yang berkembang pada era reformasi. Sebagaimana diketahui bersama pembangunan politik di era reformasi telah berusia lima belas (15) tahun. Usia yang mulai menginjak dewasa dalam menghadapi perubahan konsolidasi kekuasaan otoritarian menuju era kekuasaan demokrasi. Perubahan yang terjadi telah kita rasakan bersama bahwa kebebasan berpendapat

dan kebebasan berserikat sudah sedemikian longgar. Namun proses demokratisasi yang berjalan belum menunjukkan terwujudnya stabilitas politik yang mantab, belum mampu mendukung terhadap penguatan sistem dan struktur ekonomi, bebas KKN, bahkan muncul konflik horisontal di daerah-daerah dan ketimpangan sosial yang semakin melebar. Oleh sebab itu wajar banyak kalangan menilai arah pembangunan politik melalui empat (4) empat kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terjadi disorientasi terhadap tujuan negara.

Fenomena politik seperti yang diuraikan di atas menarik untuk dijadikan bahan kajian politik kontemporer selama kurun waktu era reformasi berjalan. Tujuan pembangunan sistem politik pada hakekatnya upaya meletakkan pilar demokrasi dalam kehidupan masyarakat menuju budaya politik yang lebih egaliter, partisipasi politik yang meningkat, dan kematangan serta kedewasan berpolitik masyarakat. Tercapainya tujuan di atas diharapkan melalui amandemen tersebut meliputi antara lain Pemilu Presiden melalui demokrasi langsung, berkurangnya tugas dan fungsi lembaga MPR, pembentukan lembaga baru yang disebut Mahkamah Konstitusi (MK), pembentukan Dewan Perwakilan Daerah dan penguatan terhadap kedudukan DPR.

Uji coba pelaksanaan pembangunan politik secara empiristik terjadi anomali. Contoh penerapan demokrasi langsung dalam pemilukada, pada kenyataaanya para pejabat publik yang terpilih kurang memiliki kemampuan di bidang manajemen pemerintahan, disamping itu kurang lebih 300 kepala daerah saat ini tersandung kasus korupsi. Oleh sebab itu fenomena tersebut merupakan lampu merah bahwa tanpa disadari desain sistem politik yang dibangun memiliki potensi menghancurkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penjelasan di atas menghantarkan penulis untuk memberikan judul "Potret Buram Politik Indonesia". Topik tersebut menggambarkan kondisi dan situasi proses pembangunan politik yang membingungkan, bias tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam demokrasi serta kerumitan dalam proses politik. Substansi buku ini sebagian besar diambil dari artikel yang telah di muat di beberapa media massa. Topik substansi tersebut antara lain; Konflik kekuasaan Legislatif dengan Eksekutif, Ambigau antara sistem perlementer dengan presidensiil, matinya politik ideologi, *Quo vadis* Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Langkanya Politisi yang negarawan, Politisasi konflik masyarakat, Politik uang menciderai demokrasi, Peran militer dalam sistem politik di era reformasi, demokrasi langsung membawa manfaat atau petaka, Partai politik melanggengkan kekuasaan transaksional, Rontoknya kekuatan partai politik islam, Dilema pemerintahan koalisi dan Ideologi Pancasila antara hidup dan mati.

Dengan telah penerbitan dan publikasi buku Potret Buram Politik Indonesia, saya persembahkan pertama; kepada kedua orangtua tercinta, Ayahanda R. Bambang Oetomo (almarhum) dan Ibunda tercinta Hj.Rr.Hadiwati serta bapak mertua Prof. HM. Effendi, SH (almarhum) dan ibu mertua Hj.Fatimah, dan juga kakak tersayang Yetty Ismiati, Bambang Ismoyo, SE (almarhum) serta adik Is Heru Permana, SH, MH dan Drs. Ismanto Priyo Tantomo. Kedua; saya mengucapkan terima kasih kepada istri tercinta Fitri Herlinawati, SH, yang selama ini dengan tekun sabar membantu dan menemani saat proses penulisan yang banyak menyita waktu baik untuk keluarga maupun kantor. Demikian pula untuk anak-anak tersayang, pertama; Arsyad Hendrawan, ST yang pada akhir tahun 2009 baru menyelesaikan bangku kuliah Teknik Mesin di ITB Bandung, kedua; Romadhon Her Wicaksono, yang masih di bangku kulian Universitas Moestopo Beragama Jakarta dan ketiga; Imaduddin Heradi Yuwono yang saat ini duduk di bangku kelas 10 SMU Angkasa Komplek Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih terdapat banyak kekurangan karena pada hakekatnya ilmu selalu berkembang dengan pesat untuk itu kritik dan saran dari pembaca selalu terbuka dan menjadi harapan penulis untuk perbaikan dan kesempurnaan buku ini. Di samping itu penulis meminta maaf apabila dalam buku ini terdapat salah kutip atau pengutipan yang lupa atau tidak tercantum narasumbernya dalam daftar pustaka, hal tersebut akan menjadi tanggung jawab penulis dan pada kesempatan lain akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juli 2014

**Bambang Istianto**

# Daftar Isi

**Kata Pengantar** ..... **iii**
**Daftar Isi** ..... **vii**

**Bab 1 Pendahuluan** ..... **1**
1.1 Latar Belakang ..... 2
1.1.1 Fenomena Pembangunan Sistem Politik ..... 5
1.1.2 Fenomena Eksistensi Partai Politik ..... 7

1.1.3 Fenomena Demokrasi di Indonesia ..... 9
1.1.4 Fenomena Perubahan Orientasi Ideologi Sekuler, Pluralisme dan Pragmatisme..... 10
1.1.5 Fenomena Eksistensi Peran Militer..... 13
1.2 Pengertian Politik, Sistem Politik, Ideologi, Demokrasi ..... 14
1.2.1 Pengertian Politik ..... 14
1.2.2 Pengertian Sistem Politik ..... 19
1.2.3 Pengertian Ideologi..... 25
1.2.4 Pengertian Demokrasi..... 28
1.3 Metode Analisis..... 33

**Bab 2 Hubungan Ideologi dan Partai Politik..... 35**
2.1 Beberapa Dimensi Ideologi..... 37
2.1.1 Dimensi Realita ..... 37
2.1.2 Dimensi Idealisme ..... 40
2.1.3 Dimensi Fleksibilitas ..... 41
2.2 Beberapa Pemikiran Ideologi-Ideologi Besar Dunia..... 42
2.2.1 Liberal-Kapitalisme ..... 44
2.2.2 Komunisme..... 46
2.2.3 Sosialisme..... 47
2.2.4 Nasionalisme ..... 47
2.2.5 Marhaenisme..... 48
2.2.6 Islamisme ..... 49
2.2.7 Pancasila..... 51
2.3 Hubungan Ideologi dengan Partai Politik..... 52
2.3.1 Ideologi Pilar Utama Partai Politik..... 52
2.3.2 Ideologi Memperkuat Eksistensi Negara ..... 53

**Bab 3 Demokrasi sebagai Esensi Pembangunan Politik Era Reformasi ..... 55**
3.1 Macam-Macam Nama Demokrasi..... 67
3.1.1 Demokrasi Konstitusional..... 68
3.1.2 Demokrasi Rakyat ..... 68
3.1.3 Demokrasi Parlementer ..... 69
3.1.4 Demokrasi Liberal..... 69
3.1.5 Demokrasi Terpimpin..... 70
3.1.6 Demokrasi Pancasila ..... 71

3.1.7 Demokrasi Sosial ..... 71
3.1.8 Demokrasi Ekonomi ..... 72
3.2 Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia ..... 73
3.2.1 Tahun 1945 s/d 1959; Demokrasi Parlementer ..... 74
3.2.2 Tahun 1959 s/d 1965; Masa Demokrasi Terpimpin ..... 75
3.2.3 Tahun 1967 s/d 1998; Masa Demokrasi Pancasila ..... 76
3.2.4 Tahun 1999 s/d saat sekarang; Masa Demokrasi Era Reformasi ..... 78
3.3 Pembangunan Sistem Politik yang Demokratis ..... 80
3.3.1 Latar Belakang ..... 80
3.3.2 Fenomena Sistem Politik di Indonesia ..... 82
3.3.3 Pendekatan Teori Sistem Politik yang Demokratis ..... 83

**Bab 4 Potret Buram Politik Indonesia ..... 93**
4.1 Ideologi Pancasila Antara Hidup dan Mati ..... 96
4.1.1 Sejarah Perjalanan Ideologi Pancasila ..... 96
4.1.2 Pertarungan Ideologi ..... 97
4.1.3 Pelemahan Nilai-nilai Ideologi Pancasila ..... 98
4.1.4 Krisis Ideologi ..... 99
4.1.5 Upaya Penguatan Ideologi Pancasila ..... 100
4.2 Dilema Pemerintahan Koalisi ..... 105
4.2.1 Sistem Pemerintahan Demokrasi ..... 105
4.2.2 Pemerintahan Koalisasi Era Orde Lama ..... 106
4.2.3 Pemerintahan Koalisi pada Masa Orde Baru Tidak Dikenal ..... 108
4.2.4 Pandangan Teoritis Tentang Pemerintahan Koalisi ..... 110
4.2.5 Pemerintahan Koalisi Era Orde Reformasi ..... 111
4.2.6 Fenomena Konflik Pemerintahan Koalisi Era Reformasi ..... 113
4.2.7 Membangun Pemerintahan Koalisi yang Efektif ..... 118
4.3 Demokrasi Langsung Membawa Manfaat atau Petaka ..... 124
4.3.1 Hakekat Demokrasi ..... 124
4.3.2 Sejarah Demokrasi di Indonesia ..... 126
4.3.3 Masa Peralihan Demokrasi Perwakilan Menjadi Demokrasi Langsung ..... 128
4.3.4 Fenomena Demokrasi Langsung ..... 131
4.3.5 Beberapa Ekses Demokrasi Langsung ..... 132

4.3.6 Analisis Terhadap Penerapan Demokrasi Langsung..... 135
4.3.7 Demokrasi Langsung Membawa Petaka..... 141
4.3.8 Analisis Perbandingan Demokrasi Perwakilan dengan Demokrasi Langsung..... 142
4.3.9 Muncul Pemikiran Kembali pada Demokrasi Perwakilan..... 144
4.4 Ambivalensi antara Sistem Presidensiil dengan Parlementer ... 148
4.4.1 Perjalanan Sejarah Sistem Pemerintahan di Indonesia.... 148
4.4.2 Fenomena Sistem Pemerintahan Multi Partai ..... 149
4.4.3 Landasan Konsep Trias Politika..... 151
4.4.4 Legislative Heavy atau Executive Heavy ..... 152
4.4.5 Orientasi Penguatan Parlemen ..... 154
4.4.6 Fungsi Legislatif Pasca Amandemen ..... 155
4.4.7 Sistem Pemilu dan Penguatan Legislatif ..... 157
4.4.8 Ambivalensi antara Sistem Presidensiil dengan Parlementer..... 159
4.5 Konflik Legislatifdan Eksekutif ..... 161
4.5.1 Hubungan Legislatif dan Eksekutif Menurut Trias Politika..... 162
4.5.2 Hubungan Legislatif dan Eksekutif Era Orde Lama ..... 163
4.5.3 Hubungan Legislatif dan Eksekutif Era Orde Baru..... 164
4.5.4 Hubungan Legislatif dan Eksekutif Era Reformasi ..... 165
4.5.5 Awal Konflik Legislatif dan Eksekutif..... 167
4.5.6 Konflik Legislatif dengan Eksekutif Pasca Amandemen UUD 1945 ..... 170
4.6 Quo Vadis Dewan Perwakilan Daerah (DPD)..... 175
4.6.1 Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)..... 175
4.6.2 Analogi DPD dengan Kongres di Amerika Serikat..... 176
4.6.3 Fungsi Dewan Perwakilan Daerah ..... 176
4.6.4 Kinerja Dewan Perwakilan Daerah..... 177
4.6.5 Upaya Peningkatan Peran Dewan Perwakilan Daerah.... 178
4.7 Politik Uang Menciderai Demokrasi ..... 182
4.7.1 Impian Tentang Demokrasi..... 182
4.7.2 Impor Demokrasi dari Amerika Serikat..... 183
4.7.3 Demokrasi yang Rumit dan Mahal ..... 184
4.7.4 Politik Uang dalam Praktik Demokrasi..... 187
4.7.5 Mempertanyakan Eksistensi Demokrasi ..... 190

4.8 Fenomena Rontoknya Kekuatan Partai Politik Islam ..... 196
4.8.1 Kekuatan Politik Islam ..... 197
4.8.2 Melemahnya Kekuatan Partai Politik Islam ..... 198
4.8.3 Refleksi Sejarah Partai Politik Islam ..... 200
4.8.4 Bermunculan Partai Politik Islam ..... 201
4.8.5 Pergeseran Ideologi Partai Politik Islam ..... 202
4.9 Partai Politik Melanggengkan Kekuasaan Transaksional ..... 208
4.9.1 Hakekat Partai Politik ..... 208
4.9.2 Lahir Partai Politik Baru di Era Reformasi ..... 209
4.9.3 Manajemen Partai Politik yang Buruk ..... 210
4.9.4 Kecenderungan Kekuasaan yang Transaksional ..... 211
4.9.5 Disorientasi Fungsi Partai Politik ..... 212
4.10 Matinya Politik Ideologi ..... 219
4.10.1 Eksistensi Sebuah Ideologi ..... 219
4.10.2 Haluan Ideologi Partai Politik ..... 221
4.10.3 Ideologi Pragmatisme Menjadi Trend ..... 222
4.10.4 Melemahnya Ideologi Partai Politik ..... 224
4.10.5 Apatisme Masyarakat terhadap Partai Politik ..... 225
4.10.6 Memperkuat Nilai Ideologis pada Partai Politik ..... 226
4.11 Politisasi Konflik Masyarakat ..... 230
4.11.1 Konflik Global ..... 230
4.11.2 Perang Dunia ke III Sudah Dimulai ..... 231
4.11.3 Konflik yang Tidak Berkesudahan ..... 235
4.11.4 Konflik Masyarakat Indonesia ..... 236
4.11.5 Politisasi Konflik Masyarakat ..... 238
4.12 Langkanya Pemimpin yang Negarawan ..... 242
4.12.1 Pemimpin Pemerintahan ..... 242
4.12.2 Fenomena Kegagalan Pemimpin ..... 243
4.12.3 Konsep dan Teori Kepemimpinan ..... 244
4.12.4 Proses Seleksi Pemimpin Pemerintahan ..... 246
4.12.5 Faktor yang Mempengaruhi Langkanya Pemimpin yang Negarawan ..... 248
4.13 Peranmiliter dalam Sistem Politik Era Reformasi ..... 252
4.13.1 Eksistensi Peran Militer ..... 252
4.13.2 Pendekatan Konsep dan Teori Militer ..... 252
4.13.3 Sejarah Militer di Indonesia ..... 256
4.13.4 Militer pada Era Reformasi ..... 259
4.13.5 Militer dan Demokrasi ..... 264

**Bab 5 Penutup ..... 271**

**Daftar Pustaka ..... 279**
**Riwayat Hidup Penulis ..... 283**

# Bab 1



## Pendahuluan

## 1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan politik era reformasi, menarik menjadi bahan kajian mengenai perubahan politik *(politicalchange)* dari sistem politik otoritarian ke sistem politik yang lebih demokratis. Pembangunan politik sebelum era reformasi yaitu era Orde Lama tahun 1945 s/d 1966 dan era orde baru tahun 1967 s/d 1998. Pada era orde lama melalui "Maklumat Wakil Presiden Nomor X bulan November 1945, memberikan kebebasan pendirian partai politik yang jumlahnya 23 partai politik. Untuk itu pada masa orde lama sesungguhnya telah mencoba melaksanakan konsep "demokrasi". Sebutan demokrasi pada masa era orde lama disebut "demokrasi parlementer atau liberal" pada tahun 1945 s/d 1959 dan "demokrasi terpimpin" tahun 1959 s/d 1966. Pada masa "demokrasi terpimpin sistem pemerintahan berdasarkan sistem presidensiil. Kekuasaan Presiden Soekarno sebagai kepala nagara maupun kepala pemerintahan yang berlangsung selama tujuh (7) tahun. Selama masa "orde lama" kehidupan politik sangat dinamis dan bahkan "politik" dinobatkan sebagai " panglima". Stabilitas politik relatif fluktuatif dan sering timbul goncangan politik atau "kegaduhan politik".Belum mantapnya stabilitas politik karena sering terjadi pergantian "Kabinet pemerintahan" atau kabinet pemerintahan yang sering jatuh bangun. Usia setiap kabinet relatif sangat pendek dari mulai tiga (3) bulan sampai dengan usia kabinet yang paling lama satu tahun lebih. Stabilitas politik yang kurang mantap menyebabkan pembangunan ekonomi terbengkelai. Meskipun stabilitas politik terganggu, beberapa catatan sejarah politik yang positif yaitu; *pertama;* bahwa pada era Orde Lama, kedewasaan berpolitik masyarakat relatif lebih matang, walaupun tingkat pendidikan masyarakat masih rendah. *Kedua;* banyak lahir pemimpin besar yang memiliki jiwa "kenegarawanan kuat" misalnya; Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Mohamad Nasir, Agus Salim, Ki Bagus Hadikusumo dan lain-lain. *Ketiga;* penyelenggaraan pemilu pertama pada tahun 1955 berjalan dengan "Luber", jurdil dan aman. Dalam sejarah politik era orde lama mengalami peristiwa politik yang kontroversional yaitu ketika keluarnya Dekrit Presiden tahun 1959. Isi dekrit tersebut yaitu; Pembubaran DPR (Dewan Konstituante) hasil pemilu tahun 1955, kembali ke UUD 1945 dan pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) berdasarkan representasi partai politik. Dengan kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945 tersebut maka kekuasaan Soekarno menjadi kuat di banding sebelumnya hanya sebagai kepala negara. Sejak tahun 1959 sampai dengan 1966 Presiden Soekarno memegang kendali penuh yaitu sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Sistem politik yang di terapkan di kenal dengan sebutan "Demokrasi Terpimpin".

Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno beberapa kebijakan politik yang sangat terkenal yaitu pertama; tahun 1960 mengeluarkan kebijakan di bidang politik luar negeri, Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang di anggapnya

kurang membawa kepentingan negara dunia ketiga. Kemudian Soekarno mendirikan Ganefo sebagai gagasan yang merupakan cikal-bakal berdirinya Gerakan Non Blok. Kedua; pada tahun 1963 Soekarno membubarkan organisasi asing di Indonesia seperti Freemasonry, Lions Club dan Rotary Club serta memulangkan warga Yahudi ke negara asalnya. Ketiga; tahun 1963 memulangkan juga warga Cina ex patriat ke negeri tirai bambu. Keempat; pada tahun 1964 mengeluarkan kebijaksanaan "nasionalisasi" perusahaan asing yang ada di Indonesia. Kemudian melakukan renegosiasi kontrak karya dengan PT. Freeport dengan skema pembagian hasil 50% pemerintah Indonesia dan 50% PT. Freeport. Kelima; Presiden Soekarno menolak bantuan asing dengan pernyataannya yang sangat terkenal "*Go To Hell Your With Aid*". Jika di kaji lebih mendalam semua kebijakan di atas dapat di tafsirkan pertama; kebijakan tersebut mengandung makna suatu perjuangan yang mencerminkan upaya mengembalikan kedaulatan negara di bidang ekonomi yang di kuasai asing. Kedua; membangun jiwa nasionalisme dan patriotisme bahwa negara Indonesia sebagai negara besar yang mampu menjadi pemimpin dunia di forum internasional secara lebih bermartabat, adil dan bermanfaat bagi negara berkembang dan negara terbelakang. Negara-negara yang mendukung gerakan non blok antara lain; India, Afrika, Yugoslavia, Mesir dan lain-lain. Ketiga; memperjuangkan kemandirian sebagai bangsa dan negara di bidang ekonomi, sebagai negara yang ingin "berdikari" yakni "berdiri di kaki sendiri". Kebijakan Presiden Soekarno di atas menimbulkan pro dan kontra terutama Amerika Serikat tidak suka dengan kebijakan tersebut karena kepentingan ekonominya terganggu. Boleh jadi kejatuhan Soekarno dari kekuasaan salah satunya di sebabkan oleh kebijakan tersebut.

Sebagaimana diuraikan di atas setelah tahun 1966 Soekarno di lengserkan melalui mandat yang diberikan kepada Mayor Jenderal Soeharto yaitu surat sakti yang di sebut "supersemar". Ketika Jenderal Soeharto di angkat menjadi pejabat Presiden tahun 1967, kebijakan pertama yang di tetapkan pada era orde baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Sejak saat itu selama pemerintahan "orde baru" program pembangunan yang dianggap vital dibiayai dengan dana "bantuan luar negeri" (BLN). Seluruh sumber-sumber kekayaan yang menguasai hajat hidup orang banyak secara perlahan mulai dikuasai oleh kekuatan pemodal asing. Dominasi kekuatan pemodal asing mulai menuai kritik dan protes dikalangan mahasiswa yang menimbulkan pristiwa sangat terkenal yaitu "Malapetaka Limabelas Januari disingkat "Malari" pada tahun 1974. Dengan demikian kebijakan pemerintahan "orde baru" yang melakukan perubahan total seluruh kebijakan Presiden Soekarno sebagaimana di sebutkan di atas, dikembalikan seperti keadaan semula baik mengenai kebijakan politik dan ekonomi. Sedangkan eksistensi gerakan non blok tetap diteruskan, namun perjuangannya sudah tidak bergaung mendunia

dan bersifat serimonial. Dalam perkembangannya peran Indonesia mulai berkurang sebagai kekuatan negara berkembang Asia-Afrika. Bahkan dewasa ini negara non blok tinggal kenangan dan di peringati sekedar sebagai nostalgia belaka. Posisi Indonesia masih belum memiliki peranan yang berarti dalam forum Internasional di kawasan Asia Pasifik. Walaupun di lihat dari "geostrategi politik" Indonesia memiliki potensi mampu mengatur perdagangan internasional, namun peran itu sudah di ambil oleh Singapura. Padahal Indonesia memiliki wilayah kawasan ekonomi sangat strategis yaitu pelabuhan bebas Sabang, tetapi sebagai pelabuhan bebas telah di tutup oleh pemerintah Indonesia, pada awal perjalanan Orde Baru, dengan alasan tertentu. Dengan demikian di tengah era ekonomi global, posisi Indonesia akan tetap menjadi wilayah pasar bagi negara-negara maju. Oleh sebab itu wajar jika sampai saat ini Indonesia masih belum terbebas oleh dominasi kekuatan asing.

Selanjutnya pada masa Orde Baru berlangsung tahun 1967 s/d 1998, merupakan era pembersihan dan koreksi total terhadap sistem orde lama. Tindakan tersebut di lakukan setelah terjadinya peristiwa "pemberontakan G 30 S PKI, yang menelan korban ratusan ribu rakyat Indonesia, baik yang nyata-nyata bersalah maupun yang kemungkinan tidak bersalah. Para korban tragedi tersebut bagi yang hidup masuk penjara banyak yang tidak melalui proses peradilan. Sejarah kelam melahirkan kontro versi dalam berbagai penulisan sejarah yang saling berbeda.

Pada masa Orba mencoba melakukan perubahan sistem politik yang memiliki kemampuan menjamin terwujudnya stabilitas politik dan keamanan yang mantap. Era Orba membangun sistem politik yang diberi nama "demokrasi Pancasila". Kebijakan politik yang digariskan lebih berorientasi kepada "stabilitas politik dan keamanan" guna mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ekonomi. Kebijakan tersebut antara lain; *pertama;* penyederhanaan jumlah partai yang disebut "fusi" menjadi tiga parpol yaitu terdiri dari "dua" partai politik (PPP dan PDI) dan satu Golongan Karya, *kedua;* memantapkan sistem pemerintahan presidensiil, *ketiga;* sistem pemerintahan sentralistik.

Beberapa catatan sejarah yang positif, yaitu *pertama;* pada masa Orde Baru stabilitas politik dan keamanan relatif stabil. *Kedua;* pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan cepat dan mampu meningkatkan perubahan yaitu dari negara yang miskin (*under developing country*) menjadi negara yang sedang berkembang *(developing country)*. *Ketiga;* selama pemerintahan Orde Baru mampu menyelenggarakan "pemilu" sampai enam (6) kali, dan lain-lain. Sedangkan catatan sejarah yang cenderung negatif yaitu; *pertama;* dengan sistem pemerintahan yang sentralistik pada kenyataannya pemerintah sering bertindak represif dan kepemimpinan pemerintahan yang otoriter. *Kedua;* oleh karena "posisi eksekutif" lebih kuat dibanding dengan lembaga "legislatif" dan "yudikatif" atau dengan kata lain "eksekutif" pada masa orde baru berfungsi

sebagai "penekan " *(pressure)* terhadap legislatif, bahkan "legislatif" hanya dicap sebagai "tukang stempel". *Ketiga;* pembangunan ekonomi maju dengan pesat dengan pertumbuhan ekonomi mencapai di atas 7%, akan tetapi pengawasan masyarakat rendah, muncul kasus "korupsi" yang tidak terkendali dalam tubuh aparatur negara, tanpa tindakan hukum yang signifikan, bahkan terkesan dilindungi. *Keempat;* terjadi disharmonisasi antara pemerintah dengan rakyatnya, karena tindakan pemerintah yang represif, membungkam kelompok-kelompok masyarakat garis keras dan kritis terhadap kebijakan pemerintah dan bahkan tindakan pemerintah sering dianggap melanggar HAM, dan lain-lain.

Penyelenggaraan pemerintahan Orde Baru yang kurang di imbangi dengan kontrol sosial yang kuat, sering terjadi "*abuse of power*". Puncak krisis politik yang dihadapi orde baru ketika melakukan kebijakan di bidang moneter yaitu Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) memicu krisis multi dimensi. Ketika tahun 1998 krisis politik terjadinya kerusuhan massal di kota kota di Indonesia, menyebabkan pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto berhenti sebagai presiden dan digantikan oleh Presiden Habibie. Ketika Habibie menjabat sebagai presiden RI ketiga dari tahun 1998 s/d 1999 telah meletakan landasan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pemilu yang dipercepat tahun 1999. Masa kepemimpinan Presiden Habibie yang relatif singkat mampu menurunkan nilai dolar dari enam belas (16) ribu rupiah menjadi enam (6) ribu rupiah. Stabilitas ekonomi dan politik sudah mulai membaik dan bahkan mampu menyelenggarakan pemilu tahun 1999 dengan relatif aman.

Perjalanan Era reformasi kini berusia lima belas 15 tahun, telah melakukan konsolidasi kekuasaan, pembelajaran demokrasi, menuju pada titik *equilibrium* kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang mapan *(establish*) dan stabil. Pembangunan politik yang sedang berjalan meliputi aspek penerapan sistem demokrasi, pemilu, kepartaian, pemantapan ideologi dan penataan kelembagaan politik. Berdasarkan penjelasan di atas, beberapa fenomena yang menarik menjadi bahan kajian diuraikan sebagai berikut;

### 1.1.1 Fenomena Pembangunan Sistem Politik

Mempelajari sejarah politik Indonesia di atas menunjukkan bahwa pendidikan dan pembelajaran demokrasi serta menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat membutuhkan kesiapan dan memerlukan pengorbanan yang mahal. Sebagai contoh proses demokratisasi di negara-negara Timur Tengah awal tahun 2011 di Tunisia, Mesir dan merembet ke wilayah Timur Tengah lainnya seperti Yaman, Libya, Suriah harus melalui revolusi berdarah-darah. Bangsa Indonesia mengalami hal yang

sama seperti di negara-negara Timur Tengah tersebut. Ketika menjelang era reformasi tahun 1998, melalui gerakan *"people power"* mampu menumbangkan rezim otoritarian yang berkuasa selama 32 tahun. Keberhasilan membangun politik era reformasi menuju proses demokrasi yang lebih luas, patut diberikan apresiasi yang tinggi sebagai tonggak awal melakukan perubahan di segala bidang. Sebab dukungan politik yang demokratis dan stabil merupakan prasyarat bagi tumbuhnya pembangunan ekonomi yang lebih maju, mandiri dan berdaulat menuju kesejahteraan masyarakat. Ketika ekonomi tumbuh dengan baik niscaya akan berdampak positif terhadap sektor-sektor yang lain. Sering dikatakan hubungan antara "politik" dan "ekonomi" seperti dua sisi mata uang, keduanya harus berjalan seiring dan seimbang. Artinya setiap langkah dalam menetapkan kebijakan "ekonomi" harus mempertimbangkan dampaknya terhadap "kehidupan politik". Misalnya kebijakan ekonomi bisa menimbulkan "konflik sosial" sampai terjadinya disintegrasi bangsa. Contoh bubarnya negara Uni Soviet dan Yugoslavia diawali dan dipicu oleh krisis ekonomi. Demikian pula di Indonesia dengan diawali oleh krisis ekonomi, rezim pemerintahan Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun runtuh oleh tekanan "*people power*". Demikian juga sebaliknya dalam setiap menetapkan kebijakan "politik" harus mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kehidupan "ekonomi". Contoh pada era Orde lama, penerapan "sistem politik modeldemokrasi liberal dan demokrasi terpimpin," cenderung menimbulkan "instabilitas politik". Implikasinya yaitu mandegnya pembangunan ekonomi bahkan menimbulkan inflasi sampai 600%.

Seperti diuraikan di atas pembangunan politik era reformasi diawali dengan empat kali amandemen terhadap UUD 1945. Perubahan sistem politik membawa konsekuensi logis terhadap sistem dan struktur politik yaitu antara lain: *pertama;* sistem kepartaian menjadi multi partai. *Kedua;* sistem pemilu menjadi campuran antara proporsional dan distrik untuk pemilu legislatif. *Ketiga;* dalam pemilu presiden dipilih secara langsung oleh rakyat (demokrasi langsung/*direct democracy*). *Keempat;* sistem pemerintahan sentralistik menjadi desentralisasi. Perubahan terhadap struktur politik yaitu antara lain: *pertama;* dibentuknya kelembagaan politik baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Daerah (DPD); *Kedua;* tidak ada lagi sebutan "lembaga tertinggi negara" tetapi seluruh lembaga politik disebut "lembaga tinggi negara". Dewan Pertimbangan Agung (DPA) juga dihapuskan, diganti dengan Dewan pertimbangan Presiden (Wantimpres). *Ketiga;* Perubahan fungsi lembaga MPR semula memilih dan mengangkat serta memberhentikan presiden dan wakil presiden, saat ini melaksanakan fungsi melantik dan memberhentikan presiden dan wakil presiden. Keempat; fungsi merubah undang-undang dasar sudah dilimpahkan kepada MK. Kelima: menetapkan GBHN setiap lima tahun saat ini sudah dihapuskan.

Seiring perubahan sistem politik tersebut juga diikuti oleh tuntutan ekspektasi masyarakat yang tinggi. Kemampuan sistem politik yang demokratis, diharapkan memberikan akselerasi terhadap tuntutan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pergantian pemerintahan hasil pemilu tahun 1999, 2004 dan 2009, seharusnya bangsa dan rakyat Indonesia sudah terbebas dari kesulitan ekonomi. Namun beberapa fenomena yang muncul justru berseberangan dengan harapan publik di atas. Beberapa catatan fenomena tersebut yaitu *pertama;* terjadi konflik antara legislatif dan eksekutif yang dipicu oleh skandal Bank Century dan mega korupsi perpajakan dengan pelakunya "Gayus Tambunan". *Kedua;* legislatif menggunakan "Hak Angket " dalam kasus "bank century" sebagai "*show of power*" sesuai kepentingan partai politik yang di inginkan. *Ketiga;* dalam realitas politik mengangkat "kasus mafia pajak" dengan "hak angket" telah gagal, menunjukkan "konflik" legislatif dengan eksekutif terus berlangsung. *Keempat;* hubungan yang belum serasi antara DPR dengan DPD masih berlangsung. Keinginan DPD memasuki wilayah yang lebih luas masih terus diperjuangkan, meskipun terbentur oleh aturan perundangan yang ada. *Kelima;* terjadi konflik "horizontal" dalam "pemilu kepala daerah" masih bersifat masif. *Keenam;* fenomena konflik yang berlatar belakang "SARA", sengketa tanah atau lahan garapan, konflik antar kampung atau suku, seakan melengkapi dan mewarnai peristiwa politik yang cukup kritis selama perjalanan pelaksanaan pembangunan politik era reformasi. Ketujuh; di bidang ekonomi politik, kebijakan ketahanan pangan kurang merespon terhadap kenaikan harga kebutuhan barang pokok yang terus melambung tinggi tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan masyarakat yang signifikan, sehingga rakyat semakin berat menghadapi tekanan ekonomi. Seperti kebijakan impor daging, kedelai, bawang merah dan putih dan barang komoditi kebutahan pokok lainnya.

Beberapa catatan mengenai fenomena di atas mencerminkan bahwa reformasi di bidang politik pada kenyataannya belum memberikan iklim yang sehat terhadap perkembangan ekonomi domestik maupun pengaruh ekonomi global. Dengan kata lain proses demokrasi politik belum di ikuti oleh proses demokrasi di bidang ekonomi dan juga aspek sosial.

### 1.1.2 Fenomena Eksistensi Partai Politik

Berbagai peristiwa konflik politik di atas baik bersifat vertikal maupun horizontal, peran "partai politik" seharusnya sebagai penengah dalam konflik tersebut, karena salah satu fungsinya yaitu sebagai "pengendali konflik". Demikian pula "partai politik" harus mampu menjalankan peran yang efektif sebagai penyangga pilar demokrasi. Beberapa fenomena yang terkait dengan eksistensi peran partai politik

yaitu pertama; jumlah partai politik yang jumlahnya sembilan (9) parpol yang lolos *electoral threshold* pada pemilu tahun 2009. Sedangkan pada pemilihan umum tahun 2014 diikuti oleh diikuti oleh dua belas (12) dan dua (2) partai politik lokal di Nanggro Aceh Darussalam. Hasil pemilihan umum sudah dipastikan tidak ada partai politik yang memperoleh suara dua puluh (20) persen sebagai persyaratan *electoral threshold* partai politik dalam pemilihan presiden sehingga mengharuskan pembentukan pemerintahan berdasarkan koalisi. Fenomena yang terkait dengan eksistensi partai politik dapat diidentifikasi yaitu pertama; kabinet pemerintah yang dibentuk oleh partai politik pemenang pemilihan umum legislatif yaitu pemerintahan koalisi, namun pada kenyataanya kurang mendukung terhadap soliditas kabinet pemerintahan yang dibentuk. Kedua; partai politik gagal menyiapkan kadernya sebagai anggota legislatif maupun kepala daerah, dimana secara empiristik para kader partai tersebut banyak tersandung kasus korupsi yang melibatkan tiga ratus (318) lebih kepala daerah. Ketiga; manajemen partai politik cenderung menciptakan terjadinya transaksional kekuasaan. Contoh untuk menduduki jabatan publik seperti menjadi kepala daerah yang diusung oleh partai politik, mensyaratkan setiap kandidat mengeluarkan uang yang jumlahnya milyaran rupiah. Demikian pula seseorang yang akan menjadi pengurus partai politik pada jabatan strategis seperti ketua umum, sekretaris jenderal dan bendahara partai dan kepengurusan inti lainnya seperti Bapilu, harus menyediakan dana besar yang mungkin *unlimited*, tergantung kebutuhan dan kondisi partai politiknya. Keempat; partai politik belum optimal dalam membangun partisipasi politik masyarakat, yang terjadi parpol melakukan mobilisasi ketika dibutuhkan dalam pemilu. Kegiatan mobilisasi mengakibatkan proses demokrasi berbiaya mahal dan muncul politik uang. Kelima; partai politik kurang melakukan pembinaan ideologis, menyebabkan para kadernya cenderung berperilaku pragmatis. Keenam; partai politik cenderung dikuasai oleh pemodal kuat yang lebih berorientasi melanggengkan kerajaan bisnisnya. Ketujuh: elit partai politik membangun kekuasaan dinasti. Contoh fenomena di wilayah Provinsi Banten, kekuasaan politik didominasi oleh keluarga mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosyiah, yang saat ini tersandung kasus korupsi. Kedelapan; kecenderungan partai politik membiarkan dan bahkan lebih memperkuat praktek demokrasi langsung. Padahal selama dua kali pemilu tahun 2004 dan 2009, mempraktekan "demokrasi langsung, secara empiristik menyebabkan praktek demokrasi menjadi rumit dan mahal. Demikian pula dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2014 telah berjalan dengan aman, lancar dan tertib, tetapi masih terjadi praktek "politik uang" dan manipulasi suara secara massif.

Penjelasan fenomena eksistensi partai politik di atas pada intinya menunjukkan desain pembangunan politik yang telah dipraktekan, dalam kurun waktu satu setengah dasawarsa (15) tahun masih menimbulkan kehidupan politik yang belum

sehat. Jika tidak dilakukan evaluasi secara komprehensif, kritis dan objektif serta tidak berorientasi untuk kepentingan negara dan bangsa, maka pembangunan politik tersebut tanpa disadari memiliki potensi menghancurkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

### 1.1.3 Fenomena Demokrasi di Indonesia

Perkembangan kehidupan demokrasi di Indonesia banyak kalangan yang menilai "demokrasi" yang dipraktekkan masih bersifat formalitas atau prosedural *(Jeff Heyness, 2003)*. Contoh selama era reformasi telah melaksanakan pemilu legislatif empat kali dan tiga kali pemilihan presiden. Sedangkan pemilukada telah diselenggarakan terhadap hampir seluruh kepala daerah baik gubernur yang jumlahnya 34 maupun bupati/ walikota yang jumlahnya 504 yang dipilih melalui demokrasi langsung. Akan tetapi praktek demokrasi tersebut masih belum menghasilkan perbaikan kesejahteraan rakyat yang signifikan. Artinya kondisi rakyat masih merasakan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar dengan harga yang semakin tidak terjangkau, karena kemampuan daya beli rendah. Demokrasi langsung yang menjadi primadona pembangunan politik era reformasi, belum didukung oleh partisipasi politik masyarakat dan budaya yang egaliter serta perilaku politik yang berbasis etika dan moral. Contoh dalam pemilukada tingkat kehadiran pemilih mencapai angka golput sebesar 40% lebih. Kemudian di berbagai daerah pelaksanaan pemilukda menimbulkan konflik di antara kubu calon yang menang dengan calon yang kalah.

Kondisi yang disebutkan di atas secara empiristik menimbulkan beberapa fenomena yaitu; pertama; praktek demokrasi langsung belum menghasilkan kepala daerah yang profesional dan kompeten di bidang manajemen pemerintahan. Contoh prestasi daerah yang menonjol hanya sedikit tidak sampai 10%. Misalnya kota Solo, Jembrana Bali, Kota Yogyakarta, kota Surabaya, dan lain-lain. Kedua; praktek demokrasi langsung belum di dukung oleh kesiapan masyarakat Indonesia dalam hal budaya politik yang egaliter, nilai sportivitas, kemandirian dalam memilih, rasionalitas yang lebih di utamakan ketimbang emosi danperasaan. Ketiga; kebijakan partai politik yang belum mampu menngendalikan politik uang dan biaya politik yang besar ketika mengikuti arena kontestasi pada pemilu legislatif maupun pemilukada, membiarkan para kadernya berperilaku pragmatis. Keempat; dalam praktek demokrasi langsung peran partai politik belum mampu mengendalikan para pendukungnya ketika kandidatnya kalah dalam konstestasi pemilukada, mengakibatkan terjadi konflik horizontal tidak terhindarkan di berbagai di daerah.

Beberapa catatan fenomena di atas dapat menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan demokrasi langsung. Implikasi demokrasi langsung yang sudah menjadi

ke khawatiran masyarakat terutama yaitu konflik horizontal, tindakan anarkhis para pendukung calon kepala daerah seperti yang dipertontonkan di gedung MK. Meluasnya budaya politik uang, transaksional kekuasaan, biaya politik yang mahal dan praktek demokrasi langsung yang rumit. Walaupun kecenderungan partai politik berkeras ingin mempertahankan pemilukada dengan demokrasi langsung, catatan di atas tetap menjadi masukan sebagai bahan pertimbangan kebijakan di bidang politik. Manakala angka golput telah mencapai 50% pada pemilukada, maka akan tercatat dalam sejarah bahwa para elit partai politik harus bertanggung jawab. Artinya membiarkan eksperimen demokrasi langsung yang telah menimbulkan ekses negatif lebih banyak serta sudah membawa petaka bagi kehidupan masyarakat. Namun para elit partai politik tidak bergeming untuk melanjutkan eksperimen demokrasi langsung terutama pada pemilukada, maka kehancuran terhadap sendi-sendi berbangsa dan bernegara semakin tidak terkendali.

### 1.1.4 Fenomena Perubahan Orientasi Ideologi Sekuler, Pluralisme dan Pragmatisme

Selanjutnya fenomena politik dalam perspektif ideologis, jika dicermati terjadi perubahan atau pergeseran haluan ideologi. Partai politik yang telah mengalami pergeseran ideologi nasionalisme mulai bergeser kearah ideologi "pragmatisme", kemudian ideologi "Islam" bergeser kearahideologi "nasionalis religius" atau "nasionalisme sekuler". Penyesuaian terhadap kemampuan simbolik *(symbolic of capability political system*) merupakan suatu hal yang wajar. Lingkungan strategis yang berubah, akan diikuti oleh perubahan simpati dan empati masyarakatnya. Untuk itu penyesuaian terhadap perubahan nilai masyarakat, akan diikuti pergeseran ideologi sebagaimana disebutkan di atas. Contoh salah satu partai politik yang basis ideologi "Islam" bergeser ke arah "nasionalisme atau menuju pada faham pluralisme" menjadi "partai politik yang inklusif ". Bagi kalangan loyalis "Islam ideologis", merasa kaget dan mungkin kecewa atas keputusan partai politik tersebut. Perubahan corak ideologi seperti di sebutkan di atas, mencerminkan kecenderungan masyarakat Indonesia yang religius dan mayoritas penduduk muslim mengalami perubahan kearah sekularisme dan pluralism. Sebenarnya dari hasil pemilu selama dua periode yaitu tahun 2004 dan 2009, partai politik tersebut (PKS) mendapat perolehan suara yang terus meningkat. Jika dibandingkan dengan partai politik yang berbasis massa Islam seperti PAN dan PKB yang sudah mendeklarasikan sebaga partai terbuka dan inklusif, dalam dua pemilu tahun 2004 dan 2009, mengalami penurunan suara yang cukup signifikan. Walaupun di luar dugaan seluruh perkiraan pengamat dan hasil survei meleset pada pemilihan umum legislatif tahun 2014. Partai politik Islam

dan berbasis massa Islam perolehan suara ternyata meningkat menjadi 30%. Hasil perhitungan suara berdasarkan perhitungan "*quick count*", partai politik Islam yaitu PKB 9,13%, PAN 7,51%, PKS 6,98%, PPP 6,68% dan PBB 1,5%. Sesungguhnya partai politik yang mengusung ideologi Islam yang lebih progresif seperti PKS dan PBB mengalami penurunan dan bahkan PBB tidak mampu memperoleh persyaratan minimal "*electoral treshhold* " 3,5%. Dilain pihak meskipun koalisi partai partai politik Islam sebesar 30% mampu mengusung "capres dan cawapres sendiri, akan tetapi akan mengalami kesulitan untuk bersatu. Umat Islam sedang galau dalam momentum genting dan kritis dimana kondisi bangsa dan negara Indonesia sedang menghadapi krisis keteladanan dan moralitas masyarakat yang rapuh, umat Islam menghadapi krisis tokoh pemersatu umat. Kekuatan politik umat Islam yang direpresentasikan oleh partai partai politik Islammemiliki kekuatan politik yang cukup signifikan, mengalami kesulitan memanfaatkan kekuatan politik yang dimiliki untuk mengendalikan kekuasaan pemerintahan. Para tokoh politik umat Islam justru terjebak oleh dikhotomi ideologi nasionalisme dengan bukan nasiolalisme. Persepsi masyarakat di bawa ke arah pemikiran bahwa ideoligi Islam itu tidak nasionalis. Penyempitan pemikiran ideologi tersebut mempengaruhi soliditas kekuatan politik Islam. Pada akhirnya partai partai politik Islam atau berbasis massa Islam akan tercerai-berai berkoalisi dengan partai nasionalis sekuler dan pragmatis. Pada gilirannya pemerintahan yang akan datang warna ideologinya akan tetap sama dengan pemerintahan yang lalu. Aspirasi kepentingan umat Islam yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan adil dengan landasan moral dan etika yang kuat serta harmonisasi kehidupan dunia dan akhirat, sudah dipastikan akan termarjinalkan. Warna kehidupan kedepan akan sama seperti saat ini yaitu; materialistik, konsumeristik, individualistik, hedonistik dan pragmatis.

Penjelasan di atas dapat menjadi bahan catatan fenomena pergeseran haluan ideologi Islam ke arah nasionalisme religius atau nasionalisme sekuler. Pergeseran ideologi tersebut dihadapi oleh partai politik yang berdasarkan Islam ideoligis khususnya PKS. Sedangkan PPP masih konsisten dengan ideologi Islam dan juga PBB yang baru menjadi peserta pada pemilu 2014. Adapun partai politik yang berbasis massa Islam (PKB dan PAN), sebagai partai inklusif pada pemilu yang lalu mengalami penurunan perolehan suara, tanpa diduga dalam pemilihan umum tahun 2014 mengalami peningkatan perolehan suara yang cukup signifikan. Berbagai kalangan pengamat memberikan analisis bahwa menghadapi tahun pemilu 2014 partai politik berideologi Islam dan yang berbasis massa Islam, terancam mengalami penurunan perolehan suara karena berbagai persoalan internal dan eksternal. Akan tetapi para pengamat dan pemilik survei harus mengakui dugaannya meleset.

Beberapa catatan fenomena pergeseran ideologis yang dialami oleh partai politik maupun masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya pemilih yang berbasis Islam, dapat diuraikan sebagai berikut; pertama; pengaruh nilai-nilai hedonism, materialism, individualism, di lingkungan masyarakat Indonesia, telah merubah perilaku masyarakat kearah yang lebih pragmatis dan sekuler. Kedua; semakin langkanya tokoh atau pemimpin Islam yang kuat, sebagai teladan dan *solidarity maker* di lingkungan umat Islam, seperti M. Nasir, Gus Dur dan Amien Rais. Ketiga; manajemen partai politik yang belum optimal, terutama dalam menyiapkan kaderisasi secara teratur, tertib dan sistematis. Contoh banyak kader partai yang menjadi kutu loncat, berpindah dari partai satu ke partai lain, mencerminkan manajemen sumberdaya manusia yang lemah. Keempat; faktor eksternal yang terkait dengan kebijakkan pemerintah tentang terorisme. Perburuan terhadap teroris selalu di kaitkan dengan Islam atau pesantren tertentu, sehingga membentuk opini publik bahwa Islam identik dengan terorisme. Bahkan banyak masyarakat yang masih di hinggapi oleh Islamophobia sehingga umat Islam banyak yang terhasut oleh persepsi bahwa "ideologi Islam" identik dengan ideologi kekerasan. Wajar jika kondisi umat Islam di Indonesia mudah terpengaruh oleh ideologi sekulerisme, pluralisme dan toleranisme. Oleh sebab itu partai politik Islam seperti PPP, walaupun perolehan suara pada pemilu legislatif tahun 2014 naik hanya 1% dan PKS turun relatif sedikit kurang dari 1% dan PBB tidak lolos *electoral threshold*, melihat fenomena di atas maka soliditas partai politik akan sulit terbangun. Jika para pemimpinnya tidak merubah strategi penguatan penggalangan massa.

Penjelasan di atas mencerminkan bahwa jumlah penduduk Indonesia mayoritas muslim, namun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai partai Islam, semakin menurun pada trend tiga kali pemilihan umum tahun 1999, 2004 dan 2009. Walaupun pada pemilhan umum tahun 2014 beberapa partai politik seperti PKB, PPP, PAN mengalami peningkatan perolehan suara seperti telah disebutkan di atas, momentum yang baik belum tentu bisa dimanfaatkan dalam membangun soliditas partai politik Islam. Pada gilirannya pemilihan umum tahun 2014 partai-partai politik Islam meskipun memiliki prospek yang cukup menggembirakan, tidak mampu menjalankan peran sebagai artikulasi dan agregasi kepentingan umat Islam yang populasinya sangat besar. Dengan demikian ternyata jumlah umat Islam yang besar tersebut tidak berbanding lurus dukungan umat Islam terhadap partai politik Islam. Mengapa demikian, jawaban mengenai kekuatan partai politik Islam akan dibahas pada bab tersendiri.

### 1.1.5 Fenomena Eksistensi Peran Militer

Perkembangan politik lainnya di era reformasi yang masih menarik menjadi bahan kajian yaitu posisi peran "militer". Di tengah sistem politik demokrasi, posisi militer menjalankan perannya sebagai penjaga pertahanan negara, atau dengan kata lain militer menjalankan fungsi "politik negara". Artinya "militer" aktif dilarang memasuki dunia politik praktis, misalnya menjadi anggota atau pengurus partai politik, menduduki jabatan publik dan jabatan di pemerintahan sipil dan BUMN/D, kecuali pada jabatan sipil misalnya di BASARNAS. Jika ingin aktif dalam politik praktis tersebut, maka setiap anggota militer (TNI) harus pensiun dari dinas kemiliteran.

Selama era reformasi tahun 1998 sampai dengan saat ini, militer telah melaksanakan kebijakan *reposisioning*, menuju militer profesional. Meskipun depolitisasi terhadap peran militer dari panggung politik telah berjalan satu dasawarsa lebih, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa posisi militer masih diperhitungkan dan mempengaruhi dalam konstelasi politik di Indonesia. Sebagai contoh seiring perjalanan waktu Bangsa Indonesia dewasa ini masih menghadapi perkembangan politik yang belum sehat. Seperti dalam kegiatan politik praktis misalnya pemilukada sering terjadi konflik horizontal di berbagai daerah. Kecenderungan masyarakat bertindak anarkis misalnya peristiwa pengrusakan fasilitas umum di gedung MK. Demikian pula hasil pemilukada, kepala daerah yang terpilih belum memuaskan masyarakat, disamping kurang memiliki kredibilitas juga tiga ratus lebih kepala daerah terlibat tindak pidana korupsi. Situasi dan kondisi politik seperti tersebut di atas, secara empiristik masyarakat dan bangsa Indonesia merindukan kembali pemimpin yang tegas, berani, disegani dan berwibawa. Profil dan karakteristik pemimpin tersebut sebagian besar muncul dari kalangan militer. Contoh Jenderal Sudirman, AH Nasution, Ahmad Yani, Suharto, Sarwo Edi Wibowo, Susilo Sudarman, Tri Sutrisno, Susilo Bambang Yudoyono yang saat ini masih menjabat sebagai presiden RI keenam, dan lain-lain masih banyak yang tidak dapat disebutkan. Kerinduan masyarakat terhadap sosok pemimpin yang berkarakter tersebut seperti dari kalangan militer, seiring dengan hasil survei LIPI yang dilansir oleh Ikrar Nusa Bakti yang dikutip oleh media Rakyat Merdeka tanggal 15 Juli 2013. Dari hasil survei tersebut yaitu 27% masyarakat lebih memilih kalangan militer untuk menjadi pemimpin, sedangkan pemimpin dari kalangan sipil mendapat dukungan masyarakat sebesar 24%.

Oleh sebab itu beberapa fenomena yang muncul dapat di indentifikasi yaitu pertama; ketika sistem demokrasi yang berjalan sebagai rezim "*civil society*", maka saat ini yang sedang trend para pensiunan perwira menengah dan tinggi baik dari kalangan TNI dan Polri ramai-ramai masuk dalam jajaran kepengurusan "partai politik" atau "ormas besar". Kedua; para pensiunan (purnawirawan) TNI/Polri merasa terpanggil kembali agar dapat menduduki jabatan publik seperti; anggota legislatif, Presiden,

Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota, melalui proses mekanisme demokrasi. Ketiga; mengingat sistem demokrasi di Indonesia terbilang rumit dan mahal, maka hanya para purnawirawan perwira tinggi dan menengah yang mempunyai cukup modal berani terjun ke dunia politik praktis. Boleh jadi bagi purnawirawan tersebut yang lebih berkualitas namun tidak cukup modal finansial, tidak mau memasuki dunia politik.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa di kalangan militer sedang menghadapi kegalauan melihat situasi perkembangan kehidupan politik semakin tidak sehat dan kepemimpinan sipil cenderung tidak terseleksi dengan baik. Untuk itu pembahasan peran militer pada era reformasi akan di lakukan kajian pada bab tersendiri dalam buku ini.

Beberapa aspek uraian penjelasan fenomena politik di Indonesia di atas maka fokus bahasan dalam pembangunan politik di era reformasi yaitu; demokrasi, pemantapan ideologi negara, hubungan kelembagaan politik, sistem pemilu dan sistem kepartaian. Selanjutnya fenomena politik tersebut menjadi landasan pengembangan unit analisis untuk mendukung terhadap topik buku ini yaitu tentang "Potret Buram Politik Indonesia". Adapun substansi yang menjadi unit analisis yaitu sebagai berikut; pertama; Ideologi Pancasila antara hidup dan mati. Kedua; Dilema Pemerintahan Koalisi. Ketiga; Demokrasi Langsung Membawa Manfaat Atau Petaka.Keempat; Ambivalensi Sistem Presidensiil dan Dengan Parlementer. Kelima; Konflik Legislatif Dan Eksekutif. Keenam; *Quo Vadis* Dewan Perwakilan Daerah. Ketujuh; Politik Uang Menciderai Demokrasi. Kedelapan; Fenomena Rontoknya Kekeuatan Partai Politik Islam. Kesembilan; Partai Politik Melanggengkan Kekuasaan Transaksional. Kesepuluh; Matinya Politik Ideologi. Kesebelas; Politisasi Konflik Masyarakat. Keduabelas; Langkanya Politisi Yang Negarawan. Ketigabelas; Peran Militer Dalam Sistem Politik Di Era Reformasi.

## 1.2 PENGERTIAN POLITIK, SISTEM POLITIK, IDEOLOGI, DEMOKRASI

### 1.2.1 Pengertian Politik

Penjelasan tentang pengertian "politik" akan di uraikan baik dari aspek ke ilmuwan maupun dalam arti seni. Pada hakekatnya pengertian politik dalam arti "seni" sudah sehari hari dilakukan oleh manusia dalam kehidupan masyarakat. Seperti ketika masyarakat berbondong-bondong mendatangi kampanye di lapangan atau ketika memilih pemimpin dalam pemilu. Kedua kegiatan politik praktis tersebut masyarakat sering melihat bahwa seseorang berjuang agar terpilih menjadi pemimpin dilakukan

dengan segala cara, misalnya memberikan uang kepada para pemilih atau membujuk dengan berbagai cara. Peristiwa politik tersebut membawa implikasi terhadap pemahaman masyarakat tentang ”politik” yang sering memberikan penafsiran keliru atau salah kaprah. Melalui berbagai forum baik yang resmi maupun hanya kongkow -kongkow di warung kopi, suka terdengar pembicaraan tentang ”politik” yang sedang hangat, namun sering diakhiri vonis yang mematikan bahwa ”politik itu kotor dan kejam”. Penafsiran yang relatif sederhana ini karena hanya memandang ”saat peristiwa politik sedang berlangsung”. Artinya pandangan yang lebih berorientasi pada politik dalam artian praktek atau ”politik praktis”. Memang dalam politik praktis para pelaku politik menggunakan strategi atau cara untuk mencapai tujuan politik tersebut. Boleh jadi cara yang di gunakan mengindahkan etika dan moral politik sehingga terjadi ”*abuse of power*”. Contoh dalam pemilu para elit politik yang memegang kekuasaan melakukan intimidasi atau dengan cara paksaan bahkan memanipulasi perolehan suara demi untuk memenangkan partainya. Jadi politik dalam arti seni kelahirannya sejak adanya manusia melakukan kegiatan dengan manusia lainnya secara bersama sama atau dengan kata lain mulai hidup bermasyarakat. Dengan demikian sejak zaman kerajaan seperti pada masa kerajaan Majapait, Mataram dan Sriwijaya di Indonesia, telah menerapkan politik dalam arti seni. Para raja mengatur dan menyelenggarakan kekuasaannya guna menjaga dan melindungi rakyatnya dari serangan musuh atau serbuan dari kerajaan lainnya. Dengan demikian politik merupakan penggunaan dan pemanfaatan kekuasaan dengan tujuan mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan rakyat.

Penjelasan mengenai pengertian “politik” menurut Istianto (2011) mengatakan bahwa adapun pengertian politik dalam pendekatan keilmuwan atau *scientific* yakni lebih berorientasi pada pandangan yang mampu menjelaskan dengan rational dan logis berdasarkan objek yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan terhadap orang banyak. Oleh sebab itu pembahasan politik mulai berkembang tidak hanya fokus kepada ”kekuasaan” akan tetapi politik juga berkenaan dengan ”negara, pengambilan keputusan, kebijakan dan alokasi nilai-nilai. Selanjutnya penjelasan politik dalam arti keilmuwan, diuraikan berdasarkan pandangan ilmuwan politik yaitu Miriam Budiardjo (1977) menjelaskan mengenai ilmu politik dengan para nara sumber dari ilmuwan barat. Seperti masing-masing memandang politik sesuai dengan pemikirannya yaitu; *J. Barents dan Roger F. Saltou*lebih memandang dari aspek negara. Selanjutnya menurut *Harold D. Laswell* dan *A Kaplan* serta *W.A. Robson* memandang politik dari sudut pandang ”kekuasaan”. Adapun *Joyce Mitchell* dan *Karl W. Deutch* memandang dari aspek ”pengambilan keputusan”. Sedangkan *Hoogerwerf* dan *David Easton* juga memandang dari sudut pembagian atau distribusi nilai-nilai kepada masyarakat.

Uraian penjelasan mengenai ilmu politik pada kesempatan ini lebih fokus pada pengertian politik yang berkenaan dengan ”kekuasaan” dan ”pengambilan keputusan”, karena kedua aspek tersebut secara fungsional lebih digunakan sehari-hari dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Menurut*W.A. Robson***, dalam Budiardjo,1977,** dalam bukunya *”The University Teaching of Social Sciences”* mengatakan: *political sciences is a concerned with the study of power in society, its nature basic processes scope and results. The focus of interest of the political scientist centers on the struggle to gain or retain power, to exercise power in influence over others or to resist that exercise”*. Jika di terjemahkan secara bebas yaitu ilmu politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat yaitu sifat hakiki, proses ruang lingkup dan hasil-hasil. *Focus of interest* para sarjana ilmu politik, tertuju pada perjuangan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan atau pengaruh atas orang lain atau menentang pelaksanaan kekuasaan itu.

Pengertian politik yang diutarakan oleh Robson tersebut lebih memperlihatkan realitas di masyarakat bahwa untuk mengendalikan masyarakat harus memiliki pengaruh yang cukup. Pengaruh itu akan dimiliki seorang pemimpin jika seorang itu mempunyai kekuatan atau kekuasaan. Hakekat kekuasaan yang diperolehnya itu harus diperjuangkan, karena kekuasaan dan pengaruh memiliki hubungan yang *reciprocal* dan keduanya tidak bisa dipisahkan. Dalam prakteknya Jika mendapatkan kekuasaan dengan perjuangan, boleh jadi untuk memperolehnya melalui berbagai cara, baik dengan cara yang etis maupun dengan yang tidak etik. Implikasinya dalam kehidupan masyarakat bahwa kekuasaan menjadi suatu tujuan, jika sebagai tujuan tidak mustahil dalam kehidupan politik menjadi tidak sehat. Misalnya peristiwa politik yang penuh dengan kekerasan, intimidasi, insinuisi dan anarki.

Berbeda jika persepsi masyarakat memandang kekuasaan itu sebagai alat yakni untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat supaya masyarakat menjadi tertib, teratur dan damai. Dengan demikian politik pada hakekatnya adalah usaha-usaha dari seseorang atau sekelompok orang untuk mengatur, menata kehidupan masyarakat yang terintegrasi untuk mencapai kedamaian, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh empiristik di masyarakat ketika seorang elit politik mendirikan partai politik. Kemudian partai politik tersebut memenuhi syarat sebagai peserta atau konstestan pemilu dan mengikuti dalam pesta demokrasi. Hasil pemilu ketua partai politik tersebut mampu meraih kemenangan dalam pemilu. Selanjutnya partai politik tersebut mencalonkan ketuanya sebagai presiden atau perdana menteri. Kemudian partai politik tersebut sebagai pemenang dalam pemilu presiden atau perdana menteri yang dipilih oleh parlemen, selanjutnya menyelenggarakan pemerintahan. Contoh tersebut sebagaimana di lakukan oleh Soesilo Bambang Yudoyono yang sudah menjadi presiden selama dua periode. Proses pentahapan kegiatan politik tersebut di jadikan

sebagai landasan pemikiran yang logis, rasional dan sistematis dalam mendifinisikan mengenai ilmu politik oleh "W.A. Robson".

Kemudian pengertian politik dari sudut pandang proses "pengambilan keputusan" menurut *Joyce Mitchell, dalam Budiardjo,1977,* melihat bahwa politik dalam arti proses mencerminkan pergulatan pemikiran antar berbagai kekuatan politik dalam setiap pengambilaan keputusan genting untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Pengembaraan pemikiran Mitchell sebagaimana tertuang dalam buku *"Political Analysis and Public Policy"* mengatakan dengan ringkas bahwa;*Politics is collective decision making or the making of public policies for entire society.* Terjemahan secara bebas yaitu politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya. Pembuatan kebijakan secara kolektif menurut pemikiran Joyce Mitchell, misalnya dalam membuat undang-undang di bahas bersama antara eksekutif dengan legislatif, sebelum di putuskan dan disahkan oleh legislatif terlebih dahulu mendapatkan masukan dari masyarakat luas terutama para pakar dan tokoh masyarakat. Adapun isi atau substansi undang-undang tersebut mencerminkan kepentingan umum atau merupakan kehendak rakyat. Dalam proses pembuatan kebijakan mulai dari formulasi dan implementasi serta evaluasi kebijakan, secara esensial memiliki makna pergulatan kekuasaan. Karena di dalamnya berbagai kepentingan kekuatan politik baik supra maupun infra struktur politik berebutpengaruh, untuk memperjuangkan aspirasi ideologinya. Kepentingan nilai nilai ideologi partai politik sedapat mungkin masuk dalam agenda atau susbtansi yang diatur dalam kebijakan tersebut.

Sedangkan *Karl W. Deutch* (1970), dalam Budiardjo,1977, dalam buku *"Politics and Government"* juga mengatakan: *politics is the making of decisions by public means*. Terjemahan secara bebas yaitu bahwa politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum. Pendifinisian politik yang singkat oleh Deutch bahwa pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat misalnya secara kelembagaan meliputi eksekutif dan legislatif, LSM, ormas, organisasi profesi, yayasan, asosiasi dan lain-lain. Adapun sarana pendukung lainnya SDM, seperangkat peraturan per undangan, teknologi informasi, fasilitas kerja dan lain-lain, semua elemen yang disebutkan di atas merupakan sarana umum atau yang yang tersedia milik negara atau pemerintah. Oleh sebab itu setiap kebijakan yang dikeluarkan menjadi milik publik dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan kepentingannya. Kebijakan pada hakekatnya berupa undang-undang dan dari aspek proses merupakan produk politik.

Selanjutnya *David Easton (1971)* dalam buku "*The Political System*" menjelaskan bahwa: *political sciences is a study of the making of public policy.* Terjemahan secara bebas yaitu ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijaksanaan umum. Pendapat

Easton berangkat dari pertanyaan mengapa terbentuknya kebijaksanaan umum perlu dipelajari sebagai esensi dari pada proses politik dan bahkan menjadi referensi untuk menjelaskan pengertian mengenai "politik" tersebut. Kebijaksanaan umum sebagai proses politik karena di dalamnya terjadi pergulatan pemikiran antar kelompok kepentingan melalui perdebatan panjang. Proses diskusi melalui lobby, kompromi dan konsensus guna mencari titik temu di antara berbagai perbedaan pandangan sehingga dapat di ambil keputusan yang tepat. Misalnya produk pembuatan undang-undang politik tentang pilpres, pemilukada dan pemilu legislatif, sampai saat ini tidak atau belum dilakukan perubahan atau revisi yang signifikan, sebagaimana dikehendaki oleh masyarakat. Contoh banyak kalangan yang menghendaki pemilu kepala daerah terutama Gubernur tidak melalui demokrasi langsung tetapi kembali ke pemilihan oleh DPRD, dengan alasan bahwa demokrasi langsung tersebut dalam prakteknya lebih banyak mudharatnya. Namun aspirasi tersebut oleh para elit politik tidak mendapat respon yang positif, bahkan tetap membiarkan undang-undang tersebut tetap seperti semula. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa proses pembuatan kebijaksanaan umum termasuk revisi, harus melalui perjuangan yang panjang oleh berbagai kelompok kepentingan yang ingin memperjuangkan aspirasinya.

Pengertian tentang politik seperti yang di jelaskan di atas, menunjukkan bahwa pemahaman mengenai politik sudah semakin luas. Walaupun dalam perkembangannya secara empiris pemahaman tentang politik kecenderungannya lebih menonjol tentang "kekuasaan". Menganalisis dan mengamati fenomena peristiwa politik di Indonesia, pemahaman tentang kekuasaan mempunyai implikasi sangat besar di kalangan masyarakat luas. Jika berkenaan dengan politik sering dianalogikan dengan perjuangan perebutan kekuasaan, serta mempertaruhkan kekuasaan sehingga pemikiran politik dengan paradigma "kekuasaan" cenderung kekuatan atau kekuasaan digunakan untuk mendapatkan sesuatu yang di luar kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Kecenderungan moral *Hazzard* akan terjadi dengan dan perilaku menghalalkan segala cara sering digunakan dengan semua argumentasi yang dianggap logis. Berkenaan pemahaman politik sebagai "kekuasaan" *Laswell* juga mengatakan, "apa, siapa, dapat apa dan bagaimana kekuasaan itu akan digunakan".

Pemahaman tentang politik secara normatif yaitu; bagaimana menata dan mengatur kehidupan masyarakat secara lebih damai, adil dan aman seperti penjelasan para pakar di atas. Demikian pula politik dalam arti kekuasaan yang secara empiris dalam kehidupan sehari di gunakan oleh para pelaku politik, namun pada hakekatnya kekuasaan tersebut hanya alat untuk menata dan mengatur kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Jika pemikiran tersebut disepakati, tidak ada istilah lagi politik itu kotor dan kejam yang membuat masyarakat menjauhi atau takut terhadap kegiatan politik.

Adapun pemahaman politik dari aspek pengambilan keputusan, jika menganalisis proses pengambilan keputusan dengan model input-output, jelas akan tergambarkan bagaimana proses adu kekuatan untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing melalui berbagai dukungan dan *loby-loby* dan *bargaining* tersebut sampai pada akhirnya dihasilkan suatu keputusan yang ditetapkan oleh lembaga politik. Pemahaman politik dalam aspek pengambilan keputusan meskipun sudah terjadi pergeseran pemikiran yang lebih spesifik, namun esensi kekuasaan masih menjadi fokus dalam pemikiran tersebut, sedangkan kajian tentang pengambilan keputusan termasuk wilayah persoalan yang justru lebih kompleks dalam konstelasi penggunaan kekuasaan sampai dengan proses pengambilan keputusan ditetapkan.

### 1.2.2 Pengertian Sistem Politik

Dalam penjelasan tentang sistem politik menurut Istianto (2011) di katakan bahwa pemahaman politik sebagai suatu sistem, maka terlebih dahulu perlu dijelaskan keterkaitannya dengan pandangan kesisteman tersebut. Dalam proses kegiatan politik yang menyangkut berbagai bagian lain atau aspek yang satu dengan aspek yang lain yang saling berhubungan dan berkaitan karena kedekatan antar variabel tersebut tidak terlepas dengan pendekatan yang sistematis. Sebab suatu kegiatan yang tidak berdiri sendiri dan memerlukan ketergantungan dengan kegiatan-kegiatan yang lain dalam suatu rangkaian kegiatan yang terpadu, maka pada hakekatnya berhubungan dengan apa yang disebut sebagai sistem. Dalam "Proses Politik" , perkembangannya tidak dapat dilepaskan dari misalnya "partai-partai politik", atau kelompok kepentingan ataupun *loby-loby*, dengan demikian suatu proses politik juga akan membentuk suatu "sistem politik". Karena pada dasarnya kegiatan politik sebagaimana dikemukakan olehRodee (1983), bahwa "politik merupakan proses kompleks yang melibatkan sikap warga negara dan kepentingan kelompok organisasi, kegiatan pemilihan umum dan *lobbying*, baik perumusan, penerapan dan penafsiran undang-undang". Pendapat Rodee tersebut menunjukkan unsur-unsur yang terlibat dalam proses politik terdiri dari beberapa variabel yang satu sama lain saling mempengaruhi dan saling bergantung sebagai ciri dari suatu sistem.

Penjelasan mengenai sistem politik akan lebih lengkap jika diuraikan pada karakteristik atau ciri-ciri sistem politik. Dilihat dari karakteristik tersebut secara umum dapat diperbandingkan pada semua negara baik negara maju (modern) maupun negara berkembang (tradisional). Menurut *Gabriel A. Almond, (1960:11),* dalam buku "*The Politics of The Developing Areas*", mengatakan bahwa:

- ***Pertama:*** semua sistem politik termasuk sistem yang paling sederhana, mempunyai struktur politik. Dalam arti bahwa dapat dikatakan dalam

masyarakat yang sederhana semua mempunyai jenis struktur politik. Mereka juga membandingkan satu sama lain dilihat dari bentuk dan tingkatan masing-masing yang khusus dari struktur politik,

- ***Kedua:*** semua sistem politik melakukan fungsi-fungsinya, namun dalam frekuensinya yang berbeda. Adapun perbedaan frekuensi dari fungsi tersebut tergantung dari bagaimana bekerjanya struktur politik dan juga gaya dari pelaksanaannya,
- ***Ketiga****:* semua struktur politik baik dalam masyarakat yang modern maupun masyarakat tradisional *(primitive)* menjalankan multi fungsi. Dalam perbandingan sistem politik, pada kasus yang terbatas memiliki tingkatan fungsi yang khusus, termasuk substansi dari multi fungsi terhadap struktur politik,
- ***Keempat****:* semua sistem politik merupakan sistem campuran, baik di dalam semua kebudayaan yang modern maupun yang tradisional.

Ciri-ciri dari sistem politik seperti diuraikan oleh Almond (1960) di atas, jika melihat secara empiris pada sistem politik di Indonesia, memiliki struktur politik baik supra maupun intra struktur politik masing-masing menjalankan fungsinya yang sama secara universal. Namun frekuensi dari masing-masing fungsi supra dan infra struktur politik hasilnya akan berbeda jika dibandingkan dengan negara-negara yang telah maju kehidupan demokrasinya. Contoh fungsi lembaga legislatif di Amerika, dalam melaksanakan fungsi pembuatan peraturan perundangan, masing-masing anggota legislatif memiliki kemampuan dalam melaksanakan hak inisiatif dalam menyiapkan rancangan undang-undang. Kemampuan penggunaan hak inisiatif karena masing-masing anggota didukung oleh staf ahli yang kuat yaitu profesional dan kompeten sesuai bidangnya. Sedang di Indonesia para anggota dewan tidak didukung oleh staf ahli yang kuat, sehingga hampir seluruh RUU telah disiapkan oleh eksekutif.

Berbeda dengan pendapat *Robert A. Dahl (1978)* dalam menjelaskan tentang sistem politik menghubungkan beberapa unsur yang spektrum sangat luas yaitu meliputi hubungan antara kontrol, pengaruh, kekuasaan dan *authority*. Jika keempat hubungan tersebut berjalan dengan berbanding lurus dan menjadi pola yang tetap dalam interaksi masyarakat, maka sistem politik tersebut akan memiliki kemampuan yang signifikan. Pendapat Dahl (1978;3) tersebut sebagaimana diuraikan dalam "Modern Political Analysis" menyatakan *"a political system as any persistent pattern of human relationships that involves, to a significant extent, control, influence, power or authority".* Jadi menurut *Robert A Dahl* bahwa sistem politik adalah pola yang tetap dari hubungan antara manusia yang memiliki hubungan pada tingkat berarti (signifikan) yang meliputi hubungan antara kontrol, pengaruh, kekuasaan, maupun wewenang. Dengan demikian, sistem politik menunjukkan adanya hubungan dalam

masyarakat sampai sejauh mana aspek kontrol dapat menjadi pola hubungan yang tetap terhadap mekanisme kontrol individu atau kelompok terhadap penguasa dan sebaliknya. Kemudian bagaimana hubungan pengaruh antara individu dan kelompok dengan penguasa atau sebaliknya mampu menjadi pola yang tetap serta pola kekuasaan yang ada antara individu dan kelompok penguasa atau sebaliknya dan bagaimana pola hubungan wewenang dalam arti sejauh mana otoritas dari sistem dapat dipatuhi oleh individu atau kelompok dalam masyarakat. Hubungan kekuasaan, kewenangan, pengaruh badan kontrol menjadi terpola dan melembaga dalam kehidupan masyrakat dan juga dalam penyelenggaraan pemerintahan. Contoh terhadap pola hubungan "*control*"; seperti kontrol lembaga formal yaitu DPR/D di bidang politik, BPK di bidang keuangan negara, serta kontrol sosial dari LSM, Ormas, Partai Politik, organisasi profesional dan asosiasi. Lembaga lembaga kontrol tersebut pelaksanaanya dapat terpola dengan tertib dan teratur, niscaya akan memperkuat kemampuan sistem politik tersebut dan stabilitas politik menjadi lebih mantap.

Demikian pula pandangan yang berbeda dari *David Easton (1965)*, pendapatnya mengatakan bahwa sistem politik merupakan nilai-nilai yang harus menjadi pegangan atau pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nilai-nilai tersebut harus diyakini oleh seluruh masyarakat dan jika diperlukan bersifat memaksa dan mengikat. Artinya jika seluruh masyarakat memiliki pandangan yang sama terhadap nilai-nilai kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, maka masyarakat akan lebih mudah terintegrasi. Masyarakat yang terintegrasi menunjukkan masyarakat yang telah merdeka, berdaulat dan kuat. Pendapat Easton secara ringkas dikutip dalam buku *"A Frame Work For Political Analysis"* (1965, hal 57) menjelaskan bahwa *"The Political System Allocates Values(by means of tiles; its allocations are authoritative;and its authoritative allocations are binding on the society as a whole*)". Pengertian di atas dimaksudkan bahwa sistem politik adalah alokasi nilai-nilai dan alokasi nilai tersebut bersifat memaksa dengan menggunakan kewenangan tersebut mengikat kepada masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian pengertian sistem politik di atas di samping sistem politik itu memiliki kewenangan untuk memberikan nilai-nilai kepada masyarakat yaitu berupa nilai-nilai kekayaan, kesehatan, kebebasan, kemerdekaan dan keadilan kepada masyarakat. Nilai–nilai tersebut harus menjadi pedoman dan arah bagi kehidupan masyarakat dan bernegara dan untuk kepatuhan terhadap nilai-nilai tersebut. Sistem politik tersebut memiliki kewenangan yang bersifat memaksa. Jika masyarakat tidak mematuhi terhadap nilai-nilai tersebut maka akan mendapatkan sanksi tertentu. Nilai-nilai yang bersifat memaksa dan mengikat tersebut merupakan instrument dalam mengintegrasikan masyarakat yang pada umumnya memiliki perbedaan latar belakang suku, ras, agama, bahasa dan kepentingan.

Selanjutnya untuk melengkapi pemahaman tentang sistem politik yang lebih komprehensif pendapat *Gabriel A. Almond* (1960) dapat menjadi tambahan referensi, menyatakan bahwa sistem politik merupakan proses adaptasi dari berbagai lapisan masyarakat menuju persatuan dan kesatuan. Proese mengintegrasikan seluruh lapisan masyarakat harus dengan paksaan yang memiliki kekuatan legitimasi dari negara. Pandangan Almond (1960;6) tercantum dalam buku "*The Politics of Developing Areas*," mengatakan "*The political to be found in all independent society which performs the functions of integration and adaptation (both internally and vis a vis other societies) by means of the employment, of more or less legitimate physical compulsion*". Pengertian tersebut dimaksudkan bahwa sistem politik adalah sistem hubungan timbal balik *(interaksi)* yang ada di dalam masyarakat yang merdeka *(independent)* yang menjalankan fungsi adaptasi dan integrasi terhadap persatuan dan kesatuan dan dengan masyarakat lainnya dengan menggunakan paksaan fisik yang sedikit banyak *(of more or less)* bersifat sah *(legitimate)*. Dengan demikian sistem politik menurut *Almond* seperti di uraikan di atas bahwa sistem politik hanya bisa berlaku di masyarakat yang sudah merdeka *(independent societies)* karena sistem politik sebenarnya mengatur hubungan antara masyarakat yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan integrasi masyarakat dan adaptasi dengan masyarakat lainnya *(other societies)* dengan menggunakan paksaan fisik yang memiliki keabsahan *(legitamate).*

Beberapa pengertian tersebut baik menurut Dahl, Easton dan Almond, memberikan pemahaman bahwa sistem politik yang dikemukakan oleh pakar tersebut menunjukkan fokus perhatian masing-masing berbeda. *Robert Dahl* memberikan pengertian yang lebih subtansial yaitu menghubungkan keterkaitan antara *control, influences, power* dan *authority,* sedangkan pendapat *David Easton*, pandangan sangat luas yaitu alokasi nilai-nilai kepada masyarakat yang bersifat memaksa, adapun *Gabriel A Almond* menekankan suatu integrasi dalam masyarakat yang bersifat memaksa dan mengikat. Apabila ketiga pendapat tersebut dikaitkan satu sama lain dalam perspektif demokrasi, maka nilai-nilai masyarakat yang di dalamnya termasuk nilai-nilai kontrol, pengaruh, kekuasaan dan kewenangan yang disintesakan dengan nilai dan konsep demokrasi sehingga akan terjadi suatu integrasi masyarakat yang demokratis.

Dengan demikian sistem politik pada umumnya sebagai sistem yang bertujuan mempersatukan seluruh elemen masyarakat yang majemuk. Konsep sistem politik yang dikemukakan oleh ketiga pakar di atas memiliki esensi demokrasi, dengan kata lain sistem politik yang akan di bangun adalah sistem politik yang demokratis.

Oleh karena itu terkait dengan konsep sistem politik di atas, dalam konteks di Indonesia, secara empiris Indonesia sebagai negara sudah terintegrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berdasarkan nilai-nilai yang disepakati seluruh elemen masyarakat, sesuai pendapat Almond dan Easton. Namun tuntutan kualitas

sistem politik yang demokratis, sebagaimana pendapat Dahl yaitu pola yang tetap dan hubungan yang signifikan antara kontrol, pengaruh, kekuasaan dan kewenangan, kemungkinan belum menunjukkan sesuai dengan yang di inginkan Easton tersebut. Misalnya dalam hal "kontrol", pelaksanaan kontrol dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, belum menunjukkan pola yang tetap dan hubungan yang signifikan. Contoh lembaga DPR belum menjalankan fungsi kontrol yang efektif, lembaga yang lain seperti BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal, juga belum menjalankan fungsi secara optimal dalam mencegah KKN. Demikian pula masyarakat belum menjalankan peran kontrol sosial secara efektif kepada pemerintah sehingga hasil pembangunan yang selama ini berjalan belum memuaskan masyarakat. Kualitas sistem politik yang demokratis belum signifikan tersebut, disebabkan kemungkinan kondisi sistem sosial dan budaya masyarakat Indonesia belum mendukung tuntutan prasyarat sistem politik yang demokratis tersebut. Misalnya nilai sportivitas, nilai saling menghargai, nilai kesamaan, egaliter, belum sepenuhnya di jiwai oleh masyarakat Indonesia. Namun masyarakat Indonesia masih kuat nilai primodialisme dan feodalisme sehingga menghambat cara berpikir rasional, sebagaimana yang di tuntut niali-nilai di atas.

Oleh karena itu, pembangunan sistem politik yang tertuang dalam desain undang-undang bidang politik seperti, kepartaian, pemilu, kedudukan DPR/D dan sebagai fondasi bangunan suatu sistem politik, harus sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Di samping itu secara substansi isi dari perundangan tersebut mencerminkan upaya memperkokoh integrasi bangsa. Sedapat mungkin jangan sampai keberadaan undang-undang kepartaian tersebut justru memperlihatkan trend berpotensi menghancurkan kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat. Contoh Undang-Undang No.2 Tahun 2008 junto UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, jika dilihat dalam perpektif kehidupan kepartaian di Indonesia secara empiris belum mampu menyederhanakan jumlah partai. Walaupun sejak pemilu tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014, indikasinya partisipasi masyarakat dalam pemilu semakin menurun jumlahnya yakni tahun 2014 hanya mencapat 75%. Di samping itu jumlah partai politik oleh banyak kalangan masih dianggap terlalu banyak yaitu 12 partai politik. Untuk membangun pemerintahan yang kuat dan solid jumlah partai maksimal lima (5) atau enam (6) parpol. Sebab dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang dibangun dengan kekuatan koalisi besar cenderung kurang solid sehingga efektifitas penyelenggaraan pemerintan kurang optimal.

Menghadapi pemilu 2014 hasil verifikasi Komisi Pemilhan Umum (KPU) terdapat penambahan peserta pemilu hanya 3 (tiga) partai politik yaitu Partai Nasional Demokrat (Nasdem), PKPI dan PBB, sehingga jumlah parpol yang akan berlaga

pada pemilu 2014 berjumlah dua belas (12) dan dua (2) partai dari Nanggroë Aceh Darussalam.

Seperti telah diuraikan di atas, dalam sejarah politik di Indonesia pernah memiliki jumlah partai yang banyak sebagai pencerminan sistem politik demokratis, yaitu pada masa orde lama. Dengan banyaknya partai tersebut, sudah terbukti dalam penyelenggaraan pemerintahan koalisi terbukti tidak mampu menjamin stabilitas politik dan ekonomi yang mantap. Pada era reformasi dengan desain sistem politik yang demokratis, telah berjalan melalui hasil pemilu tahun 2004 dan 2009 serta 2014, sebagaimana sejarah terulang kembali yaitu penyelenggaraan pemerintahan di bangun berdasarkan pemerintahan koalisi kurang solid dan kurang efektif.

Secara empiristik ketika penyelenggaraan pemerintahan tersebut melalui pembentukan pemerintahan koalisi pada umumnya rentan dengan konflik dan akan berakibat stabilitas politik akan terganggu. Untuk itu perlu ada kesadaran para elit politik melalui konsensus antar kekuatan politik secara serius mengupayakan jumlah partai dikurangi dan bisa menetapkan jumlah partai yang lebih sedikit tetapi proporsional dan sudah merepresentasikan seluruh potensi bangsa serta pembatasan yang bersifat permanen. Karena dengan banyaknya jumlah partai bisa terjebak dalam situasi yang rentan dengan pertikaian yang tidak berkesudahan serta pemerintahan tidak stabil, pada gilirannya tanpa disadari potensi kehancuran bangsa diawali dari konflik yang laten dan permanen tersebut.

Penjelasan yang cukup luas mengenai pengertian ”politik dan sistem politik”, diharapkan mampu memberikan pemahaman dan persepsi yang tepat kepada masyarakat tentang politik. Jika kesadaran politik meningkat maka mampu mendorong partisipasi politik yang lebih meningkat. Misalnya; menghadiri kampanye secara sukarela, memberikan suara dalam pemilu juga secara sukarela serta ikut memberikan pemikiran terhadap perencanaan pembangunan di lingkungannya serta mendorong masyarakat secara responsif mampu melakukan ”kontrol” atau pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan ”pembangunan” serta hasil-hasilnya dan lain-lain.

Jika partisipasi politik masyarakat tumbuh dengan sehat tanpa melalui mobilisasi, merupakan modal potensial dalam pembangunan politik demokrasi. Demikian pula pemahaman yang benar mengenai ”politik” juga merupakan dukungan yang positif terhadap upaya membangun ”budaya politik” yang lebih cerdas dan sehat. Budaya politik yang sehat mampu melaksanakan ”sistem politik” demokratis yang sesuai dengan budaya Indonesia. Adapun budaya politik tersebut sesungguhnya telah dibangun oleh para ”*funding fathers*” bangsa Indonesia dengan susah payah yaitu nilai nilai budaya politik” yang tertuang dalam; Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 serta Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

### 1.2.3 Pengertian Ideologi

Ideologi pada dasarnya adalah nilai cita-cita dan gagasan serta pemikiran yang dianut dan dipercaya masyarakatnya. Cita-cita tersebut merupakan ciri atau corak (*platform*) yang bersumber dari hasil pemikiran, renungan dan kearifan serta "*wisdom*" terhadap hakekat kebenaran. Nilai-nilai tersebut untuk mengatur dan mengelola suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hasil pemikiran tersebut dapat menjadi sebuah alternatif untuk mencapai "solusi" dari berbagai pilihan yang terbaik, bagi masyarakat pada saat ini maupun masa yang akan datang. Hasil pemikiran dan gagasan yang mengandung nilai filosofis tersebut merupakan pekerjaan besar dan tidak mudah dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.

Pengertian ideologi secara harafiah yaitu" *idea*", suatu cita-cita, sedang "logi" berasal dari kata "*logos*" yang artinya mempelajari. Jadi ideologi berarti mempelajari ide-ide atau cita-cita masyarakat. Pada umumnya menyangkut berbagai aspek kehidupan yang membentuk suatu kristalisasi nilai-nilai yang dianggap luhur. Pada akhirnya dianut dan dipedomani oleh anggota masyarakat termasuk untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adapun pengertian secara fungsional menurut *Alfian(1980;109)*, dikatakan bahwa "ideologi secara umum diartikan sebagai pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam yang dipunyai dan dipegang oleh suatu masyarakat tentang bagaimana cara yang sebaiknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai segi kehidupan duniawi".

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, suatu ideologi mengandung beberapa aspek yaitu;

1. Adanya sistem nilai;
2. Mengandung nilai moral kebenaran dan keadilan yang dicita-citakan;
3. Sebagai pedoman dan arah dalam bertindak dan bertingkah laku;
4. Mencakup berbagai sendi kehidupan.

Dengan demikian sebuah ideologi adalah merupakan himpunan nilai-nilai dan moral kebenaran dan kearifan yang meliputi aspek ekonomi, politik, sosial-budaya, hukum, pertahanan dan keamanan. Nilai tersebut dijadikan sebagai pedoman dan arah yang harus diikuti anggotanya dalam bertingkah laku dalam masyarakat. Ideologi cenderung memiliki ciri dan karakteristik masing-masing, tergantung kondisi dan lingkungan dimana ideologi itu dilahirkan atau dicetuskan. Sehingga sebuah ideologi dapat menjadi sumber energi dan sumber inspirasi bagi para pengikutnya dalam mengaktualisasikan gagasan atau pemikiran ke dalam tindakan kongkrit.

Oleh sebab itu rumusan ideologi yang merepresentasikan keinginan dan cita-cita suatu masyarakat, jangkauan gagasan dan pemikiran mampu memiliki spektrum yang universal. Pengaruh nilai ideologi menjadi sebuah ideologi besar dunia seperti ideologi "sosialisme dan komunisme" serta "liberal kapitalisme". Kedua ideologi tersebut sebenarnya sebagai gagasan dari pemikiran ekonomi. Sedangkan gagasan dan pemikiran besar yang menjadi sebuah idelogi politik misalnya nasionalisme, fasisme, demokrasi. Sedangkan ideologi "Pancasila" mengandung gagasan dan pemikiran untuk mengatur kehidupan baik dibidang religi, "sosial-politik, budaya maupun ekonomi". Artinya pemikiran dan gagasan para *founding fathers* bangsa Indonesia dalam membangun falsafah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesungguhnya memiliki dimensi yang lebih luas dibanding ideologi yang lain tersebut. Sifat ideologi pada umumnya hanya memiliki pengikut pada suatu lingkungan masyarakat tertentu dimana ideologi itu dilahirkan.Tetapi jika pengikut semakin besar sangat mungkin ideologi tersebut dianut oleh masyarakat yang berada di luar lingkungannya. Bahkan ideologi mampu bersifat ekspansif sesuai dengan kekuatan para penganut ideologi tersebut.

Pengalaman sejarah membuktikan dalam percaturan politik global, pada era perang dunia pertama (PDI) tahun 1918, salah satu tujuannya melakukan ekspansi "ideologi komunis" karya "Karl Marx" dalam buku "Das Capital" dan Manifesto Comunism". Pada masa itu ekspansi ideologi komunis mampu menaklukan kekaisaran "Rusia" dan memperluas ideologi "komunis" di kawasan Rusia dan Asia Selatan. Sehingga menjadi wilayah jajahan dan mendirikan negara yang disebut " Uni Soviet". Demikian pula ideologi " liberal kapitalisme " karya "Adam Smith " dalam bukunya "*The Wealth Of Nations* (1723-1790)" pada abad 18 melakukan ekspansi ideologi mampu menjangkau disamping keseluruh kawasan Amerika Serikat, Inggris, negara-negara Eropa. Hebatnya kedua ideologi tersebut memiliki kesempatan luas untuk mengekspansi pasca PD I bergerak ke seluruh dunia. Bahkan sekaligus melakukan invasi atau pendudukan terhadap negara-negara Asia Tenggara, Asia Timur dan lain-lain. Dalam perkembangan selanjutnya ekspansi kedua ideologi dengan relatif cepat sampai menjelang PD II, ke berbagai negara yang masih menjadi negara jajahan Inggris, Belanda dan Portugis terutama di wilayah Asia. Dunia terbelah menjadi dua kubu besar menjadi arena perang dingin (politik *detente*) antara negara-negara penganut "ideologi sosialisme dan komunisme" contohnya di Vietnam Utara, Korea Utara, sedang kawasan yang lain dibawah pengaruh "ideologi Liberal Kapitalisme" seperti negara-negara jajahan Inggris dan Belanda.

Di Indonesia kedua ideologi tersebut sama-sama berkembang dengan cepat pada saat menjelang kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ketika Indonesia merdeka pemerintah memperbolehkan pendirian partai

partai politik, landasan ideologi yang dijadikan dasar filosifis bernegara banyak dipengaruhi oleh ideologi-ideologi besar tersebut. Misalnya "liberal kapitalisme " diusung oleh "Partai Sosialis Indonesia" (PSI), tokohya antara lain Sutan Syahrir, Sumitro Djoyo Hadikusumo. Ideologi Komunisme di usung oleh "Partai Komunis Indonesia" (PKI), tokohnya antara lain Ali Muso. Adapun ideologi yang merupakan hasil akulturasi berbagai pemikiran dunia dengan kondisi lingkungan sosial budaya Indonesia muncul khas ideologi dari Indonesia diberi nama "*Marhaenisme*" yang dicetuskan oleh Ir.Sukarno. Partai yang didirikan oleh pencetus ideologi tersebut yaitu "Partai Nasional Indonesia" (PNI). Di samping itu ideologi yang berlandaskan nilai-nilai agama "Islam", diusung oleh HOS Tjokroaminoto yang mendirikan "partai Serikat Islam", sekanjutnya diikuti berdirinya "partai Nahdhatul Ulama" (NU) dan "partai Masyumi". Sedangkan yang berbasis nilai agama Kristen atau Nasrani, berdiri partai Kristen dan juga partai Katholik.

Di era reformasi pendirian partai politik dalam perspektif ideologi, memiliki kemiripan dengan basis ideologi lama yang sering disebut sebagai politik aliran. Seperti partai politik pada masa Orde Baru misalnya PDIP masih mengklaim basis ideologi "*Marhaenisme*". Partai Golkar merepresentasikan basis ideologi "liberal kapitalisme", dimana para tokoh pendiri sebagian besar tokoh Partai Sosialis. Walapun dalam perkembangannya banyak tokoh dan kader HMI menduduki posisi penting, namun tidak cukup berpengaruh merubah haluan dasar ideologi "liberal kapitalisme" terutama di era Orde Baru. Perkembangan di era reformasi partai Golkar orientasi ideologis di bawa ke arah "nasionalisme religius, meskipun tarikan sekularisme dan pluralism cukup kuat. Sedangkan PPP tetap masih konsisten dengan landasan ideologi "Islam", dengan dukungan basis massa dari kalangan "Islam mordenis" dan kalangan "Nahdiyin".

Adapun pendirian partai politik di era reformasi yang sudah secara resmi menjadi konstestan pemilu tahun 2014, basis ideologinya dipengaruhi oleh pendirinya yang berasal dari tiga partai lama di atas. Misalnya partai Hanura, Gerindra, NasDem, PKPI dan Partai Demokrat, yang pendirinya berasal dari partai Golkar, maka corak basis ideologinya mirip dengan partai Golkar saat ini. Meskipun aksidensinya mencoba berbeda, dengan melalui slogan memperjuangkan rakyat bawah dan pro rakyat. Adapun partai politik yang didirikan oleh tokoh-tokoh Islam, maka partai politik yang didirikan warna ideologinya berlandaskan Islam, misalnya PKS dan PBB. Sedang partai politik sejenis yang didirikan oleh tokoh Islam namun dengan platform "inklusif". Partai politik yang "inklusif" landasan ideologinya mengandung corak ideologi campuran antara nasionalisme dengan agama, sebutanya menjadi "nasionalisme religius", partai tersebut misalnya PAN dan PKB.

Berdasarkan kajian ideologis di atas, eksistensi partai politik peserta pemilu tahun 2014, jika di amati dengan seksama perilaku politik para elit partai hampir seluruh partai politik menunjukkan trend perubahan kearah ideologi "praktis pragmatisme". Artinya basis ideologis yang menjadi *platform* partai politiknya, cenderung lemah dalam artikulasi dan egregasi kepentingan publik. Indikasi yang memperkuat pernyataan di atas yaitu para elit partai politik bahkan ketua umum partai tersandung kasus pidana korupsi. Terlibatnya elit partai tersebut secara merata ada pada partai politik. Peristiwa hukum yang menimpa elit partai, mencerminkan perilaku politik yang praktis–pragmatis. Basis kekuatan ideologi menjadi lemah ketika menghadapi era mordenisme barat.

### 1.2.4 Pengertian Demokrasi

Uraian dan penjelasan konsep dan teori serta mengenai praktek demokrasi di Indonesia, dalam buku ini sebagai referensi sebagian besar mengutip dari buku penulis yang berjudul "*Demokratisasi Birokrasi*" (*Istianto*, 2011). Adapun terdapat penambahan aspek bahasan yang berbeda karena disesuaikan dengan materi topik buku ini. Di era reformasi kata demokrasi bergema lebih nyaring, di karenakan selama rezim Orde Baru kata demokrasi Pancasila hanya menjadi slogan, sedang yang dialami oleh masyarakat adalah penekanan, ketakutan, ancaman, sehingga membuat masyarakat apatis dan cenderung apolitis. Selama Orde Baru dengan model pemerintah yang sentralistis dan otoriter maka stabilitas kekuasaan dijadikan untuk memperkuat posisi bagi pemegang kekuasaan para elit dan kelompok *inner circle*-nya atau yang berada di pusaran kekuasaan. Dengan demikian bagaimana sesungguhnya makna demokrasi dalam kehidupan masyarakat.

Pengertian demokrasi secara harafiah terdiri dari dua kata yaitu *"demos"* yang berarti "kekuasaan atau berkuasa" dan "*kratos*" artinya orang-orang atau rakyat dengan kata lain demokrasi yaitu rakyat yang berkuasa atau *"government or rule by the people"(Mirian Budiarjo, 1977)*. Secara historis sesungguhnya makna "demokrasi" sejak di Yunani kuno sudah muncul ketika rakyat memilih pemimpin secara langsung. Romawi dan Italia menyebutnya dengan istilah "Pemerintahan Rakyat".

Untuk menunjang pada pemerintahan rakyat orang Yunani seperti kita lihat, telah menciptakan istilah "demokrasi" orang Romawi berdasarkan bahasa asli Latin mereka menamakan pemerintahannya dengan nama "Republik", kemudian orang Italia memberikan nama itu kepada "pemerintahan rakyat yang terdapat di beberapa negara kota mereka"*(Robert A. Dahl, 1999)*.

Sebagaimana diutarakan di atas, demokrasi memang menjadi harapan dan mungkin impian bagi sebagian masyarakat. Barangkali sebuah kata demokrasi

dianggap dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat baik persoalan mengenai konflik antara masyarakat dengan negara atau sebaliknya dan bahkan antara kelompok dengan masyarakat bisa diselesaikan dengan cara-cara demokrasi. Bahkan *Jean Baechler (1995)* memberikan ilustrasi sebagai berikut: "Dalam sejarahnya, demokrasi belum pernah menjadi topik yang begitu hangat seperti sekarang". Dalam sistem demokrasi yang paling tua dan mapan di Eropa dan Amerika, beberapa warga negara tengah menuntut pelaksanaan demokrasi yang lebih besar, sementara yang lainnya menuntut agar kesenjangan dalam demokrasi dihapuskan. Di negara-negara yang sistem demokrasinya lebih muda, ada kepedulian akan hadirnya lembaga-lembaga yang diperlukan untuk membangun suatu demokrasi "sejati", yang stabil dan efektif. Di tempat-tempat dimana demokrasi belum sungguh-sungguh berakar, partai-partai oposisi mencita-citakan demokrasi dalam berbagai bentuk. Dalam perkembangan demokrasi telah mengalami banyak tuntutan perubahan dalam arti bahwa demokrasi tidak hanya sekedar penyelenggara kekuasaan berada di tangan rakyat, akan tetapi bagaimana kekuasaan di tangan rakyat tersebut sudah dapat berjalan dengan "stabil dan efektif". Oleh karena itu muncul istilah berbagai macam, sifat jenis, kriteria yang dipenuhi bagi suatu penyelenggaraan kekuasaan tentang demokrasi. Menurut pandangan *Jean Baechler (1995)* demokrasi dalam perkembangannya di berbagai tempat pada akhirnya menuntut adanya efektifitas demokrasi maupun memberi kontribusi yang nyata terhadap keinginan rakyat yaitu stabilitas dan efektifitas penyelenggaraan kekuasaan untuk menuntut kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera. Meskipun berbagai macam istilah demokrasi baik macam, jenis dan kriteria itu muncul sebagaimana juga di Indonesia muncul istilah "Demokrasi Pancasila", akan tetapi harapan *Jean Baechler* adalah ketika penyelenggaraan kekuasaan sudah di tangan "rakyat" maka kekuasaan tersebut harus mampu menumbuhkan stabilitas dan efektifitas jalannya pemerintahan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga negaranya.

Seperti dikatakan oleh *Carol C. Gould (1993)* mengatakan teori-teori demokrasi tradisional yakni liberalisme klasik abad ke 18 dan ke 19 terbukti tidak mampu menjawab tuntutan yang lebih besar terhadap kebebasan dan persamaan pada abad ke 20 ini, disamping keunggulan yang masih melekat dalam teori-teori tersebut, muncul kebutuhan akan konsep demokrasi yang baru dan luas serta kebutuhan akan rumusan landasan filosofinya. Teori demokrasi tradisional semacam itu sekarang mendapatkan banyak kritik, karena konsep kebebasannya terbatas hanya menunjuk pada tiada adanya gangguan dan terbatasnya demokrasi hanya pada wilayah politik. Berbagai kritik masa kini tersebut mengajukan prinsip-prinsip demokrasi yang egaliter dan radikal sebagai landasan normatif untuk selanjutnya mendemokratisasikan kehidupan sosial. Demikian pula pandangan *"Carol C. Gould"* esensi dari pada nilai "demokrasi"

adalah "kebebasan dan persamaan akan tetapi kedua nilai tersebut tidak terjadi hanya pada wilayah "politik" saja, namun harus diperluas dalam wilayah kehidupan sosial. Ketika demokrasi hanya berhenti pada wilayah "politik" saja, maka ada kecenderungan terjadinya dominasi kekuasaan di pusaran elit-elit politik. Ketika distribusi kekuasaan tidak merata maka terjadi kesenjangan akses kekuasaan juga akan berpengaruh terhadap ketidak adilan akses distribusi sosial–ekonomi maka upaya menjamin stabilitas politik dan sosial ekonomi dipastikan akan tersendat. Pada gilirannya di negeri yang sudah menganut demokrasi dan apalagi yang baru belajar demokrasi akan menghadapi "konflik sosial" yang justru akan merusak terhadap ide-ide demokrasi yang telah dianggap sebagai konsep politik yang paling baik dibandingkan dengan ide-ide politik monarki dan oligarki.

Untuk selanjutnya kriteria demokrasi yang ideal menurut*Robert A. Dahl* dalam buku *"Dilemas of pluratist democracy, autonomy vs control* (1982) mengatakan, ada 5 kriteria yaitu:

1. **Persamaan hak pilih;**
   Dalam membuat keputusan kolektif yang mengikat, hak istimewa dari setiap warga negara seharusnya diperhatikan secara berimbang dalam menentukan keputusan terakhir. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai persamaan hak pilih setiap warga negara, maka keputusan kolektif akan lebih kuat dan legitimate. Keputusan yang dibuat dengan dukungan legalitas yang kuat, dengan sendirinya akan mengurangi timbulnya konflik baik vertikal dan horisontal karena pada hakekatnya demokrasi itu milik rakyat sehingga "konflik" yang terjadi di tengah masyarakat harus dihindari.
2. **Partisipasi efektif;**
   Dalam seluruh proses pembuatan keputusan secara kolektif termasuk tahap penentuan agenda kerja, setiap warga negara harus mempunyai kesempatan yang sama dan memadai untuk menyatakan hak-hak istimewanya dalam rangka mewujudkan kesimpulan terakhir. Partisipasi yang efektif ketika dalam proses pembuatan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat umum telah melibatkan seluruh elemen-elemen masyarakat. Jika kebijakan tersebut dilaksanakan dipastikan tidak muncul tuntutan atau klaim dari masyarakat. Oleh sebab itu partisipasi yang efektif mampu mencegah tuntutan yang eksplosif dan cenderung disintegrasi dapat dicegah sejak dini.
3. **Pembeberan Kebenaran;**
   Dalam waktu yang memungkinkan, karena keperluan untuk suatu keputusan, setiap warga negara harus mempunyai peluang yang sama dan memadai untuk membutuhkan penilaian yang logis demi mencapai hasil yang paling diinginkan. Pembeberan kebenaran pada hakikatnya merupakan klimaks

dari proses akuntabilitas publik yang terbuka dan transparan. Oleh sebab itu akuntabilitas publik merupakan proses pembeberan kebenaran ketika pejabat publik mempertanggungjawabkan di depan masyarakat luas, sehingga dengan demikian pejabat publik tersebut dapat terpilih kembali pada pemilu berikutnya.

4. **Kontrol Terakhir Terhadap Agenda;**
   Masyarakat harus mempunyai kekuasaan eksklusif untuk menentukan soal-soal mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses-proses yang memenuhi ketiga kriteria yang disebut pertama. Kekuasaan dalam penyelenggaraan negara terhadap ketiga kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif juga harus mendapat kontrol yang efektif dari masyarakat luas supaya tidak terjadi *abuse of power*. Walaupun prinsipnya ketiga kekuasaan di atas merupakan *"check and balances system"*. Kontrol sosial secara berkesinambungan yang representatif seperti; LSM, ormas dan partai politik dan juga tokoh perorangan juga merupakan elemen kontrol yang efektif terhadap setiap *agenda setting* dari kegiatan pemerintahan. Jika kontrol berjalan efektif maka agenda pemerintahan akan sesuai dengan cita-cita dan harapan masyarakat luas. Akan tetapi jika sebaliknya kontrol tidak berjalan efektif maka agenda setting justru tidak tercapai sesuai dengan sasaran, melainkan lebih berorientasi kepentingan kelompok yang berkuasa baik dari kalangan politisi maupun korporasi.
5. **Pencakupan**
   Masyarakat harus meliputi semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum, kecuali pendatang sementara. Dalam prinsip nilai-nilai demokrasi pada hakekatnya mampu mencegah tindakan pemerintah yang bersifat diskriminatif, karena pada dasarnya setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, ekonomi dan politik.

Pendapat Dahl (1982) di atas memberikan perluasan pemahaman tentang demokrasi yang meliputi; persamaan hak pilih, partisipasi, pembeberan kebenaran atau transparansi, kontrol dan pencakupan. Kelima aspek di atas merupakan persyaratan bagi terwujudnya kehidupan sosial dan politik di masyarakat. Ketika di laksanakan pemilu oleh negara maka setiap warga negara memiliki hak pilih yang di lindungi oleh Undang-Undang.Demikian pula kewajiban warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik misalnya mendatangi tempat kampanye, memberikan suara pada pemilu legislatif dan pemilu presiden serta pemilukada. Pada sisi yang lain pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik juga memegang prinsip transparansi atau keterbukaan. Seluruh tindakan pemerintah yang tercermin dalam setiap kebijakan harus terbuka dan berorientasi kepada kepentingan publik. Pemerintah harus bersifat adil dan tidak bertindak diskriminatif. Demikian pula masyarakat diberkan kebebasan

untuk melakukan kontrol terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Jika kelima aspek tersebut dapat berjalan dengan normal maka kehidupan bernegara dan bermasyarakat akan demokratis. Hubungan antara pemerintah dengan rakyat akan berjalan secara seimbang, dengan kata lain *check and balance of power* dapat berjalan efektif. Gambaran di atas merupakan esensi kehidupan demokrasi, di satu pihak pemerintah memberdayakan kemampuan masyarakat secara optimal dan di lain pihak rakyat memiliki kepercayaan kepada pemerintah dalam hal membuat dan melaksanakan kebijakan untuk melayani kepentingan publik.

Kemudian untuk memperbanyak dan memperluas tentang khasanah demokrasi, dijelaskan pula macam-macam sebutan mengenai demokrasi. Menurut *Jeff Haynes (1997)* menyebutkan demokrasi formal, demokrasi substantif dan demokrasi permukaan *(facade)* dengan penjelasannya sebagai berikut:

a. **Demokrasi Formal *(Formal Democracy)***
   Demokrasi formal ditandai dengan Pemilihan Umum yang teratur, bebas dan adil serta kompetitif. Biasanya ditandai dengan tidak digunakannya paksaan secara berlebihan oleh negara terhadap masyarakat. Secara teoritis lewat pertanggungjawaban pemerintah terhadap yang diperintah (warga negara melalui kotak suara, dan dilekatkannya "*Rule of Law")*. Ada kebebasan sipil dan politis yang cukup untuk menjamin kompetisi dalam Pemilihan Umum.
b. **Demokrasi Permukaan *(Facade Democracy)***
   Demokrasi "permukaan" merupakan hal yang umum di dunia ketiga, tampak luarnya memang demokrasi tetapi sama sekali tidak memiliki substansi demokrasi. Artinya bahwa dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan tidak menggunakan cara-cara demokratis. Misalnya, melakukan penggusuran pedagang kaki lima dengan cara kekerasan. Padahal negara tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Seperti pembagian kekuasaan berdasarkan *Trias Politika*.
c. **Demokrasi Substansif *(Substantive Democracy)***
   Demokrasi Substansif memperluas ide demokrasi di luar mekanisme formal. Ia mengintensifkan konsep dengan memuaskan penekanan pada kebebasan dan diwakilinya kepentingan melalui forum publik yang dipilih dan partisipasi kelompok. Ia merupakan pendalaman demokrasi dimana semua warga negara mempunyai akses yang mudah pada proses pemerintahan dan suara didalam pengambilan keputusan secara kolektif.

Ketiga macam istilah demokrasi yaitu demokrasi formal, demokrasi permukaan dan demokrasi substantif, merupakan pemahaman yang esensial dalam memberikan pandangan tentang demokrasi di beberapa belahan dunia. Kita menyadari bahwa ketika berbagai bangsa terutama negara-negara dunia ketiga menerapkan demokrasi dari semula yang dalam sejarahnya diawali dari sistem monarki atau oligarki, maka sudah barang tentu pengalaman masing-masing negara menghadapi situasi yang berbeda terhadap pelaksanaan demokrasi. Indonesia ketika era orde baru, walaupun mengklaim sebagai negara demokrasi yang menganut faham demokrasi Pancasila, namun dalam kehidupan masyarakatnya lebih menonjolkan sistem otoriter ketimbang suasana demokrasi. Artinya konsep demokrasi hanya di permukaan saja atau dengan istilah *Facade Demokrasi*. Demikian pula pada masa reformasi saat ini implementasi demokrasi belum memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang signifikan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat akan tetapi yang terjadi justru proses "pemiskinan" kian berlangsung, seiring dengan harga-harga barang kebutuhan pokok terus melambung tetapi tidak sebanding dengan tingkat pendapatan masyarakat artinya praktek demokrasi hanya sebatas demokrasi formal atau sekedar melaksanakan prosedur demokrasi belaka. Sedangkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak terdistribusikan dengan demokratis, sehingga kue ekonomi yang sudah membesar belum terbagi secara merata dan adil ke seluruh lapisan masyarakat. Dalam konsep demokrasi substansial menghendaki kekuasaan politik yang diperoleh dengan cara demokratis membawa implikasi terhadap distribusi kekayaan secara merata, dengan memberikan akses kegiatan ekonomi terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan mengendalikan secara ketat pengaruh praktek monopoli dan oligopoli.

## 1.3 METODE ANALISIS

Berdasarkan uraian bab di atas, telah menjelaskan secara diskriptif gejala atau fenomena politik yang terkait dengan berbagai aspek pembangunan politik di era reformasi. Untuk selanjutnya dilakukan analisis terhadap aspek-aspek pembangunan politik seperti aspek ideologi, partai politik, demokrasi dan lain-lain dengan pendekatan metode kualitatif. Adapun metode kualitatif adalah instrumen analisis untuk menjelaskan setiap fenomena secara mendalam dengan penjabaran secara rinci dan sistematis, melalui hasil observasi yang berdasarkan sumber informasi yang akurat dari nara sumber kunci. Informasi yang di gali meliputi beberapa persoalan yang terkait dengan kajian "politik kontemporer" di Indonesia pada masa reformasi yang antara lain meliputi; desain atau bangunan "sistem politik demokrasi", pelaksanaan demokrasi langsung dalam pemilu presiden, gubernur dan bupati/walikota, ideologi politik,

partai politik, hubungan kelembagaan politik serta peran militer di era reformasi. Sumber informasi yang diperoleh antara lain dari; pengamatan langsung di lapangan terhadap beberapa masalah seperti praktek demokrasi langsung pemilukada, pemilu legislatif. Sedangkan informasi yang lain yaitu dari media massa, berita berita menarik yang akan dijadikan topik studi kasus pada buku ini, hasil diskusi terbatas dengan para pakar, mengikuti diskusi atau seminar yang relevan dengan topik buku ini sebagai informasi pembanding serta studi kepustakaan.

Permasalahan yang diungkapkan di atas pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya pemerintah di era reformasi melakukan "pembangunan politik" antara lain yang meliputi; konsolidasi sistem kepartaian, memantapkan sistem pemilu, membangun kehidupan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat, memantapkan sistem pemerintahan presidensial, memantapkan NKRI serta memantapkan ideologi bangsa dan negara yaitu Pancasila.

Selanjutnya kajian politik akan dilengkapi dengan konsep dan teori politik sebagai landasan dalam penulisan ilmiah. Di samping itu beberapa topik yang termuat dalam bab empat sebagian diambil dari artikel penulis yang pernah di muat di beberapa media massa maupun media *on line*. Adapun yang dimaksud "Potret Buram Politik Indonesia", menjadi judul buku, yaitu sebagai upaya menggambarkan kondisi politik yang cenderung mengalami disorientasi, anomali dan menunjukkan kondisi yang kurang menggembirakan dalam mewujudkan stabilitas politik dan pemerintahan. Desain sistem politik yang dibangun arahnya belum jelas dan secara kasus per kasus justru kurang mendukung iklim yang kondusif terhadap kelancaran pembangunan ekonomi. Bahkan desain pembangunan sistem politik di Indonesia memiliki potensi yang cederung dapat menghancurkan negara dan bangsanya. Indikator dari pernyataan di atas yaitu terjadinya konflik yang semakin massif baik di tingkat suprastruktur maupun di tingkat infrastruktur politik.

Mengingat judul tersebut merupakan bahasa sehari hari yang sering digunakan untuk memberikan gambaran yang kurang jelas, kurang prospektif dan membingungkan, maka boleh jadi "judul" tersebut bisa sama dengan yang ditulis oleh orang lain. Walaupun kemungkinan ada kesamaan judul, diharapkan memiliki perbedaan yang signifikan terutama pendekatan konsep dan teori, aspek-aspek yang dibahas serta metode penulisan dan lain-lain. Adapun sebagai kata kunci yaitu: teori politik, sistem politik, partai politik, ideologi, demokrasi, pemilu dan militer.

# Bab 2

## Hubungan Ideologi dan Partai Politik

Melakukan kajian tentang relasi antara "politik, ideologi dan partai politik, merupakan konsep yang inheren, artinya bahwa ketiga konsep tersebut pada hakekatnya sebagai "simbiose mutualistis". Dalam pembahasan "politik" terkait dengan aspek "kekuasaan, negara, kebijakan dan pengambilan keputusan", dalam prakteknya mengandung implikasi terhadap masyarakat luas baik yang positif dan negatif. Untuk itu dalam kegiatan "politik"sehari-hari, yang terkait dengan kewenangan terhadap pengendalian pemerintahan, kegiatan "politik praktis" dilakukan oleh "partai politik". Secara umum pemahaman tentang "partai politik" adalah "suatu organisasi yang di dalamnya terdiri dari elit-elit politik yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan pemerintahan, sesuai dengan aturan yang berlaku dan mereka harus bersaing dengan kelompok-kelompok lain atau partai politik sebagai kontestan dalam pemilihan umum". Mengingat eksistensi partai politik sebagai sebuah organisasi selalu akan berinteraksi dengan masyarakat luas, maka diperlukan tatanan nilai-nilai yang menyertainya supaya kehidupan masyarakat tercipta lebih teratur, tertib, dan stabil, terintegrasi, sesuai dengan cita-cita serta tujuan masyarakat dalam suatu wilayah yang menjadi lingkungan komunitasnya. Dalam komunitas besar lazim disebut dengan "negara", sedang salah satu prasyarat mutlak sebagai awal mendirikan negara yaitu harus dilandasi oleh "suatu dasar negara" yaitu disebut "ideologi negara". Adapun "ideologi" mengandung makna berkenaan dengan cita-cita luhur yang menjadi keinginan masyarakat suatu bangsa dan atau negara sebagai arah, pedoman dan jalan dalam menuju kehidupan masyarakat yang damai, merdeka, adil dan makmur serta sejahtera yang akan menjadi dasar dan tujuan negara.

Sebagaimana diketahui bahwa negara yang menganut paham "demokrasi" maka salah satu prasyarat yang harus dipenuhi adalah adanya partai politik yang jumlahnya lebih dari satu. Dalam suatu negara yang demokratis, arena kontestasi antar partai politik akan terjadi pada situasi yang dinamis. Bagi partai politik yang mendapat dukungan publik yang terbesar pada kegiatan "pemilu" maka dapat dipastikan akan memiliki peran yang besar dalam mengendalikan dan memimpin pemerintahan. Seperti disampaikan Miriam Budiarjo (1977); partai politik adalah kelompok manusia terorganisir yang anggotanya sedikit banyak mempunyai orientasi, nilai-nilai serta cita-cita yang sama dan mempunyai tujuan yang sama untuk memperoleh kekuasaan politik serta mempertahankannya guna melaksanakan program yang telah ditetapkannya. Pada umumnya suatu partai politik yang mendapat dukungan masyarakat luas dikarenakan tertarik terhadap ideologi yang menjadi "platform" partai politik tersebut. Walaupun trend dewasa ini perubahan tata nilai dalam masyarakat cenderung pragmatis, berdampak terhadap eksistensi suatu "ideologi". Artinya ideologi hanya menjadi etalase yang kurang menjadi dasar filosofis dalam berpikir maupun bertindak. Kecederungan yang lebih menguat para elit politik terjebak oleh perilaku

pragmatis di akibatkan pengaruh materialism. Secara teoritis sebenarnya suatu partai politik yang masih eksis mendapat dukungan masyarakat luas, dalam waktu yang lama, mencerminkan kemampuan partai politik tersebut mampu memelihara dan menjaga ideologi tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Alfian (1980); bertahannya suatu ideologisampai sepanjang masa disebabkan para pendukungnya mampu menjaga dan memelihara serta mengembangkan tiga (3) dimensi yaitu "dimensi realitas, dimensi idealisme dan dimensi fleksibilitas".

## 2.1 BEBERAPA DIMENSI IDEOLOGI

Sepanjang sejarah kehidupan manusia di dunia pada hakekatnya telah ada sistem nilai yang mengaturnya.Sistem nilai tersebut biasanya bersumber dari agama, filsafat hidup masyarakat setempat, atau nilai-nilai yang bersifat turun-temurun dan berdasarkan kekuatan pemikiran manusia. Dalam perjalanannya tata nilai tersebut mengalami pasang surut atau dinamika di dalam mempertahankan eksistensi ideologi di tengah perubahan yang serba cepat. Sistem nilai atau tata nilai yang menjadi cita-cita dalam masyarakat mampu bertahan lama atau tidak tergantung sejauh mana para penganut ideologi atau para ideolog menjaga dan memelihara keseimbangan beberapa dimensi ideologi yaitu sebagai berikut;

### 2.1.1 Dimensi Realita

Dimensi realita suatu ideologi yaitu "kemampuan untuk mencerminkan realita yang hidup dalam masyarakat dimana ia muncul untuk pertama kalinya, paling kurang realita pada saat kelahirannya. Dengan perkataan lain ideologi merupakan gambaran tentang sejauhmana suatu masyarakat berhasil memahami dirinya sendiri. Dengan demikian daya tahan suatu ideologi sangat tergantung pada tinggi rendahnya kemampuan intelektual mereka yang melahirkannya dalam meneliti dan menganalisis masyarakat. Makna yang penting dari dimensi "realita" adalah kemampuan para ideologmengungkapkan keadaan realitas yang menjadi keinginan mendasar masyarakat kedalam rumusan nilai-nilai dan cita-cita yang mampu merefleksikan dalam gelombang kegiatan kehidupan manusia sehari-hari dalam upaya memperbaiki atau meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsanya. Realitas kehidupan masyarakat sudah barang tentu sangat dinamis dan kemungkinan terjadi perubahan masyarakat (*social change*), yang mampu merubah terhadap tata nilai dan juga cita-cita yang semula menjadi pegangan atau pedoman. Oleh sebab itu suatu ideologi yang memiliki eksistensi tinggi dan mampu *survive* atau bertahan lama jika mampu mengikuti secara seksama dimensi realita yang terjadi di lingkungan dimana ideologi

itu tumbuh. Misalnya realitas masyarakat Indonesia sebagian besar masih hidup di pedesaan dan mata pencaharian di sektor pertanian dan sebagian besar yang lain hidup di pinggiran pantai yang mata pencahariannya adalah sebagai "nelayan". Kedua komunitas masyarakat tersebut memiliki populasi yang terbesar dan sebagian besar mereka berpendidikan rendah serta taraf hidupnya masih berada pada kategori miskin. Oleh sebab itu ketika Indonesia berdiri sebagai sebuah negara yang berdaulat dan para pendiri negara menetapkan "falsafah hidup bangsa dan ideologi negara adalah "Pancasila" pada hakekatnya telah mencerminkan realitas kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai bangsa timur karakteristiknya memiliki sifat religius yang tinggi dan serta pandangan kuat yang bersifat supernatural maka dicerminkan dalam sila ketuhanan yang maha esa. Masyarakat Indonesia yang pada dasarnya memiliki sopan santun yang kuat, tenggang rasa yang tinggi maka dicerminkan dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Demikian pula masyarakat Indonesia memiliki jiwa gotong-royong dan solidaritas yang tinggi di tengah keragaman dan kemajemukan masyarakat Indonesia maka dicerminkan dalam "sila persatuan Indonesia". Selain dari pada itu taraf hidup dan pendidikan masyarakat yang masih relatif rendah serta belum meratanya cara berpikir logis dan rasional masyarakat Indonesia maka dicerminkan dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dengan demikian suatu keharusan bahwa sistem perwakilan tersebut mensyaratkan bagi para wakil rakyat memiliki sifat yang bijaksana dengan dibimbing oleh kebenaran yang hakiki. Oleh Sebab itu menjadi wakil rakyat pada masa itu terutama era pasca kemerdekaan mencerminkan sosok negarawan yang kuat. Sebagai sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", mencerminkan komitmen negara bahwa keadilan sosial harus ditegakan. Sebab pertumbuhan ekonomi yang baik harus di ikuti oleh tindakan pemerintah untuk membagi kekayaan negara secara adil kepada setiap warga negara. Ideologi Pancasila merupakan cita-cita atau keinginan rakyat yang sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat Indonesia. Jika para penyelenggara negara tidak menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman kebijakan negara, maka cita-cita yang realistis tersebut boleh jadi akan sulit dilaksanakan.

Penjelasan tersebut di atas dapat diwujudkan dalam keserasian dan relevansi bangunan sebuah ideologi partai politik. Sebab partai politik memiliki peran dan fungsi mengendalikan pemerintahan. Oleh sebab itu jika Pancasila menjadi dasar perjuangan dan pergerakan partai politik mencerminkan realita keinginan masyarakat dan bangsa Indonesia. Berdasarkan kondisi realitas kehidupan masyarakat sejarah tumbuhnya basis ideologi, lahir beberapa partai politik besar antara lain; Partai Nasional Indonesia (PNI) yang lebih menekankan perjuangan dengan basis "sila Persatuan Indonesia dan Kerakyatan serta Keadilan Sosial". Partai Masyumi dan Partai NU serta Partai Kristen

Indonesia dan Partai Katholik, berbasis pada sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" yakni memperjuangkan cita-cita kehidupan masyarakat Indonesia sesuai dengan syariah agama yang diakui dalam konstitusi negara. Demikian pula partai-partai yang pernah ada misalnya PKI, Murba, IPKI, PSI, dan lain-lain juga berorientasi terhadap cita-cita perjuangan yang sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat Indonesia.

Adapun perkembangan ideologi pada masa Orde Baru mengalami perubahan kebijakan yang signifikan terhadap upaya disamping membatasi jumlah partai politik juga memaksakan secara tersurat semua partai politik harus mencantumkan "Pancasila" sebagai dasar ideologi partai politik yang sangat terkenal dengan sebutan "Azas Tunggal". Pada era reformasi proses demokratisasi telah bergulir mulai tahun 1998 lahir ratusan partai politik dengan berbagai macam warna dan mewarnai masing-masing mengusung *platform* cita-cita perjuangannya. Meskipun dasar ideologi yang di usung partai-partai baru tetap hampir sama yaitu "nasionalisme, sosialisme, liberal kapitalisme, Islam. Namun para pendiri partai politik membuat *trade mark* yang sedikit berbeda sebagai *platform* sesuai suasana perkembangan era reformasi tersebut yakni lebih bersifat pragmatis. Adapun *platform* partai-partai politik yang saat ini memiliki kursi di "Legislatif" dapat dikategorisasi yaitu pertama; Golkar, PDIP dan Partai Demokrat (PD) berhaluan "nasionalisme sekuler, ketiga partai tersebut pernah memimpin pemerintahan, namun ketika berkuasa, dalam menjalankan sistem ekonominya tidak terlepas dari pengaruh liberal kapitalisme. PKPI sebagai parti baru dalam haluan ideologinya lebih dekat dengan nasionalisme-sekuler. Kedua; PAN dan PKB sebagai partai inklusif yang menerima ideologi pluralism, namun sebagian besar basis massa Islam, haluan ideologinya disebut "nasionalisme religius". Kedua partai ini termasuk anggota gabungan partai koalisi dalam kabinet koalisi hasil pemilu tahun 2009. Ketiga; partai Gerindra, Hanura dan partai NasDem haluan ideologinya disebut "sosialisme-demokrasi". Partai Gerindra dan Hanura tidak termasuk dalam keanggotaan gabungan partai koalisi pemerintahan hasil pemilu tahun 2009. Sedang partai NasDem partai baru yang akan mengikuti pemilu tahun 2014. Keempat; partai PKS dan PPP, haluan ideologinya disebut "Islamisme" karena mengusung "Islam" sebagai dasar perjuangan ideologinya. Kedua partai tersebut termasuk sebagai anggota gabungan partai koalisi dalam pemerintahan SBY.

Berdasarkan penjelasan dimensi realitas dapat di simpulkan bahwa pembentukan partai politik baru pada umumnya telah mencerminkan realita platform ideologi yang menjadi dasar perjuangaan. Ciri dan karakteristik ideologi secara representatif muaranya pada bangunan ideologi negara yaitu "Pancasila". Misalnya beberapa partai politik yang dapat di golongkan pertama; "nasionalisme" mewakili cita-cita sila ketiga yaitu "persatuan". Kedua "sosialisme demokrasi" mewakili cita-cita sila keempat dan kelima. Ketiga; ideologi agama terutama "Islam" mewakili cita-cita sila pertama dan

kedua. Penggolongan karakteristik ideologi tersebut tidak bertujuan melakukan pengkotak-kotakan sila-sila di dalam Pancasila, karena dalam implementasinya tetap akan mencerminkan keseluruhan sila-sila sebagai satu kesatuaan yang tidak terpisahkan. Meskipun secara realitas politik, siapapun partai politik yang memegang kendali kekuasaan pemerintahan tidak terlepas dari kuatnya pengaruh ideologi "liberal kapitalisme" yang dewasa ini sudah menjelma menjadi "neo liberalism". Beberapa ciri kuatnya pengaruh ideologi tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu pertama; di bidang politik, menerapkan sistem demokrasi liberal. Kedua; di bidang ekonomi menganut pasar bebas, devisa bebas, privatisasi, dan liberalisasi di bidang ekonomi. Ketiga; di bidang sosial; kecenderungan terjadi ketimpangan sosial antara yang kaya dan miskin semakin lebar. Keempat; di bidang kebudayaan; pengaruh modernism barat semakin kuat, misalnya nilai-nilai hedonism, materialism, konsumerisme, individualism, sudah melanda masyarakat baik lapisan atas maupun bawah.

### 2.1.2 Dimensi Idealisme

Dimensi idealisme dari suatu ideologi yaitu kadar atau kualitas idealisme yang terkandung di dalam nilai-nilai dasarnya. Kualitas idealisme itu menentukan kemampuan ideologi dalam memberi harapan kepada berbagai kelompok dan golongan yang ada dalam masyarakat untuk mampu membina kehidupan bersama secara lebih baik dan untuk membangun suatu masa depan yang cerah. Dalam hal ini ideologi dianggap sebagai penggerak yang membangkitkan hasrat anggota-anggota masyarakat untuk hidup bersama dan bersatu, mendorong partisipasi mereka ke dalam usaha-usaha bersama dalam kegiatan pembangunan. Namun yang perlu dicatat bahwa idealisme harus dapat dirasakan dan dianggap sebagai cita-cita yang wajar dan dapat dijangkau atau dicapai bukan suatu cita-cita yang utopis atau angan-angan yang sangat kabur dan tidak dapat di jangkau. Untuk itu kemampuan suatu ideologi dalam dimensi idealisme sangat tergantung kepada kemampuan untuk melihat ada atau tidaknya hubungan timbal-balik antara idealisme dengan realitas yang ada dalam masyarakat. Dimensi idealisme sudah barang tentu dimiliki dan menjadi cita-cita bagi setiap partai politik misalnya Golkar, PDIP dan PD bercita-cita memperjuangkan terwujudnya masyarakat Indonesia yang "majemuk atau prulalistik" secara damai dan sejahtera dalam kehidupannya. Demikian pula PAN dan PKB bercita-cita memperjuangkan masyarakat Indonesia yang "majemuk atau plural" menjadikan masyarakat yang sejahtera kehidupannya melalui pembinaan nilai-nilai agama. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan manusia lahir dan batin atau dengan kata lain membangun manusia Indonesia seutuhnya sudah barang tentu tidak mudah untuk mencapainya. Keseimbangan yang sempurna antara kehidupan lahir

dan batin merupakan cita-cita setiap orang, namun realitas kehidupan yang penuh dengan dinamika baik pergulatan antar aspek ekonomi, sosial dan politik serta nilai-nilai budaya masyarakat dalam interaksinya memiliki dampak terhadap kualitas posisi keseimbangan tersebut di atas. Oleh sebab itu ketika terjadi distorsi aspek ekonomi dan politik apalagi ditambah dengan kerusakan tatanan nilai-nilai masyarakat dikarenakan pengaruh dari luar, maka sudah barang tentu cita-cita membangun manusia seutuhnya dipastikan mengalami kegagalan. Misalnya kondisi masyarakat Indonesia saat ini sedang mengalami "krisis moral" dengan indikasi tindakan KKN yang dilakukan oleh tidak hanya para pejabat publik dan aparatur birokrasi serta para politisi tetapi juga sudah merambah ke dalam kalangan masyarakat luas. Penjelasan di atas memberikan ilustrasi bahwa meskipun membangun suatu cita-cita yang memiliki idealisme tinggi akan menghadapi kendala yang kompleks, namun ruh suatu ideologi tetap harus mengandung "dimensi idealisme" sebagai "motivasi dan energi serta sumber inspirasi" dalam perjuangan mewujudkan tercapainya kehidupan setiap warga negara yang lebih baik. Dengan demikian dalam konteks peran partai politik yang memiliki fungsi mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan baik dari posisi sebagai pejabat publik di lembaga legeslatif dan eksekutif serta yudikatif maka sangat berkepentingan untuk memperjuangkan dimensi idealisme tersebut yang telah menjadi *platform* ideologi partai politik masing-masing.

### 2.1.3 Dimensi Fleksibilitas

Dimensi fleksibilitas mencerminkan kemampuan dalam mempengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan atau perkembangan masyarakat. Mepengaruhi berarti ikut mewarnai proses perkembangan itu, sedangkan menyesuaikan diri berarti masyarakat berhasil menemukan interpretasi terhadap nilai-nilai dasar ideologi sesuai dengan realita-realita terbaru yang muncul. Adanya fleksibilitas dalam suatu ideologi membuka jalan bagi intelektual mereka guna mencari atau meneliti interpretasi interpretasi baru yang mungkin bisa diberikan terhadap nilai-nilai dasar ideologi itu. Oleh sebab itu mungkin mereka berhasil menemukan relevansi dari padanya sebagai idealisme yang wajar dalam realitas baru dimana mereka berada. Dimensi fleksibilitas ini sesungguhnya merupakan *epicentrum* yang mampu menjembatani antara dimensi realita dengan dimensi idealisme. Artinya bahwa "tatanan nilai-nilai dasar" yang menjadi sumber inspirasi cita-cita yang memiliki idealisme tinggi akan tetap menjadi landasan moral, cita-cita, nilai, norma, standard dan kriteria. Sedangkan dimensi fleksibilitas berada pada posisi taktik dan strategi pada tataran implementasi dilapangan harus sesuai atau sedapat mungkin tidak jauh keluar dari koridor nilai, norma, standard dan kriteria yang menjadi dasar dan landasan perjuangan tersebut. Misalnya idealisme membangun "ekonomi kerakyatan," bahwa semua sumber-sumber

produksi mampu menggerakan aktifitas seluruh komponen rakyat. Setiap warga negara dari semua lapisan masyarakat dapat melakukan kegiatan ekonomi mulai dari "hulu" yaitu eksplorasi sumber bahan baku, melibatkan semua lapisan masyarakat. Sedangkan kegiatan ekonomi mulai dari "hilir," yakni distribusi penjualan skala makro sampai ke skala mikro, tetap melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Demikian pula dalam pembagian kerja yang adil dan merata tanpa diskriminasi. Artinya akses kekuasaan ekonomi dan politik di lakukan dengan demokratis, supaya mampu mengendalikan dan menghindari kearah usaha usaha monopolitis maupun oligopolitis.

Dewasa ini semua partai politik berlomba menarik perhatian masyarakat dengan "jargon" ekonomi kerakyatan. Meskipun pada kenyataanya yang diusung tetap ekonomi liberal kapitalistik. Oleh sebab itu bagi partai politik yang mengklaim berideologi "ekonomi kerakayatan", dimensi fleksibilitas menjadi strategi perjuangan agar mendapatkan dukungan rakyat yang lebih banyak. Mewujudkan "ekonomi kerakyatan" sebagai dasar perjuangan yang idealistik di tengah dimensi realistik yaitu "hegemoni" ekonomi liberal kapitalistik, maka melaksanakan "ekonomi kerakyatan" sulit terwujud. Boleh jadi partai politik yang mengusung idealisme "ekonomi kerakyatan", dihadapkan pada situasi dan kondisi kehidupan masyarakat yang telah terkontaminasi pola dan gaya kehidupan masyarakat liberal-kapitalistik. Misalnya pola dan gaya hidup konsumerisme, hedonism, individualisme, materialism. Strategi dimensi fleksibilitas dapat digunakan oleh setiap partai politik yang mengusung "ekonomi kerakyatan". Membangun tatanan ekonomi kerakayatanyaitu memperkuat basis kekuasaan ekonomi dan politik yang mampu menjabarkan keinginan dan kebutuhan masyarakat dengan tepat. Untuk itu dimensi fleksibilitas tersebut dapat dijalankan dengan baik jika diterapkan strategi yang tepat tanpa harus meninggalkan dimensi idealisme dan dimensi realism.

## 2.2 BEBERAPA PEMIKIRAN IDEOLOGI-IDEOLOGI BESAR DUNIA

Dalam perjalanan sejarah dunia pada beberapa abad yang lalu, tidak terlepas dari tata pergaulan dunia yang diwarnai oleh persinggungan ideologi. Secara realitas persinggungan antar ideologi sering menimbulkan ketegangan antar negara. Ideologi besar dunia antara "komunisme" dengan "liberal kapitalisme", berpengaruh besar terhadap konstelasi kehidupan masyarakat dunia yaitu sejak PD I tahun 1918 dan PD II tahun 1945, antara kekuatan besar negara Uni Soviet dan Amerika Serikat dengan sekutunya. Bahkan sampai abad 21 pertarungan ideologi tersebut masih terus berlangsung dan sempat diabadikan dalam sebuah karya yang monumental oleh *Fukuyama* (1994) dalam bukunya "*The End History and The Last Man*". Buku

ini pada intinya menjelaskan bahwa sejarah berakhirnya manusia ketika kekalahan atau matinya "ideologi komunis-sosialisme dan dimenangkan oleh ideologi "liberal kapiralisme". Dunia saat ini dikuasai oleh ideologi "liberal kapitalisme". Walaupun kecenderungan saat ini ideologi liberal kapitalisme mulai mengalami kemunduran bidang ekonominya di beberapa Negara Eropa dan Amerka Serikat. Kehebatan ideologi tersebut secara realita mampu bertahan cukup lama lebih dari setengah abad. Bahkan liberal kapitalsme sampai saat ini mampu menguasai ekonomi dunia di bawah kendali Amerika Serikat. Kedua ideologi besar antara komunisme-sosialisme dan liberalisme-kapitalisme, dalam catatan sejarah pada waktu itu menjadi instrument konflik global kedalam perang dunia (PD) I dimulai tahun 1918 dan PD II mulai tahun 1942 sampai dengan 1945. Selanjutnya PD III sesungguhnya telah di mulai sejak tahun 1970 an sampai dengan saat ini dalam bentuk yang berbeda yaitu pertama; perang pola pemikiran. Kedua; perang terhadap penghancuran di bidang kerohanian, seperti narkoba, pornografi dan sex bebas. Ketiga; perang dalam bidang ekonomi dengan sebutan era globalisasi dan pasar bebas yang telah menaklukan dunia ketiga seperti di Amerika Latin, Afrika dan sebagian Asia termasuk Indonesia sebagai arena pasar barang barang produk negara maju. Keempat; terjadi perang total seperti terjadi *genocide* di Bosnia, perang di Irak, Afganistan dan krisis politk yang menjurus perang saudara di Mesir, Libya, Suriah, di Indonesia terjadinya konflik di Ambon, Poso dan Kalimantan.

Pada masa pasca PD II tercipta ketegangan antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat yang disebut era perang dingin. Uni Soviet berperan menjalankan tugas mengawal ideologi komunis dan Yugoslavia mengawal ideologi sosialis menjadi blok kiri sedangkan Amerika Serikat dan sekutunya menjalankan tugas mengawal ideologi liberal-kapitalis. Pada masa itu skenario politik global menurut *Richard W. Mansbach dan Kristen L. Raffetely*, (*2011*) diciptakan politik *detente* dengan tujuan memperluas konflik dan memperluas hegemoni. Negara-negara yang menjadi korban politik detente di kawasan Asia yaitu Korea terbelah menjadi Korea utara dan Korea Selatan, perang saudara di Kamboja, Vietnam, China dan Taiwan termasuk di Indonesia. Namun jika di cermati antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat hampir tidak pernah terjadi perang secara terbuka dan langsung saling berhadapan. Justru yang terjadi dibelahan dunia adalah perang saudara akibat pengaruh perbedaan kedua ideologi yang ekstrim tersebut. Contoh di Asia yaitu di Vietnam, Kamboja, Indonesia dan Afrika serta Cina. Namun jika di telusuri lebih mendalam kehebatan kedua ideologi di lihat dari pencetus ideologi tersebut yaitu ideologi "komunisme" bersumber dari buku "manifesto komunism" dan Das capital karya Karl Marx (1818-1884) seorang sosiolog keturunan rabbi Yahudi. Demikian juga ideologi liberal kapitalisme bersumber dari buku "*The Wealth Of Nations* " karya Adam Smith (1723-1790) seorang ahli ekonomi

juga seorang keturunan Yahudi. Apakah kedua pencetus ideologi tersebut membawa misi yang memiliki tujuan menciptakan peta konflik global yang telah dipersiapkan secara sistimatis. Berdasarkan penjelasan dan pertanyaan tersebut, secara singkat dapat di uraikan bahwa dengan terjadinya konflik global di berbagai belahan dunia mulai dari PD I dan PD II dan PD III sampai dengan saat ini, boleh jadi konflik global tersebut pengendalinya bukan Amerika Serikat dan Uni Soviet (Sekarang Rusia) tetapi bangsa Yahudi yang berambisi sejak lama ingin menguasai dunia. Ambisi tersebut di perjuangkan melalui organisasi Zionis internasional yang didirikan oleh Theodore Herlz tahun 1897 di Basle, Swiss melalui garis perjuangan yang tertuang dalam protokol zionisme dan di dukung oleh gerakan rahasia yang disebut *Freemasonry* dan *Illuminati*.

Untuk menambah wawasan pengetahuan tentang ideologi akan diuraikan secara singkat macam-macam ideologi yang pernah dianut oleh suatu negara. Beberapa ideologi yang pernah dan masih berkembang di berbagai negara di dunia dan terutama di Indonesia yaitu; "*liberal-kapitalisme, komunisme, sosialisme, nasionalisme, Islamisme dan marhaenisme*". Secara garis besar konsep pemikiran ideologi tersebut yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 2.2.1 Liberal-Kapitalisme

Dalam pemikiran ideologi liberal-kapitalisme menciptakan terwujudnya suatu masyarakat yang bebas dan mampu mengatur dirinya sendiri serta berkembang secara kreatif, inovatif dan mandiri dengan diberikannya jaminan perlindungan secara penuh terhadap hak hak setiap individu dalam mengatur kehidupannya. Dalam ideologi liberal kapitalisme dalam mengatur kehidupan ekonomi berdasarkan pasar bebas dengan landasan persaingan sempurna dan melarang monopoli dan oligopoli baik oleh pemerintah maupun sektor swasta. Sedangkan pengaturan kehidupan politik berdasarkan prinsip demokrasi dan sistem pemerintahan yang dianut pada umumnya sistem pemerintahan parlementer, meskipun beberapa negara tertentu menganut sistem presidentil seperti Amerika Serikat dan Indonesia. Dalam kehidupan sosial kepemilikan kekayaan individu warga negara tidak dibatasi dan interaksi sosial berlandasan nilai-nilai kebebasan dan kemerdekaan individu serta persamaan. Di samping itu hak asasi manusia sangat dijunjung tinggi. Dalam konteks Indonesia, ideologi Liberal Kapitalisme mulai menancapkan pengaruhnya di bawa oleh rezim yang berkuasa sejak Indonesia merdeka tahun 1945 s/d 1959 yang pertama kali diusung oleh Perdana Menteri Syahrirdari Partai Sosialis. Pada era demokrasi terpimpin tahun 1959 s/d 1966 di bawah kepemimpinan Ir. Soekarno, pengaruh ideologi Liberal-Kapitalisme mulai direm atau dikurangi pengaruhnya. Presiden Soekarno mencoba

mengendalikan ideologi ini dengan upaya membangun pengaruh melalui ideologi gabungan antara nasionalis, agama, dan komunis yang dikenal dengan sebutan "Nasakom". Ideologi Nasakom gagal dijalankan seiring kejatuhan rezim Soekarno dengan peritiwa G 30 S PKI tahun 1966. Ketika pergantian rezim Soekarno ke rezim Soeharto tahun 1967 maka sejak saat itu yang disebut Rezim Orde Baru mulai memberi peluang untuk memperkokoh pengaruh ideologi Liberal Kapitalisme terutama di bidang ekonomi dengan segala implikasinya. Kuatnya ideologi Liberal-Kapitalisme pada era rezim Soeharto didukung oleh tiga pilar kekuatan politik yaitu Golkar, militer, dan birokrasi. Meskipun pada era Orde Baru sistem demokrasi menggunakan nama "Demokrasi Pancasila", akan tetapi ekonomi Pancasila yang digagas "Mubyarto" tidak bisa dijalankan.

Kedua pemimpin tersebut mengalami nasib yang sama dalam mengakhiri kekuasaannya. Perbedaan kejatuhan kedua rezim adalah jika Soekarno dijatuhkan karena kebijakan politik dan ekonomi ketika berkuasa tahun 1959 s/d 1966 dianggap melawan dan menentang ideologi Liberal Kapitalisme atau Barat. Sedangkan Soeharto jatuh dari singgasana kekuasaan karena dianggap tugasnya selesai dengan baik menancapkan pengaruh kekuatan ideologi Liberal Kapitalisme di bumi Indonesia. Kegagalan ideologi Liberal Kapitalisme di Indonesia yang tidak bisa dipungkiri yaitu terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin melebar dan terjadi proses pemiskinan yang dibiarkan berlangsung. Pergantian rezim Soeharto ke rezim baru di era reformasi tahun 1998 s/d sekarang dalam konteks ideologi Liberal Kapitalisme pada kenyataannya justru semakin bersimbiose mutualistis dengan para penguasa rezim orde reformasi tersebut. Gurita pengaruh Liberal Kapitalisme tidak hanya pada aspek ekonomi saja tapi meluas kepada aspek politik dan sosial budaya.Bahkan telah melakukan metamorfosa dalam bentuk yang baru, oleh berbagai kalangan disebut Neo Liberalisme. Rezim penguasa era reformasi selama tiga periode kekuasaan dari hasil pemilu tahun 1999, 2004, 2009 yang berakhir tahun 2014, melanjutkan ideologi Neo Liberalisme. Indikasi kuatnya pengaruh Neo Liberalisme yaitu: pertama, keikutsertaan Indonesia dalam pasar bebas menjadi prioritas dalam kebijakan ekonominya; kedua, ketergantungan terhadap kekuatan ekonomi global; ketiga, Indonesia sudah menjadi pasar barang-barang produk luar negeri melalui perdagangan ritel seperti Alfamart, Indomaret, dan sejenisnya di seluruh pelosok tanah air; keempat, pengelolaan sumber daya alam dikuasai kekuatan ekonomi asing; kelima, kebijakan melakukan privatisasi/ peluang memberikan privatisasi terhadap badan milik negara melalui perubahan bentuk-bentuk BUMN mulai dari jawatan berubah menjadi perum kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT). Perubahan/pergeseran fungsi sektor publik menjadi barang komoditi yang penggunaan dan pemanfaatannya melalui mekanisme pasar memang telah merugikan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Cengkeraman

pengaruh Neo Liberalisme di era reformasi karena di topang oleh rezim penguasa yang didukung kekuatan politik pemenang pemilu yaitu Partai Demokrat dengan para pendukung pemerintah koalisinya yakni Partai Golkar dan partai Islam seperti PPP dan PKS serta partai yang berbasis massa Islam yaitu PAN dan PKB.

Menghadapi pemilu 2014, siapapun pemenang pada pesta demokrasi tersebut, baik partai politik maupun presiden yang terpilih, ketika menjalankan roda pemerintahan baru pada kabinet tahun 2014 dipastikan pengaruh gurita neo liberalisme masih tetap akan kuat. Implikasinya terhadap kehidupan masyarakat, terutama masyarakat marjinal semakin mengalami kesulitan mengikuti pola kehidupan yang serba mahal dalam memenuhi kebutuhan dasar. Indikasi yang lain belum akan berubah secara signifikan dalam perbaikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, *recovery* ekonomi, stabilitas politik dan penegakan hukum. Janji kampanye oleh para elit politik yang ingin berjuang untuk rakyat, pro rakyat, wong cilik nampaknya akan menghadapi kendala yang tidak mudah. Kecuali partai politik pemenang pemilu beserta presiden terpilihnya mampu melakukan revolusi paradigma, meluruskan ideologi yang sesuai dengan konstitusi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menuju tatanan negara yang berdaulat dan berdikari secara ekonomi dan politik.

### 2.2.2 Komunisme

Dalam pemikiran ideologi "komunisme" yaitu mencita-citakan suatu kehidupan masyarakat tanpa kelas yakni sama rata, sama rasa dan sama bahagia dengan ciri perjuangan kelas yaitu pertentangan kelas antara kaum borjuis dengan kaum proletarserta ciri-ciri pergerakannya adalah "radikal revolusional". Ideologi komunisme prinsip dasarnya sebagai antitesa dari ideologi liberal kapitalisme. Artinya nilai-nilai kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya berkebalikan dengan liberal kapitalisme. Kehidupan ekonomi diatur oleh negara, secara sentralistik dan juga seluruh kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara atau *public company*. Pengaturan dalam kehidupan politik, negara hanya memperbolehkan berdirinya 1 (satu) partai politik yaitu partai komunis, sistem pemerintahan sentralistik dan otoriter. Ideologi komunisme yang berkembang di dunia berdasarkan ajaran dari *Karl Marxsebagai mana telah disebutkan di atas* melalui buku karangannya yaitu; *Das kapital* dan *Manifesto Comunism*. Ideologi komunisme pertama kali diterapkan di Kekaisaran Rusia pada tahun 1918 yang sebagian besar penduduknya beragama Katolik. Ideolog terbesar di Rusia yaitu *Lenin* yang diteruskan oleh *Stalin* dan *Krushev*. Dalam perkembangannya kedua tokoh komunis tersebut mampu melakukan ekspansi ideologi di beberapa negara sekitarnya seperti Georgia, Checnya dan lain-lain yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Ekspansi ideologi komunis tersebut

berhasil menguasai beberapa wilayah sekitar sehingga mampu membentuk negara serikat yang diberi nama Uni Soviet. Akan tetapi dalam perkembangannya sekitar tahun 1986, Uni Soviet sebagai sebuah negara uni membubarkan diri melalui gerakan "Perestorika" yang dikumandangkan oleh Gorbachev. Saat ini satu per satu negara-negara yang dulunya bekas jajahan menyatakan diri sebagai negara merdeka seperti: Georgia, Checnya.

Pengaruh ideologi Komunis di Indonesia yaitu berdirinya Partai Komunis Indonesia (PKI) pada masa orde lama. Dalam pemilu tahun 1955, PKI memperoleh dukungan rakyat sebessar 16,4% (Samsudin Haris, 2000). Dengan peristiwa G 30 S PKI tahun 1965, PKI dibubarkan oleh rezim orde baru karena keterlibatannya dalam peristiwa pemberontakan untuk melakukan kudeta pada Negara Republik Indonesia yang sah.

### 2.2.3 Sosialisme

Dalam pemikiran ideologi "sosialisme" yaitu mencita-citakan terwujudnya suatu masyarakat yang sejahtera dan kemakmuran rakyat secara merata dengan ciri "seluruh penyelenggaraan kehidupan masyarakat yang diatur dan dikendalikan oleh negara secara terpusat (sentralisasi). Faham ideologi sosialisme merupakan fragmentasi ideologi komunisme antara Stalin dan Kruschev. Kedua ideolog komunisme Rusia/ Uni Soviet berbeda pandangan dalam strategi pelaksanaan setelah faham komunisme berhasil bercokol dalam sistem negara atau sebuah bangsa. Akan tetapi prinsip dasar mengenai eksistensi negara tetap sama yaitu bahwa kekuasaan negara harus tetap terpusat (sentralistik). Negara memiliki kekuasaan yang besar sebagai pengendali baik di bidang pemerintahan, politik, ekonomi dan hukum. Namun dalam ideologi ini kepemilikan pribadi diperbolehkan dalam batas-batas tertentu.

Ideologi Sosialis di Indonesia diikuti oleh Partai Murba yang dipengaruhi oleh pemikiran Tan Malaka. Salah satu pemimpin partai Murba yang berhasil menduduki kekuasaan penting yaitu Adam Malik sebagai wakil presiden tahun 1978 s/d 1982.

### 2.2.4 Nasionalisme

Dalam pemikiran ideologi "nasionalisme" yaitu mencita-citakan suatu kehidupan masyarakat yang menjamin adanya rasa persatuan dan kesatuan secara nasional tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan. Kelahiran ideologi nasionalisme pada hakekatnya dilandasi oleh pemikiran dan ide-ide mempersatukan pandangan atau persepsi berdasarkan rasa solidaritas sebangsa dan setanah air, lahir dari negara dan bangsa yang di jajah oleh bangsa lain. Penggagas ide nasionalisme yang terkenal antara

lain *Guiseppe Mazzini* (1805-1872), seorang pemimpin revolusi Itali. Tumbuhnya semangat nasionalisme ini muncul seperti di India, Pakistan, Mesir, Indonesia dan lain-lain.

Pengaruh ideologi nasionalisme tersebut diikuti oleh beberapa partai seperti PNI walaupun nasionalisme di tubuh PNI dipengaruhi kuat oleh pemikiran Bung Karno yang disebut Marhaenisme. Pada pemilu pertama Era Orde Baru yang diikuti oleh 10 (sepulu) partai politik, salah satu diantaranya memiliki ideologi nasionalisme yaitu Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) pimpinan A.H. Nasution. Akan tetapi pada tahun 1973, Orde Baru membuat kebijakan menggabungkan kesepuluh partai politik menjadi tiga yang disebut fusi yaitu bagi aliran nasionalisme dan agama Kristen dan Katolik difusikan ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI), sedangkan aliran ideologi Islam difusikan ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan golongan fungsional yang tergabung dalam sekbar Golkar menjadi Golongan Karya.

### 2.2.5 Marhaenisme

Dalam pemikiran ideolgi "marhaenisme" yaitu mencita-citakan dan memperjuangkan nasib rakyat kecil terutama kaum tani yang tidak memiliki tanah dan modal kerja serta alat produksi, agar dapat mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Gagasan ideologi marhaenisme lahir dari ajaran Soekarno melalui bukunya yang sangat terkenal *"Di Bawah Bendera Revolusi"*. Kelahiran ideologi ini konon berawal dari nama seorang petani yaitu "marhaen" di salah satu wilayah Jawa Barat. Sebenarnya nama "marhaen" jarang ditemukan dalam identitas suku "Sunda" yang tersebar di wilayah Jawa Barat. Oleh sebab itu diskusi politik diantara para tokoh politik di era tahun 1960-an, memberikan analisis bahwa ideologi marhaenisme bersumber dari buku *"Di Bawah Bendera Revolusi"*, sedangkan isi buku tersebut banyak dipengaruhi oleh pemikiran "*Hegel, Engel dan Karl Marx*". Dalam diskusi para tokoh politik tersebut memberikan analisis yang sederhana yaitu *otak atik gathuk*, kata "marhaen" boleh jadi merupakan singkatan dari *Marxis, Hagel dan Engel*.

Ideologi Marhaenisme diklaim oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pewaris (*legecy*) yang sah menjadi landasan perjuangan partai. Tidak hanya karena ketua umum PDIP, Megawati Soekarno Putri sebagai anak kandung pencetus ideologi, tetapi juga sebagai anak kandung ideologis. Walaupun dalam catatan sejarah ketika Megawati Soekarno Putri menjadi presiden tahun 2001 s/d 2004 justru terbelenggu oleh pengaruh kekuatan neo liberalisme di sekitar kekuasaannya. Memperjuangkan ideologi marhaenisme atau yang oleh para kadernya sering dikatakan "*wong cilik*" ternyata tidak mudah di tengah konstelasi politik yang berada

di genggaman gurita neo liberalisme. Beberapa catatan kecil yang dapat dijadikan argumen bahwa ketika Megawati Soekarno Putri di puncak kekuasaan belum mampu melawan atau menentang neo liberalisme sebagaimana yang ditunjukkan ayahnya yang berkuasa penuh sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan pada tahun 1959 s/d 1966. Catatan kecil tersebut adalah: Pertama, kebijakan mengeluarkan *Realase and dischange* terhadap para pengutang bank gagal atau *bill out* pada krisis moneter tahun 1997 yang disebut BLBI yang merugikan negara jumlahnya mencapai ratusan triliun. Kedua; kebijakan melakukan penjualan kapal tanker milik Pertamina. Ketiga, penjualan saham BUMN yaitu PT. Indosat kepada pihak asing melalui "IPO". Keempat; kebijakan melakukan impor gula yang saat itu harga gula melambung sampai menembus angka dari Rp. 3.500 menjadi Rp. 10.000 yang lebih menguntungkan para spekulan ketimbang para petani tebu. Kebijakan tersebut oleh beberapa kalangan dianggap sebagai kekuatan pengaruh neo liberalisme yang masih berada di sekitar kekuasaannya.

Apakah pasca pemilu 2014, PDIP telah memenangkan pemilu legislatif dan sekaligus pemilu presiden?. Jika PDIP mampu mengendalikan pemerintahan hasil pemilu 2014, mampukah merubah haluan ideologi neo liberalisme kearah ideologinya "*wong cilik*", pro rakyat sebagai perwujudan cita-cita marhaenisme seperti yang diinginkan oleh Bung Karno. Marilah kita tunggu dengan optimis kiprah PDIP partainya *wong cilik* di masa depan dalam sistim politik Indonesia. Hasil pemilihan umum tahun 2014 berdasarkan perhitungan suara PDIP memenangkan pemilihan umum legeslatif sebesar 19% lebih. Demikian pula PDIP menetapkan calon presiden yaitu Joko Widodo alias JOKOWI saat ini masih sebagai gubernur DKI Jakarta Raya. Siapapun cawapres Jokowi tetap akan menghadapi tantangan yang berat baik dibidang ekonomi, politik, hukum dan birokrasi.

### 2.2.6 Islamisme

Dalam pemikiran ideologi "Islamisme" yaitu mencita-citakan kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, rahmat seluruh alam, damai dengan memperjuangkan nilai-nilai persaudaran dan menegakan keadilan, berdasarkan pada pedoman Al-Qur'an dan hadist. Pada dasarnya kelahiran ideologi yang berdasarkan nilai-nilai ke-Islaman berkembang di dunia berawal dari negara-negara di wilayah Timur Tengah. Sedangkan perkembangannya di Indonesia pemikiran Islam tersebut secara terorganisir melalui organisasi massa yaitu Muhammadiyah, NU dan Serikat Islam (SI) yang berdiri sebelum Indonesia merdeka yaitu muhammadiyah berdiri tahun 1912 dan NU berdiri tahun 1926.

Konsep dan pemikiran ideologi tersebut di atas bagi bangsa dan negara serta masyarakat Indonesia sejak kemerdekaan republik Indonesia pada kenyataan pernah berkembang dan dianut oleh sebagian masyarakat Indonesia. Bahkan dalam perkembangannya ideologi-ideologi tersebut terwadahi melalui partai-partai politik di Indonesia, misalnya Partai Serikat Islam, Partai NU, Partai Masyumi dan lain-lain.

Pada masa Orde Baru, partai-partai Islam tersebut difusikan ke dalam 1 (satu) partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ketika era reformasi pada tahun 1998, tumbuh dan berdiri partai-partai Islam yang jumlahnya sampai puluhan. Akan tetapi setelah melalui tiga kali pemilu yaitu tahun 1999, 2004, dan 2009, partai politik Islam yang lolos dalam *threshold* dan yang memiliki wakilnya di DPR yaitu PPP dan PKS. Sedangkan partai politik yang memiliki basis massa Islam namun memiliki ideologi atau *platform* sebagai partai yang inklusif yaitu PAN dan PKB. Menjelang pemilu tahun 2014 peserta pemilu yang berhaluan ideologi Islam bertambah satu partai politik yaitu Partai Bulan Bintang (PBB). Dengan partai-partai politik yang mengusung ideologi Islam pada pemilu 2014 hanya mampu mendapat 30%, sedang pasa masa sejarah Orde Lama partai politik Islam yaitu Masyumi dan NU mendapatkan dukungan umat Islam sebesar 39,3%. Sebagimana telah diuraikan dimuka berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2014 partai-partai Islam dan berbasis massa Islam diluar dugaan para pengamat dan hasil survei, perolehan suara justru naik. Partai politik Islam tersebut seperti PKB mendapatkan perolehan suara sebesar 9% lebih, meningkat hampir dua kali lipat, PAN meraih suara 7% lebih naik 1%, PPP mendapatkan perolehan suara 6% lebih, PKS turun relatif sedikit menjadi 6% lebih dari 7%, hanya PBB yang menurun suaranya menjadi 1,5% dan tidak lolos *electoral treshhold*. Partai politik Islam dan berbasis massa Islam tersebut berhasil meningkat menjadi 30%. Suatu pretasi yang cukup menarik perhatian para tokoh Islam ditengah kegalauan minimnya tokoh pemersatu umat Islam Indonesia. Oleh sebab itu mendorong harapan umat Islam Indonesia agar kekuatan politik Islam bangkit kembali mengambil peran dalam percaturan politik nasional. Akan tetapi para tokoh politik dari partai-partai politik Islam tersebut dihinggapi sifat paranoid dan tidak percaya diri bahwa kekuatan Islam dapat dipersatukan kembali. Secara empiristik memang dalam perjalanan sejarah Indonesia, partai politik Islam sulit dipersatukan. Misalnya dalam pembentukan pemerintahan hasil pemilihan umum legeslatif sudah dipastikan akan terjadi koalisi antar partai politik dalam pembentukan kabinet pemerintahan tersebut. Fenomena yang menarik adalah di tubuh partai-partai politik Islam terjadi konflik internal PPP dalam pengambilan keputusan koalisi oleh Ketua Umum PPP Surya Dharma Ali yang berkoalisi dengan calon presiden dari partai Gerindra. Di lain pihak tokoh partai politik Islam yang meningkat suaranya buru-buru menutup diri untuk membangun poros tengah seperti pada masa yang lalu,

dengan memberikan pernyataan cukup kontroversi yaitu "merasa kapok" bergabung dengan koalisi poros tengah. Demikian pula tokoh yang lain berpendapat bahwa ide poros tengah saat ini sudah tidak relevan karena mengurus bangsa yang besar tidak hanya dipegang oleh kelompok Islam tetapi harus ditanggung bersama dengan kelompok nasionalis dan sekuler. Tokoh politik tersebut masih memandang bahwa kekuatan politik Islam dianggap kurang rasa nasionalismenya. Pemikiran mereduksi sistem tata nilai dalam ideologi Islam tersebut boleh jadi hanya bersifat pragmatis saja. Berdasarkan trend pemikiran para tokoh Islam yang memiliki posisi penting di partai politik Islam tersebut menunjukan bahwa partai politik Islam yang memiliki 30% suara sulit diharapkan oleh umat Islam Indonesia mampu memilih presiden dikalangan tokoh umat Islam sendiri. Itulah realitas politik yang terjadi di Indonesia dengan jumlah penduduk beragama Islam sebesar 87% tidak mampu menempatkan pemimpin Islam kedalam tampuk kekuasaan sejak Indonesia berdiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Upaya politik *devide et impera* telah berhasil dengan baik dalam percaturan politik di Indonesia dan para tokoh politik Islam boleh jadi tidak menyadari hal tersebut atau menunjukan ketidakberdayaanya.

### 2.2.7 Pancasila

Konsep dan pemikiran ideologi Pancasila merupakan gagasan yang lahir dari pergulatan pemikiran di antara ideologi besar dunia yang bersifat universal, kemudian para "*founding fathers*" bangsa Indonesia mencetuskan atau melahirkan sebuah falsafah hidup bangsa dan dasar negara, sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat Indonesia. Mempersiapkan falsafah hidup bangsa dan dasar negara tersebut yakni ketika akan memproklamirkan kemerdekaan negara dan bangsa Indonesia pada tahun 1945. Falsafah bangsa dan dasar negara yang dinamakan "Pancasila", mampu memberikan warna dan citra yang berbeda dengan pemikiran ideologi ideologi besar dunia karena menempatkan nilai-nilai transedental dan supernatural pada posisi tertinggi, menjadi pedoman dan sumber inspirasi terhadap nilai-nilai lainnya. Adapun nilai-nilai dasar yang menjadi sikap dan perilaku masyarakat Indonmesia yaitu yang tercantum dalam "pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai berikut; *Pertama*; Ketuhanan Yang Maha Esa. *Kedua*; Kemanusiaan yang Adil Dan Beradab, *Tiga*; Persatuan Indonesia, *Empat*; Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam musyawarah/perwakilan, *Lima*; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks berdirinya negara republik Indonesia oleh para "*founding Fathers*" dikandung maksud dengan telah ditetapkan "Pancasila" sebagai *way of live* bangsa Indonesia, bercita-cita membangun manusia Indonesia seutuhnya yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera lahir dan batin.

Dalam sejarah politik di Indonesia yang paling monumental adalah ketika ideologi Pancasila dijadikan sebagai azas tunggal bagi partai politik dan seluruh organisasi. Kebijakan azas tunggal ini ditentang oleh berbagai kalangan masyarakat Penentangan yang paling keras berasal dari kelompok kekuatan politik Islam. Bahkan Pancasila sebagai azas tunggal di samping menuai protes juga banyak tokoh-tokoh yang dijebloskan ke dalam penjara. Di samping itu, implikasi kebijakan politik sempat terjadi rangkaian peristiwa dan beberapa tragedi yang berujung pada pelanggaran HAM seperti peristiwa Tanjung Priok tahun 1984. Pada masa orde reformasi, cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, oleh partai-partai politik yang berada di legeslatif, diinterprestasikan kedalam *platform* masing-masing. Penggolongan *platform* ideologi seperti diuraikan di atas dapat diterima sebagai upaya melakukan upaya dimensi fleksibilitas, boleh jadi ideologi Pancasila masih akan tetap hidup sepanjang masa. Namun implementasi nilai-nilai Pancasila hanya bersifat normatif dan serimonial maka Pancasila sebagai ideologi berada pada posisi antara hidup dan mati. Perubahan sosial yang berkembang dalam masyarakat dewasa ini yaitu kuatnya pengaruh nilai "individualistik, konsumeristik, materialistik, hedonistik dan pragmatis, merupakan ancaman serius terhadap eksistensi ideologi Pancasila.

## 2.3 HUBUNGAN IDEOLOGI DENGAN PARTAI POLITIK

### 2.3.1 Ideologi Pilar Utama Partai Politik

Negara yang menganut faham demokrasi persyaratan utama yang harus dipenuhi yaitu adanya partai politik yang mendapat legitimasi rakyat sebasar besarnya. Partai politik sebagai representasi rakyat merupakan alat perjuangan untuk meraih kekuasaan sesuai cita-cita seluruh anggota dan pendukungnya. Oleh sebab itu "partai politik" merupakan organisasi yang di dalamnya terdiri dari para elit politik, memiliki kewenangan mengendalikan "pemerintahan", memerlukan dukungan rakyat sebanyak mungkin serta harus bersaing dengan partai politik lainnya dalam pemilihan umum. Dengan demikian esensi pokok partai politik adalah alat perjuangan mewujudkan cita-cita melalui kekuasaan guna mengendalikan jalannya "pemerintahan" yang dilakukan oleh para elit partai politik. Dengan uraian penjelasan mengenai partai politik tersebut di atas maka terkait "relasi" atau hubungannya dengan ideologi yaitu *pertama;* sebagai alat perjuangan mewujudkan cita-cita. *Kedua;* memerlukan dukungan rakyat sebanyak mungkin. *Ketiga;* memiliki kewenangan untuk mengendalikan jalannya roda pemerintahan setelah mampu menjadi pemenang dalam "pemilihan umum". *Keempat;* di dalamnya terdiri para elit politik yang merupakan kader pemimpin pemerintahan dan negara.

Ideologi merupakan tatanan nilai-nilai yang menjadi *guide line*, landasan dan dasar dalam pelaksanaan cita-cita atau keinginan. Untuk itu keempat esensi pokok partai politik di atas harus berbasis pada ideologi yang lebih *establish* dan stabil. Suatu pilihan ideologi mampu mendapatkan dukungan rakyat banyak, akan melahirkan kader pemimpin negara dan pemerintahan yang handal, profesional dan kompeten serta berjiwa negarawan. Apabila partai politik secara rutin melahirkan para pemimpin pemerintahan yang negarawan maka roda pemerintahan akan berjalan "efisien dan efektif", pada gilirannya kesejahteraan rakyat akan mudah terwujud. Demikian pula partai politik yang berbasis ideologi sesuai nilai dasar masyarakat, merupakan fondasi yang kokoh membangun suatu negara yang kuat, berdaulat, mandiri dan damai serta sejahtera.

### 2.3.2 Ideologi Memperkuat Eksistensi Negara

Partai politik memiliki peran menentukan suatu bentuk, dan macam negara sesuai dengan cita-cita yang menjadi basis ideologinya. Bentuk negara dan sistem pemerintahan berdasarkan ideologi komunis atau liberal kapitalis dan Pancasila, tergantung partai politik yang berkuasa. Sebagai contoh beberapa dekade yang lalu ketika pembentukan negara Uni Soviet, berawal dari ekspansiideologi komunis Maxrsisme ke Rusia tahun 1918. Ketika ideologi komunis melakukan ekspansi ke negara tetangga maka beberapa negara sekitarnya bisa ditaklukan yang pada saat itu negara-negara yang ditaklukan sudah otonom. Dengan melalui penaklukan tersebut negara-negara tersebut tergabung menjadi negara yang disebut Uni Soviet. Negara tersebut berdiri berdasarkan ideologi "komunis Marxisme" dengan kepemimpinan para tokoh ideolognya yaitu Lenin, Stalin, Kruschev dan seterusnya. Contoh negara besar lainnya seperti Amerika Serikat dengan basis ideologi "Liberalisme" yang dipimpin Presiden pertama oleh *"Abraham Lincoln"*. Negeri tirai bambu China melalui ekspansi ideologi "komunis" dibawah *Mao Tze Tung*, yang pada akhirnya berhasil melawan teman seperjuangan yang berhaluan ideologi nasionalisme yaitu Dr. Sun Yat Sen, pendiri Republik Rakyat China pada tahun 1912. Di Indonesia dengan basis ideologi "Pancasila" dipimpin Presiden Ir. Soekarno dan wakil presiden Moh. Hatta, mampu mempersatukan Indonesia sebagai Satu Bangsa dan Negara serta pemerintahan Republik Indonesia secara konstitusional berdasarkan UUD 1945. Dengan kata lain bahwa eksistensi suatu partai politik mampu bertahan lama dan mendapat dukungan rakyatnya dalam mengendalikan pemerintahan dikarenakan partai politik tersebut memiliki ideologi yang dipelihara dengan baik. Contoh di Uni Soviet, Partai Komunis dengan dasar ideologi Komunis yang saat ini walaupun telah bubar namun masih bertahan sebagai Negara Rusia. Di Amerika Serikat, melalui kekuasaan pemerintahan yang dikendalikan oleh dua partai yaitu Partai Republik dan

Partai Demokrat dengan dasar ideologi Liberal Kapitalis. Walaupun Partai Republik sering dijuluki partai yang lebih konservatif dibanding Partai Demokrat yang dijuluki Neoliberalisme. Adapun di Indonesia melalui Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan dasar ideologi Marhaenisme di bawah kendali Soekarno pernah menjadi dasar dan landasan penyelenggaraan pemerintahan. Demikian pula ideologi Pancasila, oleh negara dan bangsa serta pemerintahan dijadikan sebagai *way of life*, pedoman hidup bangsa, dasar negara, dan sumber segala sumber hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bahkan pada masa pemerintahan Orde Baru era rezim Soeharto, "Pancasila" menjadi "azas tunggal" bagi seluruh organisasi baik organisasi sosial, partai politik dan organisasi profesi. Ideologisasi Pancasila dapat berjalan cukup lama dan mampu mempersatukan seluruh komponen bangsa dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penjelasan di atas menunjukkan relasi yang signifikan antara eksistensi partai politik dengan ideologi. Partai politik yang mampu bertahan lama dalam mengendalikan pemerintahan maka partai politik tersebut memiliki kemampuan memelihara ketiga dimensi ideologi yaitu dimensi idealisme, realisme, dan fleksibilitas.

# Bab 3

## Demokrasi sebagai Esensi Pembangunan Politik Era Reformasi

Pembahasan pembangunan politik di era reformasi fokus pada konsep dan teori "demokrasi", terutama pada upaya melakukan proses demokratisasi di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya. Sebagaimana di ketahui dalam kurun waktu tiga (3) kali pemilu yaitu tahun 1999, 2004 dan 2009, merupakan tahapan konsolidasi kekuasaan demokrasi di bidang politik. Tahapan proses demokrasi tersebut antara lain; penataan kelembagaan politik di tingkat supra maupun infra struktur politik, pemantapan ideologi pada partai-partai politik, penguatan peraturan perundangan bidang politik, penguatan kemampuan sistem politik. Harapan positif efek demokrasi pada kebijakan ekonomi misalnya pertama; kemampuan sistem politik terhadap distribusi kekayaan kepada seluruh warga negara secara adil dan merata tanpa diskriminatif. Kedua; berkurangnya tuntutan warga negara tentang kenaikan upah, dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Ketiga; pengelolaan sektor publik seperti bidang ESDM, transportasi, lingkungan hidup dan infrastruktur dan lain-lain, mampu memberikan kesejahteraan masyarakat secara luas. Ekspektasi di atas merupakan tantangan terberat konsolidasi kekuasaan demokrasi di bidang ekonomi.

Pada umumnya setiap rezim yang berkuasa selalu mengkampanyekan keberhasilan bidang ekonomi dengan indikator: pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi misalnya 6%, inflasi yang masih di bawah dua digit, cadangan devisa yang cukup, neraca perdagangan surplus. Namun indikator ekonomi yang relatif baik tersebut tidak menyurutkan masih maraknya demonstrasi besar-besaran para buruh yang menuntut kenaikan upah dan kesejahteraannya, para petani yang menuntut sengketa lahan garapan, para nelayan yang kesulitan modal untuk melaut dan msyarakat miskin kota yang menuntut pekerjaan dan pemukiman layak. Penjelasan di atas menjadi paradoksal ketika melihat kontestasi para politisi dalam slogan kampanye "selalu mengklaim sebagai pejuang nasib rakyat kecil" dari pemilu ke pemilu berikutnya, namun belum membawa perubahan yang signifikan.

Konsolidasi kekuasaan demokrasi di bidang sosial budaya, jika di cermati selama tiga periode pemilu tahun 1999, 2004 dan 2009, menunjukan partisipasi politik dalam pemilu semakin cenderung menurun. Hal ini terbukti suara golput pada pemilu tahun 2009 cukup signifikan yaitu kurang lebih mencapai 30%. Artinya proses demokratisasi terhadap masyarakat belum menjadi "gerakan sosial" dalam memilih para pemimpin yang berkualitas. Demikian pula proses demokratisasi di bidang budaya, belum menyentuh terhadap perubahan nilai-nilai demokrasi misalnya nilai sportivitas, nilai persamaan atau egaliter, nilai kebebasan dan kemandirian. Artinya masyarakat Indonesia belum berubah dari sifat "primordial, feodalisme dan apolitik. Fenomena tersebut mencerminkan kran demokrasi yangsudah terbuka lebar, menjadi terbuang sia sia. Contoh praktek demokrasi langsung seperti dalam pemilukada, menurut data yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri bulan Januari tahun 2014, sebanyak 318

kepala daerah yang tersandung kasus pidana korupsi. Bahkan fenomena yang terbilang ekstrim yaitu terpilihnya Bupati Gunung Emas Kalimantan Tengah "*Hambit Bintih*" masuk penjara sebagai tersangka korupsi, menjadi heboh ketika yang bersangkutan dipaksakan akan dilantik di Lembaga Pemasyarakatan (LP). Catatan lain yang menarik yaitu tindakan anarki yang sudah kelewat batas misalnya tindakan anarki di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) ketika proses sidang sengketa pemilukada berlangsung pada akhir tahun 2013.

Berdasarkan uraian fenomena tersebut di atas merupakan ekses praktek "demokrasi" di Indonesia. Apakah dalam mempraktekan demokrasi harus melalui proses seperti yang di uraikan di atas. Pertanyaan tersebut akan terjawab pada penjelasan di bawah ini baik berupa jawaban normatif dan teoritis maupun dukungan empiristik.

Seperti diketahui bersama bahwa kajian teori "demokrasi" hampir semua bersumber dari barat. Sesuai penjelasan di atas menunjukan praktek demokrasi di dunia ketiga termasuk Indonesia, tidak seluruhnya berjalan mulus. Perjalanan panjang mempraktekan ide demokrasi, di samping menyedot sumberdaya dan sumber energi yang besar, tetapi juga menelan korban jiwa manusia yang tidak sedikit. Pada kenyataannya atas nama "demokrasi", banyak peristiwa konflik, perang saudara dan perang antar negara, mudah terjadi ketika menuntut pergantian "pemimpin" negara secara demokratis. Pilihan konsep dan teori yang tepat tentang "demokrasi" menjadi sebuah diskusi yang panjang dan melelahkan. Amerika Serikat sendiri yang dinobatkan sebagai negara kampiun "demokrasi", seringkali melakukan tindakan yang tidak demokratis terhadap negara yang dianggapnya menganggu kepentingan negeri Paman Sam tersebut. Seperti tindakan penyerbuan tentara Amerika Serikat ke Irak yang telah meluluh-lantakan negeri "seribu satu malam", baik peradaban sejarah yang sangat kuno. Infrastruktur ekonomi yang hancur sudah barang tentu menambah penderitaan seluruh rakyat Irak. Amerika Serikat menyerang di Irak dengan alasan Irak sedang melakukan pengayaan teknologi nuklir, tetapi belakangan tuduhan itu tidak terbukti. Belum selesai sisa-sisa perang di Irak, saat ini Amerika Serikat dan sekutunya telah menyerbu negara Afghanistan. Kehancuran ekonomi, sosial dan budaya dan lainnya di seluruh negeri yang tidak berbeda dengan keadaan di Irak. Secara kebetulan Irak dan Afghanistan keduanya termasuk negeri yang sebagian besar penduduknya muslim. Demikian pula perlakuan Amerika Serikat terhadap Iran yang dewasa ini juga sedang dituduh mengembangkan teknologi senjata nuklir, bahkan sudah diancam untuk diserang dan didukung oleh Israel, negara Zionis sebagai sekutu abadinya. Demikian pula Amerika Serikat melakukan tindakan yang tidak demokratis, juga dilakukan terhadap Suriah (2012) yang saat ini sedang dilanda perang saudara. Dengan tuduhan pasukan pemerintah di bawah rezim presiden Basyar al-Assad dituduh menggunakan senjata alat pemusnah kimiawi. Contoh peristiwa

tersebut sesungguhnya dengan alasan apapun tetap tidak dibenarkan. Jika mereka meyakini konsep dan teori yang telah dibuatnya sendiri, bahwa konflik baik antar masyarakat maupun antar negara, dalam alam demokrasi harus dihindari. Nilai-nilai demokrasi mengajarkan bahwa "negara-negara demokrasi perwakilan modern, tidak berperang satu sama lain, sebab dengan nilai-nilai demoraksi sesungguhnya sangat memperhatikan kehidupan yang damai, berdampingan dengan negara lain yang berdaulat", *Robert Dahl (1982)* dalam*Istianto (2011)*. Oleh sebab itu kita menggugat konsep "demokrasi" yang dipaksakan untuk dipraktekan di dunia ketiga. Karena negara barat: seperti Amerika Serikat dan sekutunya justru tidak menggunakan nilai-nilai demokrasi ketika menyelesaikan konflik negeri Irak, Afghanistan, Mesir, Suriah dan Libya meskipun dalam konsteks yang berbeda. Oleh karena itu para ahli sering mengatakan bahwa Amerika Serikat tindakannya terhadap negara lain menggunakan "standar ganda". Artinya bagi negara lain harus menerapkan demokrasi sedang bagi dirinya sendiri tidak menggunakan standar nilai demokrasi bahkan mendapat kritik dari berbagai negara tidak dipedulikan terutama pada era kepemimpinan Presiden George Bush yunior.

Demikian pula di Indonesia penerapan demokrasi sudah dianggap sukses oleh negara-negara barat, bahkan Indonesia banyak dipuji sebagai negara yang terbesar keempat jumlah penduduknya (270 juta orang) sukses menerapkan "demokrasi langsung". Penerapan demokrasi langsung tersebut yaitu dalammemilih para pemimpin pemerintahan mulai dari presiden, gubernur dan bupati/walikota. Namun demikian dibalik kesuksesan menerapkan demokrasi, sesungguhnya demokrasi yang sedang berjalan berdasarkan fenomena yang terjadi, masih bersifat semu atau dengan kata lain "demokrasi prosedural. Bahkan jika di cermati praktek demokrasi masih sebatas milik para elit politik. Nilai demokrasi belum menyentuh akar rumputsertasikap dan perlilaku politik belum dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi. Belum tumbuhnya nilai-nilai demokrasi pada masyarakat Indonesia, diduga masih dihinggapi "trauma politik" yang belum sembuh akibat dari penerapan "*strategi floating mass*", tindakan represif dan otoriter pemerintah pada masa orde baru. Akibat kebijakan "*floating mass*" masa itu, masih menyisakan sikap apolitik dan apatis terhadap politik praktis. Walaupun era reformasi sudah berjalan satu dasawarsa, masih belum mampu menumbuhkan budaya politik demokrasi dan partisipasi politik.

Fakta yang memberikan kebenaran menurunnya tingkat partisipasi politik, berdasarkan sumber data KPU yang diolah oleh M. Ikhsan S (Republika,10 Januari 2014), data pelaksanaan pemilu legeslatif pada tahun 1999, partisipasi masyarakat pada pemilu tersebut mencapai 92,99%. Kemudian pada pemilu tahun 2004 menurun menjadi 84,07% dan pemilu tahun 2009 menurun drastis menjadi 70,99%. Melihat perkembangan tingkat partisipasi masyarakat terus menurun, Ketua Komisi Pemilihan

Umum (KPU) mentargetkan partisipasi masyarakat pada pemilu tahun 2014 sebesar 75%.

Demikian pula dalam pelaksanaan demokrasi langsung pada pemilukada muncul fenomena anomali yaitu pertama; angka golput dalam pemilukada cenderung meningkat, misalnya menurut sumber "Detik Com", pemilukada yang terjadi di Tanggerang Selatan pada tahun 2010 angka golput mencapai 44%. Kedua; maraknya praktek politik uang pada setiap pemilukada, baik melalui yang disebut serangan fajar maupun pembelian suara. Ketiga; terjadi transaksional kekuasaan ketika para kandidat kepala daerah baik kader partai politik maupun bukan kader, membayar uang mahar politik untuk di calonkan dari partai politik tersebut mencapai angka milyaran rupiah. Keempat; terhadap hasil pemilukada, masyarakat belum puas karena tiga ratus lebih (318) kepala daerah tersandung pidana korupsi. Kelima; terjadi konflik horizontal antar pendukung calon kepala daerah di berbagai daerah dan perbuatan anarki yang paling menggemparkan yaitu di persidangan MK pada akhir tahun 2013 dan dalam sebagian besar pelaksanaan pemilukada. Keenam; kepala daerah yang terpilih kurang memiliki kompetensi di bidang manajemen pemerintahan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah belum efisien dan efektif, misalnya dalam pengeloaan anggaran alokasi belanja pegawai mencapai angka 50% di banding untuk belanja pembangunan berada di bawah 40%.

Terjadinya beberapa fenomena di atas menunjukan adanya korelasi antara belum tumbuhnya "budaya politik dan partisipasi politik" yang sehat dengan penerapan demokrasi langsung. Jika budaya politik dan partisipasi politik sudah establish atau mapan, para "elit politik" tidak akan kesulitan meminta dukungan rakyat dalam pemilu. Karena ketika para elit yang di percaya mengajukan "tawaran" berupa ide dan gagasan politik untuk memperbaiki "kesejahteraan rakyat" nya, sudah barang tentu akan disambut baik oleh masyarakat luas. Cara rakyat merespon yaitu mereka akan berbondong-bondong datang secara "sukarela" pada saat elit politik berkampanye dan akan membuktikan saat pencoblosan pada pemilu. Contoh gaya kepemimpinan populis seperti "fenomena Jokowi" yang saat ini menjadi Gubernur DKI Jakarta, mampu menimbulkan partisipasi politik akar rumput atau rakyat kelas bawah. Fenomena munculnya tokoh populis seperti "Joko Widodo" di atas, seharusnya dapat menjadi *role model* bagi para elit politik.

Namun dalam kurun waktu satu dasawarsa penerapan demokrasi langsung, sangat sedikit muncul gaya pemimpin populis seperti "Jokowi" tersebut. Secara teoritis tumbuhnya budaya politik yang sehat dan partisipasi politikaktif, sudah dipastikan akan menghilangkan cara-cara "mobilisasi" dalam mengerahkan massa pada kegiatan kampanye dan pemilu. Dengan cara "mobilisasi" yang saat ini cenderung digunakan oleh elit politik, merupakan ajakan yang setengah memaksa dengan iming-iming

materi untuk menghadiri kegiatan politik tersebut supaya dihadiri oleh massa yang besar. Padahal mobilisasi massa memerlukan biaya yang besar dan terkadang tidak efektif, karena dalam prakteknya "mobilisasi massa" dewasa ini menjadi ajang bisnis para ahli "pengerah massa". Apalagi kondisi sekarang masyarakat sedang dilanda kesulitan ekonomi, tanpa disadari masyarakat tergiring bersikap "pragmatis". Dengan demikian nilai "gotong royong" dan nilai "kesederhanaan", kesahajaan, ketulusan, ketika membantu orang lain yang pernah dimiliki masyarakat Indonesia sudah mulai tercabut dari akarnya. Nilai-nilai dasar masyarakat Indonesia kini mulai berubah menuju nilai-nilai pragmatisme dan materialisme.

Menerapkan desain pembangunan sistem politik model "demokrasi langsung", jika dikaitkan dengan penjelasan fenomena di atas, para pembuat kebijakan, boleh jadi tidak mengira bahwa proses demokrasi langsung menjadi rumit dan mahal. Fakta tersebut akibat pertama; manajemen partai politik cenderung dikelola dengan cara-cara bisnis, misalnya para kader partai yang tergolong militant dan ideolog dibiarkan membiayai keperluan kegiatan politiknya, padahal tidak semua kader memiliki dana yang cukup. Kedua; prinsip nilai perjuangan, pengabdian dan tanggung jawab sosial (*social-responcibility*), sudah tidak lagi menjadi garis kebijakan partai politik, misalnya rekruitmen caleg banyak melibatkan kalangan artis sebagai *vote getter* karena para kadernya kering popularitas. Ketiga; kecenderungan nilai pragmatisme dan materialisme menjadi sangat kental dianut oleh para elit politik sekarang, misalnya dalam kegiatan politik seperti proses pencalonan anggota legeslatif, pemilihan pengurus partai, pernyataan yang sering diucapkan oleh para politisi seperti "tidak ada makan siang gratis". Artinya semua kegiatan politik dan aktifitas yang terkait dengan proses politik tidak terlepas dari masalah "uang". Seolah tanpa "uang" semua kegiatan tidak bisa sukses dan ironisnya semua biaya ditanggung oleh pribadi para politisi. Sehingga situasi dan kondisi dalam kehidupan politik dewasa ini seperti tersandera oleh peran "uang" menjadi segalanya.

Dengan demikian dimasa depan potret kehidupan kepartaian sudah bisa di pastikan bahwa para pemimpin partai berasal dari para pengusaha kaya atau para profesional sukses yang alih profesi jadi politisi. Contoh pengusaha kaya pemilik "Lions Air" Rusdi Kirana di dapuk menjadi salah satu ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara resmi pada tanggal 12 Januari 2014. Sedangkan kalangan akedemisi, birokrat, militer, aktivis, yang tidak memiliki dana yang cukup, sulit menduduki posisi kunci di kepengurusan partai politik. Sedang nasib para ideolog semakin terpinggirkan, karena arah perjalanan partai sudah tidak lagi di pandu oleh idealisme dan filosofi dasar perjuangan partai. Akan tetapi nilai-nilai pragmatisme dan materialisme cenderung lebih menonjol dalam setiap kebijakan partai. Secara empiristik dapat dibuktikan bahwa dalam kegiatan acara pemilihan pemimpin partai mulai dari "muscab" sampai

dengan "munas", tidak terlepas dari "politik uang" untuk memperebutkan kursi ketua umum dan posisi kunci dalam organisasi partai. Contoh yang dialami Partai Demokrat pada konggres bulan Mei 2010 terus menjadi perbincangan publik di media massa bahwa pesta demokrasi pemilihan pengurus partai syarat dengan politik uang. Bahkan para pemilik suara seperti para ketua DPC dalam konggres mengakui secara sembunyi maupun terbuka menyampaikan informasi telah menerima uang dari para kandidiat mulai dari 20 juta sampai dengan seratus juta rupiah. Tragedi politik yang menimpa Partai Demokrat terus bergulir mulai dari para pengurus inti partai sampai pada ketua umum partai kini menjadi terpidana korupsi. Perbuatan korupsi tersebut sebagian dananya digunakan untuk pemenangan pemilihan ketua umum Partai Demokrat pada konggres partai tahun 2010 kini semakin tidak terbantahkan. Fenomena yang terjadi pada konggres Partai Demokrat tersebut sudah bisa dipastikan terjadi terhadap partai politik lainnya di Indonesia.

Oleh sebab itu para ideolog partai yang tidak memiliki "uang" cukup sulit mengikuti kontestasi sesuai mekanisme demokrasi. Dalam keikutsertaan tersebut mempunyai peluang yang kecil sebagai "pemegang kekuasaan" baik di pengurusan partai politik maupun kekuasaan pemerintahan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Banyak kalangan juga menilai bahwa dewasa ini partai politik sudah bukan lagi sebagai alat "perjuangan" untuk membangun negara dan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat. Bahkan "sosok partai politik" sekarang sudah menjelma menjadi "tempat transaksional kekuasaan" dan relasi antar keanggotaan partai di berbagai tingkat di pusat dan daerah cenderung bermotif ekonomi semata. Perubahan nilai kearah pragmatisme dan materialisme membawa implikasi terhadap perilaku para elit partai. Jika para elit partai tersebut terpilih menjadi anggota legeslatif, eksekutif dan yudikatif boleh jadi pengaruh nilai-nilai tersebut merasuk pada "*mindset*" dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Beberapa kalangan akedemisi mengkhawatirkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sering menjadi tolok ukur keberhasilan adalah tercapainya "efisiensi". Paradigma efisiensi sesungguhnya merupakan instrumen ekonomi dalam usaha meraih keuntungan. Padahal fungsi negara adalah menjalankan mandat rakyat yang berorientasi pada kepentingan sosial dan pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu jika orientasi pemerintah cenderung kearah motif ekonomi, maka fungsi pemerintah mulai berubah menjadi "pemerintahan yang berbisnis". Ciri pemerintahan yang berbisnis yaitu ketika kebijakan pemerintah melakukan pergeseran sektor publik menjadi sektor komoditi, dimana penggunaan dan pemanfaatan oleh masyarakat ditetapkan melalaui mekanisme pasar. Indikasi tersebut tercermin dalam kebijakan terhadap perubahan bentuk pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebagai badan usaha negara yang mengelola sektor publik merupakan mandat dari Undang-

Undang Dasar 1945. Dimana sumber-sumber kekayaan yang berada di bumi dan air yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Perubahan bentuk pengeloaan mulai dari bentuk "jawatan atau perusahaan negara menjadi" perusaan Umum" dan saat ini hampir seluruh BUMN bentuk pengeloaan yaitu "perseroan terbatas (PT). Argumentasi perubahan bentuk tersebut merupakan hasil studi "World Bank", agar supaya pengelolaan BUMN lebih efisien dan efektif. Tetapi pada kenyataanya terjadinya pergeseran sektor publik menjadi sektor komoditi, dimana pengunaanya ditentukan melalui mekanisme pasar, namun tidak diikuti oleh peningkatan daya beli masyarakat, dipastikan akan merugikan masyarakat secara luas. Oleh sebab itu yang dirasakan oleh masyarakat bahwa "kebenaran sudah tidak lagi ada pada otoritas negara, namun kebenaran ada pada otoritas pasar".

Sebagaimana diuraikan di atas terjadinya pergeseran peran negara yang tercermin dalam perubahan bentuk BUMN tersebut, dengan alasan efisiensi dan prospek ekspansi bisnis seperti perusahaan swasta (*private company*). Namun secara politis dibalik perubahan tersebut yaitu karena Indonesia termasuk sebagai negara pengutang dari lembaga keuangan Bank Dunia dan IMF, maka diwajibkan melakukan Privatisasi dan liberalisasi ekonomi.

Pernyataan tersebut relevan dikemukakan seiring terjadinya peristiwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pertamina sebagai BUMN menaikan harga "elpiji 12 kg" mencapai 68% pada 1 Januari 2014. Reaksi masyarakat sangat keras, pada akhirnya menyadarkan pemerintah melalui Presiden untuk turun tangan, kemudian memerintahkan Pertamina mengkaji ulang kebijakan tersebut dalam waktu dua puluh empat (24) jam. Peristiwa ini menarik karena tidak hanya persoalan ekonomi semata akan tetapi bergulir menyentuh sensitifitas politik. Dalam diskusi terbatas menyimpulkan terjadi *loss control* pemerintah terhadap misi BUMN. Bahkan secara tajam dikatakan bahwa "pemerintah telah kehilangan kendali terhadap BUMN" atau dengan kata lain BUMN mulai berani melawan pemerintah" akibat kewenangan yang diberikan pemerintah kepada BUMN terlalu besar. Bahkan pemikiran yang kelewat bebas dari para forum direksi BUMN, melakukan uji materi undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Adapun yang diusulkan uji meteri tersebut yaitu tuntutan tentang "asset BUMN yang berasal dari "Penyertaan Modal Pemerintah (PMP)" dalam aturan tersebut statusnya sebagai "keuangan negara". Namun oleh BUMN di klaim sebagai aset BUMN, para direksi BUMN sering terjebak menggunakan asset tersebut untuk menyehatkan laporan keuangan perusahaan, ketika terjadi mis manajemen. Ekspansi bisnis ala swasta atau private yang berorientasi profit, praktek bisnis tersebut sering terjebak dengan doktrin "menghalalkan segala cara". Sehingga banyak direksi BUMN yang terjerat kasus pidana korupsi. Jebakan otoritas pasar yang sering mengalahkan "kebenaran negara", kini paradigma tersebut banyak dianut

para direksi BUMN. Misi BUMN sebagai fondasi kekuatan ekonomi negara pada kenyataannya sangat rapuh menghadapi ganasnya pasar bebas. Fakta empiristik yaitu negara atau pemerintah tidak mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok rakyat seperti; daging, cabai, bawang merah dan bawang putih, listrik, LPG, BBM, beras, gula, kedelai, minyak goreng dan kebutuhan primair lainnya. Rakyat menjerit dan menderita karena daya beli yang semakin melemah karena pendapatan selalu termakan inflasi. Sedangkan kemampuan teknologi pangan dan ketahanan pangan melemah dibanding negara tetangga kita. Di lain pihak para direksi BUMN yang mengemban misi negara justru menuntut uji materi agar "asset BUMN" bukan sebagai "keuangan negara". Argumentasi para pengusul "uji meteri", para direksi merasa tersandera oleh beban misi negara, sehingga kesulitan dalam melakukan ekspansi bisnis perusahaan plat merah tersebut. Seharusnya negara dan pemerintah tidak menuntut BUMN mencari keuntungan secara fisik *cash flow* layaknya perusahaan swasta, tapi cukup pada posisi "*break event point*". Sebab yang dimaksud keuntungan bagi negara dan pemerintah adalah pada posisi "*out come, Impact* dan benefitnya. Artinya pengelolaan bisnis BUMN mampu memperkuat soko guru ekonomi nasional dari tekanan ekonomi dan pasar global. Misalnya PT. Jasa Marga membuat jalan Tol bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, tidak hanya oleh orang yang punya mobil dan tidak selalu menaikan tarif tol yang berlindung di bawah undang-undang, PT. Pertamina tidak membuat harga BBM dan LPG yang selalu naik, PT. PLN tidak selalu menaikan harga yang membuat rakyat menjerit, BUMN bidang transportasi mampu menyediakan angkutan publik yang cukup dan nyaman, BUMN bidang pertanian mampu membuat harga pangan murah, dan lain-lain.

Fenomena yang sama terjadi juga di Direktorat Jenderal Perkeretapian Kementerian Perhubungan selaku regulator yang menyelenggarakan fungsi "prasarana perkeretaapian. Ketika melakukan perkerjaan yang disebut "*Swich Over*" awal bulan Febuari tahun 2014 di Jalur Ganda Lintas Utara, pada waktu yang telah dijadwalkan dengan dihadiri oleh para pejabat tinggi, tiba-tiba dibatalkan acara tersebut oleh pihak PT. Kereta Api Indonesia (PT.KAI) dengan alasan yang tidak jelas. Padahal PT.KAI sebagai operator dalam tugas dan fungsinya melaksanakan sebagian fungsi pemerintahan dalam hal pelayanan transportasi umum. Peristiwa miskoordinasi antara pemerintah dengan BUMN tersebut mencerminkan ketidakjelasan kewenangan siapa sebagai pemimpin dan pelaksana, walaupun peraturan perundangan secara tertulis sudah sangat jelas dan tidak perlu ditafsirkan lagi. Artinya sebagaimana peristiwa PT. Pertamina terdapat fenomena BUMN sudah tidak tunduk lagi terhadap otoritas negara., tetapi lebih tunduk kepada otoritas pasar. Peristiwa tersebut sebenarnya sudah di sinyalir sejak lama oleh "Garry Hamel (1997), dalam RianNugraha (2006), dengan bukunya "*Re Thinking On The Basis Of Competition*". Dikatakan bahwa " Dalam

globalisasi persaingan sebenarnya terjadi antar pelaku bisnis, bukan antar negara atau pemerintah. Tata kelola publik yang sebelumnya di kuasai negara tiba-tiba di serah terimakan kepada swasta (*the business entity*) maka kebenaran tidak lagi berada pada otoritas negara namun otoritas pasar". Padahal konstitusi negara menyatakan dengan tegas bahwa sektor publik yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kata "dikuasai oleh negara", bagi kalangan yang pragmatis ditafsirkan bisa berbentuk "badan usaha" perusahaan umum atau perseroan terbatas bahkan bisa serahkan ke swasta melalui manajemen kontrak dengan pemerintah atau dikenal dengan "*public private partnership*".

Seperti diketahui bersama bahwa sektor migas dan transportasi publik merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang seharusnya sebagai barang publik atau "*public good*". Namun pada kenyataannya telah bergeser menjadi barang "komoditi", sehingga untuk memperoleh barang tersebut ditentukan melalui mekanisme pasar. Pergeseran menjadi barang komoditi sudah dipastikan akan merugikan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, sebagaimana peristiwa kenaikan harga elpiji 12 kg di atas. Kewenangan Pertamina dalam menetapkan tarif, dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 telah di batalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), berdasarkan usulan uji materi undang-undang oleh masyarakat. Dengan peristiwa kenaikan harga elpiji menunjukan kebijakan Pertamina dan Meneg BUMN telah mengabaikan keputusan MK tersebut. Walapun Meneg BUMN Dahlan Iskan telah mengaku bersalah dan meminta maaf, namun kasus tersebut termasuk direksi PT.KAI mencerminkan kurang cermat dan sembrono membaca peraturan perundangan dalam konteks mengurus penyelenggaraan pelayanan publik.

Penjelasan di atas juga sesuai dengan pendapat berbagai kalangan dan para pakar bahwa para elit politik yang berkuasa sebagai penyelenggara negara di eksekutif, legislatif dan yudikatif, dalam menetapkan kebijakan kurang berorientasi pada landasan kontitusi dasar negara. Keputusan MK yang membatalkan beberapa undang-undang karena dinilai telah melanggar Undang-Undang Dasar, dapat menjadi argumentasi atas penyataan tersebut. Secara ekstrim dapat dikatakan tanpa disadari kebijakan negara yang dibuat, disinyalir memberikan ruang gerak yang luas bagi kepentingan dan kekuatan asing. Bahkan seperti yang disebutkan di atas didukung data yang menyebutkan sebanyak 73 undang-undang pesanan asing.

Pernyataan tersebut sering dimuat di media massa yaitu kebijakan publik tersebut dapat di kategorikan sama dengan "menjual kedaulatan negara" melalui praktek "ekonomi" yang sudah dikuasai asing. Berbagai sumber-sumber ekonomi telah dikuasai asing melalui penjualan saham dan strategi sales, mengenai sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup masyarakat dan juga bidang perbankan nasional, sudah semakin intens menjadi bahan diskusi politik yang semakin hangat.

Data yang disajikan dan diolah oleh Wawan Tunggul Alam, dalam Istianto (2011), dapat menjadi referensi terhadap kebenaran *statement* di atas yaitu sebagai berikut:1. Air minum Aqua 74% saham PT. Danone asal Perancis; 2. Air minum Teh Sariwangi 100% dimiliki oleh Unilever Inggris; 3. Air minum Susu SGM milik Sari Husada, 82% saham dimiliki PT. Numico asal Belanda; 4. Barang-barang sabun Lux, Pepsodent, sikat gigi dikuasai oleh Unilever (Inggris); 5. Rokok Sampurna, 97% dimiliki Philip Morris Amerika Serikat; 6. Supermarket Carrefour, 75% milik perusahaan Perancis. Walaupun perkembangan saat ini kepemilikan Carrefour sudah berpindah tangan atau dibeli sahamnya oleh Chairul Tanjung, seorang pengusaha muda yang sukses. Akan tetapi jika barang-barang yang dipasarkan masih tetap berasal dari produk luar negeri atau barang-barang sejenis yang berada pada kendali Unilever, maka esensi bisnis Carrefour tetap berada pada kendali produk barang asing, meskipun pabriknya berada di wilayah Indonesia dan pemilik saham terbesar juga orang Indonesia.

Menyadari sorotan publik terhadap kekeliruan dalam pembuatan kebijakan yang cenderung tidak konsisten dengan undang-undang dasar negara, rezim pemerintah saat ini melakukan perubahan untuk memperbaikinya. Misalnya kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara, dinilai positif oleh berbagai kalangan. Walaupun berlakunya undang-undang tersebut selama empat (4) tahun, tenggat waktunya sudah berakhir pada tanggal 12 Januari 2014. Namun banyak kalangan menilai diragukan efektifitasnya, jika pemerintah tidak bisa bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar. Kebijakan pelarangan ekspor di sektor "minerba" merupakan suatu pertanda *political will* yakni keinginan pemerintah dalam mengatur pengelolaan sektor ESDM yang menguasai hajat hidup masyarakat luas dikendalikan oleh negara. Karena selama ini sejak Indonesia merdeka sampai saat ini sektor ESDM dikuasai oleh perusahaan asing. Pemerintah dianggap tidak mampu melakukan pembagian yang adil untuk kemakmuran rakyat dalam pengeloaan ESDM yang diatur melalui pasar bebas. Sehingga barang publik seperti "minerba" tersebut, selalu menjadi arena permainan "politik ekonomi"sepanjang pemerintahan republik berlangsung. Pada gilirannya rakyat banyak yang menderita, tidak hanya kalangan bawah yang berpenghasilan rendah, juga kalangan menengah. Oleh sebab itu pemeritah harus bersungguh sungguh mampu menjalankan kebijakan tersebut secara efektif, meskipuntantangan dan rintangan cukup besar. Misalnya menghadapi para pengusaha asing di bidang ESDM berkeberatan dan sebagian menolak terhadap kebijakan tersebut. Masa tenggang waktu lima (5) tahun merupakan waktu yang cukup untuk mempersiapkan infrastruktur yang harus di sediakan terkait dengan kebijakan tersebut. Jika kebijakan tersebut gagal atau tidak bisa berjalan efektif, tidak mustahil akan menjadi persoalan politik pasca pemilihanumum tahun 2014.

Penjelasan di atas sebenarnya wilayah kajian "ekonomi politik", namun dalam konsteks topik "demokrasi", relasi tersebut menjadi relevan ketika tuntutan terhadap "demokrasi" sampai kepada distribusi kekayaan ekonomi negara dilakukan secara demokratis. Jika kemampuan demokrasi mencakup wilayah ekonomi niscaya akan mengurangi disparisitas pendapatan dan kesenjangan sosial, melalui pengeloaan BUMN yang lebih berorientasi kepada kepentingan publik dibanding menuruti kepentingan bisnis pemodal asing.

Berdasarkan fakta empiris dan fenomena dalam kehidupan politik dewasa ini secara umum merupakan persoalan klasik antara *dass sollen* dan *dass sein*. Artinya konsep demokrasi secara *dass sollen* memiliki kemampuan menciptakan keadilan dan pemerataan kekuasaan ekonomi sampai lapisan masyarakat bawah. Adapun secara *dass sein* praktek demokrasi belum mampu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Harapan publik terhadap era reformasi dimana kondisi kehidupan politik demokrasi sudah lebih baik, memberi apresisasi yang tinggi bahwa "demokrasi langsung" sebagai instrumen membangun modal sosial yang lebih terbuka dan egaliter. Proses demokratisasi diharapkan mampu menciptakan dan menghantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih mandiri, berdaulat dan bermartabat dalam percaturan politik dan ekonomi global.

Namun tetap harus diwaspadai terhadap *euphoria* para elit politik di Indonesia yang sedang mabuk terhadap upaya mempraktekan ideologi demokrasi. Jika masyarakat kurang waspada bisa terjebak oleh permainan demokrasi yang hanya sekedar menggunakan instrumen "*voting*" dalam menilai keberhasilan kualitas demokrasi. Dengan jargon "suara rakyat adalah suara tuhan (*vox populi vox dei*), jika penggunaan *voting* secara serampangan dalam menentukan haluan negara, tidak mustahil hasil demokrasi justru berbalik menjadi "mobokrasi". Contoh tindakan tindakan anarki masyarakat seperti yang dijelaskan di atas sebagai embrio menuju "mobokrasi". Terdapat ungkapan yang sangat bijak patut sebagai pembanding yaitu menyatakan bahwa "barang siapa yang mengikuti kebanyakan orang niscaya akan tersesat". Artinya pengambilan keputusan dengan suara terbanyak niscaya akan menambah persoalan baru yang lebih kompleks. Contoh yang sudah banyak disebutkan di atas seperti dalam pemilu "legeslatif" dan "pemilukada", hasilnya sebanyak tigaratus lebih (318) para kepala daerah dan juga para anggota legeslatif (DPR/D) terperangkap oleh kasus tindak pidana korupsi.

Para "*founding fathers*" bangsa Indonesia mewariskan (*legacy*) kepada kita tentang kearifan dan pandangan yang tajam dan berhorizon luas tersebut dalam menentukan "kebijaksanaan haluan negara" dan tata cara memilih "pemimpin". Pengambilan keputusan strategis yang menyangkut persoalan negara, termasuk memilih pemimpin yaitu mengedepankan prinsip "musyawarah". Prinsip nilai "musyawarah" oleh para

"*founding fathers*" telah diabadikan dalam "sila keempat Pancasila". Fakta tersebut di atas hendaknya menjadi bahan renungan para *"policy maker"* dan elit politik, melakukan evaluasi terhadap penerapan demokrasi langsung yang sudah terbukti gagal menghasilkan pemimpin atau kepala daerah yang berkualitas. Namun para elit politik saat ini masih optimis, bahkanmeyakini bahwa demokrasi langsung itu lebih baik. Persoalan pokok yang harus dibenahi adalah kesiapan masyarakat yang masih kuat pengaruh budaya paternalistik dan feodalistik. Perubahan menuju sikap yang egaliter, sportif dan *fair*, merupakan prasyarat bagi tegaknya demokrasi. Oleh sebab itu menjadi tugas partai politik dalam menjalankan fungsi pendidikan politik masyarakat. Jika para pemimpin partai politik besar tetap berkeinginan memantapkan praktek demokrasi langsung dan tetap akan diteruskan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah mendatang, merupakan tuntutan mutlak peran partai politik dalam membangun partisipasi politik yang benar. Sebab selama ini kehadiran massa pada acara kampanye bukan sebagai cerminan partisipasi politik yang sesungguhnya melainkan mobilisasi. Dengan kata lain kehadiran massa dalam kampanye sebagian besar adalah massa bayaran. Oleh sebab itu jika kondisi masyarakat belum berubah kearah nilai-nilai egaliter, mandiri dan sportif, maka setelah pasca pemilihan umum tahun 2014, situasi dan kondisi politik tetap sama dengan periode sebelumnya yaitu; anomali dalam praktek demokrasi dan masih terjadi mobokrasi.

## 3.1 MACAM-MACAM NAMA DEMOKRASI

Demokrasi sebagai konsep politik sampai dewasa ini masih terus dibicarakan baik secara informal di warung-warung kopi yang menggugat tentang eksistensi demokrasi, dikaitkan dengan pengentasan kemiskinan dan perbaikan ekonomi rakyat. Sampai dengan acara resmi dan formal melalui seminar dan diskusi mulai tingkatan regional sampai tingkatan dunia. Seperti yang baru dilaksanakan di Stockholm tanggal 4 dan 5 Desember 2008 dengan topik *Democracy*; *Whither are We Wandering (Demokrasi, ke mana kita berkelana) seperti yang ditulis dalam pojok resonansi di media Republika oleh Azumardi Azra, Republik tanggal 18 Desember 2008.*

Tema diskusi tersebut menunjukkan bahwa demokrasi yang telah dilaksanakan, di berbagai negara di dunia belum menjadi solusi yang tuntas, terhadap persoalan negara dan masyarakat terutama di dunia ketiga, termasuk Indonesia yang belum lama menerapkan konsep demokrasi setelah selama 32 tahun di bawah rezim otoriter. Bangsa dan negara di dunia sangat berharap banyak terhadap konsep demokrasi, untuk menjadi instrumen pemerintahan, dalam mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sebab apapun kelemahan demokrasi, tetap lebih baik, dibandingkan dengan konsep monarki absolut maupun autokrasi atau oligarki.

Sehingga penerapan demokrasi di masing-masing negara yang memiliki budaya *(culture)* yang berbeda menyebabkan muncul istilah atau nama yang bermacam-macam untuk memberikan stempel pada konsep demokrasi.

Oleh karena itu menambah upaya pemahaman terhadap berbagai demokrasi di bawah ini dijelaskan beberapa istilah Demokrasi tersebut yaitu:

### 3.1.1 Demokrasi Konstitusional

Demokrasi konstitusional artinya konstitusi sebagai landasan negara dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi secara tertulis tercantum dalam kontitusi dasar tersebut. Esensi demokrasi yaitu pembagian atau pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif, diatur sedemikian rupa fungsi masing-masing lembaga kekuasaan tersebut dalam kontitusi. Demkian pula pola Hubungan antara lembaga kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga politik yang lainnya, diatur dalam konstitusi negara, untuk menjaga keseimbangan kekuasaan *(balance of power)*.

Oleh sebab itu negara-negara yang menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi, konstitusi negara mengandung substansi konsep demokrasi, maka disebut demokrasi konstitusional. Meskipun istilah demokrasi konstitusional jarang digunakan, namun dalam kajian ilmu politik menjadi catatan penting dalam penjelasan yang lebih mendalam tentang demokrasi. Negara yang sering disebut sebagai negara demokrasi konstitusonal misalnya Inggris *(United Of Kingdom)*. Di Inggris dalam sejarahnya merupakan wilayah kerajaan dan raja masih memiliki peranan dalam kekuasaan negara, dalam ilmu ketatanegaraan disebut sebagai "kepala negara". Sedang penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari, diserahkan kepada rakyat untuk memilih para pemimpinnya melalui pemilu sebagai "kepala pemerintahan" atau disebut "perdana menteri". Mekanisme proses penyelenggaraan pemerintahan tersebut diatur secara tertulis dalam kontitusi negara.

### 3.1.2 Demokrasi Rakyat

Istilah demokrasi rakyat muncul sebagai kajian karena pada hakekatnya semua negara mengklaim sebagai penganut paham demokrasi. Adapun pengertian demokrasi yaitu kekuasaan berada di tangan rakyat atau "*goverment rule by the people*. Dengan pengertian tersebut maka negara yang menganut paham komunis atau otoriter pun juga mengaku kekuasaan di tangan rakyat. Karena partai komunis atau partai yang berkuasa secara otoriter direpresentasikan sebagai mewakili kemauan rakyatnya. Misalnya pemilihan ketua partai juga melalui seleksi yang ketat dan merupakan

pilihan rakyat yang terwakili sebagian dari anggota partai. Oleh karena itu negara yang menganut ideologi komunis juga mengklaim sebagai negara demokrasi yaitu "Demokrasi Rakyat". Meskipun dalam penyelenggaraan kekuasaan sangat represif dan otoriter terhadap rakyatnya, contoh Negara Uni Soviet sekarang Rusia dan Republik Rakyat Cina (RRC).

### 3.1.3 Demokrasi Parlementer

Istilah demokrasi parlementer sebenarnya muncul secara sederhana yaitu mengambil nama dari sistem demokrasi yang dianutnya yaitu kekuasaan legeslatif atau parlemen lebih besar dari kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Kewenangan legeslatif atau parlementer yang besar yaitu "mengangkat dan memberhentikan kepala pemerintahan". Dalam demokrasi parlementer kekuasaan eksekutif dibagi menjadi dua kekuasaan yaitu penyelenggaraan tugas pemerintahan sehari hari, dimana kabinet pemerintahan dipimpin oleh "seorang Perdana Menteri."Sedangkan presiden sebagai kepala negara, mempunyai tugas kenegaraan seperti mengangkat dan membehnetikan "Duta Besar", memberikan grasi, abolisi, rehabilitasi dan amnesti kepada warga negaranya. Konsep demokrasi parlementer. Kepala pemerintahan yang disebut sebagai Perdana Menteri menjalankan urusan urusan pemerintahan sehari-hari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh parlemen. Kepala negara yang disebut sebagai "'presiden" atau raja atau sultan", menjalankan tugas kenegaraan yang bersifat seremonial. Kekuasaan yang lebih besar di tangan legislatif atau DPR tersebut dalam istilah yang baru disebut *"legislative heavy"*. Demokrasi perlementer banyak dianut di negara negara Eropa Barat, Inggris, Australia dan sebagian di Asia seperti India, Thailand dan Jepang. Namun sebaliknya jika kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dirangkap oleh seorang presiden, maka sistem pemerintahan disebut "sistem presidentiil".

### 3.1.4 Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal adalah demokrasi yang diterapkan di negara yang menganut ideologi liberalisme. Demokrasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai masyarakat yang menganut paham kebebasan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Masyarakatnya memiliki kebebasan mengembangkan nilai-nilai kehidupan, kebebasan berekspresi termasuk juga perilaku masyarakat sangat bebas. Bahkan kebebasan tersebut sering tidak terkendali yang terkadang melewati batas nilai-nilai ajaran agama, misalnya di Perancis perkawinan sejenis atau kaum homoseksual sudah dilegalkan dan secara ekstrim banyak warga negara yang menyatakan prinsip " ateis adalah agama" (Ralph Eppersson, 1990).

Sebagai konsekuensi logis negara yang menganut paham liberalisme, dalam penyelenggaraan urusan publik yang menjadi kewenangan pemerintahdan yang bersifat mandatori diserahkan kepada masyarakat atau sektor swasta. Misalnya diperbolehkan masyarakat membentuk sebuah organisasi yang terkait dengan usaha keamanan dan pertahanan seperti unit "tentara bayaran", contoh di Amerika Serikat unit tersebut bernama "*Black Panter*". Dalam demokrasi liberal autoritas negara lebih kecil dibandingkan dengan yang dimiliki masyarakat. Asumsinya bahwa masyarakat sudah lebih pandai dan lebih tahu untuk mengatur dirinya sendiri. Sehingga banyak urusan masyarakat yang sudah tidak lagi di laksanakan oleh negara. Fungsi negara sebagai penjaga malam atau *Watch Dog*. Fungsi pemerintah hanya sebagai regulator, pengendali dan mandatori. Jadi pemerintah hanya menjalankan kepentingan publik yang diwajibkan saja. Kekuasaan lembaga politik tersebut memiliki kekuatan yang seimbang antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, *Check an balance power* berfungsi baik. Demokrasi liberal ini banyak dianut oleh negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, Australia dan Negara-negara Eropa. Demokrasi liberal terutama di negara-negara maju, sebagian besar, memiliki kemajuan di bidang ekonomi sangat luar biasa. Artinya demokrasi politik dan demokrasi ekonomi bisa berjalan seiring. Demokrasi liberal ini pada umumnya sistim pemerintahannya berdasarkan sistim parlementer. Demikian pula pada umumnya negara-negara yang menganut demokrasi liberal, memiliki keunggulan di bidang ekonomi yang lebih baik dan masyarakatnya sebagian besar relatif sejahtera ekonominya. Walaupun dilain pihak dalam kehidupan sosial terjadi distorsi terhadap nilai-nilai kemasyarakatan. Misalnya rusaknya sistem kekeluargaan, legalisasi perkawinan sejenis, dekadensi moral di kalangan generasi muda dan lain-lain.

### 3.1.5 Demokrasi Terpimpin

Istilah demokrasi terpimpin ini hanya dalam kamus politik di Indonesia. Munculnya nama demokrasi terpimpin ketika Bung Karno selaku Presiden Indonesia mengeluarkan Dekrit Presiden RI 1959, salah satu keputusan dekrit tersebut yaitu kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dengan Undang-Undang Dasar 1945 maka Bung Karno menjadi Presiden yang memiliki kekuasaan baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan.

Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dalam penyelenggaraan kekuasaan lebih terarah dan terpimpin. Kekuasaan diselenggarakan dikendalikan secara terpimpin. Agar semua terkendali di bawah seorang pemimpin. Demokrasi terpimpin, dalam perkembangannya terjadi peristiwa yang menjadi catatan penting dan bersejarah bagi kajian ilmu politik yaitu; pertama pada periode pasca dekrit presiden, Bung

Karno merealisasikan ide penggabungan 3 (tiga) ideologi besar menjadi satu yaitu; Nasionalis, Agama dan Komunis menjadi Ideologi "NASAKOM"; Kedua Presiden Sukarno diangkat sebagai Presiden seumur hidup.

### 3.1.6 Demokrasi Pancasila

Istilah demokrasi Pancasila berkaitan dengan ideologi negara dan bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Istilah ini muncul pada masa pemerintahan Orde Baru di Bawah kepemimpinan Presiden Suharto. Pada waktu itu dalam membangun kehidupan politik salah satunya adalah membangun dan menata demokrasi agar supaya sejarah orde lama yang penuh dengan pertikaian politik antara partai, karena mempraktekkan konsep demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin.

Disebut Demokrasi Pancasila adalah bahwa Demokrasi yang dikembangkan berdasarkan pada pemahaman terhadap nilai-nilai musyawarah dan permufakatan sebagaimana yang tercantum dalam sila keempat Pancasila. Keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Keputusan berdasarkan suara terbanyak sebisa mungkin dihindari. Bandingkan dengan konsep demokrasi yang berlaku di negara barat, keputusan selalu dengan berdasarkan suara terbanyak. Padahal secara esensial pada hakekatnya suara terbanyak tidak selalu keputusan yang diambil itu benar. Bahkan sering dikatakan bahwa "barang siapa mengikuti kebanyakan orang" akan tersesat. Tetapi itulah jalan pintas yang sering diambil untuk mempercepat proses dan secara praktis, keputusan di voting suara terbanyak yang digunakan dalam demokrasi kita. Pada masa demokrasi Pancasila yang justru berumur paling panjang yang 30 (tiga puluh) tahun lebih usia penerapan demokrasi Pancasila. Namun kehidupan politik secara essensial yang dirasakan oleh berbagai kalangan masyarakat terjadi pengekangan, depolitisasi, pemerintahan dikendalikan secara sentralistik dan gaya kepemimpinan otoriter, sehingga nama atau istilah demokrasi Pancasila justru menjadi tidak sesuai dengan kebesaran dan kemurnian "Pancasila" itu sendiri.

### 3.1.7 Demokrasi Sosial

Pemikiran demokrasi sosial ditulis seorang pakar yaitu Antony Giddens yang menulis tentang *"The Third Way The Renewal of Social Democracy"* dalam menjelaskan demokrasi sosial menggunakan referensi *Anthony Giddens* tersebut sebagai pembanding pemikiran yang berkembang secara kontekstual. Munculnya istilah demokrasi sosial merupakan upaya pemikiran "jalan tengah" atau disebut "jalan ketiga" *(The Third Way)* antara kegagalan sosialisme komunisme, di Negara Uni Soviet dengan kegagalan liberal kapitalisme di negara berkembang. Negara yang menganut paham sosialisme

dimana peran negara besar, peran pasar dibatasi oleh intervensi pemerintah, prinsip Kolektivisme kuat, negara mendominasi masyarakat madani. Di lain pihak prinsip negara liberal atau neo liberalisme, jadi peran "pemerintah minimal", *"Civil Society"* (masyarakat madani) otonom, orientasi ke arah negara kesejahteraan sebagai jaring pengaman sosial, untuk mengerem fundamentalisme pasar bebas. Kedua jalan tersebut yang dikatakan sebagai "jalan kiri" dan "jalan kanan" kedua jalan tersebut di "dunia ketiga" mencoba menerapkan demokrasi tersebut mengalami kegagalan termasuk di Indonesia. Jalan ketiga menurut Antohy Giddens mengembangkan demokrasi sosial menekankan pada aspek "Solidaritas" dan "Kesejahteraan".

Dalam konteks Indonesia, konsep demokrasi sosial tentunya pemikiran "jalan tengah" sebagai analisa "jalan ketiga" bisa menjadi inspirasi memperbaiki praktek demokrasi yang berkembang saat ini. Di telaah lebih mendalam pada kesempatan yang lebih khusus untuk memberikan *guide line* dalam implementasinya. Sesungguhnya mendalami konstitusi dasar kita menunjukkan prinsip-prinsip "jalan tengah" karena negara melarang "prinsip etatisme" atau peran serba negara dan juga tidak membolehkan praktek liberal kapitalisme dalam kegiatan ekonomi. Prinsip "Jalan Tengah" yang khas dengan ideologi Pancasila tinggal dijabarkan dan di operasionalkan ke dalam berbagai kebijakan pemerintah. Seperti membangun jaring pengaman sosial, berupa infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat miskin dan masyarakat termarginalkan. Keterbukaan terhadap akses informasi tentang pembangunan yang berpihak terhadap mereka misalnya penataan pemukiman, fasilitas kehidupan dasar mereka, tata ruang yang memadai bagi mereka untuk melakukan kegiatan sosial dan lain-lain. Hal tersebut sebagai bentuk dari intervensi pemerintah dalam domain kepentingan publik yang memiliki tingkat eksternalitas yang tinggi. Memperkuat pelembagaan sosial sebagai salah satu fungsi kontrak sosial yang harus dikembangkan dan diberikan kesepakatan yang luas. Partisipasi politik dan masyarakat menjadi lebih kuat dan proposional. Demokrasi sosial sebenarnya sebagai perwujudan upaya pemerintah mengatasi kesenjangan sosial. Misalnya penerapan konsep "sosialisme pasar" yang telah dipraktekan di Negara Jerman dan Perancis, merupakan kombinasi antara sosialisme dengan liberal kapitalisme.

### 3.1.8 Demokrasi Ekonomi

Pengembangan demokrasi politik ke arah demokrasi ekonomi merupakan tuntutan yang mendasar. Jika demokrasi politik secara fundamental telah tertata dengan baik dan partisipasi politik masyarakat juga semakin meningkat, maka kesempatan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi juga harus dibuka akses secara luas partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi, maka konteks Indonesia Moh.

Hatta wakil presiden pertama Indonesia, telah mengembangkan pemikiran bahwa pembangunan ekonomi harus dilakukan dan dikerjakan secara bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pembangunan ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan yaitu melalui gotong royong, diarahkan dalam bentuk "Koperasi". Jadi "Koperasi" menjadi "Soko Guru" Pembangunan Ekonomi Indonesia. Dalam prinsip ekonomi "Koperasi" tidak ada lagi sistem monopoli maupun oligopoli. Keserakahan kedua sifat tadi bisa dikendalikan oleh sistem "Koperasi". Jadi demokrasi ekonomi adalah suatu konsep dimana melibatkan sebanyak mungkin masyarakat dalam akses kegiatan ekonomi. Prinsip kerjasama secara kekeluargaan harus dikembangkan dalam bentuk "Koperasi". Seluruh aktivitas ekonomi masyarakat dari hulu sampai hilir di kelola secara "Koperasi" atau keterlibatan masyarakat secara luas dalam ekonomi menjadi prioritas kebijakan ekonomi pada pemerintahan yang dibentuk oleh kabinet hasil pemilihan umum tahun 2014, seperti industrialisasi automotif model Korea Selatan.

Di Jepang dan Swedia kehidupan "Koperasi" sangat maju dan bahkan memegang peranan yang vital dalam menentukan kebijakan ekonomi negara. Koperasi mampu memberikan kesejahteraan bagi para anggotanya. Mengapa di Indonesia demokrasi ekonomi yang direpresentasikan dalam wadah ekonomi "Koperasi" tidak berkembang dengan baik dan bahkan banyak yang "Mati Suri". Kondisi ini tidak lain karena kebijakan ekonomi dan bahkan strategi pembangunan dibidang ekonomi sudah terlalu jauh dan mendalam berada dalam cengkeraman gurita sistem kapitalisme global. Sistem politik dan sistem pemerintahan tidak mampu melepaskan diri dari pengaruh intervensi global. Bahkan produk undang-undang di bidang energi dan mineral pun sudah terperangkap dalam genggaman kapitalisme global tersebut.

## 3.2 SEJARAH PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Seperti diketahui bahwa sejak berdirinya Negara Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 dengan berdasarkan konstitusi UUD 1945 secara legalitas formal telah memenuhi kriteria sebagai negara menganut paham demokrasi. Isi konstitusi telah menunjukan adanya pembagian kekuasaan antara badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Masing-masing lembaga tinggi negara mempunyai fungsi-fungsi terperinci sebagai mana fungsi pembagian kekuasaan. Kekuasaan berada di tangan rakyat yang di representasikan oleh orang-orang yang di ketiga lembaga tersebut. Untuk melengkapi pilar-pilar demokrasi, pada bulan November tahun 1945, melalui maklumat No X yang ditetapkan oleh wakil presiden di mana isi maklumat No X tersebut dibolehkan pendirian partai-partai politik.

Dalam perkembangan implementasi demokrasi di Indonesia selama 6 (enam) dasawarsa menunjukan kharakteristik yang berbeda-beda dari waktu ke waktu: Oleh

karena itu di bawah ini diuraikan pengalaman praktek demokrasi dari waktu ke waktu yaitu sebagai berikut;

### 3.2.1 Tahun 1945 s/d 1959; Demokrasi Parlementer

Pada masa demokrasi parlementer kehidupan politik sangat dinamis dan karena situasi pada waktu itu masih baru merdeka, keamanan masih belum pulih dari gangguan dan ancaman separatisme serta keinginan negara kolonial masih ingin kembali ke Indonesia juga merupakan gangguan keamanan dan pertahanan. Disamping itu sistem politik yang dibangun yaitu demokrasi parlementer, yaitu sebagai kepala pemerintahan yang menjalankan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Perdana Menteri. Dalam demokrasi Parlementer, dan DPR salah satu fungsi yaitu mengangkat dan memberhentikan kepala pemerintahan atau perdana menteri. Pada masa itu pembentukan kabinet tidak pernah ada yang berumur lebih dari satu tahun lebih(1,3 th) bahkan ada kabinet berumur 3 bulan. Kehidupan politik pada waktu itu belum stabil bahkan penyelenggaraan pemilu yang merupakan salah satu prasyarat negara demokratis, ternyata baru bisa dilaksanakan pada tahun 1955, artinya 10 (sepuluh) tahun setelah berdirinya Negara Republik Indonesia (NKRI). Penyelenggaraan pemilu tahun 1955 di tengah kehidupan politik yang belum stabil tersebut ternyata pelaksanaan pemilu berjalan dengan aman dan damai serta demokratis. Kontestan pemilu tahun 1955 yang ikut sebanyak 29 (dua puluh sembilan) partai dan individu. Nama partai yang terbesar hanya 5 (lima) yaitu; PNI, Partai Masyumi, NU, PKI dan PSI. Hasil pemilu tahun 1955 telah menghasilkan terbentuknya DPR yang pada waktu itu disebut Dewan Konstituante. Sebagaimana diuraikan di atas sebenarnya dengan pelaksanaan pemilu tahun 1955 berjalan dengan jujur, adil, dan aman menunjukkan kedewasaan dan kematangan berpolitik warga negara pada saat itu, walaupun di tengah stabilitas politik yang masih rapuh dan stabilitas ekonomi yang belum mantap. Namun Dewan Konstituante pada tahun 1959 dibubarkan oleh Presiden Soekarno melalui dekrit presiden tahun 1959, dengan salah satu pertimbangan ketika Dewan Konstituante dianggap tidak bisa menyelesaikan " Perubahan Undang-undang Dasar Sementara"yang tinggal beberapa pasal, menjadi undang-undang yang lebih lengkap. Oleh karena pertimbangan stabilitas politik waktu itu, maka dengan dekrit presiden tahun 1959 salah satunya menetapkan kembali kepada UUD 1945. Sesungguhnya demokrasi parlementer merupakan demokrasi yang sampai saat ini banyak digunakan oleh berbagai negara-negara maju seperti di Eropa, Australia, Inggris dan lain-lain. Kehidupan politik di era demokrasi parlementer meskipun banyak diwarnai oleh pertikaian antar partai politik, akan tetapi dinamika politik lebih dinamis dan lebih demokratis. Pembinaan dan pengorganisasian partai politik relatif baik, pemahaman kader terhadap nilai-nilai ideologis lebih kuat. Semangat dan loyalitas pengabdian para

kader sangat militan. Meskipun di lain pihak pembangunan ekonomi terbengkalai, yang berakibat mempengaruhi terhadap stabilitas politik. Sebab politik dan ekonomi merupakan dua sisi mata uang, oleh karena itu pembangunan politik dan pembangunan ekonomi harus seimbang iramanya. Pengalaman sejarah dua pemimpin besar antara Soekarno dan Suharto jatuh dari singgasana kepresidenan, juga diakibatkan oleh dua hal yaitu politik dan ekonomi.

### 3.2.2 Tahun 1959 s/d 1965; Masa Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin seperti telah disebutkan pada bab terdahulu merupakan demokrasi yang khas Indonesia. Pada masa itu terjadi peristiwa politik dengan dikeluarkan oleh Presiden yang disebut Dekrit Presiden tahun 1959. Isi dekrit tersebut yaitu pertama: Bubarkan Dewan Konstituante kedua: pernyataan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga; pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong (DPRGR) berdasarkan representasi partai-partai politik dan pengangkatan golongan fungsional. Dengan kekuasaan penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD 1945 maka jabatan Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara dirangkap oleh Presiden.

Dengan kekuasaan yang besar ditangan Presiden maka sejak saat itu Soekarno memegang kekuasaan sebagai Kepala Negara dan juga sebagai Kepala Pemerintahan. Oleh karena itu dengan kekuasaan yang besar maka pelaksanaan demokrasi lebih mudah dilakukan secara terpimpin, agar demokrasi berjalan lebih tertib dan bisa dikendalikan dengan baik. Sehingga demokrasi yang berjalan pada masa itu disebut sebagai "Demokrasi Terpimpin". Adapun setelah Dekrit Presiden dengan dibubarkannya anggota dewan konstituante tersebut, maka pembentukan DPR Sementara dan MPRS tidak berdasarkan melalui hasil Pemilu. Tapi pada Tahun 1960 keanggotaan DPR (S) dan MPR (S) diangkat oleh Presiden. Pada masa Demokrasi Terpimpin persaingan antar partai politik semakin tajam dan saling berebut pengaruh terhadap Presiden Soekarno. Namun karena ambisi PKI yang besar akhirnya terlibat dan terjebak dalam skenario G 30 S PKI 1965 yang menjadi sasaran adalah beberapa Jenderal terbunuh melalui skenario Dewan Jenderal. Sejak peristiwa sejak G 30 S PKI 1965, Mayor Jenderal Soeharto di tunjuk sebagai panglima keamanan nasional melalui supersemar. Pada tahun 1967 secara resmi Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden danPKI dibubarkan dan dilarang berdiri di Indonesia.

Selama pelaksanaan demokrasi terpimpin beberapa catatan bersejarah yang harus diingat oleh masyarakat Indonesia yaitu pertama; pada tahun 1960 presiden Soekarno memutuskan keluar dari PBB dan mendirikan Ganefo sebagai cikal-bakal Gerakan Non Blok, kedua; presiden Soekarno membuat kebijakan yang berani yaitu melakukan

program nasionalisasi perusahaan asing dan melakukan renegoisasi kontrak karya dengan PT. Freeport yang lebih menguntungkan negara dan bangsa Indonesia, dengan skema 50%untuk pemerintah Indonesia dan 50% untuk investor asing, ketiga; presiden Soekarno mengambil kebijakan mengembalikan warga negara Cina dan orang-orang Yahudi ke negaranya. Bung Karno sebagai seorang demokrat sejati akan tetapi sayang diakhir masa jabatan kepresidenannya justru terjebak oleh kultus individu, dengan pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Nasib yang lebih tragis Soekarno sang proklamator tersingkir dari panggung kekuasaan pada 1967. Berbagai kalangan menganalisis ada kemungkinan terkait dengan kebijakan presiden Soekarno yang kontroversial seperti disebutkan di atas. Kontroversi tersingkirnya dari panggung kekuasaan ada keterlibatan kekuatan asing melalui operasi intelejen CIA, sebagaimana banyak dianalisis dari referensi bacaan sejarah peristiwa G 30 SPKI yang memuat beragam versi.

### 3.2.3 Tahun 1967 s/d 1998; Masa Demokrasi Pancasila

Demokrasi pancasila merupakan demokrasi yang berdasarkan pada ideologi negara dan bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Demokrasi yang ingin dikembangkan pada masa itu adalah bahwa keputusan dan kebijakan penting dan strategis kekuasaan negara harus bermakna pada azas musyawarah untuk mufakat, seperti tercantum dalam sila keempat Pancasila. Keputusan berdasarkan suara terbanyak sedapat mungkin dihindari dan diupayakan melalui lobby, negosiasi, kompromi dan pada akhirnya konsensus. Sebab jika pengambilan keputusan melalui proses voting pada akhirnya akan merasa ada yang dikalahkan dan dimenangkan, hal ini sudah barang tentu akan menimbulkan bibit disintegrasi masyarakat Indonesia yang masih tradisional. Memang pada dasarnya dengan masih kuatnya nilai-nilai feodalisme baik di kalangan elit maupun masyarakat bawah *(grass root)* belum mampu menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas yakni kalah dan menang sebagai suatu standart nilai baku dalam suatu permainan *(game)*. Dalam Masyarakat tradisional persepsi terhadap kekuasaan adalah tunggal *(Anderson, dalam Priyo Budi, 1993)* dijadikan sebagi acuan dasar dalam pengambilan keputusan. Demokrasi Pancasila berkembang atau dipopulerkan pada masa pemerintahan orde baru. Kebijakan di bidang politik ketika awal pemerintahan orde baru adalah konsolidasi terhadap penentuan jumlah partai politik. Setelah pada 1967 Mayor Jenderal Suharto dilantik sebagai Presiden menggantikan Ir. Soekarno, maka pemilu yang pertama diselenggarakan yaitu tanggal 05 Juli 1971.

Pada pemilu tersebut diikuti oleh 10 (sepuluh) partai politik, untuk mengurangi jumlah partai sejak masuk pemilu 1971 s/d 1973 diupayakan agar dilakukan fusi atau penggabungan jumlah partai politik menjadi 3 (tiga) partai politik. Melalui Undang-

Undang No. 3 Tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya, maka secara resmi jumlah partai politik di Indonesia pada masa demokrasi pancasila menjadi 3 (tiga) yaitu 2 (dua) partai politik; Partai Persatuan pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Pancasila (PDI) serta Golongan Karya (GOLKAR). Uniknya pada saat itu bahwa Golkar adalah bukan sebagai partai politik disepakati sebagai keputusan setingkat undang-undang. Sebagai golongan fungsional yang tidak disebut sebagai "partai politik", pada waktu itu tidak menjadi perdebatan akademis, dan bahkan tidak menjadi polemik tentang eksistensi fungsi kepartaian Golkar. Secara taktis Golkar bukan sebagai partai politik, tetapi sebagai golongan fungsional barangkali untuk menghindari sebagai partai politik saat itu merupakan cara yang tepat. Karena pada masa orde lama, persepsi terhadap partai politik yang berkembang dimasyarakat yaitu bahwa partai politik selalu diwarnai dengan "pertikaian atau konflik". Meskipun kelak di era reformasi, Golkar sudah berubah nama menjadi partai Golkar. Kebijakan di bidang politik yang penting dan strategis dimasa demokrasi pancasila yaitu kebijakan "massa mengambang" *(Flooting Mass)*. Dengan kebijakan massa mengambang tersebut terjadi proses depolitisasi dalam kehidupan masyarakat. Akibatnya masyarakat jauh dari kehidupan politik, menyebabkan di samping kurangnya kesadaran dalam kehidupan bernegara juga partisipasi politik rendah, kontrol masyarakat lemah dan oligarki kekuasaan berkembang tanpa kendali. Dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan maka kebijakan *"Security approach"* lebih dominan, memunculkan tindakan represif sering dilakukan oleh alat negara. Sistem pemerintahan yang dikembangkan cenderung sangat sentralistik, kekuatan orde baru dengan "demokrasi Pancasilanya" justru yang dialami dan dirasakan oleh masyarakat adalah "terjadi pengebirian terhadap nilai-nilai kebebasan. Demokrasi hanya bersifat "semu" atau hanya di permukaan kelihatan demokrasi atau disebut sebagai *"Facade democracy"* (Heynes, 2003) namun dalam prakteknya tindakan pemerintah lebih represif dan otoriter. Meskipun di lain pihak, pembangunan ekonomi melaju dengan sangat pesat, akan tetapipembangunan ekonomi yang hanya bertumpu pada pertumbuhan dan skala ekonomi makro, secara empiris distribusi kekayaan tidak merata mengalir kemasyarakat bawah terutama para petani dan nelayan di pedesaan dan masyarakat yang marginal di perkotaan dan kawasan industri. Adapun yang menikmati hasil pembangunan lebih banyak dikuasai oleh para konglongmerat dan kelas menengah yang memiliki akses kekuasaan. Strategi pembangunan ekonomi liberal kapitalis dan pengendalian kebijakan moneter yang didikte oleh IMF dan World Bank merupakan kebijakan yang termasuk kategori mengingkari dari kedaulatan negara. Pada akhirnya sangat wajar ketika kekuasaan yang tidak terkendali dan *Abuse Of Power* yang berlangsung massif, maka puncaknya pada tahun 1997 terjadi krisis moneter dan rakyat Indonesia "marah" terjadi peristiwa demonstrasi *(people power)* besar-besaran mengakhiri singgasana "seorang Jenderal Besar Suharto" harus mengundurkan diri

dari jabatan Presiden yang sudah di genggamnya selama 32 (tiga puluh dua) tahun. Selama rezim ORBA berkuasa demokrasi tidak berjalan dengan semestinya dan KKN merajalela dan sampai saat ini masih sulit dihentikan. Penggantian kepemimpinan nasional yang berakhir tragis terulang kembali dalam sejarah politik di Indonesia, jika Ir. Soekarno berhenti dari jabatan Presiden melalui "Supersemar" dan tragedi G 30 S PKI, sedang Jenderal (Purn) Suharto turun tahta karena gelombang demonstrasi besar-besaran *(people power)* masyarakat Indonesia yang tidak bisa dibendung lagi. Pada akhirnya jabatan Presiden diteruskan oleh wakilnya yaitu Prof. Dr. B.J. Habibie. Akan tetapi masa jabatan kepresidenan B.J. Habibie yang berumur 1 (satu) tahun lebih ketika berakhir tahun 1999, dikarenakan pertanggungjawabannya tidak diterima dalam Sidang Paripurna DPR. Sedangkan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) diberhentikan dari jabatan presiden dalam masa jabatan kurang dari 2 (dua) tahun oleh Sidang Umum Istimewa MPR.

### 3.2.4 Tahun 1999 s/d saat sekarang; Masa Demokrasi Era Reformasi

Demokrasi di era reformasi bagaikan mutiara yang hilang telah ditemukan kembali. Demokrasi yang ditemukan masyarakat memiliki kriteria dan format yang benar yaitu antara lain; *Pertama;* kebebasan mendirikan organisasi dan bahkan organisasi partai politik di buka tanpa batas, *kedua;* kebebasan menyatakan pendapat melalui demokrasi tidak dilarang, *ketiga;* menyelenggarakan pemilu sebayak tiga kali tahun 1999, tahun 2004 dan tahun 2009 bahkan dalam tahun 2004 sudah menerapkan demokrasi langsung dalam pemilihan Presiden dan Gubernur dan Bupati/Walikota, *keempat;* lembaga peradilan sudah relatif lebih bebas dan independen, *kelima;* mobilitas vertikal dan horizontal masyarakat semakin bertambah luas, *keenam;* kebijakan pembangunnan di bidang politik mendukung menuju penyelenggaraan kekuasaan demokratis. Situasi dan kondisi politik seperti tersebut di atas setelahUUD 1945 telah empat kali di amandemen. Kemudian di ikuti pembuatan paket undang-undang bidang politik yaitu; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang No.10 Tahun 2008 tentang pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu Presiden. Keseluruhan undang-undang tersebut secara substansial mengandung praktek penyelenggaraan kekuasaan yang demokratis.

Dalam perkembangan praktek demokrasi beberapa fenomena yang menarik untuk dicermati yaitu anomali yang terjadi di masyarakat. Aspek yang negatif yang muncul yaitu ketika masyarakat Indonesia memperoleh kebebasan berdemokrasi yang tanpa dipersiapkan dengan baik justru menimbulkan kondisi *"shock culture"*. Artinya sikap dan perilaku masyarakat merespon kebebasan secara *(Euphoria)* dalam melakukan "kontrol sosial" diekspresikan dengan sikap yang cenderung "anarkis".

Misalnya demonstrasi atau unjuk rasa dengan melakukan perusakan, pemblokiran jalan, melakukan penyanderaan, dan bahkan tidak jarang terjadi ”bentrokan” dengan aparat keamanan. Kecenderungan sikap masyarakat yang tidak terkendali tersebut bukannya yang diperoleh adalah demokrasi akan tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah “Mobokrasi”.

Kontrol sosial dilakukan dengan demonstrasi aksi unjuk rasa melalui gerakan massa dengan sikap anarkis, barang kali karena sering kali mengalami kegagalan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dikarenakan sikap pemerintah yang kurang merespon dengan baik dan seolah pemerintah mengambil jalan sendiri demikian juga rakyat dengan jalan pikiran sendiri. Artinya komunikasi antara pemerintah dan rakyat berjalan kurang baik. Tentunya ketika masyarakat melakukan protes keras dengan demonstrasi besar-besaran, tentang kenaikan harga BBM, undang-undang ketenagakerjaan mengenai ”tenaga kerja *(outsoursing)*” kenaikan upah buruh dan lain-lain. Kenyataannnya kontrol sosial tersebut tidak berhasil atau gagal menghadapi ”tidak bergemingnya sikap pemerintah” terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut di atas. Oleh karena itu ”kontrol sosial” perlu dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif tanpa merugikan masyarakat itu sendiri, saluran kontrol sosial yang efektif memang harus melalui kelembagaan sosial dan juga kekuatan *(power)* sebagai alat negosiasi dan kompromi dengan pihak penguasa. Pelembagaan sosial yang berpengaruh dan memiliki kekuatan *(power)* layaknya partai politik memang tidak mudah. Jika kelembagaan sosial kita tidak memiliki kekuatan dan pengaruh maka kontrol sosial tersebut tetap akan lemah dan tidak efektif. Sebagai perbandingan, contoh yang menarik dan sederhana di Jepang yaitu apa yang dilakukan oleh para petani di Jepang, kelompok masyarakat petani yang tergabung dalam koperasi, cukup memiliki pengaruh dalam melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Misalnya; ketika petani melakukan protes terhadap kebijakan yang dianggap merugikan para petani tersebut, maka demonstrasi para petani cukup hanya membuang hasil pertaniannya seperti buah semangka, buah apel dan lain-lain, ke jalan-jalan raya. Aksi tersebut sangat direspon oleh pemerintah setempat dan dengan aksi tersebut dapat mengakibatkan pejabat publik mengundurkan diri dari jabatannya. Contoh ini hanya bisa berjalan dengan baik jika masyarakat secara umum telah mempunyai kultur ”budaya malu”.

Fenomena-fenomena tersebut di atas merupakan gambaran secara umum bahwa implementasi demokrasi dari masa ke masa selalu mengalami dinamikanya masing-masing, meskipun demokrasi di era reformasi ini, oleh rezim penguasa tidak memberikan label yang secara spesifik sebagai ciri dari pelaksanaan demokrasi tersebut. Namun demokrasi yang dijalankan di era pemerintahan saat ini oleh banyak kalangan masih di sebut sebagai ”Demokrasi Prosedural” yang oleh *Jeff Heyness (2003)* disebut sebagai *”Formal Democracy”*.

Sesungguhnya masyarakat sangat berharap bahwa ketika reformasi digulirkan akan membawa perubahan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun meningkatkan kebutuhan pokok, barang-barang sembako tidak sulit dicari, pendidikan dan kesehatan bisa dinikmati dengan biaya yang murah dan lain-lain. Dengan demikian jika hasil Pemilu tahun 2009 melalui pembentukan pemerintahan yang baru diharapkan memiliki komitmen melakukan perubahan yang signifikan. Dengan perubahan tersebut mampu mengembangkan demokrasi yang lebih substansial, seperti disebutkan *"Substantive Democracy" (Jeff Heyness, 2003)*. Penjelasan di atas mengenai demokrasi, melihat refleksi hasil pemilu 2009.

Agar supaya pemerintahan yang baru, sukses melaksanakan pembangunan demokrasi yang lebih *substantive,* tidak ada pilihan kecuali pemerintah sanggup merubah strategi pembangunan ekonomi yang tidak bergantung pada kekuatan asing. Sebagai negara berdaulat harus melakukan kemampuan negosiasi dan kompromi, untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Sebab jika pemerintah dalam menetapkan kebijakan masih tidak sanggup menentukan sikap sebagai negara dan pemerintah yang berdaulat niscaya hasil pembangunan tidak mengalami perubahan perbaikan ekonomi yang signifikan terhadap rakyat miskin. Namun jika pembangunan ekonomi masih dipengaruhi dan didikte negara luar walaupun IMF dan Bank Dunia saat ini perannya sudah pasif, tetapi ketika salah satu direktur IMF atau Bank Dunia dari orang Indonesia, sedikit banyak nasehat atau *advis* secara diam-diam dilakukan. Sehingga perubahan ekonomi yang pro rakyat miskin akan tetap bernasib sama dengan sebelumnya. Oleh sebab itu jika konsolidasi kekuasaan melalui desain sistem politik yang cenderung disorientasi dengan kepentingan bangsa dan negara, maka kecenderungan ekonomi lebih menjadi kekuasaan kelompok tertentu, maka kehancuran negara dan bangsa secara perlahan dan pasti tinggal menunggu waktu.

Oleh sebab itu dengan hasil pemilihan umum tahun 2014 sebagai pemenang dalam pemilu legeslatif yaitu PDIP. Jika presiden terpilih dari kader PDIP atau presiden dari partai lain menjadi tugas berat pemerintahan yang akan datang dalam memperjuangkan kedaulatan ekonomi dan politik, penegakan hukum dan pemantapan demokrasi yang cenderung liberal, mampu menjadi landasan bagi kemakmuran dan keadilan rakyat Indonesia.

## 3.3 PEMBANGUNAN SISTEM POLITIK YANG DEMOKRATIS

### 3.3.1 Latar Belakang

Dalam penjelasan mengenai sistem politik menurut Istianto (2011) dikatan istilah membangun atau pembangunan berarti menyangkut suatu proses perubahan kearah

kemajuan. Kata kemajuan itu sendiri sering disamarkan dengan "modernisasi", artinya bahwa tolak ukur dari suatu kemajuan jika melakukan modernisasi. Jika kriteria modernisasi menggunakan model dunia barat yang disebut dengan Westernisasi, sesungguhnya tidak semua yang datang dari dunia barat terutama Amerika dan Eropa pada kenyataannya belum tentu cocok untuk ukuran masyarakat Indonesia. Sebagai contoh ukuran demokrasi yang lebih menekankan pada aspek kuantitas melalui mekanisme voting dalam pengambilan keputusan atau dalam pemilu sudah merupakan *trade mark* demokrasi, boleh jadi masih "bias", jika peran pemilih (*voter*) kurang rasional atau akses informasi yang dimiliki relatif kurang. Oleh karena mekanisme dalam praktek demokrasi bisa dipastikan mudah terjadi manipulasi dalam perhitungan suara. Indikator kegagalan praktek demokrasi dalam pemilu kepala daerah yaitu terpilihnya para kepala daerah, baik gubernur, bupati/walikota berdasarkan data yang dirilis kemendagri (2012) bahwa sebanyak 474 pejabat daerah melakukan perbuatan korupsi dan separuh lebih (318) diantaranya adalah kepala daerah. Oleh sebab itu sesuai dengan realitas dalam praktek demokrasi langsung, ditenggarai bahwa masyarakat Indonesia dalam mengikuti praktek demokrasi tersebut masih dalam kategori kurang rasional dan bahkan akses informasi yang dimiliki masyarakat masih terbatas.

Melihat fenomena di atas, membangunan sistem politik menyangkut perubahan terhadap kebebasan, kemerdekaan dan hak azasi manusia serta keadilan dan demokratisasi yang sesuai dengan kondisi nilai-nilai sosial budaya masyarakatnya. Sistem politik sebagai instrumen mengatur dan menata serta integrasi kehidupan masyarakat yang aman, damai dan stabil, hakekatnya untuk kepentingan manusia baik sebagai pribadi dan makhluk sosial. Untuk itu konsep dan teori yang digunakan dalam "pembangunan sistem politik" harus direncanakan dengan baik.

selanjutnya menurut Istianto (2011) dijelaskan bahwa sebagaimana yang dikemukakan oleh *Ramlan Surbakti* seperti yang dikutip *Arifin Rahman (1998)* dikatakan bahwa pembangunan dan modernisasi politik merupakan perubahan politik, tetapi tidak sebaliknya, konsep pembangunan sedikit banyak terkandung adanya upaya yang disengaja, relatif terencana, memiliki sasaran yang relatif jelas, proses yang bersifat evolusioner dan tidak mengandung kekerasan. Pembangunan politik dilihat sebagai implikasi politik dari pembangunan dan ukurannya dibedakan dengan pembangunan ekonomi. Sasaran yang hendak dicapai dengan pembangunan politik tidak hanya sistem politik yang demokratis, tetapi juga kemampuan-kemampuan lain yang dianggap penting dipunyai dengan suatu sistem politk untuk dapat melestarikan dirinya.

Namun *John Markoff (1998)* mempertanyakan: mengapa ada sistem politik yang lebih demokratis pada suatu negara pada suatu masa tertentu, sementara pada masa yang lain dibanyak negara berlangsung sistem yang kurang demokratis.

### 3.3.2 Fenomena Sistem Politik di Indonesia

Pernyataan Markoff, jika digunakan untuk menganalisis situasi Indonesia maka pernyataan tersebut dapat dijelaskan dengan membandingkan keadaan pada sistem politik era orde lama dengan orde baru serta era reformasi. Sebagaimana dijelaskan pada bab terdahulu bahwa pada masa orde lama mulai tahun 1945 s/d 1959 dapat dikatakan sistem politik yang diterapkan sangat demokratis. Ciri yang menonjol sistem politik yang demokratis yaitu; Pertama; sistem kepartaian yang dianut yaitu sistem multi partai. Kedua; sistem pemerintahan menerapkan sistem pemerintahan parlementer dimana kepemimpinan nasional dipisahkan antara kepala pemerintahan yang disebut "perdana menteri", dipilih dan diangkat oleh parlemen atau DPR, sedangkan presiden ditetapkan sebagai kepala negara. Ketiga; pada masa itu dapat menyelenggarakan pemilu pada tahun 1955 dengan jujur, adil, rahasia, dan aman. Akan tetapi ketika terjadi peristiwa Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang dilakukan oleh Presiden Soekarno dengan membubarkan Dewan Konstituante (DPR hasil pemilu 1955) dan konstitusi negara kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 maka kepemimpinan nasional diambil alih Soekarno dengan menerapkan sistem pemerintahan presidensiil dan demokrasi yang diterapkan diberi nama "Demokrasi Terpimpin". Pada masa itu berlangsung mulai tahun 1959 s/d 1966, maka kran demokrasi mulai dikendalikan oleh Soekarno supaya lebih tertib dan terarah di bawah satu tangan komando seorang presiden. Dalam pengalaman sejarah politik mulai tahun 1945 s/d 1966, mengalami dua situasi sistem politik yakni dari mulai sistem politik yang sangat demokratis, demokrasi parlementer (1945-1959) dan sistem politik yang kurang demokratis, dimana kekuasaan dikendalikan secara terpimpin oleh penguasa yang populer disebut demokrasi terpimpin (1959-1966).

Kemudian jika membandingkan lagi dengan sistem politik orde baru yang berlangsung tahun 1967 s/d 1998, pada masa itu berlangsung praktek sistem politik yang diberi label "demokrasi Pancasila". Secara formal dan prosedural dalam menerapkan sistem politik memenuhi kriteria sebagai sistem politik yang demokratis. Akan tetapi pada masa itu situasi yang dirasakan masyarakat penuh dengan: penekanan, intimidasi dan bahkan kelompok yang bersuara radikal tidak hanya dibungkam tetapi juga dipenjarakan bahkan sampai terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Artinya, ketika terjadi persoalan atau konflik antara rakyat dan pemerintah penyelesaiannya sering dilakukan dengan kekerasan seperti peristiwa "Tanjung Priok pada tahun 1984 dan kejadian saat awal perjuangan reformasi pada tahun 1997, terjadi peristiwa

penembakan mahasiswa Trisakti. Sampai saat ini belum tuntas penyelesaian tuntutan keluarga korban atas peristiwa tersebut siapa yang harus bertanggung jawab.

Adapun era reformasi yang dimulai pada tahun 1998 sampai sekarang, merupakan era konsolidasi kekuasaan melalui demokrasi yang lebih berpijak pada "kekuatan sipil" atau "*civil society*". Keberpihakan terhadap upaya membangun sistem politik yang demokratis dengan akar yang kuat dari dukungan masyarakat sipil bertujuan agar demokrasi mampu melakukan perubahan yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat secara luas, merata, dan adil yang mengalir ke segenap lapisan masyarakat.

Oleh karena pada masa sistem politik demokrasi Pancasila atau Orde Baru, praktek demokrasi yang kekuasaannya lebih di dominasi oleh kalangan militer dengan konsep Dwi Fungsi ABRI, secara empiristik demokrasi yang berjalan menjadi bersifat semu atau meminjam istilah Jeff Heyness (2003) dikatakan sebagai "*faced demokcracy*". Sebab pada kenyataannya dalam praktek demokrasi yang lebih menekankan "kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat", pada sistem orde baru dikendalikan dengan sangat ketat melalui operasi intelejen yang sangat rapi, teratur, dan sistematis.

Perkembangan praktek demokrasi, pada era reformasi telah memilih model "demokrasi langsung (*direct democracy*)" dalam memilih "presiden dan kepala daerah. Model demokrasi langsung terutama yang digunakan untuk memilih kepala daerah menunjukkan fenomena yang sebenarnya cukup merisaukan. Sebab situasi saat ini banyak peristiwa yang justru menjurus pada eskalasi konflik baik pada tingkat supra struktur politik dan infrastruktur politik maupun penyalahgunaan wewenang jabatan. Di samping itu para pemimpin yang terpilih melalui demokrasi langsung pada kenyataannya kurang memuaskan masyarakat dalam pembangunan daerah dan kemajuan kesejahteraannya.

### 3.3.3 Pendekatan Teori Sistem Politik yang Demokratis

Kemudian kajian secara teoritis untuk melengkapi landasan pemikiran yang logis dan rasional bagaimana membangun suatu sistem politik yang demokratis. Menggunakan landasan teori *Samuel P. Huntington (1998)* dimana memberikan ilustrasi paling tidak bagi suatu sistem politik yang demokratis. Dalam teori tersebut sebagaimana ia mengutip pendapat *Joseph Schumpeter* mengatakan "dengan mengikuti tradisi *Schumpeterian*, bahwa studi ini mendefinisikan sistem politik abad ke-20 sebagai sistem politik demokratis. Model ini yakni para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala. Sistem itu para calon secara bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara". Pernyataan di atas menegaskan bahwa kata kunci sistem politik yang demokratis adalah terletak pada pelaksanaan pemilu

yang berkualitas, yaitu yang berlangsung secara adil, jujur, dan berkala. Dalam konteks kasus pemilu di Indonesia apakah sudah memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi di atas. Secara empiristik walaupun sudah dilaksanakan secara berkala, tetapi belum sepenuhnya dapat dikatakan adil dan jujur, dikarenakan pelaksanaan pemilu masih diwarnai dengan menonjolnya ”politik uang” dan banyak terjadi gugatan sengketa pemilu serta partisipasi pemilih yang relatif rendah yaitu kurang dari 60% terutama pada pemilukada.

Selanjutnya berkaitan dengan upaya menjelaskan sistem politik yang demokratis, bisa dijadikan acuan untuk ke depan atas beberapa preposisi atau hipotesis Mohtar Mas'oed *(2003)* berkisar mengenai teori demokrasi kontemporer yaitu; apa yang mendukung transisi menuju demokrasi. Bagaimana pergantian rezim secara demokratis berlangsung, bagaimana demokrasi-demokrasi baru itu didirikan dan dikonsolidasikan, apa konsekuensi dari karakteristik transisi itu terhadap masa depan pemerintahan demokrasi.

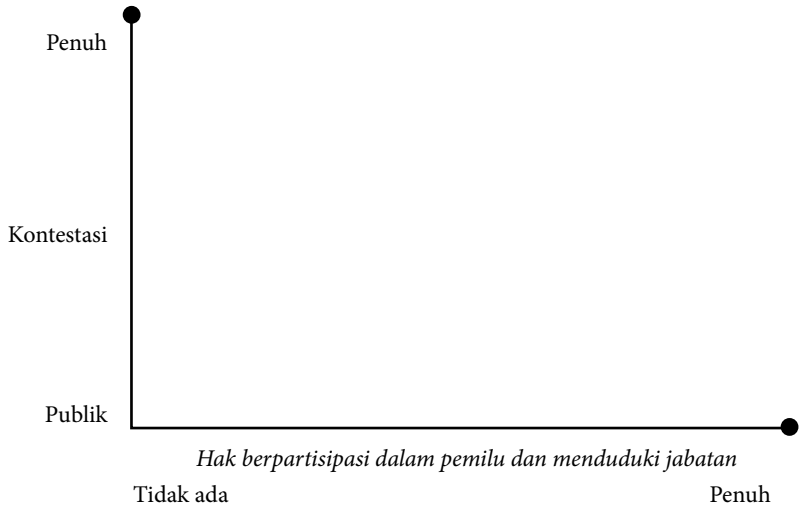
Proposisi di atas dapat menjadi arah untuk membangun sebuah konsep dan teorisasi demokrasi yang lebih maju dibanding demokrasi yang rasional, *utopian* dan ideal yang mewarnai masa sebelumnya, kehilangan banyak pengaruhnya. Seperti pendapat *Mohtar Mas'oed (2003)* yang tetap terpengaruh gagasan *Joseph Schumpeter* setengah abad lalu, bahwa teorisasi masa kini lebih menekankan persoalan prosedur, yaitu persoalan menciptakan prosedur. Menurut *Schumpeter* yang oleh teoritisi klasik disebut ”kehendak rakyat” sebenarnya adalah hasil dari proses politik, bukan motor penggeraknya. Demokrasi atau metode demokratis menurut *Schumpeter* adalah: ”pengaturan kelembagaan untuk mencapai keputusan-keputusan politis dimana individu-individu, melalui perjuangan memperebutkan suara rakyat pemilih, memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan *(Hungtington, 1991:6)*.

Kemudian teori-teori mengenai demokrasi yang dimunculkan oleh para ilmuwan politik dari karya lama masih menarik untuk menjadi bahan kajian dalam membangun sistem politik demokratis seperti misalnya *Robert A. Dahl (1973)* dalam Mochtar Mas'oed (2003). Merumuskan suatu tatanan politik yang disebutnya ”Poliarki” *(Polyarchy)*, istilah yang dipakai untuk menyebut demokrasi.

Menurut *Robert Dahl* ciri khas demokrasi adalah sikap tanggap pemerintah secara terus-menerus terhadap preferensi atau keinginan atau keinginan warga negaranya. Tatanan politik seperti itu bisa digambarkan dengan memakai dua dimensi teoritik yaitu:

1) seberapa tinggi-tingkat kontestasi, kompetisi atau oposisi yang dimungkinkan dan;
2) seberapa banyak warga negara yang memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kompetisi politik itu (lihat Gambar 3.1).

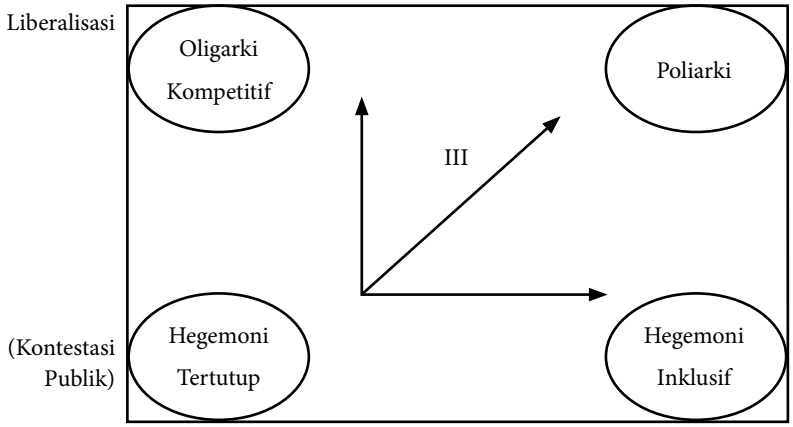
**Gambar 3.1.**
**Dua Dimensi Teoritik Demokratisasi**




Selanjutnya berdasarkan dua dimensi itu *Dahl* membuat tipologi empat sistem politik; hegemoni tertutup, oligarki kompetitif, hegemoni inklusif dan poliarki.

Dalam Gambar. 3.2 *Dahl* juga menunjukkan kemungkinan perubahan dari sistem "hegemoni tertutup" dimana tingkat kontestasi publik dan partisipasi sama-sama rendah, ketipe sistem lain. Jalan III itulah yang dimaksud dengan "demokratisasi" yaitu jalan menuju sistem dimana tingkat kontestasi publik dan partisipasi semua sama tinggi.

**Gambar 3.2.**
**Liberalisasi, Partisipasi Demokrasi**



Dengan melihat model–model atau tipologi sistem politik yang ditawarkan oleh *Robert A. Dahl* melalui Gambar 3.2. adalah seiring dengan situasi empiris di Indonesia yaitu selama rezim Orde Baru pada situasi ”hagemoni tertutup” dan era reformasi sistem politik yang akan dibangun ke arah pergeseran ”poliarki”atau demokratisasi. Oleh sebab itu dalam menghadapi pemilu tahun-tahun yang akan datang perpaduan antara dua teori dan *Joseph Schumpeter* yaitu teori yang lebih menekankan pada aspek prosedural yang dikatakan oleh *Schumpeter* sebagai metode demokratik dan *Dahl* menyebutkan sebagai ”poliarki”.

Dengan demikian perubahan sistem politik ke arah yang lebih demokratis di Indonesia, saat ini diawali dengan amandemen UUD 1945 keempat, Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Susunan dan kedudukan DPR/MPR, meskipun merupakan produk kompromi politik, sudah memulai kedepan membangun sistem politik yang lebih demokratis dibandingkan sistem politik di era Orde Baru yang kalau meminjam istilah *Jeff hayness* sebagai ”Demokrasi Permukaan *(Facade Democracy)*”.

Dari pendapat tersebut menunjukkan bahwa sistem politik yang demokratis ataupun pemerintahan yang diselenggarakan secara demokratis jauh lebih menguntungkan ketimbang jika pemerintahan yang dijalankan secara otoriter dan sentralistik. Hal senada juga dikatakan oleh *Robert A. Dahl (1999)* mengenai berbagai keuntungan yang membuat demokrasi lebih diharapkan dari pada alternatif yang memungkinkan yakni:

1. Demokrasi menolong mencegah timbulnya pemerintahan oleh kaum otokrat yang kejam dan licik.
2. Demokrasi menjamin bagi warga negara dengan sejumlah hak azasi yang tidak diberikan dan tidak dapat diberikan oleh sistem yang tidak demokratis.
3. Demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negaranya daripada alternatif lain yang memungkinkan.
4. Demokrasi membantu rakyat untuk melindungi kepentingan dasarnya.
5. Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi orang-orang untuk menggunakan kebebasan menentukan nasibnya sendiri, yaitu untuk hidup di bawah hukum yang mereka pilih sendiri.
6. Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung jawab moral.
7. Demokrasi membantu perkembangan manusia lebih dari pada alternatif lainnya yang memungkinkan.
8. Hanya pemerintahan yang demokratislah yang dapat membantu perkembangan tingkat persamaan politik yang relatif tinggi.
9. Negara-negara demokrasi perwakilan modern tidak berperang satu sama lain.

10. Negara-negara dengan pemerintahan yang demokratis cenderung makmur daripada negara-negara dengan pemerintahan yang tidak demokratis.

Sepuluh implikasi positif dalam menerapkan demokrasi di atas jika bisa diwujudkan merupakan upaya perluasan makna demokrasi mulai dari demokrasi politik menuju pada demokrasi sosial dan demokrasi ekonomi.

Berdasarkan penjelasan teori dan konsep model-model mengenai sistem politik demokrasi dapat menjadi alat atau unit analisis dalam mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut; sejauhmana membangun sistem politik yang demokratis di Indonesia dapat terwujud.

Pertanyaan di atas menunjukkan sikap skeptis meskipun masih berdasarkan data sekunder dari beberapa literatur mengenai teori-teori politik dan demokrasi baik yang telah dikemukakan oleh *David Easton, Harold Laswell, Gabriel A. Almond, Robert A. Dahl, Schumpeter* sampai pada *Samuel P. Hamington*, membangun sebuah sistem politik yang demokratis pada umumnya di negara berkembang yang mengalami masa penjajahan kolonial termasuk di negara Indonesia, mengalami banyak kendala.

Kondisi lingkungan sosial-budaya, ekonomi dan politik bekas negara jajahan kolonial ada kesenjangan yang cukup lebar antara para elit dengan rakyatnya. Apalagi di Indonesia seperti diketahui, kemerdekaan bangsa Indonesia lebih banyak peran para elit dan tokoh dalam menentukan arah pembentukan negara yang belum tentu sama dengan aspirasi rakyatnya.

Perkembangan kehidupan politik sejak Indonesia merdeka tahun 1945 sampai dengan dewasa ini mengalami banyak pasang surut. Jika kita mengacu pada periodesasi berdasarkan Orde Lama mulai tahun 1945–1965 sebenarnya merupakan tonggak awal menerapkan sistem politik yang demokratis di bawah kepemimpinan Ir. Soekarno walaupun kehidupan politik relatif masih belum stabil, contoh pergantian kabinet yang berumur tidak lebih dari satu tahun sering terjadi. Pada waktu itu sistem pemerintahan adalah berdasarkan sistem parlementer dari mulai November 1945–Juni 1959, baru tahun 1960–1966 sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sistem demokrasi yang dianut yaitu demokrasi terpimpin.

Pada masa orde lama baik pada masa demokrasi parlementer maupun demokrasi terpimpin sebenarnya pembangunan mulai digalakkan walaupun masih bersifat ”mercusuar”. Inspirasi pembangunan yang bersifat ”mercusuar” tersebut misalnya pembangunan tugu Monas, jembatan Semanggi, gedung Ganefo, Hotel Indonesia, waduk-waduk besar seperti Jatiluhur, Sempor, dan lain-lain. merupakan upaya membangun semangat nasionalisme dan patriotisme sebagai negara yang baru merdeka supaya diperhitungkan di dunia internasional. Meskipun usaha presiden

Soekarno berhasil dalam dominasi percaturan internasional, misalnya pada tahun 1960 Indonesia keluar dari PBB dan mendirikan Negara Non Blok. Meskipun di lain pihak stabilitas politik juga banyak gangguan dan puncak dari ketidakstabilan politikpada tahun 1965 terjadinya peristiwa G.30S PKI. Kemudian terjadi pergantian rezim dari Soekarno kepada Soeharto melalui supersemar mulai tahun 1967 hingga tahun 1997 di bawah sistem demokrasi Pancasila. Penyelenggaraan kekuasaan era Orde Baru dengan sistem sentralistis dan otoriter, Indonesia mampu melakukan pembangunan dengan prioritas di bidang ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7%, membawa bangsa Indonesia bangkit dari negara terbelakang menjadi negara berkembang, stabilitas politik yang dijalankan dengan pendekatan keamanan *(security approach)* memang relatif tidak terjadi gejolak yang besar seperti gerakan radikal, pemberontakan separatis dapat dikendalikan melalui pendekatan yang represif.

Namun pada saat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemakmuran seharusnya dirasakan lapisan menengah ke bawah dan kemiskinan absolut sudah berkurang. Akan tetapi karena tidak dibarengi dengan pembangunan politik yang seimbang dengan pembangunan ekonomi terutama yang meliputi; budaya politik egaliter, partisipasi politik tidak berkembang dengan baik, tidak berjalannya pengendalian dalam penyelenggaraan kekuasaan. Sehingga kontrol terhadap kekuasaan lemah akibat dari partisipasi politiknya rendah tersebut. Oleh karena itu dalil *Lord Acton,"power Tends to corrupt but Absolute power to corruptsabsolutely"* benar-benar terjadi di Indonesia selama pemerintahan Orde Baru. Sehingga pada saat itu korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) merebak di semua lini kehidupan masyarakat, maka hasil pembangunan ekonomi yang sudah susah payah dibangun mengalami distorsi yang tinggi. Akhirnya rezim Orde Baru tahun 1997 runtuh dengan turunnya Soeharto dari tampuk kekuasaan selama 32 tahun digenggamnya,sampai saat ini krisis melanda bangsa Indonesia menjadi krisis multidimensi. Pada era reformasi sejak tahun 1998 sampai saat ini telah melaksanakan 3 (tiga) kali pemilu yaitu tahun 1999, 2004, dan 2009. Penyelenggaran pemerintahan melalui hasil pemilu tersebut telah berupaya membangun sisem politik yang demokratis. Namun demikian proses demokratisasi yang berjalan dengan baik, belum didukung dengan *recovery* ekonomi yang stabil dan penegakan hukum yang masih lemah, tetap menjadi ancaman terhadap eksistensi demokrasi itu sendiri.

Dari uraian tersebut di atas kendala yang dihadapi di negara berkembang dalam membangun sistem politik yang demokratis pada kenyataannya menghadapi tantangan yang berat. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi termasuk yang cukup dominan yaitu faktor sosial-budaya. Bangunan sistem kepartaian di Indonesia misalnya lebih banyak dipengaruhi oleh latar belakang budaya masih kuat, bahkan partai politik yang

dibentuk belum bisa lepas dari politik aliran. Padahal sistem politik yang demokratis harus ditopang oleh kekuatan partai-partai politik yang solid dan kuat. Banyaknya partai politik yang bermunculan dewasa ini pada kenyataannya belum sepenuhnya bisa dikendalikan jumlahnya melalui *electoral threshold*, apalagi kondisi partai politik dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang egalitarian. Belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dan kecenderungan sikap-sikap politik aliran masih mewarnai identitas partai politik di Indonesia. Walaupun beberapa kalangan masih memperingatkan terhadap politik aliran jika dianalisis secara seksama boleh jadi belum tentu tepat, tapi bisa menjadi bahan kajian. Sesungguhnya istilah politik aliran dipengaruhi oleh pemikiran seperti dikemukakan oleh *Clifford Geertz* (1976) dari hasil studinya di Jawa dengan judul *"Religion of Java"* membagi masyarakat Jawa menjadi tiga kelompok yaitu; santri, abangan dan priyayi. Masing-masing kelompok budaya masyarakat tersebut memiliki aliran politik masing-masing seperti misalnya dari kelompok santri orientasi politiknya ke partai-partai Islam, abangan ke partai nasionalis sekluer dan priyayi ke partai nasionalis atau sosialis. Meskipun study dari *Clifford Geertz* tersebut mungkin perlu dikaji ulang, namun pengamatan dari pembentukan partai-partai di era reformasi ada kecenderungan orientasi politik masyarakat kembali masih dipengaruhi oleh representasi politik aliran.

Oleh sebab itu upaya membangun sistem politik yang demokratis memerlukan energi besar. Sebab sepanjang budaya politik masyarakat masih kental dengan gaya feodalistik dan patrimonial, sedangkan kondisi politik massa mengambang *(floating mass)* masih kuat; sulit bisa dibangun sistem politik yang demokratis secara hakiki. Artinya sistem politik demokrasi pada level standar dan norma serta prosedur sudah terpenuhi akan tetapi dalam praktek masih bersifat semu. Sebagaimana yang diharapkan teori demokrasi dari *Joseph Schumpeter* dan *Robert A. Dahl*. Kecuali jika pada saat ini partai besar yang berkuasa melakukan konsolidasi secara lebih teratur dan tersistematik melalui sosialisasi politik dan komunikasi politik dari mulai lapisan atas sampai ke bawah secara intensif dalam kurun waktu secara terus-menerus. Maka basis massa partai politik semakin kuat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Seiring dengan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih egaliter bisa memberikan jalan yang mulus bagi terbangunnya sistem politik yang demokrasi di masa yang akan datang paling tidak pada pemilu tahun 2014.

Berdasarkan uraian penjelasan yang cukup mendalam tentang konsep dan teori demokrasi, ketika menjadi acuan dalam membangun sistem politik guna mendukung terwujudnya stabilitas ekonomi dan sosial budaya merupakan upaya yang terus-menerus dilakukan. Oleh sebab itu terwujudnya sistem politik yang demokratis menjadi tujuan utama dalam memajukan kesejahteraan umum seperti tercantum dalam tujuan negara. Dengan demkian praktek demokrasi pada dasarnya

membutuhkan prasyarat tertentu yang harus dipenuhi yaitu; *pertama;* demokrasi dapat berjalan dengan baik pada masyarakat yang berpendidikan relatif tinggi atau memiliki kesadaran kewarganegaraan yang baik, *kedua;* prasyarat pertama terpenuhi jika kondisi masyarakat ekonomi relatif baik, *ketiga;* terjalin hubungan yang relatif dekat antara elit politik dengan rakyatnya, *keempat;* komunikasi dan sosialisasi politik bekerja baik dan stabil, *kelima;* partai politik menjalankan fungsi dan perannya lebih optimal.

Kelima prasyarat tersebut dalam mendesain pembangunan sistem politik era reformasi sedapat mungkin menjadi alat kontrol terhadap baik substansi kebijakan politik yang tertuang dalam aturan perundangan maupun pada tingkat implementasi kebijakan tersebut. Sebagai penjelasan penutup pada bab ini mencoba menegaskan kembali pentingnya berpikir komparatif antara *das solen dan das sein*. Usaha-usaha menjalankan praktek demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari kritik yang bersifat membangun sebagai contoh praktek demokrasi langsung dalam pemilukada. Secara empiristik implementasi demokrasi langsung dalam memilih pemimpin pemerintahan, hasilnya sebagian besar masyarakat belum puas. Sebagaimana data yang disebutkan pada bab terdahulu bahwa kurang lebih separuh dari seluruh kepala daerah baik Gubernur dan Bupati/Walikota yang terpilih berdasarkan demokrasi langsung terperangkap oleh tindak pidana korupsi. Namun dalam tahun 2012 ketika muncul fenomena kepemimpinan yang populis atau merakyat yang ditampilkan pasangan fenomenal Joko Widodo dan Basuki Cahya Purnama (Ahok) dalam pemilukada DKI Jakarta Raya,secara mengejutkan mampu mengalahkan *incumbent* pasangan Foke-Nara yang kuat secara finansial dan tingkat elektibilitasnya. Dengan demikian terbukti bahwa sesungguhnya rakyat menghendaki model kepemimpinan seperti sosok Jokowi yang populis tersebut disukai dan merupakan idola masyarakat luas. Oleh sebab itu demokrasi langsung yang sudah dipraktekkan dalam 3 (tiga) pemilu yang menyedot biaya sangat besar agar tidak sia-sia belaka harus mampu melahirkan pemimpin yang dicintai rakyatnya. Peran dominan menjadi tanggung jawab partai politik untuk menyiapkan kader calon pemimpin/ pejabat publik tersebut yang jujur, amanah, memiliki integritas yang tinggi dengan tidak terbebani biaya politik yang sangat besar terhadap dirinya. Dengan demikian para kader partai politik yang handal sebagai pemimpin populis seperti *role model* kepemimpinan ala Joko Widodo Gubernur DKI sejak tahun 2012, akan semakin banyak muncul dari partai-partai politik yang didukung dengan manajemen yang baik. Partai politik sudah saatnya memberikan peluang dan kesempatan kepada kader potensial bangsa baik dari lingkungan partai politik maupun diluar partai politik agar didukung menjadi pemimpin pemerintahan di semua lini. Partai politik harus lebih besar perannya melahirkan pemimpin populis yang bertaraf internasional seiring

dengan kondisi sistem politik yang sudah semakin demokratis. Pasca pemilu tahun 2014, menjadi harapan besar baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan pemilukada, harus mampu menghentikan terpilihnya para pemimpin yang korup. Oleh sebab itu jika pada pemilu tahun 2014 nanti masih terpilih para pemimpin yang tidak berkualitas dan korup, maka negara dan bangsa Indonesia tinggal menunggu keruntuhannya. Jika pada pemilu 2014, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden mampu melahirkan para pemimpin yang dicintai rakyatnya seperti *role model* kepemimpinan ala "Jokowi" dapat dipastikan Indonesia akan menjadi negara yang mampu keluar dari krisis ekonomi, politik, dan hukum. Apabila ketiga krisis tersebut bisa dikendalikan oleh para pemimpin yang handal terebut maka Indonesia akan menjadi negara yang siap bersaing menghadapi pasar bebas di era globalisasi menuju negara yang stabil dan modern.

# Bab 4

## Potret Buram Politik Indonesia

Pada bab ini menjelaskan berbagai peristiwa "politik di Indonesia" era reformasi. Adapun objek analisis yaitu pembangunan politik di Indonesia berdasarkan hasil pengamatan *(observasi),* studi kepustakaan, sumber media massa, hasil diskusi politik dengan beberapa nara sumber yang ahli di bidang politik. Peristiwa "politik kontemporer" dimaksudkan "sebagai suatu peristiwa politik yang menarik perhatian publik dalam kurun waktu sekitar masa era reformasi. Adapun peristiwa politik pada masa lampau seperti pada masa Orde Baru dan Orde Lama, menjadi pembanding dalam perspektif masa depan pembangunan politik di Indonesia. Pengamatan yang bersifat empiristik terhadap suatu peristiwa politik merupakan pelengkap sebagai sumber kajian. Sumber tersebut dipilih yang relevan dengan konsep dan teori politik. Adapun yang dimaksud dengan politik yaitu berkenaan dengan: negara, kekuasaaan, kebijakan, pengambilan keputusan dan alokasi nilai-nilai masyarakat.

Sedangkan pada bab sebelumnya seperti mengenai pengertian politik dan sistem politik, konsep ideologi, partai politik dan konsep demokrasi, sebagai landasan pemikiran ilmiah untuk memberikan batasan dan ruang lingkup melakukan analisis fenomena politik terkait dengan tema pokok tentang ideologi, demokrasi dan sistem politik. Demikian pula konsep dan teori demokrasi yang diuraikan pada bab terdahulu digunakan sebagai landasan pemikiran terkait dengan kajian praktek demokrasi di Indonesia.

Sebagaimana telah diutarakan di atas bahwa *focus dan locus* mencakup aspek-aspek "pembangunan politik" di Indonesia. Pembangunan politik yang sedang berlangsung mengisyaratkan masih banyak persoalan, dalam upaya melakukan konsolidasi "kekuasaan demokrasi" yang mapan dan stabil. Aspek pembangunan politik yang menjadi perhatian untuk dilakukan penataan dan pembaharuan antara lain *pertama;* penataan sistem kepartaian yang belum tuntas, *kedua;* sistem pemilu masih bersifat eksperimen antara sistem proporsional menuju sistem distrik atau mencari jalan tengah, *ketiga;* penataan hubungan kelembagaan politik, *keempat;* penataan dan pengelolaan "partisipasi politik" dalam desain "model demokrasi" yang cocok untuk Indonesia, *kelima;* membangun "budaya politik" demokrasi yang sesuai dengan nilai dan budaya bangsa Indonesia yang sedang dibangun, *keenam;* memantapkan ideologi negara, bangsa dan masyarakat Indonesia. Keenam aspek pembangunan politik tersebut akan dikaji melalui berbagai fenomena politik yang cenderung anomali sebagai rujukan untuk perbaikan terhadap keenam aspek tersebut. Meskipun masih sebatas hasil pergulatan pemikiran, namun sedapat mungkin tetap menjaga rasionalitas, logis dan tersusun secara sistimatis.

Pergulatan dan pengembaraan pemikiran terhadap fenomena politik pada era reformasi yang menjadi pusat perhatian kajian dalam buku ini terdapat tiga belas (13) fenomena politik kontemporer. Pembahasan yang cukup mendalam terhadap fenomena politik tersebut diharapkan mampu memberikan rekomendasi penyempurnaan dalam pembangunan politik di Indonesia. Untuk memperkuat landasan pemikiran dalam kajian empiristik akan dilengkapi dengan bahan diskusi terhadap setiap topik. Bahan diskusi tersebut mengambil kasus yang dimuat di media massa yang relevan dengan topik yang dibahas. Setiap studi kasus tersebut akan diajukan kuis untuk memberikan pengembangan pemikiran yang lebih mendalam. Adapun ketiga belas (13) topik kajian sebagaimana diuraikan di bawah ini.

## 4.1 IDEOLOGI PANCASILA ANTARA HIDUP DAN MATI

Sebagai pengantar membahas tentang Pancasila, sepanjang sejarah republik Indonesia selalu menjadi topik perbincangan, tetapi hanya sebatas normatif, kurang implementatif. Banyak kalangan menilai karena kekuatan ideologi liberal kapitalisme yang sudah menjadi *trade mark* pelaksanaan ekonomi di Indonesia. Dampak ekonomi liberal kapitalisme tersebut membawa ekses berantai terhadap aspek sosial, budaya dan politik. Misalnya pengaruh nilai-nilai individualisme, materialisme, hedonisme dan pragmatisme, tanpa disadari nilai-nilai tersebut sudah menjadi perilaku kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Faktor-faktor tersebut di atas, yang menyebabkan nilai-nilai Pancasila sulit diterapkan Indonesia.

### 4.1.1 Sejarah Perjalanan Ideologi Pancasila

Ideologi Pancasila lahir di tengah-tengah pertarungan ideologi besar dunia antara ideologi Kapitalisme dengan ideologi Komunis pasca perang dunia kedua. Para *founding fathers* sebagai perumus Pancasila menjadi landasan idiil dan dasar negara, pada hakekatnya merupakan jalan tengah dari kedua kutub ekstrim ideologi besar tersebut. Sejarah membuktikan Pancasila menjadi perekat seluruh komponen bangsa dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam perjalanan sejarah, Pancasila mengalami pasang surut dan dinamika pelaksanaan nilai-nilai luhur tersebut dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Pada masa Orde Lama, Pancasila dicoba diperas menjadi Trisila dan Ekasila oleh yang melahirkannya. Ketika Orde Baru, Pancasila dijadikan sebagai azas tunggal dan menjadi doktrin dalam penerapan P4, namun tarikan ideologi liberal kapitalistik justru lebih kuat sehingga Pancasila hanya sebagai slogan. Pada era Reformasi pengaruh neoliberalisme semakin kokoh menjadikan ideologi Pancasila antara hidup dan mati.

Sebagaimana ideologi-ideologi yang dianut oleh bangsa bangsa di dunia pada umumnya mengalami pasang surut, tergantung para peganutnya memainkan dimensi ideologi antara "realita, fleksibilitas dan idealism" (Alfian, 1980) secara dinamis dan seimbang dalam menjaga, memelihara dan merawat ideologi tersebut. Ideologi besar seperti Komunisme Marxisme-Leninisme mampu bertahan di bawah hegomoni Uni Soviat di atas 50 tahun. Demikian pula Cina, sampai saat ini masih menerapkan "komunisme" dalam pemerintahan Cina dengan kombinasi kebijakan ekonominya yang kapitalistik, atau kapitalisme yang dijinakkan melalui peran negara yang kuat merupakan keberhasilan dalam menjaga ketiga dimensi tersebut. Dalam perjalanan sejarah memang mencatat bahwa ideologi komunis beberapa dekade yang lalu dianggap gagal dibidang ekonomi, artinya untuk perbaikan kualitas hidup rakyat masih kalah dengan ideologi "liberal-kapitalisme" di bawah hegomoni Amerika Serikat dan

negara Eropa Barat yang sukses mensejahterakan rakyatnya. Bahkan *Fukuyama(1994)* seperti yang telah disebutkan di atas, mengabadikan kemenangan ideologi "liberal kapitalisme" atas komunisme, sebagai sebuah akhir dari "sejarah manusia" *(The end history and the last man)*. Namun dalam perjalanan sejarah yang panjang ini, negara-negara penganut faham ekonomi liberal mulai dilanda krisis ekonomi, sejak tahun 2008 di Amerika Serikat dan di Yunani tahun 2011 serta negara-negara Eropa Barat. Ketika negara-negara besar yang menganut ideologi "kapitalis" dilanda krisis ekonomi, tampaknya pergeseran bandul ke kiri akan menggantikan peran ekonomi dunia, misalnya negeri Cina dan Brazil serta Rusia mulai menjadi negara yang kemampuan ekonomi sudah semakin membaik, meskipun negara tersebut tetap menganut ideologi sosialisme dan komunisme. Bahkan kemajuan ekonomi yang sangat menakjubkan diperlihatkan negeri "tirai bambu" Cina, mampu mengejar pertumbuhan ekonomi mencapai dua digit. Dengan demikian maka tesis *Fukuyama (1994), David Boaz, The Primer Liberalianism (1996), Lesther Thurow, The Future Of Capitalism (1996) Heil Broner, Vision Of The Future (1995)* dalam *Rian D Nugraha (2006),* tentang dominasi ideologi liberal kapitalisme dalam percaturan global terutama di bidang ekonomi dan politik, patut dipertanyakan kembali. Walaupun kecenderungan global harus diakui bahwa dunia dikuasai penuh oleh tata cara dan gaya hidup liberal kapitalistik, pada kenyataanya sudah melanda ke seluruh dunia ketiga atau negara berkembang. Demikian pula perkembangan tersebut tidak mustahil tanpa disadari juga melanda kawasan Asia termasuk di Indonesia.

### 4.1.2 Pertarungan Ideologi

Menghadapi fenomena berlangsungnya pertarungan ideologi global tersebut, sejauhmana kemampuan ideologi Pancasila memiliki peran memfilter, mengerem, dan membendung pengaruh kuat kedua ideologi besar tersebut. Seperti diketahui bersama bahwa terutama ideologi liberal kapitalisme sudah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pertanyaan tersebut sangat relevan ditengah arus pengaruh nilai-nilai "liberal kapitalistik" misalnya nilai-nilai "konsumerisme, materialisme, hedonisme, individualisme, pragmatisme, dan rasionalisme. Secara empiristik nilai-nilai tersebut telah hadir ditengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia terutama di kota-kota besar dan bahkan trend dewasa ini pengaruhnya sudah meluas dalam kehidupan di pedesaan terutama perkembangan nilai-nilai "konsumerisme, hedonisme dan pragmatisme. Arus kuat nilai-nilai liberal kapitalisme tersebut di atas patut diduga bahwa selama ini gaung mensosialisasikan nilai-nilai "Pancasila" sudah dalam satu dasawarsa ini semakin redup dan belum ada kebijakan memperkuat ideologi bangsa dan negara secara lebih komprehensif, sistematis, teratur dan terprogram secara nasional. Fenomena yang sering terjadi di

negeri ini, suatu peristiwa yang bertentangan dan bahkan secara gamblang melanggar nilai-nilai Pancasila terus berlangsung secara massif. Misalnya peristiwa pelanggaran HAM di Mesuji Lampung dan Sumetera Selatan, produk perundang-undangan yang menciderai rasa keadilan masyarakat, seperti tentang aturan tenaga kerja dengan sistem *"Out Sourcing"* yang terus ditentang oleh para kaum buruh, demikian pula berkembangnya berbagai aliran agama yang memicu konflik, dan lain-lain. Artinya fenomena tersebut mencerminkan pergeseran nilai-nilai Pancasila yang sudah mulai memudar misalnya nilai-nilai keimanan kepada Tuhan yang semakin luntur, demikian pula rasa "kemanusiaan, nasionalisme dan patriotismenya, dan keadilan". Bahkan dalam kurun waktu perjalanan era reformasi saat ini, fenomena di atas masih terus berlangsung seolah proses pembiaran tetap terjadi. Hal tersebut dikarenakan banyak faktor yang menjadi penyebab di atas, salah satu faktor dominan yang oleh banyak kalangan dan para pakar memperingatkan yaitu disebabkan pemerintahan yang lemah dan kewibawaan pemerintah di mata publik semakin terus menurun. Seperti diketahui bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami berbagai peristiwa di atas secara perlahan dan pasti dapat menghancurkan eksistensi sebagai bangsa dan negara. Oleh karena itu, fenomena berbagai kehidupan masyarakat yang patut menjadi catatan penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah: *pertama;* meningkatnya tindakan anarkis masyarakat secara kolektif di berbagai tempat (kasus Mesuji dan Bima pada tahun 2011). *Kedua;* terjadinya ketidakharmonisan hubungan antar lembaga tinggi negara dalam penyelenggaraan kekuasaan. *Ketiga;* Lembaga legeslatif (DPR) sudah tidak dipercaya oleh masyarakat. *Keempat;* perilaku aparat penegak hukum yang semakin buruk. *Kelima;* perilaku kolusi, korupsi dan nepotisme para aparatur birokrasi dan pejabat publik serta para politisi masih berlangsung secara massif. *Keenam;* rasa solidaritas masyarakat semakin memudar; *Ketujuh;* kekuatan modal asing semakin mencengkram yang mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah secara signifikan sesuai dengan keinginannya. *Kedelapan;* kerusakan berbagai sumber daya alam akibat eksplorasi tidak terkendali yang merusak lingkungan hidup secara massif dan sulit di atasi. *Kesembilan;* jiwa nasionalisme dan patriotisme masyarakat Indonesia semakin terdistorsi oleh berbagai kepentingan yang bersifat pragmatis.

### 4.1.3 Pelemahan Nilai-nilai Ideologi Pancasila

Berdasarkan diskripsi fenomena yang diuraikan di atas dalam konteks penerapan ideologi Pancasila maka secara empiristik tersebut dapat dipastikan bahwa nilai-nilai Pancasila belum bisa dijalankan dengan baik atau dengan kata lain semakin melemahnya nilai-nilai ideologi Pancasila, artinya Pancasila sudah kurang dijadikan sebagai sumber inspirasi terutama oleh para penyelenggara negara dalam membuat kebijakan negara. Oleh sebab itu, dominasi nilai-nilai liberal kapitalistik yang saat ini berkembang dalam

segala aspek kehidupan masyarakat menjadi salah satu penyebab teralienasi nilai-nilai Pancasila. Sehingga posisi Pancasila sesungguhnya berada pada persimpangan jalan, di antara ideologi lain yang mempengaruhi terjadinya pergeseran dan perubahan nilai dalam masyarakat yang pada hakekatnya bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Boleh jadi perkembangan masyarakat Indonesia dewasa ini yang telah terpengaruh oleh nilai-nilai "ideologi liberal-kapitalisme" misalnya faham "konsumerisme, hedonisme, individualisme, materialisme, pragmatisme dan lain-lain. Sehingga nilai-nilai tersebut mampu menggeser atau merubah nilai-nilai dasar yang menjadi karakteristik masyarakat Indonesia seperti sifat religious, sopan santun, gotong-royong, musyawarah dan mufakat, dan lain-lain. Hal tersebut menyebabkan secara empiristik nilai-nilai Pancasila sampai saat ini belum sepenuhnya menjadi pedoman, sumber inspirasi dan perilaku masyarakat Indonesia terutama baik dalam kolektiftas kehidupan masyarakat maupun berbangsa dan bernegara.

### 4.1.4 Krisis Ideologi

Indikasi dan fenomena belum mantapnya penanaman ideologi Pancasila tersebut di atas pada akhir-akhir ini terjadi peristiwa dalam masyarakat yaitu antara lain *pertama;* perilaku dan tindakan radikalisme dan anarkhisme masyarakat, *kedua;* tindakan terorisme, tindakan pengrusakan secara kolektif terhadap asset masyarakat maupun terhadap asset negara, *ketiga;* kasus pembakaran kantor pemerintahan daerah di Bima pada peristiwa konflik "daerah eksplorasi pertambangan tahun 2012", *keempat;* berbagai daerah lainnya dalam suatu peritiwa baik konflik antara rakyat dengan pemerintah maupun konflik antar masyarakat itu sendiri dengan bermacam-macam latar belakang. *Kelima;* persoalan yang menonjol dalam peristiwa tersebut yaitu latarbelakang "sengketa tanah, eksplorasi tambang, penggunaan lahan untuk area perkebunan, pemilukada". Dengan demikian peristiwa yang diuraikan di atas dapat diduga karena nilai-nilai Pancasila sudah tidak lagi dijadikan sebagai sumber nilai moral dan nilai-nilai dalam setiap pembuat kebijakan publik oleh para penyelenggara negara. Oleh sebab itu, krisis ideologi yang dihadapi bangsa Indonesia patut menjadi perhatian serius jika dikaitkan dengan berbagai peristiwa ekonomi, politik dan sosial yang cenderung semakin mendistorsi produktifitas sebagai bangsa. Kondisi bangsa Indonesia yang oleh sebagian besar masyarakat dinilai belum memuaskan dalam konteks kesejahteraannya, diduga kuat akibat kurangnya ideologi Pancasila menjadi *guide line* dalam berbagai aktifitas kebijakan, pemerintahan dan kemasyarakatan baik di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya dan lain-lain. Untuk itu sosialisasi nilai-nilai Pancasila dari generasi ke generasi harus lebih digalakkan lagi melalui metode dan sistem yang lebih praktis dan mudah diterima dan dipraktekkan dalam kehidupan

sehari-hari. Pengalaman pada masa orde baru dalam penanaman nilai-nilai Pancasila melalui Program P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang hanya bersifat normatif, formalitas dan cenderung doktrinasi pada kenyataannya telah gagal dalam upaya memelihara dan menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan negara, bangsa dan masyarakat Indonesia.

### 4.1.5 Upaya Penguatan Ideologi Pancasila

Sesungguhnya upaya memelihara ideologi Pancasila telah banyak dilakukan baik melalui kurikulum pendidikan dan upacara bendera di setiap Instansi Pemerintah. Di samping itu, nilai-nilai Pancasila juga sudah tidak asing dan familiar dalam perilaku kehidupan masyarakat sehari-hari. Akan tetapi justru yang masih kurang adalah keteladanan yang ditunjukkan oleh para pemimpin. Kesuksesan dan kegagalan penerapan nilai-nilai Pancasila terletak pada setiap pimpinan pemerintahan. Masyarakat diharapkan mampu menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan, maka keteladanan para pemimpin mempunyai andil yang besar sebagai pemicu atau *trigger*. Sebab masyarakat Indonesia yang masih bersifat *patron-client atau* bapak-buah/anak-buah, maka pemimpin sebagai patron sangat berpengaruh dalam mengendalikan, mengerahkan dan membimbing masyarakat yang dipimpinnya. Jika para pemimpin menunjukkan kualitas kepemimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, artinya setiap langkah dan tindakan kebijakan, sesuai dengan Pancasila maka pada gilirannya ideologi Pancasila akan mewarnai seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pola kehidupan yang teratur, tertib dan sistematis boleh jadi dapat diawali melalui perilaku masyarakat dalam berlalu-lintas di jalan raya. Di negara maju sebagian besar mampu mewujudkan manajemem lalu lintas jalan raya yang teratur tertib dan sistematis. Oleh sebab itu, kunci sukses dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila ada pada keteladanan para pemimpinnya. Di samping faktor keteladanan para pemimpin dalam memberikan semangat penanaman nilai Pancasila, perlu kerja keras segenap komponen bangsa dalam menghadapi krisis moral melalui gerakan, pertama; bangunkan qolbu, kedua; gerakan akal, ketiga; perkuat solidaritas sosial, dan keempat; tegakkan keadilan masyarakat. Jika strategi gerakan empat pilar di atas dapat dijabarkan dalam program kegiatan aksi secara nasional, merupakan dukungan terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

## STUDI KASUS 1

Kajian mengenai ideologi negara tersebut di atas akan lebih sempurna jika dilengkapi dengan studi kasus. Sebagai bahan diskusi diambil dari media massa yang berjudul "Pancasila Jangan Sekedar Dihafal". Substansi bahan diskusi ini sangat menarik yaitu membahas ideologi negara hubungannya dengan persepsi mahasiswa tentang "Pancasila" sebagai ideologi negara di kalangan generasi muda terutama mahasiswa. Pada prinsipnya seluruh mahasiswa masih tetap mengenal dan mengetahui pentingnya eksistensi "Pancasila" sebagai ideologi negara. Walaupun para pemerhati mengkhawatirkan kecenderungan mahasiswa atau generasi muda sudah ada yang tidak lagi hafal Pancasila. Terlebih lagi ketika dihadapkan berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa seperti; tindakan kekerasan, korupsi, upaya disintegrasi bangsa, persoalan agama misalnya tentang "Ahmadiyah" yang menghebohkan, pengaruh budaya barat misalnya sifat hedonis, materialisme, dan lain-lain, maka sikap mahasiswa terbelah dalam pemahaman terhadap Pancasila. Ada sebagian memahami persoalan dalam konteks dimana peran Pancasila, sebagian yang lain cukup mengetahui dan sebagaian lagi tidak tahu persoalan yang sedang dihadapi.

Kajian tentang Pancasila ini juga di dukung oleh hasil survei Litbang Kompas, akan menambah kajian lebih hidup berdasarkan data empiristik dan persepsi mahasiswa. Untuk lebih jauh membahas mengenai topik ini dipersilahkan untuk membaca teks di bawah ini:

### Pancasila Jangan Sekadar Dihafal

*KOMPAS, 1 Oktober 2013*

Pancasila sebagai ideologi negara sudah diamini oleh sebagian besar mahasiswa, tetapi jangan sekedar dihafal di luar kepala. Hendaknya Pancasila menjadi pegangan hidup berbangsa. Namun, belakangan ini muncul kekhawatiran dari beberapa kalangan pemerhati pendidikan bahwa mahasiswa sekarang cenderung tidak mengerti Pancasila. Bahkan, disinyalir ada mahasiswa yang tidak hafal sila Pancasila.

Pancasila makin dibutuhkan dalam menghadang berbagai persoalan di masyarakat. Pancasila jangan hanya sekadar dihafal di luar kepala. Sejumlah mahasiswa mensyaratkan bahwa Pancasila akan tetap hidup jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dibarengi dengan kejujuran dan kedisiplinan moral yang tinggi.

Direktur Reform Institute Yudi Latif mengungkapkan, selain membaca sejarah perjuangan dan keteladanan para pendiri bangsa, belajar dengan cara berbuat (*learning by doing*) merupakan cara terbaik untuk memahami Pancasila. "Munculnya berbagai tindakan kekerasan, keagamaan, korupsi, dan pelanggaran kesusilaan mengindikasikan kurangnya pemahaman, penghayatan, dan pengalaman nilai-nilai Pancasila," kata Yudi.

Menurut dia, salah satu cara yang efektif untuk mengatasi lemahnya pemahaman mengenai Pancasila adalah dengan memulai kerja-kerja keteladanan dalam melindungi segenap warga dan tumpah darah Indonesia. "Mahasiswa bisa langsung terjun ke masyarakat, menjalin kerja sama dengan orang-orang yang 'berbeda' latar sosial untuk sebuah agenda, seperti menolong korban bencana atau memperjuangkan para pedagang tradisional," katanya.

Sementara itu, dosen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito, mengatakan kecenderungan mahasiswa kurang peduli dengan Pancasila bukan berarti mereka tidak ingin mempelajari Pancasila atau ideologi negara. "Dalam situasi krisis, ketegangan dan beberapa potensi diintegrasi sosial, sesungguhnya mahasiswa prihatin. Kadang-kadang mereka tidak mengerti bagaimana harus bersikap. Justru inilah peluang dan tantangan kita untuk mengajak mahasiswa berdialog soal Pancasila dengan cara dan format kreatif dan menarik untuk dunia mereka," kata Arie.

**Survei Litbang "Kompas"**

Untuk mengetahui jawaban tersebut, Litbang *Kompas* menyebarkan angket di empat universitas di Jakarta, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Atma Jaya, Universitas Bung Karno, dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Sampel yang diambil sebanyak 400 mahasiswa, baik dari jurusan ilmu sosial maupun eksakta, pada 19-21 September 2013.

Apakah hafal teks Pancasila? Tentu saja. Demikianlah jawaban 94,8 persen mahasiswa Jakarta ketika ditanya tentang Pancasila. Sementara itu ada 4,3 persen yang mengaku hanya hafal sebagian sila. Dan sisanya, yaitu 1 persen atau empat responden, mengaku tidak hafal sama sekali atau tidak ingat satu pasal pun!

Ditanya mengenai penting tidaknya menghafal teks Pancasila, sebanyak 92 persen responden sepakat bahwa menghafal seluruh sila Pancasila tetaplah perlu. Di dalam lingkungan kampus, Pancasila masih menjadi napas dalam kehidupan mereka. Dalam hal ini organisasi kampus menjadi ruang kehidupan bersama, seperti pada pemilihan ketua senat universitas. Mahasiswa lebih memilih seseorang yang mampu memimpin dan memiliki kepandaian. Responden lebih memilih ketua senat berdasarkan kapabilitas dan kemampuan individu, dan bukan kepentingan kelompok atau primordial agama.

Yang cukup menggembirakan, kampus memiliki cukup kepekaan pada lingkungan sekitar mereka. Sebanyak 65,8 persen responden mengaku pernah melakukan aktivitas untuk kepentingan

masyarakat. Mereka tetap berorganisasi dan melakukan aktivitas sosial di masyarakat sebagai bagian dari proses pembentukan kedewasaan mereka.

**Negara versus Keimanan**

Bagaimanakah Pancasila ditingkat wacana? Keragu-raguan membela Pacasila tampaknya mulai menggejala di kalangan mahasiswa. Hal itu muncul ketika Pancasila disandingkan dengan gagasan syariat Islam. Sebanyak 44,5 persen responden menyatakan tidak setuju jika Pancasila diganti dengan syariat Islam. Hanya 6,7 persen saja yang setuju dengan gagasan syariat Islam.

Sebanyak 48,8 persen lainnya menjawab, mereka tidak tahu dan tidak mau menjawab pertanyaan tersebut. Angka ini cukup besar sebagai bukti bahwa mahasiswa saat ini tidak mampu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan ideologi negara. Sebuah hal mendasar yang seharusnya menjadi kepedulian mahasiswa.

Keragu-raguan itu semakin tampak ketika dihadapkan pada persoalan real di masyarakat. Contohnya kasus Ahmadiyah dan Syiah di Sampang, Madura. Mahasiswa terbelah menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah mahasiswa yang tidak setuju dengan sikap pemerintah (37.5 persen). Kelompok kedua setuju pada fatwa sesat dari lembaga pemerintah (35,5 persen). Kelompok ketiga adalah mahasiswa yang acuh dan tidak tahu bagaimana menyikapi persoalan tersebut.

Setelah membaca seluruh teks di atas, sudah barang tentu merasa terdorong untuk memberikan respon atau tanggapan terhadap topik di atas. Oleh sebab itu, sebagai pengantar diskusi disampaikan beberapa pertanyaan di bawah ini:

1. Sejauhmana pemerintah, negara, bangsa dan masyarakat masih peduli terhadap eksistensi Pancasila sebagai sebuah ideologi dan falsafah bangsa dan negara?
2. Upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam memelihara dan melestarikan nilai Pancasila dari generasi ke generasi selanjutnya?
3. Dalam diskusi di atas terdapat *gap* pemahaman para mahasiswa terhadap Pancasila dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa, strategi apa yang harus dilakukan untuk mengurangi *gap* pemahaman terhadap Pancasila bagi generasi muda?
4. Sebagaimana diketahui bersama bahwa seluruh kepentingan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, diatur melalui kebijakan pemerintah dalam bentuk peraturan perundangan. Adakah peraturan perundangan tersebut yang bertentangan dengan Pancasila serta sejauh mana rakyat atau setiap warga negara memahami peraturan perundangan yang dinilai bertentangan dengan Pancasila?

5. Masyarakat Indonesia yang masih kuat nilai primodialisme dan *patronage* serta feodalisme, maka unsur "keteladanan Pemimpin" memiliki nilai strategis dalam membangun partisipasi masyarakat untuk memperkuat implementasi nilai Pancasila, sejauhmana "keteladanan Pemimpin" menjadi salah satu strategi pendorong pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat?

## 4.2 DILEMA PEMERINTAHAN KOALISI

Dalam sejarah politik di Indonesia, pemerintahan berdasarkan gabungan beberapa politik besar sudah berjalan dan dipraktekan di Indonesia sejak awal kemerdekaan. Secara teoritis pemerintahan koalisi merupakan pemerintahan yang dibentuk oleh beberapa partai politik berdasarkan hasil pemilihan umum dengan tujuan untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan. Pada umumnya pemerintahan koalisi di praktekan di negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Pemerintah eksekutif yang direpresentasikan dalam pembentukan suatu "kabinet", dalam sistem parlementer, mekanismenya diangkat dan diberhentikan oleh "parlemen". Sistem tersebut telah dipraktekan di Indonesia sejak tahun 1945 s/d 1959, pada kenyataannya sistem ini tidak berjalan dengan baik. Sejak dikeluarkan dekrit presiden tahun 1959, sistem pemerintahan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sistem pemerintahan "presidensial". Ciri sistem ini memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada pemerintahan eksekutif, yakni kedudukan seorang "Presiden" merangkap jabatan sebagai "kepala negara" dan kepala pemerintahan". Sistem presidential pernah dilaksanakan dalam sistem pemerintahan di Indonesia yaitu pada periode tahun 1959 s/d 1966, di bawah Presiden Soekarno. Sedang periode tahun 1967 s/d 1998 pelaksanaan sistem pemerintahan presidential di bawah Presiden Soeharto. Pada masa dua periode tersebut tidak terjadi pembentukan kabinet pemerintahan berdasarkan koalisi beberapa partai politik. Namun pada era reformasi sejak hasil pemilihan umum tahun 2004 dan tahun 2009, pembentukan kabinet pemerintah berdasarkan koalisi beberapa partai politik. Hasil pemilihan umum tahun 2014 tidak terdapat partai politik memperoleh suara di atas 30%, sehingga pembentukan "kabinet pemerintahan" berdasarkan koalisi lebih dari dua partai politik. Gabungan banyak partai politik secara empiris kabinet pemerintahan koalisi menunjukkan kinerja yang kurang efektif dan solid. Dengan demikian bangunan sistem politik tersebut dalam pelaksanaanya mememiliki kelemahan yang bersifat dilematis. Untuk itu sistem pemerintahan koalisi pada era reformasi ini akan dilakukan analisis yang cukup mendalam seperti diuraikan di bawah ini.

### 4.2.1 Sistem Pemerintahan Demokrasi

Desain pembangunan politik di Indonesia sejak era reformasi terus bergulir dengan tujuan membangun "sistem politik" yang demokratis. Adapun dalam mewujudkan suatu negara yang demokrasi memerlukan beberapa persyaratan mutlak yang harus terpenuhi yaitu antara lain *pertama;* adanya pembagian kekuasaan yang jelas dan tegas antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, *kedua;* jumlah partai politik harus minimal dua atau lebih, *ketiga;* diselenggarakan "pemilu" secara tetap dan kontinue,

*keempat;* bentuk pemerintahan republik dan sistem pemerintahan parlementer atau presidential, *kelima;* adanya lembaga peradilan yang bebas dan lain-lain. Jika melihat persyaratan formal di atas maka Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi telah terpenuhi. Negara demokrasi sebagaimana yang dipraktekan di negara barat, memiliki pengaruh yang cukup menjanjikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Meskipun dalam konteks kehidupan kemasyarakatan di negara berkembang atau dunia ketiga, persyaratan formal dalam ketatanegaraan dan tata pemerintahan telah memenuhi syarat demokrasi, belum menjamin bahwa aspek kehidupan yang lain misalnya aspek; ekonomi, sosial, keamanan dan lain-lain, akan menjadi lebih baik. Memang pada hakekatnya jika sistem politik yang demokratis bisa sukses menumbuhkan stabilitas politik dan keamanan, merupakan entri poin yang penting dan strategik terhadap tumbuh dan berkembangnya aspek-aspek kehidupan yang lain seperti ekonomi, sosial budaya dan lain-lain, menurut Heyness (1997) disebut ”Demokrasi substansial” (*subtancy democracy*).

Penjelasan di atas sebagai pengantar dalam pembahasan tentang salah satu fenomena yang berkisar “upaya pemerintah dalam menata kehidupan politik yang demokratis” antara lain adalah penataan sistem kepartaian. Seperti telah disebutkan di atas bahwa salah satu persyaratan dikatakan sebagai “negara demokrasi” adalah harus menganut sistem dwi partai atau multi partai. Berdasarkan peraturan perundangan di Indonesia, desain sistem politik Indonesia menganut sistem multi partai dalam sistem pemerintahan presidensial.

### 4.2.2 Pemerintahan Koalisasi Era Orde Lama

Sesungguhnya sejak pemerintahan republik Indonesia didirikan oleh para “*founding fathers*” dalam membangun sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia menganut faham demokrasi dengan sistem multi partai. Oleh sebab itu, jika bercermin pada sejarah masa lalu yaitu pada masa Orde Lama menganut sistem multi partai, dengan sistem pemerintahan yang berlaku saat itu “parlementer”. Pada waktu itu penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan dengan baik, dikarenakan tidak stabilnya roda pemerintahan yang selalu silih berganti karena kabinet pemerintahan sering dijatuhkan oleh parlemen jika kebijakannya tidak dikehendaki oleh mayoritas anggota parlemen. Bahkan dengan jatuh bangunnya kabinet, usia kabinet pemerintahan yang paling pendek hanya 3 (tiga) bulan dan paling lama satu (1) tahun lebih. Dengan stabilitas pemerintahan yang terganggu tersebut sudah bisa dipastikan akan menganggu pula jalannya roda pembangunan terutama pembangunan ekonomi. Akan tetapi sebetulnya sejak tahun 1959 setelah dikeluarkan dekrit Presiden, yang isinya

antara lain pembubaran Dewan Konstituante (DPR) dan "kembali kepada UUD1945, maka sejak saat itu sistem pemerintahan berubah kembali menjadi sistem presidensial, sistim demokrasi yang dianut disebut "demokrasi terpimpin", sedang anggota DPR berdasarkan pengangkatan oleh Presiden. Namun selama kurun waktu 1959 s/d 1966, kondisi politik masih terus bergejolak dan pembangunan ekonomi tetap tidak berjalan dengan baik. Padahal pada waktu itu rakyat sangat mengharapkan "perbaikan ekonomi", agar lepas dari penderitaan akibat penjajahan Belanda yang sangat lama, untuk bangkit menjadi negara yang lebih maju melalui pembangunan ekonomi tersebut. Dengan terbengkalainya pembangunan ekonomi berpengaruh terhadap menurunnya stabiltas keamanan, sampai pada akhirnya eskalasi instabilitas politik dan keamanan yang terus memburuk selama dua dasa warsa, maka puncak gunung es meletus seiring dengan peristiwa G 30 S PKI tahun 1965, yang menelan korban ratusan ribu orang. Namun sebenarnya selama demokrasi terpimpin terdapat beberapa peristiwa politik yang cukup fenomenal selama kepemimpinan Presiden Soekarno sebagai Kepala Pemerintahan dan juga sebagai Kepala Negara tahun 1959 s/d 1966. Peristiwa politik tersebut antara lain: *pertama;* pada tahun 1960 Presiden Soekarno memutuskan keluar dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). *Kedua;* Presiden Soekarno mendirikan negara-negara yang tergabung dalam Non Blok. *Ketiga;* Pada tahun 1963 Ir. Soekarno membubarkan organisasi Fremasonry dan organisasi sayapnya yaitu Lion Club dan Rotary Club dan memulangkan orang-orang Yahudi ke negara masing-masing serta memulangkan pula warga negara Cina ke negerinya. *Keempat;* Presiden Soekarno mengeluarkan kebijakan yaitu melakukan nasionalisasi perusahaan asing dan memperbaiki kontrak karya dengan PT. Freeport melalui skema yang ditawar 50% untuk Pemerintah Indonesia dan 50% untuk PT. Freeport. *Kelima;* Pada waktu itu dalam melaksanakan pembangunan lebih memprioritaskan pembangunan fisik yang lebih cenderung bermakna "Mercusuar" sebagai kebanggaan untuk menumbuhkan semangat patriotisme, nasionalisme dan lain-lain. *Keenam;* Kebijakan menolak Hutang Luar Negeri (BLN) dengan slogan yang sangat terkenal yaitu *"Go to hell with your aid"*. Kebijakan yang kontroversi tersebut sesungguhnya merupakan upaya Soekarno melakukan perubahan fundamental atas kegagalan era pemerintahan sebelumnya (1945 s/d 1959) yang cenderung dikendalikan oleh kekuatan asing. Tujuan kebijakan di atas ingin mengembalikan posisi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tegak kembali. Sebuah negara yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian serta berkebudayaan. Ketiga aspek tersebut pada waktu itu sangat terkenal dengan sebutan yaitu "TRISAKTI". Sebagai negara yang berdaulat tersebut harus didukung oleh rakyatnya yang memiliki jiwa patriotisme, semangat berdikari dan nasionalisme yang tinggi. Akan tetapi kebijakan tersebut tidak disukai oleh Amerika Serikat pada waktu itu dan memerintahkan "*Central Inteligent Amerika*" (CIA) untuk menurunkan Soekarno dari tampuk kekuasaan, digantikan oleh Soeharto pilihan

CIA yang memiliki reputasi sebagai pendukung "anti komunis" (Jhon Perkins, 2006). Sebagaimana pula dikemukakan oleh "Peter Dale Scott (1985), dalam bukunya yang berjudul "*US and the Overthrow of Sukarno*,1965- 1967", dikatakan "Banyak pejabat politik inti di Washington, terutama dalam Direktorat Perencanaan CIA, sudah lama berkeyakinan bahwa politik anti komunis mengharuskan disingkirkannya Sukarno".

Pendekatan historis atau sejarah tersebut di atas menjadi rujukan dalam analisis terhadap fenomena "politik" dewasa ini, dengan melakukan refleksi sejarah masa lalu. Meskipun secara esensi agak berbeda dengan sistem multi partai pada era reformasi, dimana sistem pemerintahannya menggunakan sistem "presidential", namun sesungguhnya yang dirasakan hampir sama yaitu terjadinya "kegaduhan politik", juga telah dialami pada era reformasi tersebut. Kegaduhan politik yang terjadi dewasa ini, berpengaruh terhadap aspek lain yang menyangkut "pembangunan ekonomi" terutama yang berkaitan dengan "iklim investasi" akan terganggu. Kemudian jika bercermin pada era Orde baru, dengan model sistem kepartaian secara esensial menggunakan multi partai artinya lebih dari dua partai politik yaitu dua partai politik (PPP dan PDI) dan Golongan Karya namun konflik politik dalam pemerintahan hampir tidak muncul di permukaan. Keberhasilan Era Orde Baru mampu mewujudkan stabilitas politik dan keamanan yang mantap sehingga "kegaduhan politik" dapat dikendalikan dengan baik. Sedangkan pengalaman pada masa Orde Lama dan orde reformasi dengan sistem multi partai, konflik politik atau kegaduhan politik sering terjadi, meskipun tingkat intensitasnya lebih keras pada masa Orde Lama. Adapun kesamaannya yaitu penyelenggaraan pemerintahan kurang efektif dan solid.

### 4.2.3 Pemerintahan Koalisi pada Masa Orde Baru Tidak Dikenal

Pada masa Orde Baru, di bawah kepemimpinan pemerintahan rezim Suharto memaksakan kebijakan "fusi" partai dari 10 partai menjadi 2 (dua) dan membentuk partai baru embrio dari Sekber Golkar yang belakangan tidak disebut sebagai partai politik tetapi sebagai "golongan fungsional" yang disebut Golongan Karya. Mengingat sejarah masa Orde Lama yaitu terganggunya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka pemerintahan Orde Baru tidak menginginkan terulang kembali. Pada pemilu pertama tahun 1971, dengan dukungan seluruh komponen masyarakat yang tergabung dalam "golongan fungsional" dan ABRI/TNI dan Polri serta Birokrasi, maka Golongan Karya memenangkan pemilu pertama tersebut dengan perolehan suara lebih dari 50%. Kondisi stabilitas politik dan keamanan yang terkendali, maka skenario politik orde baru pada pemilu berikutnya harus menjaga kemenangan Golkar. Puncak kemenangan tertinggi yaitu pada pemilihan umum tahun 1997 mencapai 73%. Oleh sebab itu, selama pemerintahan Orde Baru praktis tidak pernah dalam kabinet

yang dibentuk menggunakan "kabinet pemerintahan koalisi". Meskipun dari unsur PDI pernah masuk dalam kabinet Suharto yaitu "Sunawar Soekowati" dan PPP yaitu Mintareja, SH. Pemerintahan Suharto di bawah dukungan Golkar, TNI/Polri dan Birokrasi, memiliki kekuatan penuh dalam menjalankan roda pemerintahan dengan stabil selama hampir 32 tahun.

Akan tetapi selama 32 tahun Orde Baru memerintah di bawah komando Suharto, tidak dimanfaatkan dengan baik untuk memperkokoh bangunan sistem dan struktur ekonomi, politik dan sosial budaya. Artinya sebelum Orde Baru jatuh, momentum yang strategis bagi rakyat dan bangsa Indonesia selama membangun, tidak memberikan landasan yang kuat dalam pembangunan di bidang ekonomi kerakyatan, pendidikan dan kehidupan sosial serta budaya. Sehingga ketika ekonomi tumbuh melesat tinggi di atas 7% pada kenyataanya sistem dan struktur ekonomi Indonesia rapuh. Terbukti ketika tahun 1997 krisis moneter mendera Indonesia, menyebabkan ekonomi ambruk, bangunan sistem sosial dan budaya juga runtuh serta sistem politik demokrasi yang semu juga kolaps. Kondisi demikian mengakibatkan rezim Suharto bersama sistem Orde Baru runtuh dan bubar meninggalkan beban yang berat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Bahkan kejatuhan Orde Baru membawa risiko politik yang tidak ringan bagi "Golkar". Sebagai partai politik penguasa setelah kejatuhan rezim Suharto, pada era reformasi tingkat kepercayaan masyarakat hilang, ketika pemilu tahun 1999, suara golkar turun menjadi 23% dari 73% pada pemilu tahun 1997. Dalam perjalanan masa reformasi setelah Golkar secara resmi menyatakan sebagai partai politik melakukan konsolidasi. Di bawah kepemimpinan "Akbar Tanjung" sebagai "ketua umum", secara bertahap berhasil memperbaiki "citra" buruk masa lampau ketika sebagai pendukung tunggal rezim "Orde Baru". Terbukti di era reformasi Golkar tetap menjadi kekuatan politik yang selalu diperhitungkan dan sudah mulai berhasil menguburkan citra buruk "Golkar" dari beban sejarah yang pahit masa lalu. Namun tidak dapat dipungkiri kerusakan yang ditinggalkan rezim Orde Baru di bidang ekonomi, hukum dan birokrasi, masih menjadi beban bagi pemerintahan era reformasi.

Jika melakukan refleksi sejarah politik masa lalu, ketika krisis moneter tahun 1997 berkembang menjadi krisis "multi dimensi", artinya krisis moneter menyebar ke krisis yang lain yaitu krisis kepercayaan dan krisis "moral". Bahkan krisis "moral" yang mengkhawatirkan adalah "perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di tubuh birokrasi". Kemudian dampak negatif penerapan ekonomi liberal kapitalisme yang diterapkan selama rezim Orde Baru terhadap aspek sosial yaitu: tercabutnya potensi akar budaya lokal, antara lain: nilai "gotong-royong, ramah-tamah, santun, sabar dan ulet, telah berubah dan cenderung berorientasi kenilai-nilai pragmatis, materialistik, hedonistik dan individualistik". Persoalan berat yang ditinggalkan oleh

rezim Orde Baru tersebut sampai saat ini menjadi pekerjaan rumah yang belum bisa diselesaikan oleh pemerintahan era reformasi. Bahkan perilaku KKN justru telah menjalar seperti virus ganas ke lembaga legislatif dan yudikatif. Barangkali sudah tidak terhitung anggota DPR dan DPRD serta para jaksa dan hakim yang tersangkut kasus korupsi dan masuk penjara.

Membandingkan dua fenomena tentang penyelenggaraan pemerintahan pada masa Orde Lama dan Orde Baru antara sistem pemerintahan parlementer era orde lama tahun 1945 s/d 1959 dengan sistem pemerintahan presideinsial era orde lama tahun 1959 s/d 1966 dan era orde baru tahun 1967 s/d 1988. Menjadi bahan referensi untuk mencoba melakukan analisis komparatif guna mencari persamaan dan perbedaan dan mampu melakukan identifikasi persoalan yang mendasar dari kedua sistem pemerintahan serta menjelaskan secara mendalam hakekat "perbedaannya" dan "persamaannya".

### 4.2.4 Pandangan Teoritis Tentang Pemerintahan Koalisi

Terkait dengan topik kajian tentang "dilema pemerintahan koalisi", seperti penjelasan di atas dapat menjadi referensi untuk menganalisis lebih mendalam terhadap "konsep pemerintahan koalisi". Dalam literatur ilmu politik, konsep pemerintahan koalisi memang ditemukan dalam kajian sistem kepartaian atau partai politik. Negara yang menganut faham demokrasi dan jika sistem kepartaiannya menggunakan multi partai dan pada umumnya sistem pemerintahan berdasarkan sistem "perlementer". Oleh sebab itu dalam konteks di Indonesia, ketika penyelenggaraan pemilu, tidak ada partai politik yang menang lebih dari 50%, merupakan konsekuensi logis "pembentukan pemerintahan berdasarkan koalisi". Artinya bahwa bagi partai pemenang pemilu akan menempatkan "kepala pemerintahan" atau "perdana menteri", mengajak kerjasama partai lain untuk membentuk pemerintahan. Di negara yang menganut multi partai dan sistem pemerintahan "parlementer", "kepala pemerintahan" atau "perdana menteri" diangkat dan diberhentikan oleh parlemen atau DPR. Untuk itu partai pemenang akan membangun "koalisi" yang kokoh, maka harus menjaga dan memelihara mitra koalisi menjadi semacam "koalisi permanen", sampai akhir masa jabatan kepala pemerintahan tersebut. Namun tidak dapat dipungkiri, meskipun komitmen berkoalisi telah terpelihara dengan baik, di lain pihak kehidupan politik tidak bersifat linear, namun sangat dinamis, maka dalam "pemerintahan koalisi" risiko konflik tetap tinggi dan laten. Apalagi sistem politik di Indonesia yang menganut multi partai, sedangkan "sistem pemerintahan" berdasarkan sistem "presidential", sesungguhnya merupakan model yang unik. Oleh karena disatu pihak "presiden" memiliki dua peran yaitu di samping sebagai "kepala pemerintahan" juga merangkap sebagai "kepala negara".

Adapun di lain pihak "presiden" dipilih secara langsung otomatis memiliki legitimasi yang kuat dari dukungan rakyat. Seharusnya ketika pemilihan presiden telah memiliki legitimasi yang kuat, secara teoritis akan seiring pula dukungan politik di parlemen, terutama dari "fraksi partai politik" yang merupakan representasi dari partai politik. Sedangkan partai politik merupakan representasi dari dukungan rakyat.

Sebagaimana diketahui pelaksanaan pemilihan anggota legeslatif dengan pemilihan presiden dilakukan secara terpisah. Kemungkinan secara empiristik tidak ada korelasi antara partai politik pemenang pemilihan umum legeslatif secara otomatis menjadi "presiden". Ketika presiden terpilih dari partai politilk bukan partai politik pemenang pemilihan umum legeslatif (Pileg) atau presiden terpilih tidak mendapatkan kursi mayoritas di legeslatif, maka pembentukan pemerintahan koalisi harus kuat. Dalam kabinet pemerintahan koalisi harus ada keseimbangan dukungan politik di parlemen atau legeslatif dalam memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah eksekutif. Demikian pula secara empiris koalisi pemerintahan yang gemuk sebagaimana dilakukan pada pemerintahan "Presiden SBY " tahun 2009 s/d 2014, belum menjamin terselenggaranya pemerintahan yang solid dan efektif. Oleh sebab itu partai politik yang mengusung presiden terpilih harus memiliki kemampuan politik dalam menggalang kekuatan politik di parlemen ketika "Presiden" menetapkan berbagai kebijakan untuk kepentingan publik. Secara umum di berbagai negara negara yang kabinet pemerintahannya dibentuk berdasarkan "koalisi" partai-partai politik, dalam perjalanannya terjadi dinamika politik dan bahkan konflik politik. Namun ketika dengan sistem pemilihan "anggota legislatif" dilakukan secara terpisah, maka dukungan partai politik terhadap "presiden terpilih" belum tentu dari "partai politik" yang menguasai kursi di legislatif. Oleh sebab itu "presiden" terpilih dalam membentuk kabinet pemerintahannya mengharuskan "berkoalisi" dengan partai lain. Dengan demikian referensi historis dan konsep serta teori tentang pemerintahan koalisi di atas, akan digunakan mendiskripsikan "fenomena" pemerintahan koalisi di Indonesia di era reformasi pada hasil pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2009 yang lalu. Sedangkan hasil pemilihan umum tahun 2014 tetap akan sama dengan periode sebelumnnya, pemerintahan yang dibentuk berdasarkan koalisi lebih dua (2) partai politik.

### 4.2.5 Pemerintahan Koalisi Era Orde Reformasi

Seperti diketahui bahwa desain sistim politik Indonesia menganut multi partai, maka sebagaimana dijelaskan di atas pembentukan pemerintahan berdasarkan "koalisi". Sebagai contoh ketika Partai Demokrat baik pada pemilihan umum tahun2004 sebagai

pemenang pemilihan presiden dan pada pemilihan umum tahun 2009 juga menang dalam "pilpres", maka Partai Demokrat sebagai pengusung Presiden yang terpilih berada di garis depan dalam membentuk "pemerintahan koalisi". Hasil pemilu tahun 2009 partai politik yang lolos dari ketentuan "*electronic threshold*" (ET) dan meraih kursi parlemen yaitu: Partai Demokrat (148), Partai Golkat (106), PDI Perjuangan (94), PKS (57), PAN (46), PPP (40), PKB (29), Gerindra (26) dan Partai Hanura (17). Seperti di sebutkan di atas Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu maka menjadi "tim leader" sebagaimana pada kemenangan "pilpres" tahun 2004 SBY bersama Partai Demokrat membangun "pemerintahan koalisi". Oleh karena Partai Demokrat perolehan kursi parlemen hanya 27,3% maka supaya kekuatan eksekutif harus berimbang dengan kekuatan di legislatif, konsekuensinya harus membangun "koalisi besar", supaya stabil dalam pemerintahan dengan merangkul partai lain sampai minimal 60%. Oleh sebab itu dalam pembentukan kabinet Indonesia Bersatu jilid II, partai-partai yang diajak dalam koalisi yaitu; Partai Demokrat (148), Golkar (106), PKS (57), PAN (46), PPP (40), dan PKB (29), sedang partai-partai yang berada di luar koalisi yaitu; PDI Perjuangan (94), Gerindra (26) dan Partai Hanura (17).

Adapun yang menjadi "kesepakatan bersama "dalam pembentukan " pemerintahan koalisi" hasil pemilihan presiden tahun 2009, dirumuskan dalam 11 (sebelas) butir kesepakatan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota partai koalisi, butir-butir kesepakatan yaitu sebagai berikut:

1. Bersepakat memelihara keutuhan Negara KesatuanRepublik Indonesia.
2. Bersepakat melaksanakan sistem pemerintahan presidensial.
3. Presiden akan mengikutsertakan kader parpol sebagai menteri di kabinet Indonesia Bersatu II.
4. Presiden menetapkan sejumlah nama yang diusulkan menjadi menteri dan dalam hal ini, parpol tidak akan menolak putusan presiden.
5. Para menteri wajib melaksanakan tugas sesuai kontrak kerja dan berperilaku sesuai dengan pakta integritas yang ditandatangani.
6. Presiden dapat memberhentikan menteri yang tidak memenuhi kontrak kerja dan pakta integritas. Presiden memberitahu pimpinan parpol untuk dicarikan penggantinya.
7. Presiden, baik langsung maupun melalui wakil presiden dan para menteri dapat berkonsultasi ke pimpinan parpol, mengenai kebijakan khusus dan strategis. Parpol anggota koalisi harus mendukung kebijakan yang telah diputuskan Presiden, baik melalui fraksi di DPR maupun saluran lain.
8. Dalam menyikapi keputusan dan pelaksanaan tugas di DPR, fraksi partai koalisi selalu berkomunikasi sesama fraksi anggota koalisi.

9. Tanpa harus kehilangan daya kritis dan fungsi pengawasan, fraksi partai koalisi wajib mendukung kebijakan pemerintah sebagaimana disebut pada poin 7 dan 8.
10. Pimpinan parpol anggota koalisi tidak dapat secara sepihak menarik menterinya yang memiliki masalah di internal dengan partainya. Pimpinan parpol harus berkonsultasi dengan Presiden untuk mencari solusi.
11. Jika pimpinan parpol secara resmi dan terbuka menyatakan menarik dukungan terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, koalisi atau keberadaan para menteri di kabinet Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono akan batal/berakhir.

Berdasarkan kesepakatan di atas, dalam perjalanan kabinet pemerintahan pimpinan SBY, setelah berjalan satu setengah tahun (2011), di lalui dengan dinamika politik yang cukup tinggi dan bahkan seringkali menghadapi intrik-intrik serta konflik kepentingan di parlemen yang sudah barang tentu berdampak terhadap terganggunya kinerja pemerintahan bentukan Presiden SBY.

### 4.2.6 Fenomena Konflik Pemerintahan Koalisi Era Reformasi

Meskipun Presiden SBY telah mengantongi 60% lebih anggota parlemen (DPR) di legislative berdasarkan perolehan suara dari parpol-parpol yang tergabung dalam "Sekretariat Gabungan Parpol Koalisi". Namun ketika terjadi benturan kepentingan yang menyangkut kasus besar yakni mega korupsi di sektor perbankan dan perpajakan yaitu kasus "bank century" dan kasus korupsi "Gayus Tambunan", perbedaan pendapat cara penanganan kasus tersebut menimbulkan "kegaduhan politik" antara sesama parpol anggota koalisi. Para anggota dewan dari parpol koalisi masing-masing ingin memanfaatkan momentum kasus tersebut untuk menarik simpati publik dengan cara kasus tersebut diangkat melalui "hak angket" sebagai "Hak DPR" yang memiliki fungsi sangat strategis yaitu kewenangan "penyelidikan". Dua persoalan besar yang menimbulkan "kegaduhan politik" menurut istilah para politisi, ketika kasus" bank century", mau diangkat dalam "hak angket" diputuskan melalui voting. Partai Demokrat dan koalisinya menghendaki supaya hasil hak angket tidak diangkat menjadi persoalan "hukum". Sampai dilakukan voting terhadap tiga opsi, justru yang menang "opsi" yang tidak dikehendaki oleh Partai Demokrat. Pada kasus yang kedua yaitu "kasus Gayus", maka Partai Demokrat tidak mau kecolongan seperti pada kasus "bank century". Ketika kasus "Gayus" akan diangkat dalam hak angket dan keputusan dilakukan dengan voting, maka pada kasus yang kedua ini dimenangkan oleh kubu koalisi Partai Demokrat. Sebagai konsekuensinya parpol anggota koalisi yang mendukung kasus

”Gayus” yaitu Golkar dan PKS, menyebabkan Partai Demokrat l memberikan kartu merah kepada Golkar dan PKS, dan diminta keluar dari keanggotaan Setgab Parpol Koalisi. Ketika Presiden SBY akan merombak kabinet banyak kalangan memprediksi Golkar dan PKS dikeluarkan dari “kabinet pemerintahan koalisi”.

Suasana kebatinan saat itu akan terjadi Resufle kabinet sebagai salah satu jalan keluar yang harus dilakukan ketika “ketidakharmonisan” terjadi dalam berkoalisi. Ketidakharmonisan para parpol anggota koalisi dalam menyikapi peristiwa yang menjadi pembicaraan publik, patut menjadi catatan penting dalam sejarah politik di era reformasi, pada semester I tahun 2011. Presiden SBY dalam pidato resmi di depan media massa dengan tegas memberikan isyarat, bagi partai poltik yang tergabung dalam pemerintahan sudah tidak sepaham dan melanggar “kesepakatan” akan dikeluarkan dari “pemerintahan koalisi”. Boleh jadi dua kejadian peristiwa politik di parlemen yang diangkat dalam “Hak angket“ DPR yaitu “kasus Bank Century” dan kasus “mafia pajak Gayus” meskipun kasus ini gagal diangkat dalam Hak Angket DPR, telah membuat kegusaran baik Presiden SBY maupun Partai Demokrat. Bahkan partai Golkar dan PKS agar diminta mengundurkan diri dari pemerintahan koalisi.

Perdebatan yang cukup melelahkan dan membuat bosan dan jenuh masyarakat sesungguhnya harus disadari oleh elite politik untuk segera menuntaskan konflik dalam tubuh “parpol-parpol anggota pemerintahan koalisi”. Banyak kalangan menghendaki dalam perdebatan issue “perombakan atau *reshuffle cabine*t”, agar tetap berdasarkan atas penilaian yang objektif bahwa para menteri yang diberhentikan “melanggar kontrak kerja dan pakta integritas”. Adapun perbedaan pendapat di parlemen yang menyangkut kepentingan yang menjadi perhatian publik dan menimbulkan “kegaduhan politik”, sebagai isyarat dilakukan penilaian terhadap partai politik koalisi. Jika sering terjadi pergantian menteri sudah barang tentu mempengaruhi kinerja kementerian tersebut. Pada umumnya menteri baru memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Lazimnya “menteri” baru maka kebijakan juga baru, artinya kementerian tersebut bekerja mulai dengan hal yang baru. Adapun kebijakan pendahulunya meskipun bagus belum tentu akan diteruskan. Kecenderungan terjadinya bongkar pasang menteri di tengah perjalanan pemerintahan, sudah bisa dipastikan kontra produktif. Kecuali motivasi pergantian anggota kabinet didasarkan oleh evaluasi kinerja yang memang di bawah standar. Dampaknya akan lebih positif jika dibandingkan pergantian anggota kabinet semata mata berdasarkan motif “politik” yang dipastikan mengindahkan objektifitas. Dengan demikian “kegaduhan politik” yang menjadi pemicu keputusan Presiden mengganti menteri-menteri dari parpol koalisi, dikarenakan peristiwa “voting hak angket kasus Gayus”, merupakan presiden terhadap kelemahan “pemerintahan koalisi”.

Sesungguhnya terlepas dari persoalan "kegaduhan politik" di parlemen tentang "kasus Bank Century dan Gayus", penilaian masyarakat terhadap "*performance*" para menteri "Kabinet Indonesia Bersatu II" sudah meragukan kemampuannya sejak awal pembentukan kabinet pemerintahan Presiden SBY. Oleh sebab itu seharusnya momentum Presiden memberhentikan menteri-menteri adalah para menteri yang gagal menjalankan "kontrak kerja" dan "pakta integritas", seperti disebutkan di atas. Dampak reshufle kabinet tersebut mengundang kepercayaan publik terhadap pemerintahan SBY. Kebijakan politik tersebut sebagai manifestasi keseriusan dalam mengelola negara yang tidak tersandera oleh kepentingan politik semata. Penilaian terhadap kinerja yang kurang baik para pembantu presiden dapat dipertanggungjawabkan secara kuantitatif dan kualitatif yang menjadi salah satu kewenangan "Staf Khusus Bidang UKP4" yang dijabat oleh " Kuntoro Mangku Subroto". Penilaian layak dapat digunakan sebagai dasar Presiden menggunakan "Hak Prerogatifnya" terhadap nota kesepakatan butir 6 (enam). Walaupun pada hakekatnya masyarakat memiliki cara dan logikanya sendiri dalam memberikan penilaian terhadap kinerja para pejabat publik. Kemungkinan masyarakat tidak terlalu mengindahkan teori-teori matematika yang rumit, penilaian masyarakat sangat sederhana dan bersahaja yakni apa yang dilihat dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Data empiris yang sering menjadi keluhan masyarakat misalnya; harga-harga kebutuhan barang-barang pokok yang terus naik, harga BBM dan Gas yang semakin tidak jelas arahnya, keadaan infrastruktur dasar yang masih buruk seperti jalan raya, transportasi, pertanian, industri, perdagangan serta di bidang penegakan hukum. Bahkan pengendalian harga barang kebutuhan pokok masyarakat seperti daging, cabe, bawang merah/putih, pemerintah terasa sangat kewalahan dan panik menghadapi gejolak ekonomi setiap menjelang lebaran.

Penilaian masyarakat tersebut tinggal dicocokan dengan penilaian dari Staf Khusus Bidang UKP4 jika penilaian seiring atau "*matching*", tinggal menteri-menteri yang menangani sektor-sektor tersebut yang paling rendah kinerjanya yang mendesak untuk diganti. Selama ini dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia terutama pada masa Orde Baru memang tidak pernah diajarkan adanya kelompok "oposisi" yang diperankan oleh partai politik. Ketika era reformasi, desain sistem politik Indonesia membuka peluang munculnya "partai oposisi" dalam legislatif yang dimainkan oleh PDI Perjuangan dan Gerindra serta Partai Hanura yang memang berada di luar pemerintahan "Kabinet Indonesia Berasatu II" walaupun mereka berada di luar pemerintahan namun sesungguhnya sikap dan tindakan politiknya belum sepenuhnya sebagai "oposisi" sejati, hanya bersikap kritis semata. Dalam kalkulasi politik Presiden akan melakukan "*resufle cabinet*" Partai Demokrat sebagai "*team leader*" terutama SBY sebagai Presiden, harus menghitung dengan cermat agar tetap dapat lebih mengimbangi "kekuatan di perlemen" yaitu harus menggandeng

partai oposisi yang lain (PDI Perjuangan, Gerindra dan Hanura) sebagai pengganti kekuatan yang ditinggalkan Golkar dan PKS jika benar-benar Presiden SBY berani mendepaknya.

Pandangan para pakar, sesungguhnya dalam "matematika politik" jika Presiden SBY akan mengeluarkan Golkar dari "pemerintahan koalisi" maka harus ada "partai" lain seperti PDI Perjuangan diajak bergabung. Dalam upaya Presiden SBY mengutus seseorang melakukan pendekatan politik terhadap PDI Perjuangan, namun pimpinan partai tersebut tetap menginginkan supaya konsisten dengan amanat "kongres" di Bali, dengan memberikan sinyal yang bisa dipastikan PDI Perjuangan akan menolak untuk diajak bergabung oleh Presiden SBY. Oleh sebab itu ketika gagal membujuk PDI Perjuangan masuk dalam pemerintahan koalisi, maka SBY perlu menghitung ulang komposisi koalisi partai-partai politik.

Berkaitan dengan sikap politik Golkar yang lebih cenderung bermain "dua kaki atau ambigu", yakni di satu sisi tetap menghendaki ada di pemerintahan karena memang tidak terbiasa jadi "oposisi" takut kehilangan basis massa, maka di sisi yang lain agar tetap mendapat simpati dan dukungan rakyat harus dimainkan seolah-olah bersikap "kritis" dan dinamis". Peran yang ingin dimainkan oleh Golkar tersebut patut dimaklumi oleh karena Partai Golkar masih trauma dengan "hujatan masyarakat" yang sedemikian hebat setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Bahkan ketika Presiden dijabat oleh Abdurahman Wahid (Gus Dur) sempat menghendaki agar "Golkar dibubarkan". Berdasarkan beban sejarah yang berat tersebut, maka di era reformasi permainan politik Golkar yang ditampilkan harus berbeda dengan partai pendukung pemerintah, agar tidak terbebani kembali sebagai pencitraan partai pendudukung penguasa. Sebab ketika rezim yang didukung mengalami nasib yang kemungkinan sama dengan sejarah masa lalu, dengan sikap kekritisan yang ditampilkan Golkar tetap secara perlahan dan pasti mandapat simpati masyarakat luas, bahkan dewasa ini di mata publik kepercayaan masyarakat sedang mulai tumbuh kembali. Momentum tersebut sangat dirasakan oleh Golkar sehingga permainan politik harus tetap kritis, menjadi alat "bargaining position dengan penguasa" saat ini.

Dengan sikap dan permainan Golkar yang cerdik, sesungguhnya membuat "Presiden SBY gamang walaupun dalam pidato resmi di depan media massa sangat tegas menginginkan penataan ulang keanggotaan pemerintahan koalisi dan juga para elite politik Partai Demokrat dibuat gregetan atas sikap Golkar sebagaimana diutarakan di atas. Adapun PKS dalam situasi menjelang issue "reshuffle cabinet" seolah menjadi partai yang merasa paling disalahkan oleh para elite Partai Demokrat. Akan tetapi dengan gaya yang sabar, teguh pendirian dan ikhlas yang ditampilkan oleh para elite politik PKS, walaupun dikatakan siap sebagai partai oposisi jika dikeluarkan dari keanggotaan pemerintahan koalisi. Namun dengan keyakinan yang tinggi dan

merasa tidak melanggar "nota kesepakatan", Presiden SBY tidak akan mendepak PKS dari "pemerintahan koalisi".

Setelah selama tiga minggu terjadi perdebatan "issue perombakan " kabinet, ketika Presiden SBY memberikan "keterangan" di hadapan media massa usai sidang kabinet, pada kenyataannya Presiden SBY harus realistis, jika mendepak Golkar dan PKS dari pemerintahan koalisi, akan tetapi gagal mengajak PDI Perjuangan bergabung, tidak bisa menjamin "pemerintahan koalisi" akan bertambah baik. Oleh sebab itu Presiden SBY mengurungkan niatnya untuk melakukan penggantian menteri menteri terutama yang dari Golkar dan PKS dan kementerian lainnya termasuk dari Partai Demokrat sendiri. Keputusan Presiden SBY sudah menjadi keniscayaan dan juga sudah diduga para pakar dan pengamat dalam berbagai diskusi, SBY tidak akan merombak kabinet jika tidak bisa menggandeng PDI Perjuangan ditambah dengan Gerindra. Walapun cara Presiden menghentikan perdebatan "issue perombakan kabinet" mengundang banyak kritik dan komentar yang bernada sinis dan apologetik dan bahkan sikap apatis masyarakat. Boleh jadi niat presiden mau melakukan penggantian para pembantunya sesungguhnya benar-benar akan dilakukan, oleh karena sudah kehilangan momentum yang tepat atau momentum "Hak Angket" mafia pajak yang diciptakan oleh kubu Partai Demokrat ternyata menggelinding seperti bola liar yang justru tidak membawa hasil memancing masuknya partner baru untuk bergabung "pemerintahan koalisi" yaitu PDI Perjuangan. Kegagalan menggandeng PDI Perjuangan masuk dalam "pemerintahan koalisi", seperti dikatakan di atas, Presiden SBY dan Partai Demokrat tidak mungkin akan berani membangun "pemerintahan koalisi" tanpa ada sandaran kekuatan politik antara Golkar dan PDI Perjuangan. Karena jika pemerintahan SBY berkoalisi dengan PAN, PKB, PPP dan Gerindra kekuatan politik di parlemen masih rapuh dan belum kuat untuk mengawal dalam setiap pengambilan keputusan yang harus mendapatkan persetujuan DPR. Namun pada akhirnya SBY melakukan reshuffle kabinet, akan tetapi janji yang disampaikan SBY untuk membentuk Zaken Kabinet tetap tidak terpenuhi, karena pendekatan "politik" tetap menjadi pertimbangan utama dalam rangka memperkuat "koalisi". Untuk mengurangi kekecewaan publik, SBY mengangkat dan memperbanyak jabatan "Wakil Menteri" di sebagian besar Kementerian. Walaupun pada kenyataannya kedudukan Wakil Menteri yang berasal dari para "profesional" dari kampus dan birokrasi dalam perkembangannya kurang efektif. Seiring dengan itu respon masyarakat cenderung negatif dan bahkan langkah yang cukup berani masyarakat mengajukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi tentang jabatan "Wakil Menteri". Pada kenyataannya kedudukan "Wakil Menteri, di nilai sering terjadi disharmonisasi dengan para pejabat eselon satunya.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan "presidential" dalam sistem multi partai, pada kenyataaannya menghadapi persoalan

yang cukup dilematis, terutama menjaga keseimbangan dinamika kekuatan antara "legislatif dan eksekutif". Negara yang menganut sistem multi partai, pada umumnya sistem pemerintahannya menggunakan "sistem parlementer". Dalam sistem tersebut "kepala pemerintahan" atau sering disebut "perdana menteri" diangkat dan diberhentikan oleh legislatif dalam satu paket pemilu, sehingga secara otomatis partai pemenang pemilu yang tidak mencapai "*single mayority*" untuk menempatkan "calonnya" sebagai kepala pemerintahan, melakukan upaya membentuk "koalisi partai" guna membangun kekuatan lebih dari 50% kursi di legislatif. Adapun terkait dengan sistem parlementer, Presiden sebagai kepala negara tidak berdasarkan dari hasil "pemilu" akan tetapi melalui pengangkatan yang ditetapkan dengan perundangan yang berlaku. Meskipun dalam dinamika proses penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa terhindarkan dari "konflik kepentingan" akan tetapi proses politik relatif tidak menimbulkan "keguncangan" stabilitas politik dan keamanan, namun bisa terkendali melalui mekanisme hubungan kelembagaan yang telah ditetapkan.

Upaya menjelaskan perbandingan sistem parlementer dengan sistem pemerintahan "presidential" di Indonesia memang cukup unik. Karena sistem kepartaiannya multi partai dan "presiden dipilih terpisah dengan pemilu legislatif yakni melalui pemilu dengan model pemilihan oleh rakyat secara langsung (demokrasi langsung). Apabila presiden terpilih didukung oleh partai politik yang kemenangannya menguasai 50% lebih jumlah kursi di legislatif, maka dalam pembentukan "kabinet pemerintahan" tidak perlu dibangun melalui "koalisi partai" dan pemerintahan akan solid. Namun pada realitasnya "presiden" terpilih tidak didukung oleh "partai politik" yang mampu menguasai 50% kursi legislatif. Konsekuensi logis, kabinet pemerintahan yang dibentuk harus melalui "koalisi partai". Dengan membangun koalisi partai, tidak hanya membutuhkan "energy politik" yang besar juga tidak menjamin "dinamika politik" di legislatif mampu dikendalikan dengan baik oleh pemimpin atau "koordinator" koalisi partai. Oleh sebab itu sepanjang desain sistem politik seperti yang digambarkan di atas, maka penyelenggaraan pemerintahan jika terus ditopang dengan basis kekuatan politik yang relatif lemah, mengakibatkan rentan dengan konflik kepentingan baik dalam pemerintahan di legislatif maupun di eksekutif. Dengan demikian kegaduhan atau keguncangan politik setiap saat bisa terjadi dan pengaruhnya adalah stabilitas politik yang tidak kondusif dampaknya terhadap pembangunan ekonomi kurang maksimal dalam meningkatkan "kesejahteraan rakyat".

### 4.2.7 Membangun Pemerintahan Koalisi yang Efektif

Oleh sebab itu agar dalam sistem "presidential" mampu menopang kokohnya stabilitas "penyelenggaraan pemerintahan", koalisi partai-partai yang dibangun cukup dua atau

maksimal tiga partai besar yang mendapatkan suara lebih dari 50% kursi di legislatif. Apalagi jika ada partai politik yang mampu mendapat kursi di legislatif lebih dari 50%, sehingga untuk membangun pemerintahan akan lebih solid dan kuat. Jika dilihat performance ke depan Partai politik pada pemilu 2014 yang akan datangmenghadapi berbagai persoalan yaitu banyak kader partai-partai politik yang tersangkut tindak pidana korupsi. Terutama Partai Demokrat berdasarkan hasil survei elektabilitas yang menurun sangat tajam. Bahkan saking galaunya Partai Demokrat ketika mengadakan KLB untuk mengganti Anas Urbaningrum yang berhenti sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Presiden SBY didaulat secara aklamasi menggantikan posisi Ketua Umum Partai Demokrat yang ditinggalkan Anas. Dengan turun gunungnya sang pendiri memimpin Partai Demokrat, agar dalam pemilu 2014 dapat bangkit kembali menjadi partai papan atas. Pada dasarnya ketika partai politik solid dan kuat maka akan berpengaruh terhadap semakin mantabnya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, meskipun secara empiristik hasil pemilu 2014 tetap mengharuskan dibentuknya pemerintahan koalisi. Untuk itu sistem kepartaian harus diatur dengan tepat dalam peraturan perundang-undangan. Sebab jika koalisi partai yang dibangun masih mencerminkan banyak partai, niscaya dalam pembentukan "pemerintahan koalisi" akan rentan dengan konflik baik dalam tubuh parlemen atau legislatif maupun dalam soliditas penyelenggaraan pemerintahan eksekutif. Dengan kata lain dalam desain sistem politik multi partai membutuhkan kekuatan partai politik yang mendapatkan dukungan rakyat minimal 40% sehingga dalam membangun pemerintahan koalisi hanya terdiri dari dua partai politik besar. Oleh sebab itu, rakyat perlu memberikan dorongan yang maksimal terhadap partai politik yang memiliki kualitas unggul dan bersih dari tindakan KKN, maka salah satu partai pemenang mendapat suara seperti disebutkan di atas. Secara signifikan untuk modal koalisi hanya dengan dua atau tiga partai politik saja.

Pengalaman sejarah politik di Indonesia sudah pernah mengalami perjalanan pemerintahan koalisi mulai tahun 1945 s/d 1959, menunjukkan selama menyelenggarakan pemerintahan tidak pernah mengalami kondisi yang stabil dan bahkan menganggu jalannya pelaksanaan pembangunan terutama di bidang ekonomi, sehingga berpengaruh terhadap stabilitas politik dan keamanan. Pengalaman tersebut menjadi pelajaran bahwa di era reformasi, meskipun "kegaduhan politik" tidak seberat pada era Orde Lama, namun memberikan dampak kurang baik terhadap pendidikan politik warga negara dan juga menambah antipati masyarakat terhadap partai politik yang terkesan kurang fokus memperjuangkan secara nyata peningkatan kesejahteraan rakyat yaitu menghapus kemiskinan dan kebodohan masyarakat. Oleh sebab itu

menjadi tugas para elite politik negeri ini untuk iktibar terhadap sejarah masa yang lalu dalam mendesain sistem politik yang demokratis dan sedapat mungkin mampu mencegah terulangnya kembali sejarah masa yang lalu yang buruk.

Harapan yang dikemukakan di atas pada akhirnya sia sia dengan melihat dan mencermati hasil pemilihan umum legeslatif tahun 2014. Sebagaimana diketahui bersama bahwa hasil pemilihan umum tahun 2014 yang diikuti oleh 12 (dua belas) partai politik, tidak ada partai politik yang mencapai ambang batas sebesar 20% suara di legislatif yang dipersyaratkan untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden sendiri. Pemenang dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 yaitu PDIP hanya mencapai sebesar 19% lebih, mengharuskan mencari partner koalisi dalam membentuk kabinet pemerintahan tahun 2014 s/d tahun 2019. Oleh sebab itu jika pembentukan koalisi terjebak oleh situasi politik dagang sapi dan tidak berdasarkan kekuatan ideologis dalam melakukan perubahan Indonesia ke depan, niscaya sejarah pemerintahan koalisi masa sebelumnya di bawah komando Presiden Susilo Bambang Yudoyono selama dua periode yang kurang solid dan kurang efektif akan terulang kembali.

Sebagaimana di ketahui bersama dalam pemilihan presiden terdapat dua pasangan calon presiden yaitu calon presiden nomor urut 1 pasangan Prabowo Subianto dengan Hatta Rajasa, dan pasangan calon nomor urut 2 yaitu Joko Widodo dengan Jusuf Kalla. Pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa di dukung oleh partai koalisi yaitu; Gerindra, PKS, PKS, PPP, PAN, PBB dan Golkar. Sedangkan pasangan Joko Widodo dengan Jusuf Kalla di dukung partai koalisi yaitu PDIP, NasDem, Hanura, dan PKB. Berdasarkan hasil perhitungan hasil Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 22 Juli 2014 sebagai pemenang calon nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan perolehan suara 53,7% dan Prabowo-Hatta mendapat 47,3%. Hasil perhitungan yang di keluarkan oleh KPU mendapat reaksi penolakan oleh kubu Prabowo-Hatta dan melakukan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan yang dilakukan calon pasangan Prabowo-Hatta di awali dari sengketa perhitungan Quick Count yang membedakan diantara 4 (empat) lembaga survei yang memenangkan kubu Prabowo-Hatta dan 8 (delapan) lembaga survei yang memenangkan kubu Jokowi-JK. Keputusan final penetapan calon presiden terpilih dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 22 Agustus 2014. Presiden terpilih Jokowi-JK merupakan fenomena kemenangan rakyat menunjukkan partisipasi politik yang sesungguhnya. Oleh sebab itu kabinet yang di bentuk berdasarkan koalisi tanpa syarat harus mencerminkan kehendak rakyat yaitu kabinet yang bersih dari KKN, Profesional dan Kompeten serta Negarawan.

## STUDI KASUS 2

Kajian mengenai ”pemerintahan koalisi” di atas merupakan konsekuensi logis dari sistem politik multi partai. Untuk menambah wawasan menegnai “pemerintahan koalisi” kita akan membahas berdasarkan kasus yang dimuat di media massa sebagai upaya mencari solusi bagaimana membangun pemerintahan koalisi hasil pemilihan umum tahun 2014. Setelah melakukan perlehatan pesta demokrasi tahun 2014 partai politik yang memperoleh suara besar seperti PDIP (19%), GOLKAR (14%) dan GERINDRA (12%), sibuk mencari partner koalisi untuk diajak membentuk kabinet pemerintahan. Harapan masing-masing partai besar tersebut sudah barang tentu kabinet pemerintahan yang dibentuk mampu menjawab keinginan publik (*public interest*) yaitu; pemerintahan yang kuat, efektif, berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsa lain, berdaulat di bidang ekonomi dan politik, membangun kedaulatan pangan dan lain-lain. Agar cita-cita dan harapan di atas dapat terwujud sudah barang tentu koalisi yang akan dibangun memiliki kesamaan dan kesepemahaman ideologi yang dimiliki oleh partai politik yang dapat mengusung calon presidennya. Untuk itu bahan diskusi yang dipilih yaitu topik tentang koalisi yang berjudul “Bangun Koalisi Seideologi” sebagaimana tertulis di bawah ini:

### Bangun Koalisi Seideologi

*MEDIA INDONESIA, Jum'at April 2014*

Utusan PDIP menemui Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh untuk membahas masa depan bangsa. Sebagai pemenang Pemilu Legislatif 2014 versi hitung cepat tetapi gagal menjadi *single majority*, PDIP mulai menjajaki koalisi berdasarkan kesamaan ideologi dan *platform*, bukan dengan parpol yang hanya berorientasi kekuasaan.

Komunikasi politik pun mulai dibangun ketika Sekjen PDIP TjahjoKumolo yang ditemani Wasekjen Hasto Kritianto dan tim sukses Jokowi for President bertemu Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, kemarin. Itu merupakan pertemuan pertama PDIP dengan partai lain setelah pemungutan suara, Rabu (9/4).

Tjahjo mengatakan kunjungan ke Partai NasDem atas perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk membangun kesepakatan bersama dalam membangun bangsa kedepan. ”Kita membahas perihal bangsa Indonesia kedepan, yakni bangsa berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian. Pikiran Ibu Megawati dan Pak Surya memiliki kesamaan. Kesepakatanakan dilanjutkan nanti,” ujarnya seusai pertemuan.

Saat ditanya apakah pertemuan tersebut bentuk ajakan koalisi kepada Partai NasDem, Tjahjo menyatakan belum ada pembicaraan ke arah itu. Pertemuan semata didasari kesamaan visi dan misi serta *platform* antara PDIP dan Partai

NasDem. ''Implementasinya, kita lihat nanti."

Surya mengatakan Partai NasDem dan PDIP punya kesamaan pandangan, yakni kemajuan bangsa ditentukan pemerintahan yang kuat dan didukung parlemen solid. Indonesia yang menganut sistem presidensial pun butuh pemimpin tangguh, konsisten, dan berani melaksanakan kebijakan. ''Soal koalisi, saya ingin melihat kesempatan, peran yang lebih berarti bagi NasDem menjalankan politik gagasan. NasDem membutuhkan kerjasama yang baik dengan siapa pun yang duduk di pemerintahan yang mendukung restorasi," kata Surya.

**Contoh buruk**

Koalisi berlandaskan *ideology* dan *platform* partai dinilai ideal demi terbentuknya pemerintahan yang kuat. Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Komaruddin Hidayat menegaskan koalisi yang kuat berawal dari kesamaan visi dan misi. Hal itu dapat dilihat dari *platform* partai sebagai acuan komitmen selama menjalin koalisi.

Komaruddin mencontohkan Kabinet Indonesia Bersatu II yang dibangun Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai koalisi buruk. Berbagai perbedaan dan keberagaman tujuan partai hadir sehingga menyulut ketidakharmonisan dan ujung-ujungnya roda pemerintahan kerap tersendat akibat konflik internal.

''Kedepan, koalisi harus berdasarkan platform. Partai yang berhaluan nasionalis dan Islam sulit dipertemukan karena berangkat dari arah berbeda. Jangan sampai koalisi merupakan kumpulan partai, bukan kumpulan satu visi dan misi," tegasnya.

Partai Gerindra yang juga menjadi salah satu poros koalisi siap bekerjasama dengan partai mana pun yang sejalan dan mengusung cita-cita sama. ''Harus berdasarkan Pancasila, berpihak pada kesejahteraan rakyat, dan mendukung 6 Program Aksi Transformasi Bangsa Partai Gerindra," tandas Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi.



Setelah membaca teks di atas maka untuk menambah bahan diskusi di bawah ini disampaikan beberapa pertanyaan seputar topik mengenai pemerintahan koalisi yaitu sebagai berikut:

1. Dalam sejarah politik Indonesia pada masa orde lama pernah menerapkan sistem multi partai dan pemerintahan koalisi yang dibentuk kabinet selalu jatuh bangun, mengapa sistem tersebut diterapkan kembali?
2. Bagaimana strategi pembentukan pemerintahan koalisi yang lebih efektif dan kondusif?
3. Sejauh mana respon masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang tidak solid akibat konflik antar partai politik koalisi di parlemen?
4. Apakah selama ini terjadi konflik kepentingan dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan antar partai politik koalisi sesuai dengan kepentingan masyarakat luas atau hanya kepentingan kelompok partai atau bahkan kepentingan pribadi elite politik?
5. Bagaimana pendapat Saudara jika pembentukan partai-partai koalisi untuk menentukan calon Presiden dan wakil Presiden dilakukan sebelum pemilu legislatif?

## 4.3 DEMOKRASI LANGSUNG MEMBAWA MANFAAT ATAU PETAKA

Sistem politik Indonesia telah menetapkan demokrasi langsung sebagai alat dalam memilih pemimpin nasional, regional dan lokal. Sejak pemilu tahun 2004 dan 2009 merupakan tonggak sejarah penting Indonesia yang berpenduduk 230 juta jiwa memilih Presiden Republik Indonesia melalui demokrasi langsung berdasarkan undang-undang dasar. Selanjutnya diikuti pemilihan kepala daerah yaitu Gubernur dan Bupati/Walikota, dengan landasan undang-undang pemerintahan daerah. Indonesia dianggap sukses menerapkan demokrasi langsung yang berjalan dengan aman, tertib dan damai. Namun kesuksesan melaksanakan demokrasi secara prosedural belum diikuti oleh hasil kerja para pemimpinnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Problem utama yang dihadapi oleh negara dan bangsa Indonesia antara lain penegakan hukum yang masih lemah, pemberantasan korupsi yang belum optimal, pemulihan ekonomi yang belum mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok rakyat, konflik horizontal masih bersifat laten dan massif. Persoalan yang paling menonjol dengan pelaksnaan demokrasi langsung yaitu hasil pemilukada tercatat sampai bulan Februari tahun 2014 sebanyak 318 kepala daerah terlibat kasus pidana korupsi. Fenomena tersebut menggiring untuk melakukan kajian terhadap pelaksanaan demokrasi langsung yang sudah berjalan dua kali pemilu yaitu tahun 2004 dan 2009 dan apakah akan terulang lagi fenomena di atas pada hasil pemilihan umum tahun 2014. Adapun topik kajian berjudul ”demokrasi langsung membawa manfaat atau petaka”, dengan uraian penjelasan di bawah ini.

### 4.3.1 Hakekat Demokrasi

Sebagaimana penjelasan pada bab di atas bahwa hampir semua negara modern maupun yang baru lepas dari penjajahan dari kekuatan asing sejak mulai abad 18 sampai dengan abad sekarang, negara tersebut baik secara sukarela maupun dipaksa menerapkan konsep “demokrasi” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di negara yang telah memenuhi syarat demokrasi lazimnya terdapat partai politik lebih dari satu, memiliki lembaga-lembaga politik seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif secara terpisah, adanya peradilan yang bebas, telah menjalankan pemilu secara periodik, dan lain-lain. Dalam konsep dan teori demokrasi telah diperkenalkan yakni terdapat bermacam-macam sebutan demokrasi misalnya “demokrasi rakyat”, demokrasi liberal juga disebut “demokrasi parlementer” karena diikuti oleh sistem pemerintahannya perlementer, demokrasi Pancasila (khusus istilah ini khas di Indonesia). Adapun demokrasi dipandang dari aspek fungsional yaitu; “demokrasi” formal *(Formal democracy)*, demokrasi permukaan *(faced democracy)*, demokrasi

substansial *(substancial democracy)*. Sedangkan dipandang dari aspek teknis yaitu disebut "demokrasi perwakilan" *(representative democracy)* dan demokrasi langsung *(direct democracy)*.

Dalam pembahasan pada bab ini lebih fokus pada pengertian demokrasi yang ditinjau dari aspek teknis yaitu "demokrasi langsung" dan sebagai pembeda yaitu "demokrasi tidak langsung" atau "demokrasi perwakilan". Pada hakekatnya di Indonesia selama menjalankan konsep "demokrasi" menggunakan model demokrasi perwakilan, sebagai perwujudan dari pelaksanaan "Pancasila" yaitu sila keempat yang berbunyi; "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijakan dalam permusyawaratan atau perwakilan". Kata "kerakyatan" atau "republiken" dalam bahasa latin, sebagai konsep dasar dari suatu pemikiran yang menjiwai ide "demokrasi" menunjukkan suatu pengakuan bahwa "rakyat" sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam pengaturan, pengelolaan dan percaturan suatu negara. Mandat "rakyat" mencerminklan suatu "hikmah" dalam jiwa dan sanubarinya, sehingga "suatu kebenaran" pada hakekatnya mengalir melalui "media yang luhur" yang menjelma menjadi "lembaga musyawarah" yaitu sebagai lembaga "pengambilan keputusan tertinggi yang memiliki kewibawaan luhur yang menjadi pegangan bagi rakyatnya". Para anggota yang berada pada "lembaga musyawarah" memiliki kewibawaan merupakan "perwakilan" yang terpilih melalui proses yang dipercaya membawa "kebenaran" untuk melaksanakan tugas dengan mengemban "hikmah" untuk mewujudkan "kehendak rakyat" yaitu "kesejahteraan lahir dan batin". Oleh sebab itu "sistem perwakilan" dianut dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan sejak bangsa Indonesia berdiri tahun 1945 melalui dua rezim pemerintahan yaitu pada waktu jaman Orde Lama dan Orde Baru. Seperti disebutkan *Samsudin Haris (2000*), ketika pemilu pertama yang dilaksanakan tanggal 29 September tahun 1955, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat yang para anggotanya berjumlah 257 kursi. Partai politik yang memperoleh suara dalam pemilu, termasuk partai-partai besar yang menguasai parlemen antara lain Partai Nasional Indonesia (PNI, 22,3%/57 kursi), Partai Masyumi (20,9%/57 kursi), Partai NU (18,4%/45 kursi), Partai Komunis Indonesia (PKI, 16,4%/39 kursi). Empat partai tersebut memperoleh suara mayoritas, sedangkan dua puluh tiga (23) partai lainnya dan satu peserta perorangan (R.Soejono Prawiosoedarso) memperoleh suara antara 2,9% sampai 0,1% atau sekitar 8 s/d 1 kursi. Akan tetapi dari hasil pemilu yang sering dikatakan sebagai pemilu yang sangat "luber" dan aman, dalam perkembangannya persaingan antar partai politik yang dilatarbelakangi oleh faktor ideologis justru semakin tajam yakni antara nasionalisme, Islam dan komunis, sehingga stabilitas politik dan keamanan tergangggu. Demikian pula pada jaman Orde baru "sistem Perwakilan" justru lebih dimantapkan bahkan rezim Orde baru dapat melanggengkan kekuasaannya sampai selama 32 tahun. Oleh karena selama masa Orde Baru pelaksanaan "sistem perwakilan"

mengalami distorsi secara massif, maka di era reformasi dilakukan evaluasi dan mengalami perubahan yang fundamental dalam bangunan "sistem politik" Indonesia.

### 4.3.2 Sejarah Demokrasi di Indonesia

Sebelum melakukan analisis atau kajian tentang "demokrasi langsung", akan diuraikan terlebih dahulu beberapa catatan penting tentang sejarah politik Indonesia terutama penerapan "demokrasi" sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdiri sampai era reformasi saat ini.

Sejarah perkembangan politik di Indonesia sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan saat ini mengalami banyak pasang surut. Secara periodisasi dari mulai masa Orde Lama tahun 1945-1966 dibagi dalam dua model pemerintahan yaitu model demokrasi parlementer tahun 1945-1959 dan demokrasi terpimpin tahun 1959-1966. Pada era demokrasi parlementer kepala pemerintahan dipimpin seorang perdana menteri sedangkan pada masa demokrasi terpimpin kepala pemerintahan dan kepala negara dirangkap. Sebagaimana telah diuraikan di atas kedua model demokrasi tersebut menunjukkan kehidupan politik tidak sehat dan stabilitas politik terganggu. Sebagai contoh pergantian kabinet yang berumur tidak lebih dari satu tahun sering terjadi, meskipun penyelenggaraan kekuasaan lebih demokratis. Berdasarkan sistem parlementer, mulai November 1945-Juni 1959. Kemudian Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sistem demokrasi yang dianut yaitu demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin tersebut juga banyak gangguan terhadap stabilitas dan puncak dari ketidakstabilan politik terjadinya peristiwa G.30 S PKI pada tahun 1965. Kemudian penggantian rezim dari Soekarno ke Soeharto mulai tahun 1967 hingga tahun 1998 di bawah sistem demokrasi Pancasila penyelenggaraan kekuasaan yang disebut Orde Baru. Sistem pemerintah berdasarkan demokrasi Pancasila lebih cenderung sentralistik dan otoriter. Dengan perubahan sistem politik tersebut mampu mewujudkan stabilitas politik dan keamanan sehingga bangsa Indonesia dapat dengan leluasa melakukan pembangunan dengan prioritas pembangunan di bidang ekonomi. Bahkan pertumbuhan ekonomi selalu ditargetkan di atas 7% dapat membawa bangsa Indonesia bangkit menjadi negara berkembang. Stabilitas politik yang dijalankan dengan pendekatan keamanan *(security approach)* tersebut memang relatif tidak terjadi gejolak yang besar seperti gerakan radikal, pemberontakan separatis dapat dikendalikan melalui pendekatan yang represif.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi memang mampu meningkatkan jumlah kelas menengah di Indonesia mencapai seratus juta lebih. Secara teoritis kelas menengah merupakan agen pembaharuan dan perubahan dalam sistem politik demokrasi. Oleh karena dalam sistem demokrasi Pancasila lebih ditekankan pada

aspek pendekatan keamanan, maka kekuatan kelas menengah tidak tumbuh signifikan sebagai agen perubahan dan pembaharuan. Melemahnya peran kelas menengah mengakibatkan kurang tumbuhnya partisipasi politik, budaya politik yang egaliter dan kelembagaan politik yang lebih demokratis. Oleh sebab itu sistem pemerintahan berdasarkan demokrasi Pancasila menunjukkan praktek demokrasi yang belum substansial, namun baru demokrasi permukaan (*faced democracy*). Artinya demokrasi yang belum memberikan pengaruh terhadap perbaikan di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Pertumbuhan ekonomi yang tidak terdistribusikan dengan cara demokrasi, menimbulkan kesenjangan dan ketimpangan pendapatan masyarakat. Komunikasi politik yang kurang baik antara pemerintah dan rakyatnya menyebabkan terjadinya konflik yang bersifat vertikal. Demikian pula kesenjangan hubungan pemimpin di semua lini dengan rakyatnya menyebabkan kurang tumbuhnya budaya egaliter. Dengan demikian pada masa orde baru profil demokrasi masih bersifat formalitas atau semu, sehingga fungsi kontrol sosial lemah dan terjadi *abuse of power* di semua lini pemerintahan eksekutif.

Oleh sebab itu ketika masa orde baru dimana hasil pembangunan ekonomi yang tumbuh dengan stabil selama tiga puluh tahun, mengalami distorsi akibat krisis moneter tahun 1997. Dengan krisis tersebut menjungkirbalikan kekuasaan rezim Orde Baru yang sangat kuat. Tumbangnya orde baru pada tahun 1998 yaitu ketika Soeharto meminta berhenti dan mundur dari tampuk kekuasaan yang selama 32 tahun digenggamnya. Warisan krisis moneter yang berdampak terhadap krisis multidimensi masih dirasakan oleh bangsa Indonesia yakni krisis moral dan krisis kepercayaan, pemerintahan era reformasi bahkan belum mampu memulihkan stabilitas ekonomi dan penegakan hukum. Beban berat krisis pemerintahan tersebut, menyebabkan kondisi masyarakat saat ini masih mengalami tingkat kesulitan dalam kebutuhan kehidupan sehari-hari. Untuk itu wajar jika menimbulkan persepsi masyarakat yang justru berbalik menyalahkan terhadap gerakan reformasi yakni kehidupan pada masa orde baru dirasakan lebih baik terutama dalam hal stabilitas keamanan dan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu menjadi catatan penting bagi era gerakan reformasi terhadap perkembangan opini masyarakat tersebut, karena kurang cepatnya gerakan reformasi melakukan *recovery* di bidang ekonomi, politik, dan hukum ke arah yang benar. Gerakan reformasi yang sudah sukses dalam membangun sistem politik yang demokratis, jika tidak diimbangi dengan optimalisasi pembangunan ekonomi yang signifikan, akan berakibat terhadap terganggunya stabilitas keamanan. Demikian pula jika secara yuridis formal sistim politik Indonesia sudah memenuhi persyaratan demokrasi, harus didukung oleh budaya politik yang egaliter, agar tidak menjadi demokrasi yang semu dan demokrasi tidak hanya dinikmati oleh elit politik yang berkuasa saja tetapi juga masyarakat secara luas.

Sesungguhnya jika melihat fenomena di atas tidak terlepas dari kondisi empiristik yang dihadapi negara berkembang seperti di Indonesia. Membangun sistem politik demokratis yang establish seperti di negara maju di pengaruhi oleh banyak faktor antara lain faktor sosial-budaya. Di negara maju yang kondisi sosial buadaya memiliki nilai-nilai keterbukaan, egaliter dan disiplin serta menujunjung tinggi nilai sportivitas, maka demokrasi dapat berjalan dengan sukses. Sedangkan masyarakat Indonesia sebagian besar masih tradisional, budaya primordial dan feodalistiknya masih kuat, belum mampu sepenuhnya memahami dan melaksanakan nilai-nilai tersebut di atas. Sebagai contoh dalam pembentukan sejumlah partai politik, ternyata masih belum bisa lepas dari pengaruh politik aliran walaupun telah mendeklarasikan sebagai partai modern dan inklusif. Hal tersebut diindikasikan dimana orientasi politik masyarakat dalam memberikan dukungan terhadap partai politik masih diwarnai politik aliran seperti disinyalir oleh *Clifford Geertz* (1976). Seperti dikemukakan dari hasil studinya di Jawa dengan judul *"Religion of Java"* membagi masyarakat Jawa menjadi tiga kelompok yaitu: santri, abangan dan priyayi. Budaya masyarakat tersebut memiliki aliran politik masing-masing, misalnya kelompok budaya santri orientasi politiknya ke partai-partai Islam, budaya abangan ke partai nasionalis sekuler dan budaya priyayi kepartai nasionalis atau sosialis. Namun menarik untuk dicermati trend menjelang pemilu tahun 2014, hasil survei yang dirilis oleh sebuah lembaga survei terkenal, khusus terhadap pemilih pemula justru menempati rating pertama yang banyak dipilih oleh pemilih pemula adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), disusul Partai Golkar dan Partai Hanura. Padahal PDIP merupakan penjelmaan diri dari Partai Nasional Indonesia (PNI) pendukung kuat masyarakat tradisional atau masyarakat abangan serta masyarakat bawah atau akar rumput (*grass root*). Sedangkan pemilih pemula dewasa ini memiliki pemikiran yang lebih liberal dan pragmatis. Untuk itu studi *Clifford Geertz* tersebut sudah mulai mengalami perubahan tata nilai masyarakat di masa depan, ketika Indonesia menghadapi bonus demografi. Meskipun berdasarkan pengamatan dalam pembentukan partai-partai di era reformasi tahun 1998, ada kecenderungan orientasi politik masyarakat secara relatif kembali pada representasi politik aliran terutama di Jawa yang masih berbasis tradisional agraris. Namun kecenderungan di masa depan partai politik seperti PDIP akan mengalami perubahan seiring dengan regenerasi elit politik yang semakin lebih modernis.

### 4.3.3 Masa Peralihan Demokrasi Perwakilan Menjadi Demokrasi Langsung

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa pembangunan sistem politik yang demokratis ternyata memerlukan energi yang sangat besar. Sebab sepanjang budaya

politik masyarakat masih kental dengan budaya feodalistik dan patrimonial dan sikap politik masyarakat selama Orde Baru diterapkan politik masa mengambang *(floating mass)* masih kuat, sulit bisa dibangun sistem poitik yang demokratis sebagaimana diharapkan dari teori demokrasi dari *Joseph Schumpeter* dan *Robert A. Dahl.* Untuk itu partai politik besar yang berkuasa melakukan konsolidasi secara lebih teratur, terpimpin dan tersistematik. Konsolidasi tersebut terutama yang menyangkut sosialisasi politik dan komunikasi politik serta *rekrutment* politik dari mulai lapisan atas sampai ke bawah secara intensif. Dalam kurun waktu dua atau tiga generasi baru dapat terwujud, seiring dengan dukungan meningkatnya pendidikan masyarakat. Seperti diketahui bersama bahwa praktek demokrasi selama masa orde lama dan orde baru berdasarkan demokrasi perwakilan (*representative democracy*). Perubahan dari demokrasi perwakilan menuju demokrasi langsung merupakan kebijakan politik yang dilandasi oleh pemikiran reformasi. Seperti hasil pemilu tahun 2004, 2009 dan 2014 jika dijadikan sebagai tonggak sejarah politik di Indonesia maka Indonesia dianggap sebagai negara yang sukses dalam menerapkan demokrasi langsung yaitu dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota.

Terkait dengan uraian di atas wajar jika bangsa Indonesia sering dikatakan sedang melakukan sebuah eksperimen yang terbesar pada abad 21 ini. Sebagai negara dengan penduduk nomor empat terbanyak di dunia melaksanakan pemilu dengan memilih pemimpin melalui demokrasi langsung. Dalam pemilihan presiden pada tahun 2004 dan 2009 telah berjalan dengan aman dengan risiko konflik yang sangat minimal. Meskipun pelaksanaan demokrasi secara formal dan prosedural telah menghasilkan pemimpin yang memiliki legitimasi kuat. Harapan terhadap demokrasi sebagai konsep politik modern yaitu pemimpin yang terpilih memiliki kemampuan *(ability)* dan kapasitas *(capacity)* serta aseptabel *(acaptable)* menjalankan roda pemerintahan dalam menangani problem pokok bangsa seperti di bidang pemerintahan, ekonomi, hukum, dan sosial. Sebagaimana dijelaskan di atas, membangun sistem politik yang demokratis harus diimbangi dengan kesuksesan pula di bidang ekonomi dan masalah sosial lainnya, agar tidak menimbulkan problem baru bagi kehidupan demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu pemimpin di masa depan yang terpilih melalui demokrasi langsung adalah pemimpin yang visioner dan demokratis yang mampu menghadapi tantangan perubahan pada era globalisasi.

Penjelasan di atas merupakan pencerminan perubahan kebijakan politik berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dilakukan "Amandemen". Perubahan yang mendasar yaitu dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui demokrasi langsung. Kemudian diikuti dalam pemilihan kepala daerah yaitu Gubernur dan Bupati/Walikota. Memilih seorang pemimpin negara dan pemerintahan seperti dalam pemilihan presiden, sesuai konstitusi setiap calon

presiden hanya memiliki peluang dua kali masa jabatan presiden. Kebijakan politik tersebut sesungguhnya momentum yang baik untuk membangun proses regenerasi kepemimpinan nasional. Kemudian diikuti oleh pemilu kepala daerah Gubernur dan Bupati/Walikota, juga membuka peluang yang besar untuk mendapatkan seorang "pemimpin" yang dekat dengan rakyatnya karena rakyat yang memilih langsung tokoh yang di idolakan sebagai pemimpinnya. Dari model pemilihan langsung tersebut diharapkan akan mendapatkan sosok pemimpin yang "visioner dan demokratis", sesuai harapan masyarakat.

Namun tujuan yang mulia dari perubahan dari demokrasi perwakilan menuju demokrasi langsung menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks. Para elit politik ketika mendesain model demokrasi sebagai pemikiran reformis kurang menghitung aspek kesiapan masyarakat. Pada kenyataan di lapangan terdapat kesenjangan informasi dan aspirasi antara kepentingan para elit dengan rakyatnya. Pada satu sisi aspirasi dan kepentingan para elit cenderung lebih berorientasi pada kekuasaan dan motif ekonomi. Sedang dilain pihak rakyat memiliki harapan tinggi yaitu dengan demokrasi dapat terpilih pemimpin yang dekat dengan rakyatnya dan mampu menyelesaikan problem masyarakat yaitu kemiskinan dan kebodohan. Pada kenyataanya tokoh-tokoh yang diusung melalui hasil pemilihan demokrasi langsung sosok pemimpin daerah yang kurang didukung oleh kemampuan, kapasitas dan aseptabilitas sebagai pemimipin negara dan pemerintahan, terutama dalam pemilukada gubernur dan bupati/walikota. Oleh sebab itu dapat dkatakan bahwa sesungguhnya masyarakat belum siap melaksanakan ide demokrasi langsung. Sebab kondisi masyarakat Indonesia secara politis masih dalam situasi pengaruh politik massa mengambang *(floating mass)* yang diterapkan pada masa orde baru. Dampak negatif kebijakan massa mengambang yaitu kecederungan masyarakat bersikap apatis terhadap kegiatan politik atau apolitik. Sikap apolitik dapat menyebabkan partisipasi politik masyarakat rendah. Fenomena demokrasi langsung menunjukkan bahwa ketika elit politik membutuhkan dukungan rakyat baik dalam pemilihan legeslatif, pemilihan kepala daerah, seringkali menghadapi kesulitan karena respon masyarakat rendah. Menghadapi konsdisi partisipasi politik yang rendah, maka para elit politik untuk memperoleh dukungan rakyat dilakukan melalui mobilisasi massa. Pendekatan melalaui cara mobilisasi massa membutuhkan dana yang besar. Oleh sebab itu dalam praktek demokrasi langsung kurang didukung oleh partisipasi politik masyarakat dan cenderung dilakukan mobilisasi massa, maka fenomena yang muncul adalah manipulasi suara dan politik uang dalam pemilihan umum berlangsung secara massif. Contoh sengketa pemilihan umum legeslatif tahun 2014 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebanyak 767 kasus sengketa pemilu yang diajukan oleh partai politik. Oleh karena itu dalam konteks *das sein* dan *das solen* berkaitan dengan pelaksanaan

demokrasi langsung, menimbulkan pertanyaan sejauh mana efektifitas model demokrasi langsung yang sudah diterapkan untuk memilih Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, sudah tepat sasaran, ataukah masih sebatas pada tata cara normatif dan prosedural. Menjawab pertanyaan tersebut dapat diikuti kajian kritis tentang demokrasi langsung di bawah ini.

### 4.3.4 Fenomena Demokrasi Langsung

Beberapa catatan fenomena yang terjadi dengan pelaksanaan demokrasi langsung *(direct democracy)* yang menggantikan demokrasi perwakilan *(representative democracy)* cenderung menimbulkan:

*Pertama;* proses pencalonan sebaga kepala daerahmembutuhkan biaya sangat besar bagi sang calon atau kandidat. Masing-masing calon untuk mengikuti pemilihan Bupati/Walikota, Gubernur dan Presiden sudah dipastikan akan menghabiskan dana bisa mencapai miliaran rupiah. Sedang untuk pemilihan Presiden bisa mencapai ratusan miliar yang harus dikeluarkan oleh masing-masing calon. Artinya beban yang ditanggung oleh masing-masing calon sangat besar. Manajemen partai politik sebagai pengusung calon secara kelembagaan sudah dipastikan tidak memberikan dukungan dana terhadap para kandidat. Tetapi justru mengharuskan para kandidat membiayai sendiri pengeluaran selama proses pemilihan kepala daerah. Bahkan partai politik mengenakan tarif terhadap para kandidat/calon yang akan diusung menjadi Kepala Daerah. Berdasarkan beberapa sumber informasi untuk Pemilukada Bupati/Walikota para calon yang menang tersebut menghabiskan biaya minimal antara 15 s/d 30 miliar untuk daerah-daerah yang wilayahnya luas dan penduduknya kurang dari 1 (satu) juta orang.

*Kedua;* dalam pemilihan kepala daerah ketika partisipasi politik masyarakat rendah maka yang terjadi adalah mobilisasi massa. Dengan penggerakan massa melalui mobilisasi, maka peristiwa politik uang tidak dapat dihindari. Bentuk politik uang bisa terjadi dalam berbagai cara seperti dalam bentuk sumbangan, santunan sampai pada istilah serangan fajar. Jadi jika bentuk dukungan terhadap calon pejabat publik itu bukan melalui partisipasi politik melainkan dengan cara mobilisasi bisa dipastikan biaya politik jauh lebih besar.

*Ketiga;* Ketika pendidikan politik kurang dan nilai sportivitas masyarakat juga rendah, maka persaingan dalam pemilhan kepala daerah sangat rentan dengan konflik. Terjadinya konflik antar pendukung calon kepala daerah cenderung kearah konflik horizontal di berbagai daerah. Konflik yang cukup fenomenal seperti terjadi pada pemilu gubernur di Sulawesi Selatan dan Maluku Utara dengan berbagai versinya. Walaupun dalam penyelenggaraan Pemilukada sebanyak 94 di daerah (data sampai

dengan bulan Juli 2010) yang terjadi konflik horizontal hanya pada 24 daerah pemilukada. Akan tetapi fenomena tersebut berpotensi menciderai upaya pemerintah dalam bereksperimen mengembangkan ”demokrasi langsung” dalam sistem politik Indonesia di era reformasi.

*Keempat;* akibat dari pembiayaan pemilihan kepala daerah keseluruhan dibebankan kepada para kandidat maka akan terjadi perubahan orientasi berpikir para pemimpin daerah. Perubahan pemikiran tersebut yaitu bagaimana upaya mengembalikan modal yang telah dikeluarkan atau *return of investement* (ROI). Cara yang dapat dilakukan pada umumnya melalui penggunaan anggaran belanja daerah atau dari sumber APBN melalui DAU dan DAK serta dana Bansos. Melakukan gratifikasi kepada para investor atau pengusaha. Pemikiran pragmatis tersebut tanpa disadari oleh para kepala daerah melakukan perbuatan “korupsi kolusi dan nepotisme (KKN)”. Untuk itu tren yang kini sedang terjadi banyak kepala daerah yang terlibat korupsi dan mendapatkan sanksi pidana baik semasa masih menjabat maupun setelah menjadi mantan Gubernur/Bupati/Walikota.

### 4.3.5 Beberapa Ekses Demokrasi Langsung

Berdasarkan penjelasan fenomena di atas, penerapan demokrasi langsung dalam perspektif sejarah sejak abad 18 sampai dengan saat ini abad 21, secara empiris menimbulkan hasil yang berbeda dari masing-masing negara. Misalnya negara yang sudah maju seperti Amerika Serikat dan negara Eropa Barat antara demokrasi dan kesejahteraan rakyat memiliki korelasi yang positif. Namun bagi negara berkembang pelaksanaan demokrasi sering menimbulkan hasil yang tidak sebanding dengan tujuan demokrasi, yaitu konflik yang berkepanjangan dan bahkan berpotensi timbulnya disintegresi seperti terjadi di Mesir pada tahun 2013. Dengan demikian terkadang sering menjadi bahan renungan dan muncul godaan pemikiran yang skeptis bahwa demokrasi sebagai sebuah konsep apakah masih bersifat absurd, atau memang demokrasi membutuhkan kondisi dan persyaratan yang rumit dan kompleks yang belum bisa dipenuhi oleh masyarakat dan bangsa yang sedang berkembang seperti Indonesia. Sikap skeptis tentang demokrasi langsung, mendorong untuk melakukan evaluasi dan kajian yang lebih mendalam terutama dalam Pemilihan kepala daerah. Adapun *guide line* penerapan demokrasi di Indonesia yang sudah ada pada sila keempat Pancasila, telah dilakasanakan pada masa orde lama dan orde baru akan menjadi bahan studi komperatif.

Penjelasan di atas yang terkait dengan berbagai ekses dalam praktek demokrasi langsung, dalam beberapa forum diskusi, sudah mulai muncul pemikiran para pakar dalam pemilihan gubernur agar kembali kepada “demokrasi perwakilan”. Pertimbangan

dalam melakukan kajian terhadap penerapan demokrasi langsung yakni "kedudukan Gubernur sebagai wakil pemerintah sebaiknya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Di samping itu jika dikaitkan dengan dasar negara Pancasila seperti yang dikatakan di atas bahwa dalam sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Penafsiran terhadap sila keempat tersebut selama ini, azas kerakyatan yang mencerminkan konsep demokrasi, telah digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan sejak zaman Orde Lama, Orde Baru dan awal Reformasi, sebagai model demokrasi perwakilan. Dalam pandangan kaum reformis pada waktu itu menilai bahwa hasil demokrasi perwakilan dianggap kurang berhasil atau gagal karena esensi perwakilan sering dimanipulasi oleh para elite politik dalam memilih pemimpin. Bahkan pada zaman Orde Baru dalam memilih pemimpin selama 6 (enam) kali pemilu dengan sistem perwakilan ini terpilih satu orang yang sama untuk menjadi presiden. Fakta empiris penerapan demokrasi pada masa orde baru tersebut walaupun kualitas demokrasi masih sebatas demokrasi permukaan atau *facede demoracy (Jeff Heyness, 1997)*. Akan tetapi pada hakekatnya demokrasi perwakilan tetap mengandung esensi nilai-nilai demokratis. Sebab secara teoritis setiap anggota legeslatif yang terpilih merupakan wakil rakyat yang memiliki mandat dan amanah yang luhur dalam menjalankan tugas kenegaraan. Dengan demikian mengkaji kembali mengenai pemilihan Gubernur melalui cara demokrasi perwakilan, berdasarkan pertimbangan antara lain pertama; di samping kedudukannya sebagai wakil pemerintah yang perannya relatif sudah berkurang. Kedua; peranannya sebagai koordinator dan pengendalian pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Ketiga; tidak memiliki kewenangan hirarki terhadap Bupati/Walikota. Berdasarkan ketiga pertimbangan di atas maka sudah sewajarnya dalam pemilihan Gubernur menggunakan Demokrasi Perwakilan.

Pemikiran kembali kepada "demokrasi perwakilan" sebagaimana yang telah diuraikan di atas, praktek demokrasi menimbulkan anomali. Seperti diketahui bersama perlu ditegaskan kembali bahwa dalam perkembangannya penerapan demokrasi langsung yang sudah berjalan selama 2 (dua) kali Pemilu tahun 2004 dan 2009, memang sudah mulai dilakukan evaluasi kembali oleh banyak kalangan masyarakat, pakar dan bahkan pejabat negara yang berwenang. Identifikasi masalah yang sudah sering menjadi pembahasan dalam berbagai diskusi dan telah diuraikan di atas antara lain *pertama;* pencalonan seseorang dalam mengikuti pilkada menjadi kandidat pemimpin daerah membutuhkan biaya yang sangat besar. *Kedua;* tidak bisa terhindarkan dengan merebaknya politik uang dan politik dagang sapi. *Ketiga;* timbulnya potensi konflik horizontal sesama pendukung calon sangat kuat. *Keempat;* terkait dengan pembiayaan dalam pencalonan, maka hanya kandidat yang punya uang saja yang bisa maju sebagai calon tanpa memperdulikan kualitas dan kemampuan

sebagai pemimpin daerah, sehingga muncul dari kalangan " Artis" dan "Pengusaha". *Kelima;* kalangan yang dianggap mampu sebagai pemimpin daerah seperti misalnya para intelektual, profesional, birokrat, aktivis LSM dan Ormas, politisi parpol yang kurang populer dan tidak memiliki dana yang cukup, sulit untuk masuk bursa pencalonan.

Permasalahan tersebut di atas dalam berbagai forum diskusi resmi maupun pendapat dari kalangan masyarakat, sudah banyak yang memberikan ulasan dan kajian baik sifatnya praktis maupun teoritis. Dari kalangan akedemisi memberikan penjelasan bahwa kemungkinan kesalahan bukan hanya pada sistem tetapi pada para pelaksananya atau pada manusianya, yang belum mampu menyesuaikan diri dengan sistim demokrasi langsung tersebut. Karena pada hakekatnya perubahan dari sistem perwakilan ke demokrasi langsung merupakan lompatan yang besar, perlu kesiapan yang sempurna baik *hardware* maupun *software*. Artinya di samping harus dipersiapkan sistem dan perangkat operasionalnya juga kesiapan manusianya sebagai suatu kesatuan dalam sistem sosial. Manusia sebagai individu dalam masyarakat sudah barang tentu terikat oleh tata nilai yang berlaku di lingkungannya. Ketika masyarakat mudah dihinggapi penyakit "*moral hazzard*" karena perubahan tata nilai yang cenderung "praktis pragmatis", maka terjadinya "peristiwa politik uang" seperti yang disebutkan di atas akan mudah terjadi.

Demokrasi langsung dianggap merupakan lompatan besar dalam perubahan desain sistem politik di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang baru terlepas dari kungkungan politik otoritarian dan politik massa mengambang *(political floating mass)*, tiba-tiba dibuka kran demokrasi, sudah barang tentu menimbulkan *euphoria* dan *shock culture* yang cukup berarti. Berbagai kekuatan politik melakukan konsolidasi kekuasaan dengan mendirikan partai politik yang jumlahnya spektakuler yaitu ratusan partai politik. Namun di pihak lain kondisi masyarakat di akar rumput *(grass root)* yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi, secara tidak disadari munculnya sifat pragmatisme yang sudah mulai berkembang semakin tumbuh subur, ibarat peribahasa "bak cendawan tumbuh di musim hujan". Sehingga ketika para elit politik membutuhkan dukungan rakyat untuk kepentingan konsolidasi kekuasaan tersebut, maka menimbulkan fenomena "politik uang" dan "politik dagang sapi", tidak bisa terhindarkan terjadi yang merebak di seluruh penjuru tanah air.

Oleh karena itu muncul ungkapan "politik serba uang" atau politik adalah uang akan menjadi *trademark* desain sistem politik Indonesia di masa depan. Pada akhirnya jika tidak waspada dalam menyusun format sistem politik melalui paket undang-undang politik seperti yang saat ini tengah berlangsung, maka justru paket undang-undang tersebut memiliki potensi menghancurkan kehidupan berbangsa

dan bernegara. Fenomena tersebut secara perlahan sudah mulai bermunculan, yaitu potensi laten memperlemah semangat NKRI, tidak mustahil bisa datang dari produk undang-undang di bidang politik disamping produk undang-undang lainnya.

### 4.3.6 Analisis Terhadap Penerapan Demokrasi Langsung

Berdasarkan kajian yang cukup mendalam dari berbagai sudut pandang seperti yang diuraikan di atas, analisis terhadap penerapan demokrasi langsung meliputi beberapa aspek yang dibahas antara lain sosiologis, ekonomi, budaya, politik, hukum dan keamanan itu sendiri. Oleh sebab itu apabila aspek-aspek tersebut menjadi bahan tambahan untuk melengkapi kajian di atas, maka akan lebih lengkap dan komprehensif. Untuk itu di bawah ini diuraikan secara ringkas aspek tersebut sebagai pendukung untuk melengkapi kajian tersebut di atas, yaitu sebagai berikut:

**4.3.6.1**. **Ditinjau dari Aspek Sosiologis**; ”demokrasi langsung” dalam prakteknya identik dengan pemilihan ”lurah” atau kepala desa”, yang saat ini masih dilaksanakan di daerah daerah. Dalam pemilihan ”lurah” atau kepala desa, figur yang akan dipilih rakyat atau masyarakat sudah sangat mengenal ”calon” pemimpinnya. Mengingat jumlah penduduk di pedesaan masih relatif sedikit sehingga masyarakat mudah saling mengenal. Oleh sebab itu dalam memilih calon pemimpinnya lebih banyak menggunakan kata hatinya. Walaupun masyarakat pedesaan masih kuat sifat ”patrimonialismenya”, tetapi sesungguhnya masyarakat desa juga memiliki pendirian dan keteguhan yang sulit dipengaruhi oleh pihak lain. Terkait dengan pemilihan Gubernur atau Bupati/Walikota, jumlah penduduknya jauh lebih besar dan masyarakatnya lebih heterogen. Demikian pula wilayah cakupannya sudah sedemikian besar dan luas yang mendiami daerah perkotaan (urban) maupun pedesaaan (rural). Sifat masyarakat perkotaan sudah barang tentu berbeda dengan masyarakat pedesaan. Sifat masyarakat perkotaan pada umumnya lebih dekat dengan arus informasi dan menguasai informasi melalui media massa dan media elektronik. Hubungan sosial relatif kurang dekat dan lebih bersifat invidual serta serba formal. Sedang masyarakat desa arus informasi yang dimiliki relatif lebih sedikit dan hubungan komunikasi lebih bersifat dari mulut ke mulut. Terkait dengan praktek demokrasi langsung dalam memilih kepala daerah yaitu Gubernur dan Bupati/Walikota, pemahaman terhadap para kandidat terhadap kedua komunitas tersebut sudah barang tentu berbeda. Pada masyarakat perkotaan pada umumnya tingkat partisipasi dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah lebih rendah dibanding masyarakat pedesaan. Sedang masyarakat pedesaan pada umumnya kurang mendapatkan informasi yang lengkap tentang para calon kepala daerah. Oleh sebab itu pemilihan umum yang telah berjalan

sejak tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014, partisipasi politik masyarakat cenderung mengalami penurunan. Partisipasi politik masyarakat yang rendah mendorong para elit politik menggunakan cara memobilisasi massa pada setiap melakukan kampanye. Seperti diketahui bersama bahwa cara mobilisasi massa membutuhkan dana yang besar, di samping itu memaksa masyarakat memilih calon tertentu dengan iming-iming sejumlah uang dalam pesta demokrasi langsung tumbuh subur di masyarakat. Bahkan kondisi masyarakat dewasa ini memandang pesta demokrasi dalam pemilihan legeslatif dan pemilihan kepala daerah menjadi perhelatan para politisi membagi-bagikan uang.

**4.3.6.2. Ditinjau dari Aspek Budaya**; masyarakat pedesaan pada umumnya masih kuat dalam memegang teguh nilai-nilai tradisional. Walaupun teknologi informasi melalui berbagai jenis media massa kemungkinan sudah merambah ke pelosok pedesaan, akan tetapi nilai tradisional seperti ”patuh dan taat” terhadap ”patron”nya masih tetap kuat. Misalnya terhadap ”ulama, guru, dan tokoh masyarakat atau pemimpin informal” yang dekat dengan masyarakat. Penggalangan massa melalui para ”patron” sangat efektif, untuk itu cara pendekatan kepada para tokoh tersebut sering digunakan oleh para elit politik. Akan tetapi kelemahanya jika para ”patron” sudah terbujuk melakukan bias informasi, maka dukungan rakyatpun akan bias dan tidak efektif. Sedang masyarakat perkotaan nilai-nilai seperti disebutkan di atas pada umumnya sudah mulai memudar, masyarakat perkotaan lebih rasional, pragmatis dan egaliter, pada umumnya sulit mempengaruhi mereka hanya dengan menggunakan simbol-simbol, tetapi lebih mengutamakan hubungan yang lebih dialogis dan pernyataan atau janji kampanye yang rasional. Pada umumnya jika ”calon” pemimpin kurang mendapat simpati, paling sulit bagi mereka untuk datang secara sukarela ke kotak TPS pada saat pemilu. Namun dalam perkembangannya dewasa ini telah terjadi pergeseran nilai-nilai baik masyarakat pedesaan maupun perkotaan sudah sama terjangkiti ”nilai-nilai pragmatisme”. Bahkan di tengah masyarakat perkotaan sudah berkembang bisnis ”penggalangan massa”, jika akan diselenggarakan kampanye di tempat terbuka dan juga tertutup. Oleh sebab itu dalam praktek demokrasi langsung justru tumbuh nilai-nilai pragmatis terutama terhadap masyarakat pedesaan. Budaya politik uang mengiringi praktek demokrasi di Indonesia seolah menjadi *trade mark* perpolitikan Indonesia dewasa ini dan kemungkinan di masa depan.

**4.3.6.3. Ditinjau dari Aspek Ekonomi**; pada saat ini baik masyarakat perkotaan dan di pedesaan, sedang mengalami kesulitan ekonomi, sehingga mereka lebih sibuk dan paruh waktunya digunakan untuk mencari nafkah. Kondisi kesulitan ekonomi akan

mempengaruhi terhadap kegiatan politik misalnya kampanye, diskusi, pemungutan suara. Pada umumnya faktor kesulitan ekonomi masyarakat, memang lebih mudah tergoda oleh stimulus berupa *money politic*. Artinya apabila mereka dimobilisasi untuk menghadiri kampanye, diskusi atau datang ke tempat bilik suara, dengan diiming-imingi sejumlah ”uang” akan lebih mudah. Oleh sebab itu dari kajian faktor ekonomi akan lebih relevan dan signifikan bahwa munculnya ”budaya politik uang” lebih leluasa dilakukan oleh karena faktor kesulitan ekonomi yang hampir dirasakan oleh masyarakat baik di pedesaan maupun orang miskin perkotaaan. Oleh sebab itu di lingkungan masyarakat yang tingkat kesejahteraan rendah sulit dikembangkan suatu kehidupan ”demokrasi” karena pada hakekatnya ”demokrasi” dalam arti yang hakiki akan tumbuh subur ketika masyarakat kondisi ekonominya baik. Artinya masyarakat memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti kebutuhan sandang, pangan, rumah, pendidikan dan kesehatan. Sebagaimana dalam teori Maslow (1943) ketika kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi maka akan muncul kebutuhan selanjutnya yaitu mulai dari kebutuhan sosial, keamanan dan aktualisasi diri. Ketika kebutuhan masyarakat sudah pada level kebutuhan sosial, keamanan dan aktualisasi diri tersebut maka motivasi masyarakat dalam memberikan dukungan terhadap pemilukada sudah dipastikan lebih rasional, sehingga tidak akan terpengaruhi oleh praktek politik uang. Jadi faktor ekonomi akan mempengaruhi terhadap kualitas pelaksanaan demokrasi langsung.

**4.3.6.4. Ditinjau dari Aspek Politik**; sebagian besar masyarakat Indonesia baik di perkotaan maupun di pedesaan, sesungguhnya masih belum mengalami perubahan yang signifikan tentang persepsi yang negatif terhadap ”politik dan juga partai politik”. Persepsi tersebut tertanam cukup lama sejak masa Orde Baru menerapkan ”kebijakan floating mass” atau massa mengambang artinya masyarakat dijauhkan dari aktifitas politik. Pada saat itu kegiatan partai politik hanya di tingkat kabupaten atau kotamadya, sedang di kecamatan hanya bersifat ”komisariat” dan di desa tidak ada kegiatan politik secara organisasional kepartaian. Sehingga kebijakan tersebut berakibat munculnya sikap apatis dan apolitik masyarakat terasa bersifat sangat massif. Dampaknya sesungguhnya masih dirasakan sampai saat ini, walaupun di setiap desa telah berdiri ”kantor partai politik” tapi bisa dipastikan dalam keseharian ”kantor partai” tersebut sepi dikunjungi oleh para kadernya dan mungkin juga miskin kegiatan, kecuali jika ada rapat musyawarah ranting atau ada kunjungan petinggi partai, setelah itu sepi kembali. Kondisi seperti itu pada umumnya terjadi baik di pedesaan maupun di perkotaan. Fenomena tersebut sesungguhnya masih belum memberikan iklim yang kondusif terhadap ”proses demokratisasi”, bahkan jika dikaitkan dengan ”pelaksanaan demokrasi langsung” dalam pemilihan Presiden, Gubernur dan Bupati/

Walokota, dapat dipastikan tingkat dukungan atau partisipasi politik masih tetap rendah. Indikasi tersebut dikuatkan dengan penyelenggaraan ”pemilukada” tingkat kehadiran masyarakat saat ”pemungutan suara” rata-rata hanya mencapai 60% di hampir semua daerah pemilukada tersebut bahkan Pemilukada di Tangerang Selatan pada bulan Desember 2012 yang hadir di TPS hanya 57% atau tingkat golput mencapai 43% (www.kabar6.com). Upaya mendorong tumbuhnya partisipasi politik yang sulit, membuat para elite politik mencoba menggalang massa dengan cara ”mobilisasi massa”. Sebagaimana diketahui bersama cara mobilisasi massa memerlukan energi yang besar dan mahal. Di samping itu eksistensi partai politik yang kurang menonjol dalam kegiatan masyarakat dan bahkan sudah sampai pada situasi dimana partai politik hadir pada kegiatan masyarakat sudah mengundang curiga, sehingga ”partai politik” terpaksa manahan diri untuk tidak tampil dengan atribut dan simbol-simbol partai secara mencolok dan terbuka. Kondisi yang digambarkan tersebut akan menambah daftar panjang terjadinya ”proses disfungsionalisasi” partai politik. Padahal peran partai politik dalam negara ”demokrasi” sesungguhnya sebagai ”tiang negara”, sebab partai politik yang kurang berfungsi dalam menjalankan perannya tersebut niscaya akan mengurangi ”kualitas demokrasi”. Oleh sebab itu ”demokrasi langsung” harus didukung oleh mesin partai politik yang dinamis dan kreatif dalam menjaring calon ”pemimpin pemerintahan”. Jika partai politik berperan dengan baik dalam fungsi rekruitmen pemimpin, tidak akan terjadi ”pemimpin pemerintahan” seperti Kepala Daerah sebagai Gubernur dan Bupati/Walikota, yang berurusan dengan hukum yang pada akhirnya menjadi ”narapidana” karena perbuatan korupsi.

**4.3.6.5. Ditinjau dari Aspek Hukum**; Sebagaimana diketahui bersama bahwa fungsi pemerintah dalam menjalankan ”*rule of law and law of enforcement*” belum berjalan efektif dan bahkan trend yang terjadi adalah maraknya praktek ”mafia hukum”. Padahal di negara yang menganut faham ”demokrasi” harus seiiring dengan penegakan hukum yang tegas dan lugas tanpa pandang bulu. Jika demokrasi tanpa diikuti dengan ”l*aw of enforcement*” maka kebebasan akan disalah gunakan dan boleh jadi akan bermuara pada tindakan anarkis dan hukum rimba akan mudah terjadi, artinya siapa yang berkuasa dan kuat, akan selalu menang walaupun melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh sebab itu ketika penerapan ”demokrasi langsung ” telah berjalan dalam kurun waktu lima belas tahun, banyak menimbulkan praktek melawan hukum yang terkait dengan ”pemilu kada” misalnya; tindakan anarkis, konflik horizontal, politik uang dan perbuatan KKN, baik yang dilakukan oleh masyarakat pendukung calon kepala daerah, maupun oleh elite politik nasional dan lokal. Oleh sebab itu demokrasi tanpa diikuti dengan penegakan hukum yang terjadi justru mobokrasi.

**4.3.6.6. Ditinjau dari Aspek Keamanan**; Sejak era reformasi keamanan memang relatif fluktuatif, tetapi masyarakat merasakan kondisi keamanan lebih rawan dibanding sebelum era reformasi. Fungsi keamanan secara keseluruhan telah diserahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pada waktu itu fungsi Hankam masih dilaksanakan oleh ABRI saat ini disebut TNI, setelah Polri lepas dan berdiri sendiri juga bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan beban yang berat dan besar dalam menjalankan fungsi keamanan pada kenyataannya tugas Polri masih belum optimal. Banyak terjadi kerusuhan di berbagai daerah yang dipicu oleh konflik antar kampung, sengketa tanah, konflik antar pendukung calon kepala daerah, masalah terorisme, dan lain-lain, serta ditambah pelaksanaan "pemilu kada" yang rentan dengan konflik horizontal, sudah barang tentu membutuhkan energi ekstra dan beban berat bagi Polri. Namun justru kecenderungan belakangan ini sering timbul gangguan keamanan yang masih muncul konflik kekerasan antara TNI dengan Polri. Di beberapa daerah terjadi peristiwa bentrokan massal antara TNI dengan Polri. Terakhir dalam bulan Maret 2013 terjadi bentrok fisik antara TNI-Polri yang mengakibatkan Kantor Polres Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan hangus terbakar. Peristiwa tersebut menunjukkan adanya ketidakberesan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Semua pihak yang bertanggung jawab terhadap berlangsungnya kehidupan berbangsa dan bernegara harus menghentikan peristiwa yang memalukan di mata rakyat. Panglima TNI dan Kapolri harus bertanggung jawab mengendalikan bawahannya atau prajuritnya, karena bangsa ini sudah lelah disuguhi berbagai peristiwa konflik. Jika mengharapkan suksesnya praktek demokrasi, dukungan stabilitas keamanan mutlak diperlukan.

Berdasarkan analisis terhadap enam aspek yang menjadi variabel terhadap pelaksanaan "demokrasi langsung", secara keseluruhan berpotensi menumbuhkan "praktek politik uang" dalam penyelenggaraan "pemilukada", terutama aspek ekonomi yang dominan sebagai pemicunya. Adapun dampak negatif yang masif adalah "perilaku koruptif " para elite politik baik yang duduk di legislatif maupun yang duduk sebagai "kepala daerah" sebagaimana data yang telah diuraikan di atas. Dengan demikian model demokrasi langsung yang baru berjalan 2 (dua) kali pemilu lebih banyak berdampak negatif. Sesungguhnya bukan karena model demokrasi langsung yang salah, akan tetapi lingkungan strategis belum mendukung diterapkannya demokrasi langsung dalam "pemilukada" baik untuk Gubernur maupun Bupati/Walikota. Oleh karena demokrasi langsung telah berjalan jika dimatikan sama sekali kemungkinan timbul pro dan kontra. Meskipun telah diketahui bersama bahwa dengan demokrasi langsung membutuhkan biaya yang besar baik yang terkait dengan anggaran negara maupun biaya yang telah dikeluarkan oleh para calon. Sebagai alternatif boleh jadi dicoba pemilukada dapat dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Indonesia.

Pemilukada yang dilaksanakan secara serentak kemungkinan bisa mengurangi pembiayaan keuangan negara, sedang bagi masyarakat tidak selalu dihadapkan pada kegiatan politik praktis tersebut, dan juga dapat mengurangi fragmentasi konflik di tengah masyarakat.

Adapun dalam ”pemilu presiden” yang berdasarkan landasan konstitusi UUD 1945, sudah berjalan mulai pemilu tahun 2004 dan tahun 2009 relatif tidak menimbulkan konflik yang tinggi. Sebagai proses pembelajaran *(learning process)* penerapan demokrasi langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden dimaksudkan antara lain mengembangkan”budaya politik” bagi masyarakat yaitu; menghargai nilai-nilai demokrasi, meningkatkan pemahaman nilai-nilai ”partisipasi politik”, menanamkan nilai-nilai ”kebangsaan dan kewarganegaraan”, nilai-nilai ”egaliter atau persamaan”, dan nilai-nilai yang fundamental misalnya nilai-nilai ”Pancasila”. Jika dalam tiga atau empat pemilu presiden, menghasilkan terpilihnya sosok atau figur presiden yang belum efektif kepemimpinannya dalam melakukan perubahan yang signifikan terhadap aspek ekonomi, politik, hukum dan sosial. Untuk itu pemilu presiden perlu dikaji aspek-aspek yang masih lemah dalam pemilu presiden. Menjelang pemilu legislatif dan presiden pada tahun 2014, sudah muncul para calon presiden yang diusung oleh partai politik. Berbagai kalangan menilai bahwa calon presiden yang diusung oleh partai politik besar yaitu para ketua umum partai politik, dengan beragam pendapat antara lain; *pertama*; calon presiden yang diusung partai usianya sudah di atas 60 tahun, *kedua;* para calon presiden masih muka-muka lama atau dengan bahasa betawi ”lu lagi, lu lagi”. *Ketiga;* para calon presiden yang mau maju sudah dianggap kurang efektif dan tingkat kapasitasnya juga sudah mulai diragukan. *Keempat;* kemunculan para tokoh baru yang ikut meramaikan bursa presiden sebagian mendapat respon positif dari berbagai kalangan, akan tetapi tidak memiliki kendaraan politik. *Kelima;* jika seluruh partai politik mengusulkan calon presiden dari para ketua umumnya masing-masing, maka banyak kalangan menilai kapasitas para kandidat dari ketua partai dianggap masih banyak membawa masalah masing-masing dan belum cukup mumpuni. *Kelima;* beberapa ketua partai yang diusulkan sebagai calon presiden walaupun tingkat popularitasnya tinggi, tingkat elektabilitasnya masih rendah. Oleh sebab itu, pemilu 2014 menjadi momentum yang sangat strategis untuk mendapatkan seorang pemimpin pemerintahan nasional yang menjadi idola masyarakat luas dan memberikan harapan yang besar dan menjadi jaminan, bahwa pemilu presiden mampu mendapatkan atau menghasilkan seorang pemimpin nasional yang handal, visioner dan demokratis.

Pelaksanaan pemilihan presiden melalui demokrasi langsung yang telah berjalan dalam dua pemilu yaitu tahun 2004 dan 2009 relatif tidak menimbulkan konflik horizontal yang massif, seharusnya sistem pilpres tersebut memberikan peluang dan kesempatan yang terbuka lebar bagi tokoh-tokoh nasional yang potensial dan berbobot yang berada di luar partai politik. Agar *hegemoni oligarchi* partai politik tidak menjadi bagian yang merusak hakekat eksistensi peran dan fungsi partai politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

### 4.3.7 Demokrasi Langsung Membawa Petaka

Kemudian kembali pada pembahasan pelaksanaan demokrasi langsung dalam memilih kepala daerah yaitu gubernur dan bupati/walikota menjadi sorotan publik terutama para kepala daerah yang tersangkut pidana korupsi. Berdasarkan pemberitaan yang dilansir di media massa yang bersumber dari Menteri Dalam Negeri pada bulan Februari 2011, pada intinya dinyatakan bahwa sudah ada 158 "Kepala Daerah", 17 diantaranya adalah Gubernur dan mantan Gubernur, telah menjadi tersangka dan sebagian yang lain sudah sebagai terdakwa dan narapidana, karena terkena kasus pidana korupsi. Data pada posisi tahun 2012 pada kenyataannya telah bertambah menurut Kementerian Dalam Negeri dalam Press Release menjadi 474 pejabat daerah yang terindikasi korupsi separo diantaranya 237 orang Kepala Daerah. Fakta empiris hasil pemilukada menunjukkan para pemimpin daerah yang tidak kredibel, maka perlu didalami melalui penelitian yang terkait antara relasi sistem demokrasi langsung dengan pemimpin yang korup tersebut. Terutama sejauhmana variabel Budaya Politik, Perilaku Politik, Sistem Nilai yang ada dalam masyarakat memiliki relasi yang signifikan terhadap pelaksanaan demokrasi langsung. Artinya jika ketiga variabel itu positif maka demokrasi langsung akan menghasilkan pemimpin yang kredibel atau sebaliknya. Oleh sebab itu desain sistem politik demokrasi langsung yang secara teoritis itu baik, didukung oleh budaya politik yang egaliter, perilaku politik yang kuat etika dan moralnya sebagai sistem nilai yang positif. Sesungguhnya pembangunan politik meliputi; sistem kepartaian, sistem pemilu, Susduk MPR/DPR dan DPD, "Pemilu Presiden dan Pemilukada" dan peraturan perundangan lain yang terkait dengan di atas, jika pelaksanaanya menunjukkan hasil kurang produktif perlu dievaluasi kembali secara komprehensif, terintegrasi dan objektif dan bebas kepentingan subjektif kelompok. Oleh sebab itu merupakan keniscayaan bahwa jangan sampai terjadi "proses pembiaran", terhadap implikasi dan ekses demokrasi merusak etika dan moral para elit politik, "demokrasi langsung" bukan membawa manfaat akan tetapi justru membawa petaka negeri ini.

### 4.3.8 Analisis Perbandingan Demokrasi Perwakilan dengan Demokrasi Langsung

Kemudian perlu menjadi pertimbangan dimana kecenderungan berbagai kalangan mengusulkan agar kembali kepada UUD 1945 yang asli yakni sebelum diamandemen. Jadi UUD 1945 yang sudah diamandemen beberapa pakar memberi nama Undang-Undang Dasar Tahun 2002 (UUD 2002). Artinya penilaian dan tuntutan tersebut menunjukkan bahwa demokrasi langsung yang sudah diterapkan selama satu dasa warsa belum memuaskan masyarakat dalam mendapatkan para pemimpin tersebut. Walaupun ide dasar "Demokrasi Langsung" sebagai solusi memperbaiki kelemahan terhadap demokrasi perwakilan dimana dalam memilih pemimpin hanya ditentukan oleh "Elite Partai Politik" yang duduk di parlemen dan melakukan manipulasi dalam memilih pemimpin. Ketika kedua model tersebut dipraktekkan sesungguhnya sama-sama memiliki kelemahan, dimana pemimpin yang dilahirkan tersebut belum "teruji sebagai pemimpin yang negarawan". Apabila kedua model tersebut diperbandingkan maka perbedaan antara demokrasi perwakilan *(Representative Democracy)* dan Demokrasi Langsung *(Direct Democracy)* yaitu *pertama;* demokrasi perwakilan pada kenyataannya telah dijalankan selama 60 (enam puluh) tahun lebih baik pada masa demokrasi parlementer tahun 1945 s/d 1959 maupun pada masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959 s/d 1966 dan masa Orde Baru tahun 1967 s/d 1998 serta masa Era Reformasi tahun 1999 s/d 2004. *Kedua;* implikasi atas ekses demokrasi perwakilan walaupun terjadi "Politik Uang" disekitar para elit partai politik yang duduk di legislatif akan tetapi tidak menimbulkan ekses "konflik horizontal" yang menimbulkan skala besar. *Ketiga;* demokrasi perwakilan mampu mencegah timbulnya politik dinasti. *Keempat;* biaya pemilihan dipastikan jauh lebih hemat atau lebih murah dibandingkan dengan pemilihan langsung. Adapun perbedaan pemilukada dengan model Demokrasi Langsung yakni: *Pertama;* kecenderungan memicu timbulnya konflik horizontal sudah terjadi di berbagai daerah. *Kedua;* bagi calon kepala daerah harus menyiapkan dana yang besar contoh bagi pemilukada bupati/walikota antara 15 s/d 30 miliar. *Ketiga;* partisipasi politik masyarakat dalam pemilukada lebih banyak dimobilisasi bukan kesadaran yang murni (partisipasi politik), maka disamping menimbulkan biaya politik *(political cost)* yang besar dan juga mendorong timbulnya "politik uang" untuk mempengaruhi atau memaksa warga agar memilih calon tersebut. *Keempat;* biaya penyelenggaraan pemilukada cukup besar yaitu pada pemilukada Bupati contoh di Kabupaten Banyumas pada pemilukada tahun 2007 menghabiskan anggaran ± 16 miliar dengan jumlah pemilih 1,2 juta orang dan dianggarkan ± 23 miliar jika diselenggarakan putaran kedua. *Kelima;* menumbuhkan paradigma baru bagi setiap Kepala Daerah terpilih yaitu "*Return of Investment* (ROI)". *Keenam;* menimbulkan

korupsi sangat masif yang dilakukan oleh para Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota, data sampai dengan tahun 2012 mencatat sebanyak 234 kepala daerah yang terlibat korupsi.

Analisis perbandingan terhadap kedua model demokrasi tersebut di atas mendorong para pakar mencoba melakukan evaluasi yang juga berujung pada dua kubu pendapat yakni yang menyarankan agar kembali kepada demokrasi perwakilan dan kubu yang tetap mempertahankan demokrasi langsung. Kedua kubu memiliki argumentasi yang semuanya sama yaitu logis dan rasional. Bagi kubu yang menghendaki kembali pada demokrasi perwakilan karena berdasarkan fakta dan data yang diikuti dengan fenomena perubahan masyarakat yang semakin pragmatis dalam kehidupan politik praktis. Sedangkan kubu yang ingin mempertahankan agar berjalannya demokrasi langsung karena berdasarkan landasan filosofis dan konstitusi dan semangat demokrasi yang bertumpu pada keyakinan bahwa jika warga negara diberikan hak konstitusi dan semangat demokrasi yang ideal yang bertumpu pada keyakinan bahwa jika warga negara diberi hak konstitusional tersebut dipastikan akan terpilih pemimpin "Ratu Adil" yang diyakini membawa kesejahteraan rakyat.

Pertarungan kedua kubu tersebut akan diuji di lembaga legislatif apakah kekuatan politik besar akan lebih cenderung memilih kembali "demokrasi perwakilan" terutama sebagai uji coba terhadap pemilihan Gubernur, dengan berbagai argumentasi yang logis dan rasional. Bagi yang tetap menghendaki demokrasi langsung dalam pemilukada maka pilihan kedua model akan ditentukan melalui pertarungan politik sebagai dimensi adu kekuatan baik secara logika maupun adu kekuatan dukungan dalam jumlah besar di parlemen, diyakini akan memenangkan salah satu opsi tersebut di atas. Akan tetapi jika berpikir jernih dan mencari hakekat kebenaran ilmiah walaupun kedua model demokrasi antara "Perwakilan dan langsung dikatakan sebagai suatu bangunan teori, maka untuk kasus di Indonesia kedua teori demokrasi langsung *(Direct Democracy)* dan demokrasi perwakilan tersebut tertolak kebenarannya secara empiristik. Dengan kata lain Teori Demokrasi perwakilan dan teori demokrasi langsung untuk kasus di Indonesia tidak terbukti kebenarannya secara empiristik dalam memilih pemimpin pemerintahan mampu menghantarkan ke depan pintu gerbang kesejahteraan dan keadilan sosial. Artinya para pemimpin pada era reformasi dengan menggunakan dua model demokrasi fakta empiris membuktikan para pemimpin yang terpilih mengecewakan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan kedua teori tersebut diduga antara lain; *pertama;* budaya politik primordial yang masih kuat. *Kedua;* partisipasi politik yang rendah (yang terjadi mobilisasi bukan partisipasi). *Ketiga;civil education* (pendidikan kewarganegaraan) yang belum merata. *Keempat;* penyelenggaraan pemilu yang rumit. *Kelima;* penegakan hukum yang lemah.

*Keenam;* birokrasi pemerintahan yang belum efisien dan efektif. *Ketujuh;* pendidikan masyarakat yang relatif masih rendah. *Kedelapan;* kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang masih timpang.

### 4.3.9 Muncul Pemikiran Kembali pada Demokrasi Perwakilan

Oleh sebab itu jika harus memilih dari kedua teori demokrasi tersebut maka yang memiliki implikasi yang relatif kecil yaitu "Demokrasi Perwakilan", dapat menjadi pertimbangan untuk dihidupkan kembali. Untuk itu faktor-faktor di atas dimasa depan harus ditumbuhkan dan dimantapkan. Selanjutnya jika berbagai kalangan tetap ingin mempertahankan demokrasi langsung, maka variabel yang menghambat konsolidasi kekuasaan melalui demokrasi langsung harus diberi penguatan melalui regulasi yang lebih kondusif dalam memperkuat bangunan sistem politik Indonesia *(Capasibility of Political System)* dan memperkuat pemerintahan *(Strong Goverment)*. Pada masa yang akan datang, pada saatnya penerapan demokrasi langsung mampu meminimalisir efek negatif seperti konflik horizontal, politik uang dan penyalahgunaan wewenang *(Abuse of Power)* oleh para calon kepala daerah yang memenangkan pemilukada.

### STUDI KASUS 3

Pada sesi studi kasus yang ketiga, terkait dengan topik pembahasan tentang "demokrasi langsung membawa manfaat atau petaka", maka untuk mengisi diskusi mengenai topik tersebut dipilih materi kasus yang diambil dari media massa yaitu berjudul " Pilkada Dimanfaatkan". Pilihan studi kasus ini relavan karena muara dari praktek demokrasi adalah pemilihan "kepala daerah, baik Gubernur maupun Bupati/Walikota. Studi kasus tentang "pilkada dimanfaatkan", sesungguhnya mengisyaratkan siapa yang memanfaatkan dan siapa dimanfaatkan. Kasus ini mengingatkan tentang konsep negara yang disebut "*coorporasi state*". Dalam konsep tersebut menjelaskan bagaimana hubungan simbiose mutualistis antara "penguasa dan pengusaha". Hubungan yang saling menguntungkan antara penguasa dan pengusaha pada kenyataannya, lebih banyak merugikan masyarakat luas. Orientasi kepentingan yang berbeda dimana negara memiliki tujuan sosial dan swasta bertujuan mencari untung atau profit. Negara koorporasi pada umumnya dominasi pengaruh pengusaha terhadap penguasa lebih kuat. Pengaruh yang kuat tersebut dimanfaatkan oleh pengusaha dalam setiap melakukan pembuatan kebijakan pemerintah terutama di bidang ekonomi. Misalnya kebijakan mengenai ekspor dan impor serta pengadaan barang dan jasa.Oleh sebab itu terkait dengan "pemilukada", praktek hubungan penguasa dan pengusaha, dimulai dari pemberian *sponsorship* para pengusaha terhadap para calon Gubernur dan Bupati/

Walikota. Ketika sudah menduduki kursi kepala daerah, maka para sponsor akan menagih janji berupa proyek kegiatan di kantor pemerintah daerah tersebut. Ekses buruk dari hubungan penguasa dan pengusaha misalnya proyek-proyek yang dikerjakan oleh para pengusaha tersebut mutunya di bawah standar, sehingga hasil pembangunan proyek cepat rusak. Bagi para kepala daerah terpilih, akan mengembalikan modalnya dengan menggunakan dana proyek, sehingga sudah sebanyak 318 kepala daerah pada awal bulan Februari tahun 2014 menjadi terpidana korupsi. Untuk lebih mendalam mendiskusikan kasus tersebut dipersilahkan membaca topik diskusi di bawah ini.

## Pilkada Dimanfaatkan

*JAKARTA, KOMPAS Senin 7 Oktober 2013*

Keberadaan pengusaha dalam kasus yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mochtar membuktikan bahwa masih ada pengusaha yang memanfaatkan pemilihan kepala daerah untuk mengamankan dan menguntungkan kegiatan bisnisnya.

"Pengusaha yang terlibat (dalam kasus Akil Mochtar) kembali menjadi bukti yang sangat mengecewakan dan mencoreng hukum di Indonesia," kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Kebijakan Publik, Fiskal, dan Moneter Hariyadi B Sukamdani, di Jakarta.

KPK menangkap dua pengusaha dalam kasus Akil, yaitu Cornelis Nalau dan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Cornelis diduga terkait kasus Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Sementara Wawan, adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, menjadi tim sukses Amir Hamzah-Kasmin, salah satu pasangan di Pilkada Lebak, Banten.

Menurut Hariyadi, pengusaha yang tergabung di Kadin telah menandatangani pakta integritas pengusaha antisuap pada tahun 2009. Lewat pakta itu, pengusaha didorong tidak menghalalkan segala cara, termasuk suap, dalam melanggengkan bisnisnya. Bahkan, pakta integritas ini menjadi salah satu program yang ditindaklanjuti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).

Pengusaha yang sudah terlibat terlalu jauh dalam pilkada, lanjut Hariyadi, patut dihukum pidana. Jika calon kepala daerah yang didukung menang, pengusaha yang merasa berjasa akan semakin jauh menabrak aturan untuk melanggengkan bisnisnya. Jika calonnya kalah, pihak lain akan membeberkan keterlibatan negatif pengusaha itu.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, "Hukum di Indonesia kini tidak bisa lagi dipercaya. Selama ini, MK sering dianggap sebagai lembaga setengah malaikat. Ternyata, aksi suap telah meruntuhkan pilar kekuatan hukum ini. Hukum seakan bisa dibeli."

**Dikendalikan uang**

DANY PERMANA Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/10/2013). Akil yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka, diduga terlibat dalam suap pengurusan sengketa pilkada Gunung Mas Kalimantan Tengah.

Pakta integritas pengusaha antisuap, lanjut Sofjan, sulit dijalankan karena sistem hukum terbukti membutuhkan uang untuk memenangkannya. Pengusaha terlibat terlalu jauh karena dipaksa oknum pejabat negara yang mempunyai kekuasaan.

Sofjan menegaskan, "Hukuman mati harus menjadi satu-satunya putusan bagi koruptor. Efek jera membangkrutkan koruptor ternyata tidaklah membuat takut koruptor. Paling hanya 20-30 persen harta benda koruptor yang bisa disita negara. Sebagian besar harta koruptor sudah berganti kepemilikannya."

Ketua Apindo Anton J Supit mengatakan, esensi reformasi adalah perubahan menuju perbaikan. Tidak cukup jika hanya berubah dari rezim Orde Baru ke Orde Reformasi atau dari zaman kurang demokratis. Apalagi, demokrasi saat ini terbukti lebih menjadi demokrasi yang mudah memakai uang.

"Sebagian dari politisi atau pemimpin daerah, tidak jelas asal-usulnya karena mereka memakai uang. Akibatnya, mereka mudah lupa dengan ungkapan, di balik jabatan atau tanggung jawab, selalu ada kehormatan yang harus dijaga," ujar Anton.

Presiden Direktur Mustika Ratu Tbk Putri K Wardani mengatakan, Kadin sebagai institusi memang sudah menandatangani pakta antisuap. Namun kenyataannya, memang masih ada pelaku usaha yang mempraktikkan suap.

Suap terjadi karena perizinan, kemudahan usaha, dan kebijakan usaha masih kerap dipermainkan oknum birokrat. Akibatnya, pelaku usaha belum dapat lepas dari suap demi waktu dalam melangsungkan usaha. Bagi pengusaha, keterlambatan, ketidakpastian, atau ketidaksesuaian kebijakan harus semaksimal mungkin dihindari. Namun, sebagian pengusaha menerjemahkan terlalu jauh dan instan, seolah semua bisa diselesaikan dengan uang," ujar Putri

Setelah membaca kasus tentang pemilukada yang dimuat media massa dari hasil wawancara dengan beberapa nara sumber pengusaha seperti Sofyan Wanandi, Haryadi, Anton Supit dan Putri K Wardani. Pendapat para nara sumber tersebut pada umumnya tidak setuju dengan suap menyuap kepada para birokrat termasuk kepala daerah. Bahkan mereka melakukan pakta integritas anti suap, bertujuan mendorong birokrasi yang bersih dan berwibawa. Agar diskusi lebih mendalam disajikan beberapa pertanyaan yang relevan dengan topik tersebut yaitu;

1. Apa tujuan hakiki dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah menggunakan demokrasi langsung?

2. Fenomena pemilukada sebagian besar para calon kepala daerah dari pengusaha, apa yang menjadi motif para pengusaha ramai-ramai mencalonkan diri sebagai kepala daerah?
3. Apa kelebihan dan kekurangan model demokrasi langsung dibandingkan dengan demokrasi perwakilan?
4. Jika membandingkan praktek demokrasi langsung di negara maju sudah lebih mapan dan terpilihnya kepala daerah pada umumnya profesional dan kompeten. Namun praktek demokrasi langsung di Indonesia banyak menimbulkan persoalan yang kompleks dan mahal, mengapa demikian, jelaskan.
5. Jika praktek demokrasi langsung lebih banyak membawa kerusakan dalam masyarakat misalnya para kepala daerah terpilih tidak kompeten dan korupsi, maraknya konflik horizontal dan tumbuh subur politik uang, setujukah Saudara dalam pemilukada kembali pada demokrasi perwakilan? Jelaskan dengan landasan teori dan konsep guna mendukung argumentasi Saudara?

## 4.4 AMBIVALENSI ANTARA SISTEM PRESIDENSIIL DENGAN PARLEMENTER

Menarik untuk dilakukan kajian mengenai dua sistem pemerintahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yaitu sistem pemerintahan parlementer dengan presidensial. Kedua sistem tersebut sebenarnya saling berbeda dan bahkan bertolak belakang dan kedua sistem tersebut pernah dipraktekan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Adapun yang mendorong melakukan kajian terhadap kedua sistem karena pada kenyataanya dalam sistem politik era reformasi memiliki ciri-ciri campuran antara sistem parlementer dengan presidensial. Untuk melakukan pembahasan topik tersebut seperti diuraikan di bawah ini.

### 4.4.1 Perjalanan Sejarah Sistem Pemerintahan di Indonesia

Pembahasan tentang sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakekatnya memberikan pedoman dan arah yang jelas bahwa sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem "presidensial". Akan tetapi pengalaman sejarah masa yang lalu ketika masa pemerintahan proklamasi pada tahun 1945 s/d 1959, sistem pemerintahan yang dijalankan menganut faham "parlementer". Sebagaimana telah diuraikan panjang lebar pada bab sebelumnya, ketika sistem pemerintahan parlementer berjalan membawa bangsa Indonesia pada sejarah politik yang juga tidak sehat. Sistem "parlementer" sebenarnya telah terkubur cukup lama dalam suasana kebatinan kehidupan politik di Indonesia sejak "Dekrit Presiden" tahun 1959, era pemerintahan Presiden Soekarno (tahun 1959 s/d 1966) dengan berlakunya UUD 1945 kembali, maka sistem pemerintahan kembali pada sistem "presidensial". Kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan era Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto mulai tahun 1967 s/d 1998. Selanjutnya pemerintahan di era reformasi mulai tahun 1999 s/d sekarang, perdebatan kedua sistem tersebut ramai kembali menjadi polemik yang terus bergulir membandingkan sistem pemerintahan berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 yang telah "diamandemen" empat kali, namun sistem "presidensial", yang telah berjalan lima belas tahun ini suasana "psikologi politik" dirasakan menghangat kembali "aroma" sistem parlementer. Jika dicermati ketika kran demokratisasi terus menggelinding dengan kencang dan bersamaan dengan itu lemahnya *"rule of law dan law of enforcement"*, kebebasan berpolitik seolah tanpa batas dan tak terkendali. Di lain pihak pada dasarnya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, memberikan porsi yang cukup kuat terhadap legislatif. Seiring dengan amandemen tersebut menunjukkan bahwa kewenangan anggota DPR/legislatif terutama penggunaan "Hak Inisiatif dan hak hak legislasi" yang lainnya diberikan kewenangan yang lebih besar dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945

sebelum diamandemen. Misalnya dalam pengaturan "Hak Inisiatif", saat ini setiap anggota DPR diberikan kewenangan menggunakan Hak Inisiatif dalam mengajukan "Rancangan Undang-Undang" (RUU). Di samping itu juga dalam proses pembahasan RUU menjadi UU, jika DPR telah menetapkan melalui sidang paripurna RUU disetujui dan disahkan menjadi UU, walaupun Presiden tidak atau belum menandatangani UU tersebut maka dalam waktu 1 (satu) bulan, UU tersebut tetap sah dan harus dicatat dalam "lembaran negara". Penguatan kewenangan DPR yang lain yaitu dalam hal penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan APBD diberikan kewenangan dalam pembahasan sampai tingkat satuan tiga sebelum ditetapkan. Politik anggaran yang dimiliki legislatif tersebut, walaupun secara normatif sebagai upaya optimalisasi kontrol anggaran yang ketat, akan tetapi pembahasan yang bersifat teknis secara *moral hazzard*, tidak dapat dihindarkan akan terjadi proses negosiasi yang pada akhirnya akan terjadi kolusi struktural dalam merumuskan proses penetapan RUU APBN menjadi UU APBN.

### 4.4.2 Fenomena Sistem Pemerintahan Multi Partai

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa di era reformasi penguatan kewenangan legislatif semakin besar. Di lain pihak sistem kepartaian menganut "multi partai" dan sebagai konsekuensi logis pemerintahan yang dibentuk adalah "pemerintahan koalisi". Kecenderungan yang terjadi yaitu dengan posisi legislatif semakin kuat tersebut,akan digunakan oleh para anggota DPR/D melakukan manufer politik untuk kepentingan partainya. Ketika menghadapi perbedaan yang penting dan strategik antar legeslatif dengan pemerintahan eksekutif, untuk menaikan posisi tawar mendorong bagi kalangan anggota legislatif (DPR/D) menggunakan "Hak Angket" atau bahkan "Hak Menyatakan Pendapat". Kedua alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut tidak mustahil dijadikan sebagai alat politik untuk menjatuhkan "pemerintahan" atau memanaskan kondisi politik pada saat "koalisi" pemerintahan lemah. Penggunaan hak hak DPR tersebut sangat rentan timbul konflik antara eksekutif dengan legislatif. Situasi yang digambarkan tersebut secara empiris dapat mengambil contoh dua (2) peristiwa politik yang menjadi perhatian publik yakni "kasus Bank Century dan kasus mafia pajak Gayus Tambunan". Kedua kasus tersebut diangkat sebagai "persoalan politik", karena kedua peristiwa politik tersebut sangat menyita perhatian publik. Meskipun pada kasus "mafia pajak" kalah *voting* dalam pengambilan keputusan "penggunaan hak angket". Artinya Hak Angket tidak jadi diteruskan karena kubu yang menolak "mafia pajak" diangkat dengan menggunakan "Hak Angket" menang *voting* dengan selisih suara yang sangat kecil yaitu 2 (dua) suara. Akan tetapi kasus Bank Century terus menggelinding mewarnai konflik

antara eksekutif dan legislatif, bahkan kecenderungan kuat menjadi komoditi politik menjelang pemilu 2014.

Fenomena kegaduhan politik seperti diuraikan di atas menunjukkan peseteruan antara legislatif dengan eksekutif berjalan dinamis dengan intensitas yang cukup tinggi. Jika sering terjadi konflik antara eksekutif dan legeslatif tidak mustahil bisa menjatuhkan pemerintahan eksekutif. Sebagaimana terjadi pada waktu pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur), menimbulkan kembali luka lama seperti situasii kehidupan politik sistem "parlementer" pada tahun 1945 s/d 1959 terasa hidup kembali. Pemerintahan "era Gus Dur" hanya berjalan kurang lebih satu setengah tahun (1,5 tahun). Pemerintahan yang berjalan relatif pendek pada kenyataan kurang efektif. Namun demikian pada masa era kepemimpinan Gus Dur tidak bisa kita pungkiri beberapa arah kebijakan pemerintah yang diambil dinilai cukup strategis misalnya "kebijakan demiliterisasi. Proses demiliterisasi atau dikenal "repositioning peran TNI terus bergulir dimana para anggota TNI tidak lagi menduduki pada jabatan pemerintahan sipil dan partai politik. Reformasi ditubuh TNI dengan mengurangi kekuasaan pemerintahan sipil merupakan prasyarat meletakkan dasar dan landasan pemerintahan yang demokratis menuju era *civil society*.

Namun demikian dalam perkembangannya kebijakan politik yang telah melakukan "amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya memperkuat kekuasaan legeslatif. Kecenderungan tumbuhnya *legislatifheavy*, timbul situasi psikologi politik yang dirasakan semakin menimbulkan dualisme dan ambigau antara sistem presidential dengan parlementer. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen mencerminkan sistem pemerintahan yang memiliki ciri-ciri "presidensial". Sistem pemerintahan presidensial yang menggunakan sistem multi partai, konsekuensi logisnya bisa dipastikan hasil pemilihan umum tidak ada partai politik yang unggul di atas 50%. Misalnya pemilihan umum tahun 2009 Partai Demokrat sebagai pemenang hanya memperoleh 27% dan pada pemilihan umum tahun 2014, PDIP sebagai pemenang memperoleh suara 19%. Oleh sebab itu pembentukan kabinet pemerintahan berdasarkan koalisi beberapa partai politik dan keanggotaan kabinet pemerintahan yang menjadi menteri dari para kader partai politik yang dibagi secara representatif dan proporsional. Secara empiristik dalam sistim politik di Indonesia selama pemerintahan koalisi dari dua kali hasil pemilihan umum tahun 2004 dan 2009 memiliki kecenderungan sering terjadi konflik kepentingan antara eksekutif dengan legeslatif. Contoh peristiwa politik yang menyita perhatian publik yaitu "Bank Centrury dan mafia pajak Gayus Tambunan" oleh DPR diangkat dalam "hak angket dan hak menyatakan pendapat". Perseteruan yang terjadi antara eksekutif dan legeslatif boleh jadi pengaruh dari menguatnya posisi DPR pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kajian selanjutnya akan diuraikan cukup mendalam "penguatan

kewenangan" yang dimiliki legislatif menjadi stimulus meningkatnya dinamika konflik antara pemerintahan eksekutif dengan legislatif. Jika dinamika politik tersebut tidak dikelola dengan baik, maka dalam suasana persaingan antar partai-partai politik yang semakin meningkat, bisa saja terjadi "kemelut politik" yang sulit dikendalikan. Jika itu terjadi pada gilirannya akan mempengaruhi terhadap jalannya roda pemerintahan serta kurang mendukung upaya pemerintah dalam rangka menarik para investor untuk membangun berbagai "infrastruktur" strategis dimana memerlukan stabilitas politik yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif. Pemantapan konsistensi penerapan sistem pemerintahan presidensiil dalam sistem politik era reformasi, perlu dilakukan analisis yang mendalam mengenai penguatan kewenangan legislatif. Meningkatnya dinamika hubungan eksekutif dan legislatif harus dikelola secara proporsional agar konflik kepentingan yang terjadi tidak menimbulkan presiden saling menjatuhkan antar kedua lembaga politik tersebut. Contoh pada masa "orde lama" Presiden Sukarno pada 5 Juli tahun 1959 mengeluarkan "Dekrit Presiden" antara lain membubarkan "Dewan Konstituante" (DPR) hasil pemilihan umum tahun 1955. Kemudian pada masa era reformasi hasil pemilu tahun 1999 yang telah memilih Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur), diberhentikan di tengah jalan dihadapan "sidang istimewa " MPR tahun 2001.

### 4.4.3 Landasan Konsep Trias Politika

Sesungguhnya jika legislatif itu kuat maka peran dan fungsi lembaga legislatif akan berjalan dengan efektif. Oleh sebab itu kekuasaan eksekutif yang besar dan luas akan terkontrol dengan baik, sehingga kemungkinan terjadinya *Abuse Of Power* dapat dihindari. Pada gilirannya aspirasi rakyat secara optimal dapat dilaksanakan oleh pemerintah, dan tujuan "kesejahteraan" akan terwujud. Untuk menjawab pertanyaan di atas memang tidak mudah, perlu kajian yang cukup mendalam terhadap topik tersebut. Untuk itu, kajian mengenai lembaga kekuasaan negara tidak terlepas dari teori pembagian kekuasaan menurut *"John Locke atau Montessque"* yang sangat terkenal dengan teori "Trias Politika". Dalam teori ini ada dua aspek penafsiran yaitu, pertama yang disebut *"Separation of Power"* dan yang kedua *"Distribution of Power"*. Konsep *Separation of Power* diartikan sebagai pemisahan secara tegas fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Dalam konsep ini, ketiga lembaga politik tersebut menjalankan fungsinya masing-masing maka tidak terjadi *overlapping* dalam menjalankan fungsinya. Ketiga lembaga tersebut memiliki kekuasaan yang sama kuat dan tidak ada celah untuk saling mencampuri, sehingga terbangun suatu keseimbangan dalam kekuasaan atau disebut *"Balance of Power"*. Adapun konsep *"Distribution of Power"* diartikan sebagai

"Pembagian Kekuasaan", penafsiran mengenai pembagian kekuasaan yaitu bahwa masing-masing lembaga politik mendapat porsi atau bobot tugas yang sama atau seimbang, atau juga mungkin pembagian kekuasaan tidak seimbang antara kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif. Apabila dalam pembagian kekuasaan cenderung lembaga legislatif yang lebih besar atau lebih kuat disebut *"Legislatif Heavy"*. Sedangkan apabila pembagian kekuasaan cenderung eksekutif yang lebih besar atau lebih kuat disebut *"Eksekutif Heavy"*.

Kajian trias politika dalam perspektif konstitusi ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen sebanyak 4 (empat) kali, konstitusi kita tersebut mengikuti teori "Trias Politica", tetapi lebih cenderung dalam penafsiran teori "*Distribution of Power*". Dengan mengikuti pemikiran pembagian kekuasaan bukan pemisahan kekuasaan maka ketiga lembaga politik tersebut terdapat celah untuk saling bekerja sama. Misalnya kerjasama antara legislatif dan eksekutif dimana usulan RUU, dibuat oleh eksekutif dan sebelum mendapatkan ketetapan dibahas secara bersama-sama dengan legislatif. Contoh yang lain misalnya dalam penyusunan RUU APBN dari eksekutif, lembaga legislatif melakukan pembahasan sampai dengan satuan tigadan memberikan persetujuan serta penetapan menjadi Undang-Undang APBN.

### 4.4.4 Legislative Heavy atau Executive Heavy

Kembali pada kajian sistem pemerintahan presidensiil pada era reformasi mengingatkan kembali pada istilah *"exekutive heavy atau legislative heavy"*. Pembahasan mengenai *"Legislatif Heavy"* atau *"Eksekutif Heavy"* tidak terlepas dengan sistem pemerintahan suatu negara. Pada umumnya secara universal sistem pemerintahan yang berlaku di negara-negara maju maupun berkembang yaitu sistem pemerintahan Parlementer atau Presidensiil. Sistem Pemeritahan Parlementer lebih condong kearah *Legislatif Heavy* artinya DPR menjadi super bodi karena mempunyai fungsi mengangkat dan memberhentikan kepala pemerintahan, atau "Perdana Menteri". Dalam sistem Pemerintahan Parlementer fungsi Kepala Negara disebut dengan jabatan Presiden dan kepala pemerintahan disebut dengan jabatan Perdana Menteri. Sedangkan sistem "Presidensiil" fungsi Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dirangkap oleh Presiden. Dalam sistem ini kedudukan legislatif dan eksekutif sama kuatnya, artinya keduanya tidak dapat saling menjatuhkan sehingga terjadi *"Check and Balances Power"*.

Di Indonesia kedua sistem pemerintahan tersebut di atas pernah dipraktekkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yakni ketika pertama kali Undang-Undang Dasar 1945 diterapkan, menggunakan sistem Pemerintahan Parlementer. Pengangkatan pertama sebagai Kepala Pemerintahan adalah Perdana Menteri Syahrir. Walaupun

Undang-Undang Dasar 1945 memiliki karakteristik sistem Pemerintahan Presidensiil. Sebagaimana telah dijelaskan di bab terdahulu sejak tahun 1945 sistem parlementer diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perjalanannya terjadi silang sengketa antar partai politik tersebut mengakibatkan kabinet jatuh bangun dan rata-rata usia kabinet paling lama satu setengah tahun sedang paling pendek berumur tiga bulan sehingga penyelenggaraan pemerintahan tidak stabil.

Sesungguhnya posisi *Legislative Heavy* secara teoritis, kesempatan baik bagi para legislator untuk memperjuangkan aspirasi rakyat melalui kontrol yang berjalan efektif terhadap eksekutif dengan tujuan mampu mengurangi *abuse of power*. Akan tetapi karena pertikaian antar partai politik tersebut menyebabkan terjadi ketidaknormalan penyelenggaraan pemerintahan. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan yang sangat terkenal yaitu "Dekrit Presiden" dengan menetapkan antara lain membubarkan "Dewan Konstituante" dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Sejak itu Presiden Soekarno merangkap jabatan sebagai Kepala Pemerintahan dan juga Kepala Negara. Sistem pemerintahan presidensial berlangsung pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1966, dengan menerapkan sistem demokrasi yang disebut "demokrasi terpimpin". Ketika pemerintahan Presiden Soekarno berlangsung, pernah diangkat sebagai "Presiden Seumur Hidup". Peristiwa politik tersebut sebagai fenomena pergeseran dari *Legislatif heavy* kepada *Eksekutif Heavy* yang berlangsung sampai dengan pasca peristiwa G.30S PKI 1965. Kekuasaan Soekarno yang pada saat itu sangat kuat berakhir sampai tahun 1966 ketika harus melimpahkan kekuasaan kepada Mayor Jenderal Soeharto melalui mandat "Supersemar". Pada tahun 1967 secara resmi Presiden Soekarno diganti oleh Mayor Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden. Pergantian pemerintahan dari orde lama ke orde baru yang menarik adalah bahwa dengan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, oleh Presiden Soeharto dengan Rezim orde barunya tetap memperkuat dalam memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan keputusan politik yang sangat monumental adalah "tidak ada keinginan untuk merubah dan tidak ingin untuk mengubah serta akan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, secara murni konsekuen".

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, orde baru melakukan konsolidasi kekuasaan, memperkuat melalui pilar-pilar kekuasaan yaitu Militer, Birokrasi dan Golongan Karya. Ketiga kekuatan politik menjadi sub ordinasi di bawah kekuasaan Soeharto, dengan ketiga pilar kekuatan politik tersebut lambat laun kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara penuh dapat dikendalikan. Kekuasaan eksekutif menjadi super bodi atau *"Eksekutif Heavy"*, berjalan mulus tanpa rintangan yang berarti. Pemberontakan yang memunculkan separatisme, gangguan demonstrasi dan tindakan radikal dari kalangan mahasiswa dan tokoh-

tokoh pembangkang ditangani dengan pendekatan represif dan pendekatan *security*. Setiap pencalonan anggota legislatif yang dipilih maupun yang diangkat harus melalui *Screening* yang ketat. Sehingga praktis selama rezim orde baru posisi lembaga legislatif dijadikan sebagai etalase dan tukang stempel, bahkan yang lebih memprihatinkan di kalangan media cetak dan masyarakat menjuluki 5 (lima) D yaitu, Datang, Duduk, Diam, Dengkur dan Duit. Pemerintahan orde baru yang berkuasa selama 32 tahun merupakan kekuasaan yang paling lama dipegang oleh suatu rezim, mungkin kekuasaan yang terlama didunia setelah Fidel Castro di Kuba.

### 4.4.5 Orientasi Penguatan Parlemen

Pada akhirnya dengan lemahnya kontrol dari legislatif (DPR) dan kontrol sosial juga lemah, maka kekuasaan yang absolut menyebabkan terjadinya *"Abuse Of Power"*. Aparatur birokrasi yang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme memang tidak terkendali. Banyak kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan rakyatnya sehingga kebijakan yang keliru tersebut, terutama di bidang moneter, mengakibatkan terjadinya krisis moneter pada tahun 1997. Akibat terjadinya krisis moneter pada akhirnya Soeharto mengundurkan diri dari Jabatan Presiden tahun 1998 maka berakhir pula rezim "orde baru". Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku maka pada saat itu Presiden Suharto langsung digantikan oleh wakilnya, B.J. Habibie. Siklus pemerintahan kembali berputar ketika era orde baru telah beralih ke era reformasi. Kepemimpinan presiden Habibie relatif singkat dari tahun 1998 sampai dengan tahun 1999, namun mampu meletakkan fondasi pelaksanaan demokrasi melalui pemilu yang dipercepat pada tahun 1999. Meskipun menjelang pemilu tahun 1999, kedudukan kepresidenan Habibie harus dilepas melalui sidang paripurna, pertanggungjawabannya ditolak oleh mayoritas anggota parlemen. Keiklasan Habibie melepaskan jabatan presiden yang berumur 1 (satu) tahun lebih tersebut melalui pergulatan kekuatan politik antar kelompok kepentingan, menunjukkan sikap kenegarawanan seorang Habibie yang dapat menjadi teladan bagi para politisi generasi muda.

Selanjutnya era pasca pemilu tahun 1999 yang dapat disebut sebagai era rezim orde reformasi, mulai terjadi pergeseran dari *"Eksekutif Heavy"* ke era *"Legislatif Heavy"*. Secara Yuridis Formal menunjukkan bahwa *"Legislatif Heavy"* tersebut, memiliki landasan yang kuat yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945yang telah diamandemen tahun 2002. Adapun pasal dan ayat menjadi landasan bagi berkembangnya *Legislatif Heavy* ialah; *pertama;* Legislatif (DPR) mempunyai kewenangan mengusulkan pemberhentian Presiden/Wakil Presiden kepada MPR, terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi dan seterusnya sebagaimana tercatat dalamPasal 7B; *kedua;* DPR mempunyai kekuasaan membentuk

Undang-Undang (Pasal 20 ayat 3), *ketiga;* Didalam DPR menetapkan Rancangan Undang-Undang, tidak disahkan oleh Presiden Rancangan Undang-Undang tetap sah menjadi undang-undang dan wajib di undangkan (Pasal 20 ayat 5), *keempat;* Setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak inisiatif dan berhak mengajukan usul Rancangan Undang-Undang (Pasal 21 ayat 1). Kewenangan yang disebutkan di atas merupakan kewenangan baru dari hasil amandemen. Pasal tersebut sebelumnya tidak ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. Kewenangan yang sangat strategis tersebut sebenarnya merupakan kesempatan baik jika digunakan fungsi legislatif dalam membuat dan memperjuangkan kebijakan strategis yang lebih berorientasi pada kepentingan rakyat, terutama fungsi legislatif (DPR) pada Pasal 20 ayat 5 dan Pasal 21 ayat 1, akan tetapi kemampuan anggota DPR masih terbatas sehingga fungsi strategis tersebut belum bisa dijalankan secara optimal. Dalam hal penggunaan Pasal 7B UUD 1945 yang telah diamandemen, supaya terjadi keseimbangan dan stabilitas pemerintahan terjaga dengan baik, maka pemilu tahun 2014 partai politik pemenang pemilu legislatif, juga diharapkan meraih kemenangan dalam pemilihan Presiden tersebut. Sebab jika yang menjadi Presiden bukan dari partai politik pemenang pemilu legislatif, dalam pembentukan kabinet koalisi beberapa partai politik, kecenderungan ”pemerintahan koalisi” akan mengalami ”kegaduhan politik” di parlemen. Oleh sebab itu dinamika politik yang tinggi dan suhu politik juga memanas, dapat dipastikan dukungan legislatif baik dari partai politik anggota koalisi maupun di luar anggota koalisi dalam mengendalikan dan menjaga stabilitas politik memerlukan energi yang besar. Sehingga jika dinamika politik di parlemen dalam kondisi intensitas tinggi tidak mustahil akan terjadi pemakzulan terhadap presiden sebagaimana pernah terjadi terhadap presiden hasil pemilu tahun 1999. Seperti diuraikan di atas mengenai kewenangan atau kekuasaan legislatif (DPR) di era reformasi berbeda dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Persoalannya adalah apakah kewenangan yang strategis tersebut digunakan selama menjalankan tugas sebagai anggota legislatif (DPR). Kewenangan legislatif seperti yang disebutkan di atas belum seluruhnya dijalankan secara optimal dan efektif. Akan tetapi ketika dilakukan kontrol melalui mekanisme hak angket dan interpelasi, lebih cenderung digunakan sebagai alat *pressure* terhadap pemerintah/eksekutif dan dalam prakteknya menjadi alat bargaining dengan pemerintah eksekutif dengan motif yang dilatar belakangi berbagai kepentingan lainnya.

### 4.4.6 Fungsi Legislatif Pasca Amandemen

Fungsi DPR yang strategis lainnya sebagai alat kontrol legislatif (DPR) yaitu *pertama;* Fungsi legislasi, fungsi ini adalah fungsi membuat undang-undang, dalam melaksanakan fungsi ini meskipun mekanisme penyusunan dan pembahasan melalui kelompok kerja

atau panitia kerja namun secara individual setiap anggota dewan sudah seharusnya memiliki kemampuan *Legal Drafting*, atau minimal memiliki pengetahuan tentang hukum dan tata cara penyusunan perundang-undangan. Anggota Dewan harus memiliki pengetahuan dasar bidang teknis meskipun tidak harus mendalami, dimana mereka memilih Komisi yang menjadi fokus artikulasi dan agregasinya. Agar supaya anggota dewan mampu menjalankan fungsi legislasi dengan baik dan mampu melaksanakan hak inisiatif, maka setiap anggota dewan perlu dibantu oleh minimal 4 (empat) staf ahli, yaitu ahli *legal drafting*, ahli bidang teknis, analis kebijakan publik dan ahli bahasa. *Kedua;* fungsi penganggaran adalah fungsi kontrol anggaran di bidang anggaran belanja negara. Kewenangan dalam melaksanakan fungsi ini lebih kuat dibandingkan dengan legislatif pada zaman Orde Baru, yaitu melakukan pembahasan anggaran dengan pemerintah sampai pada satuan tiga dan kewenangan penetapan persetujuan ada pada legislatif. Namun dalam perkembangan pelaksanaannya fungsi ini menimbulkan ekses yaitu menjadi alat "Negosiasi atau *Bargaining*" dengan pemerintah. Implikasi dari hasil *Bergaining* tersebut jika tidak terkendali menyebabkan terjadinya *Abuse of Power*. Contoh kecenderungannya politik anggaran yang melakukan pengawasan sampai satuan tiga baik APBN maupun APBD, menjadi alat bargaining dengan eksekutif. Munculnya dana aspirasi dan APBNP serta Bansos boleh jadi merupakan kompromi dalam menetapkan anggaran belanja pemerintah. Implikasinya pembahasan alokasi anggaran sering terjadi tidak melalui kajian yang seksaama dan muncul dengan tiba-tiba sehingga menjadi tidak fokus kepada kebutuhan riil (nyata) kepentingan publik. Seperti pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang rusak, kurang menjadi perhatian utama, yang membutuhkan anggaran sangat besar, karena anggaran terpecah-pecah dan kurang sinergi. Pada akhirnya rakyat tidak mendapatkan *out come* maupun *impact* dari hasil pembangunan yaitu pemerataan pembangunan dan kesejahteraannya. *Ketiga;* Fungsi pengawasan, fungsi ini merupakan fungsi strategis lainnya yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pembangunan. Mekanisme fungsi ini dijalankan melalui berbagai alat kelengkapan DPR. Seperti melalui rapat dengar pendapat (RDP) yang dilakukan secara berkala dan insidental, kunjungan kerja pada saat reses, dan lain-lain.

Adapun untuk kelancaran menjalankan fungsi-fungsi di atas, DPR memiliki alat kelengkapan kontrol yang disebut, hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Penggunaan hak-hak tersebut, DPR periode era reformasi lebih dinamis dalam menggunakan hak interpelasi dan hak angket. Pada era orde baru penggunaan hak-hak tersebut hampir tidak pernah digunakan. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya peranan DPR saat ini sangat strategis dengan kewenangan yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan DPR berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum di amandemen. Jadi posisi legislatif saat ini

disamping memiliki posisi yang kuat atau disebut *"Legislatif Heavy"* untuk itu tugas yang sedemikian berat menjadi anggota Dewan merupakan keniscayaan dan juga merupakan kondisi *Sine Quanon* bahwa lembaga legislatif tersebut harus didukung oleh anggota yang berkualitas. Kriteria anggota berkualitas antara lain yaitu; politisi yang memiliki basis massa yang kuat, juga seorang tokoh politik yang menguasai bidang keahlian yang menjadi fokus perhatiannya. Oleh sebab itu diharapkan hasil pemilu tahun 2014 mendapatkan wakil rakyat yang berkualitas tersebut.

### 4.4.7 Sistem Pemilu dan Penguatan Legislatif

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan sistem pemilu melalui sistem daftar dan berdasarkan suara terbanyak. Sistem pemilu tersebut sudah barang tentu mempengaruhi terhadap konstelasi dan dinamika politik yang dihadapai oleh partai politik. Demikian pula pengaruhnya terhadap sistem pemerintahan presidensiil, dimana penguatan kewenangan legeslatif dan didukung oleh anggota legeslatif yang terpilih berdasarkan suara terbanyak akan memperkuat posisi legeslatif. Oleh sebab itu bagi partai politik merupakan tantangan yang positif agar manajemen partai politik dilakukan dengan optimal. Misalnya melakukan pola rekruitmen yang terencana, teratur dan sistimatis berdasarkan *merithocracy system*. Contohnya dalam menempatkan kader pada daftar urut calon legeslatif lebih mengutamakan ketokohan kader yang memilki basis massa, dengan harapaan mampu mendulang suara di daerah pemilihannya (Dapil). Pola tersebut perlu menjadi basis pengkaderan bagi partai politik sebagai embrio menuju sistem Distrik. Dengan demikian mendorong kesiapan masyarakat terutama terhadap perubahan dari yang biasa memilih tanda gambar kemudian harus memilih orangnya.

Pemilu legislatif berdasarkan suara terbanyak membawa kecenderungan bagi calon legislatif harus dikenal masyarakat atau populer, agar kemungkinan akan dipilih oleh masyarakat lebih besar. Walaupun memiliki popularitas tidak menjamin akan terpilih namun modal awal untuk menggerakan elektabilitas adalah popularitas terlebih dahulu. Dengan teori "blusukan" dipastikan akan membantu peningkatan elektabilitas. Jika yang terpilih seorang tokoh yang dikenal masyarakat sudah dipastikan pilihan masyarakat tidak lagi seperti memilih kucing dalam karung. Oleh sebab itu seiiring dengan perubahan sistem pemilu tersebut harus terus ditingkatkan pendidikan politik masyarakat. Pendidikan politik yang meningkat akan berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat. Pada gilirannya pemilihan berdasarkan suara terbanyak memiliki kualitas yang lebih baik. Artinya bagi pejabat publik atau pejabat negara yang dipilih melalui proses demokrasi adalah mereka yang memiliki kompetensi sesuai yang diharapkan rakyatnya.

Sesungguhnya penentuan calon terpilih berdasarkan "suara terbanyak", merupakan salah satu solusi untuk mengakhiri *Hegemoni Oligarchi* Elit Partai yang pada akhir-akhir ini banyak disoroti berbagai kalangan. Sebab elit partai yang menguasai kepengurusan inti, belum tentu memiliki basis massa binaan tetap atau mereka boleh jadi tokoh tidak populis. Ditengarai banyak elite politik dadakan yang bukan kader dari bawah dan kurang memiliki basis massa, menjadi pengurus inti partai. Fenomena banyak elit partai politik ketika berlaga di arena pemilu legislatif tidak cukup mendapat dukungan suara masyarakat sesuai persyaratan, sehingga gagal masuk Senayan.

Oleh karena itu bagi caleg yang tidak bekerja keras, tidak rajin mendatangi para konstituen dan dekat dengan rakyat, sulit untuk mendapat suara terbanyak, meskipun dalam daftar calon menempati posisi nomor urut 1 (satu). Jadi mengharap setiap hasil pemilu terhadap caleg yang berkualitas adalah sangat logis dan tidak utopis. Karena untuk mengisi lembaga legislatif yang terhormat dan sebagai lembaga yang memiliki posisi *"Legislatif Heavy"*, memerlukan anggota yang profesional dan kompeten. Agar fungsi legislatif berjalan optimal dalam menjalankan kontrol terhadap lembaga eksekutif sehingga dapat menjalankan kebijakan yang benar. Penetapan calon terpilih anggota legislatif berdasarkan suara terbanyak memang tingkat keterpilihannya tidak selalu seiring dengan kualitas calon yang profesional dan kompeten. Sebab masyarakat Indonesia yang sebagian besar belum rasional sulit diharapkan akan menentukan pilihan secara objektif. Oleh sebab itu jika "Demokrasi ukurannya adalah suara terbanyak" memerlukan dukungan masyarakat yang cerdas dan rasional agar menghindari "salah pilih", melalui pendidikan politik masyarakat seperti diuraikan di atas. Namun model "suara terbanyak" dengan ukuran kuantitatif dijadikan alat pembenaran dalam setiap pengambilan keputusan tidak selalu seiring dengan kebenaran hakiki menjadi pijakan utama. Sebab kata bijak yang sering kita dengar bahwa jika kita mengikuti kebanyakan orang, maka akan tersesat. Artinya bahwa suara terbanyak sebagai indikator untuk alat pembenaran dalam setiap kebijakan lebih banyak menyesatkan. Contoh yang sudah berulang kali disebutkan pada bab terdahulu mengenai pemilukada, pada kenyataannya dengan melalui pemilu langsung, terpilihnya kepala daerah selama era reformasi terdapat ± 300 kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. Namun ditengarai dari hasil pemilihan umum tahun 2014 sebagian yang terpilih sebagai anggota DPR/D di berbagai daerah banyak dari kerabat dekat para kepala daerah baik Gubernur dan Bupati/Walikota yaitu anaknya, istrinya, menantunya atau adiknya dan lain-lain. Kecenderungan fenomena proses menuju pemerintahan "*oligarchi*" sepanjang secara invidual para anggota DPR/D memiliki karakteristik sebagai pemimpin populis akan mengurangi kesenjangan komunikasi dengan rakyatnya. Sebab para elite politik yang

berada di puncak kekuasaan lambat laun akan semakin berjarak dengan rakyatnya. Implikasinya fungsi artikulasi dan agregasi dalam menentukan kebijakan publik yang sesuai dengan kepentingan publik kurang berjalan optimal. Contoh banyak pembangunan yang bersifat "mercusuar" seperti pembangunan gedung menara yang menjulang tinggi kurang memiliki korelasi dengan upaya mengurangi kemiskinan dan kebodohan. Oleh sebab itu pada era reformasi posisi legeslatif semakin kuat memiliki harapan terhadap peningkatan pengawasan atau kontrol rakyat terhadap jalannya pemerintahan eksekutif semakin baik. Untuk itu keseimbangan kekuasaan eksekutif dan legeslatif membawa dampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif guna mendukung terwujudnya kesejahteraan rakyat.

### 4.4.8 Ambivalensi antara Sistem Presidensiil dengan Parlementer

Penjelasan di atas menunjukkan perkembangan peran legislatif yang bergeser semakin kuat, baik di pusat maupun di daerah. Oleh sebab itu dalam konteks sistem pemerintahan "presidensiil," semakin kuatnya posisi legislatif tersebut secara empiristik "Presiden" yang dukungan kursi di DPR RI kurang dari 50%, akan mengalami dinamika politik ketika mengambil kebijakan strategis harus berhadapan dengan legeslatif. Perjuangan politik tersebut menunjukkan bahwa cukup menguras energi dalam membentengi agar setiap kebijakan "presiden" tidak tersandung oleh penggunaan hak angket atau bahkan hak menyatakan pendapat yang berujung pada upaya pemakzulan. Dua hak DPR tersebut dalam permainan politik, merupakan jalan dan pintu masuk menjatuhkan "Presiden" jika dinyatakan melanggar undang-undang. Walaupun memerlukan mekanisme proses yang cukup panjang, namun dalam politik, sesuatu yang sulit dilakukan, sangat mungkin bisa "terjadi". Contoh pergantian Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bisa dilengserkan oleh parlemen, meskipun sistem pemerintahannya "presidensiil" bisa saja terjadi. Kemudian melalui "Hak Angket", mampu menekan "Presiden" selaku kepala pemerintahan, memberhentikan "Sri Mulyani" sebagai Menteri Keuangan. Dalam situasi yang terjepit pihak "Barat" mengulurkan tangan membantu agar "Sri Mulyani" ditampung sebagai "Managing Direktur di Bank Dunia" di Amerika Serikat. Berdasarkan beberapa penjelasan dan fakta empirik di atas menunjukkan bahwa desain sistem politik pemerintahan "presidential" dalam prakteknya timbul nuansa "psikologi politik" yang aromanya "parlementer". Artinya dalam praktek ketatanegaraan kedua bentuk pemerintahan tersebut cenderung memunculkan sifat ambivalensi. Kedua sistem pemerintahan tersebut pernah dipraktekan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sejak pemerintahan masa awal proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai

dengan era reformasi saat ini. Desain sistem politik era reformasi sesuai dengan peraturan perundangan bidang politik baik sistem kepartaian, pemilihan umum, demokrasi, membawa pada bentuk sistem pemerintahan presidensiil yang beraroma "parlementer". Dengan demikian profile sistem pemerintahan yang secara empiristik seperti diuraikan di atas, meskipun secara yuridis formal sistem pemerintahan presidensiil, namun dalam prakteknya dinamika politik hubungan eksekutif dengan legeslatif terjadi konflik politik yang dapat saling menjatuhkan.

## 4.5 KONFLIK LEGISLATIFDAN EKSEKUTIF

Sebagaimana dalam penjelasan beberapa topik di atas telah diuraikan mengenai hubungan antara eksekutif dengan legeslatif baik dalam sistem pemerintahan parlementer dan presidensiil. Kedua sistem pemerintahan secara empiristik melahirkan pola hubungan yang berbeda satu sama lain. Ciri pola hubungan eksekutif dengan legeslatif dalam sistem pemerintahan parlementer, legeslatif memiliki kecenderungan yang lebih kuat atau disebut "*legeslatif heavy*". Sedangkan ciri pola hubungan eksekutif dengan legeslatif dalam sistem pemerintahan presidensiil, eksekutif memiliki kecenderungan lebih kuat atau disebut "*eksekutif heavy*". Seperti juga diuraikan di atas kedua sistem pemerintahan telah di praktekan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Secara empiristik kedua sistem tersebut mengandung potensi konflik antara legeslatif dengan eksekutif. Akan tetapi dalam sejarah politik di Indonesia, sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan tahun 1945 s/d tahun 1959 potensi konflik sangat massif dan hampir menimbulkan disintegrasi bangsa. Bahkan berujung pada peristiwa terjadi "dekrit presiden" yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno, dengan salah satu isi dekrit yaitu "pembubaran dewan konstituante" atau parlemen (DPR) hasil pemilihan umum tahun 1955. Sedangkan dalam sistem presidesiil baik pada masa rezim orde lama tahun 1959 s/d tahun 1966 dan pada masa orde baru tahun 1967 s/d tahun 1998, hubungan antara eksekutif dan legeslatif relatif tidak terjadi konflik. Adapun pada masa era reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang, sistem pemerintahan presidensiil telah berjalan melewati tiga (3) kali pemilihan umum tahun 1999, 2004 dan 2009, hubungan antara legeslatif dengan eksekutif mengalami konflik yang cukup laten. Peristiwa politik yang menjadi perhatian publik terjadinya konflik legeslatif dengan eksekutif yaitu pertama; pada tahun 2001 pada pelaksanaan sidang istimewa MPR dengan agenda "pemberhentian Abdurahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden RI ketiga. Kedua; kasus Bank Century yang diangkat menjadi persoalan politik dengan diangkatnya dalam hak angket dan hak menyatakan pendapat, menimbukan kegaduhan politik, dimana terjadi keretakan diantara anggota partai politik yang tergabung dalam pemerintahan koalisi. Ketiga; demikian pula kasus mafia pajak "Gayus Tambunan" diangkat sebagai persoalan politik sebagaimana yang terjadi pada butir kedua di atas.

Peristiwa politik konflik antara legeslatif dengan eksekutif selama dalam penyelenggaraaan sistem pemerintahan presidensiil pada era reformasi, menarik untuk di analisis secara lebih mendalam. Oleh sebab itu di bawah ini akan dijelaskan secara sistimatis faktor-faktor terjadinya konflik antara legeslatif dengan eksekutif di bawah ini.

### 4.5.1 Hubungan Legislatif dan Eksekutif Menurut Trias Politika

Mencermati perkembangan hubungan antar lembaga politik di Indonesia pada era reformasi, terutama antara legislatif dan eksekutif sering muncul di permukaan dan menjadi topik perdebatan hangat dan dinamis. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab dimuka, mempelajari lembaga kekuasaan politik dalam suatu negara tidak terlepas dari konsep*"trias politika"*. Dalam konsep tersebut terdapat 2 (dua) pandangan yaitu yang disebut *"separation of power"*, yakni kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif terpisah. Sedangkan pandangan yang lain yaitu *"distribution of power"*, artinya "pembagian kekuasaan". Doktrin konsep antara "pemisahan kekuasaan" dengan "pembagian kekuasaan" memiliki implikasi yang berbeda dalam pelaksanaannya. Bentuk pemerintahan di Indonesia sesuai konstitusi yang diatur dalam undang-undang dasar lebih condong pada pandangan "*distribution of power*", yaitu "pembagian kekuasaan". Sebab dalam pandangan ini ketiga lembaga kekuasaan politik tersebut diberikan ruang untuk saling bekerjasama, baik antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pada hakekatnya pola hubungan antara "legislatif dan eksekutif" dalam sistem presidensiil dan parlementer memiliki pola hubungan yang masing-masing berbeda karakteristiknya. Jika dalam sistem parlementer, pola hubungan antara eksekutif dengan legislatif sangat dinamis dan bahkan sering terjadi konflik kepentingan yang tidak jarang bisa menyebabkan suatu kabinet pemerintahan jatuh. Oleh sebab itu dalam sistem pemerintahan parlementer mensyaratkan partai politik yang berkuasa sebagai pemenang pemilu legislatif, agar mampu mengendalikan konflik kepentingan, harus memiliki kekuatan 50% lebih kursi legislatif baik melalui hasil pemilu maupun dengan cara membentuk koalisi dengan partai lain yang tidak terlalu banyak melibatkan partai politik, sehingga mampu mendukung pemerintahan eksekutif yang lebih efektif. Adapun sistem presidential pada umumnya hubungan legislatif dengan eksekutif lebih seimbang *(balance of power*). Konsep *"balance of power"*lebih terpelihara dengan baik, jika kedua lembaga tersebut mampu menyalurkan fungsi dan perannya dengan baik dan seimbang. Namun apabila eksekutif lebih kuat sering terjadi eksekutif lebih banyak menekan terhadap legislatif. Contoh kasus di Indonesia pada masa Orde Baru kecenderungan eksekutif lebih kuat, konsekuensinya terhadap legislatif sering diberi istilah DPR fungsinya sebagai "tukang stempel" pemerintah. Jika mencoba membandingkan dengan sistem pemerintahan di Amerika Serikat yang menganut sistem "presidensial", pernah mengalami tekanan politik yang cukup berat dari perlemen Amerika Serikat terutama dari para anggota "Kongres" ketika Presiden Barack Obama akan menggoalkan rancangan undang-undang kesehatan yang konten kebijakannya lebih populis atau pro rakyat miskin, mendapat kecaman yang bersifat ideologis. Bahwa Amerika Serikat yang dikenal sebagai negara yang berhaluan ideologi liberal kapitalis, oleh Barack Obama dibawa ke arah yang berbau "sosialis". Bahkan demi untuk perjuangan politik Presiden Obama yang pada akhirnya

RUU tersebut sukses ditetapkan menjadi undang-undang, sempat mengorbankan kunjungan kenegaraanya ke Indonesia, yang salah satu issue alasan penundaan lawatan ke Indonesia seperti yang dijelaskan di atas.

Berdasarkan penjelasan bab terdahulu, dalam mempelajari hubungan kekuasaan antar lembaga politik dalam mahzab "parlementer maupun presidential", kemungkinan dalam kajian akan menemui beberapa persamaan terhadap kasus yang dibahas karena pada hakekatnya keduanya memiliki potensi "konflik kepentingan". Walaupun kedua bentuk pemerintahan di atas dalam bab sebelumnya telah dibahas secara mendalam meliputi beberapa aspek tetapi penjelasan materi kajian akan diuraikan dalam konteks yang berbeda. Oleh karena kajian pada bab ini lebih fokus pada hubungan 2 (dua) lembaga politik antara legislatif dan eksekutif yang cenderung menimbulkan konflik.

### 4.5.2 Hubungan Legislatif dan Eksekutif Era Orde Lama

Kajian mengenai "konflik" lembaga tinggi negara" antara legislatif dengan eksekutif dalam sejarah politik di Indonesia pada umumnya sudah banyak ditulis oleh para ahli. Dalam catatan *Samsudin Haris (2000)* disebutkan terutama pada masa pemerintahan Orde Lama mulai tahun 1945 s/d 1959, konflik legislatif dengan eksekutif paling banyak terjadi. Ketika pemerintahan Indonesia pertama kali terbentuk berdasarkan sistem parlementer yaitu "Kabinet Pemerintahan" di bawah Perdana Menteri Syahrir I dan II tahun 1945 sampai dengan "Kabinet Pemerintahan" yang terakhir antara masa transisi Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Maret 1956- April 1957) dan digantikan oleh Kabinet Djuanda (April 1957 - Juli 1959) yang merupakan kabinet non partai bentukan Presiden Sukarno. Jadi selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun yaitu tahun 1945 s/d 1959 penyelenggaraan pemerintahan di bawah sistem parlementer, sudah mengalami pembentukan 10 (sepuluh) lebih kabinet pemerintahan. Dalam setiap kabinet cenderung hubungan antara legislatif dan eksekutif dipenuhi dengan konflik yang sebagian besar bersifat tarikan ideologis antara "nasionalisme (PNI) dengan Islam (Masyumi dan NU)". Pada saat itu konflik bersifat ideologis pada dasarnya di karenakan semangat berbangsa dan bernegara yang belum lama di dirikan oleh para *"founding fathers"*, masih kental dengan nilai-nilai ideologi yang masih dibawa ketika mereka melawan penjajahan "Hindia Belanda". Sehingga mendirikan partai politik sebagai alat perjuangan mencapai kekuasaan baik di legislatif dan eksekutif serta yudikatif harus berorientasi nilai-nilai ideologi. Sebenarnya pada era orde lama konflik yang paling keras antara eksekutif dan legislatif, yaitu; ketika Ir. Soekarno pada bulan Juli 1959 selaku Kepala Negara mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya adalah "membubarkan DPR atau pada waktu itu disebut "Dewan Konstituante".Pada era pasca dekrit 1959 s/d 1966 merupakan era Demokrasi Terpimpin dengan landasan konstitusi

Undang-Undang Dasar 1945. Dalam masa Demokrasi terpimpin Presiden Soekarno memiliki kekuasaan penuh *(Power Full)* baik sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Sebagimana telah diuraikan pada bab terdahulu efektifitas kepemimpinan dari Ir. Soekarno dalam mengisi lembaran sejarah sebenarnya terdapat beberapa catatan sejarah yang jarang dicatat dalam sejarah sehingga kurang diketahui oleh masyarakat luas. Selama kepemimpinan Presiden pertama Indonesia pada masa akhir kepemimpinannya sesungguhnya memiliki banyak kebijakan yang berorientasi pada upaya membangun kejayaan bangsa Indonesia sebagimana yang tertuang dalam semboyan "Bhineka Tunggal Ika dan *Nation and Charachter Building*" dan doktrin TRISAKTI. Kebijakan yang menunjukkan sikap "Heroik" misalnya pertama; pada tahun 1960 Indonesia keluar dari PBB dan Bung Karno mendirikan Ganefo sebagai embrio dari Gerakan Non Blok. Kedua; pada tahun 1961 kebijakan melarang perkumpulan yang terkait dengan jaringan Zionis Internasional seperti Rotary Club dan Lion Club serta tahun 1963 imigran Cina atau eks patriat dipulangkan ke negara asal. Ketiga; pada tahun 1964 kebijakan melakukan nasionalisasi perusahaan asing dan melakukan negoisasi ulang kontrak karya terhadap beberapa eksplorasi tambang dan minyak dengan perusahaan asing terutama dengan PT. Freeport. Walaupun dengan beberapa kebijakan tersebut dalam catatan sejarah pada akhirnya presiden pertama tersebut harus mengakhiri jabatan kepresidenan yang tidak lama setelah kebijakan politik tersebut digulirkan dengan melalui suatu peristiwa politik yang tragis yaitu G 30 SPKI dan Ir. Soekarno bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Namun dalam perjalanan sejarah, kebijakan tersebut dikembalikan ke posisi semula oleh rezim baru ketika pada tahun 1967, Soeharto ditetapkan sebagai pejabat presiden dan seterusnya sampai akhir masa jabatan yang dipaksa mundur oleh gelombang "*people power*" pada tahun 1998 karena dipicu oleh krisis moneter.

### 4.5.3 Hubungan Legislatif dan Eksekutif Era Orde Baru

Dalam perkembangannya di era Orde Baru mulai tahun 1967 s/d tahun 1998, pada era rezim Soeharto yang menjabat presiden selama 32 tahun pemerintahan, selama di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto sudah dalam 6 (enam) kali pembentukan "kabinet pembangunan", hubungan antara legislatif dengan eksekutif, praktis tidak pernah terjadi "konflik politik" yang sampai menggoyahkan pemerintahan. Semua potensi "konflik" baik yang sembunyi maupun yang sempat muncul di permukaan, dapat dikendalikan dengan sangat mudah. Namun ketika menjelang kejatuhan "rezim Soeharto" pada tahun 1997, situasi politik yang memanas maka legislatif mendapat tekanan massa *(people power)*, di bawah kepemimpinan para tokoh "reformasi" yaitu yang muncul di permukaan; Amien Rais, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati dan Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan lain-lain. Ketua MPR pada waktu

itu "Harmoko" mendapat tekanan hebat dari massa mendesak dan meminta sesuai kehendak rakyat, agar "Presiden Soeharto Lengser".

Dalam catatan sejarah politik era orde baru mengenai hubungan kedua lembaga tersebut dapat dijelaskan bahwa terkendalinya konflik antara legislatif dengan eksekutif, kemungkinan dipengaruhi oleh: pertama; jumlah partai yang sedikit (PPP dan PDI) dan Golkar sebagai hasil kebijakan fusi partai politik. Kedua; kekuatan politik Golkar memenangkan pemilu di atas 50% pada tahun 1971, pemilu pertama pada era orde baru, ketiga; kemenangan Golkar terus berlanjut sampai pada pemilu 1997 mencapai 73%.Sebagai golongan fungsional, yang menjalankan peran partai politik dan fungsi partai politik bahkan sebagai hegemoni kekuatan politik pada era orde baru.

Pada awal era orde baru, memang stabilitas politik sudah mulai mantap sehingga efektifitas penyelenggaraan pemerintahan benar-benar bisa dirasakan dengan tanpa adanya "kegaduhan politik" antara legislatif dan eksekutif.Pada gilirannya stabilitas politik yang semakin terkendali maka pembangunan ekonomi maju dengan pesat. Posisi Indonesia naik dari "negara terbelakang *(under developing country)* menjadi negara berkembang *(developing country)*. Adapun peristiwa kegaduhan politik akibat dari tekanan dan tindakan pemerintah yang represif terhadap kelompok-kelompok kritis dan radikal dari kalangan aktifis dan mahasiswa, sering pula membuat pemerintah bertindak keras dan bahkan dianggap melanggar HAM, misalnya peristiwa Tanjung Priok tahun 1984, Talang sari, dan terakhir penculikan dan penembakan aktifis mahasiswa Trisakti tahun 1997. Sedangkan bagi anggota legislatif yang kritis dan radikal sudah dipastikan di *"recall"* dari keanggotaan DPR, misalnya anggota DPR RI dari Golkar yaitu; Rahman Toleng dan Ichsanurdin Noersi dan lain-lain. Oleh sebab itu dalam konteks dinamika hubungan lembaga-lembaga tinggi negara tersebut agar berjalan dengan seimbang *(Balance of power)*, perlu kebijakan yang tegas dan tepat serta lebih serius dan tuntas dalam implementasi penataan kelembagaan politik terutama di tingkat infra struktur politik, sebagai konsolidasi kekuasaan yang stabil dan establish. Pada gilirannya memberikan pengaruh signifikan terhadap performance supra struktur politik. Hubungan antara eksekutif dan legislatif praktis tidak terjadi konflik yang menimbulkan kegaduhan. Bahkan lebih terkesan terjadi proses "eksekutif lebih dominan mempresure atau menekan legislatif ketika eksekutif meminta dukungan politik. Oleh karena itu efektifitas pengawasan menjadi kurang optimal dan *abuse of power*" relatif tidak muncul di permukaan.

### 4.5.4 Hubungan Legislatif dan Eksekutif Era Reformasi

Kemudian dalam perkembangannya upaya mempelajari hubungan legislatif dan eksekutif di era reformasi mulai tahun 1999 s/d 2014, di tengah perubahan politik

dari sistem otoriter dan sentralistik menuju sistem politik demokrasi menarik untuk dijadikan kajian ilmiah dengan fokus terhadap kelembagaan politik dan *locus* pada sistem politik Indonesia.

Pasca kejatuhan rezim Orde Baru tahun 1998, keberadaan lembaga legislatif hasil pemilu tahun 1997 masih tetap meneruskan tugasnya sampai dengan pemilu tahun 1999 seiring dengan tongkat estafet penyerahan kekuasaan dari "Presiden Soeharto" kepada "Wakil Presiden BJ. Habibie" diangkat menjadi Presiden RI yang ketiga. Dalam kurun waktu pemerintahan BJ Habibie yang dijalankan mulai Mei tahun 1998 s/d pasca pemilu 7 Juni 1999, sesungguhnya mulai tampak perubahan yang cukup signifikan terutama nilai kurs dolar dari Rp. 16.000 menjadi Rp. 6.000, merupakan upaya yang spetakuler. Akan tetapi bersamaan dengan upaya *recovery* ekonomi, terganggu oleh peristiwa Timor-Timur yang disebabkan oleh kebijakan BJ.Habibie menetapkan "referendum" bagi rakyat Timor Leste, untuk menentukan tetap "bergabung" dengan Indonesia atau memilih "lepas". Hasil referendum dimenangkan oleh mayoritas penduduk yang ingin "lepas" dari Indonesia dan menjadi negara yang "merdeka."

Sesungguhnya peristiwa yang sudah sepuluh tahun lebih, jika diambil hikmahnya di tengah banyak persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia, lepasnya Timor -Timur dari pangkuan NKRI, mengurangi bisul dan beban berat persoalan bangsa yang selama ini menjadi alat permainan "barat" untuk menggoyang stabilitas politik dan keamanan Indonesia". Negara dan bangsa Indonesia sudah tidak kurang-kurangnya membangun infrastruktur yang cukup dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat Timor Leste pada waktu itu, bahkan terkadang wilayah yang lain seperti Papua dan NTT, sering dikalahkan porsi pembangunannya. Peristiwa lepasnya Timor-Timur dari NKRI, menyebabkan masyarakat Indonesia menyesali, terutama dari pihak ABRI/TNI yang pada waktu perjuangan "bergabungnya" wilayah Timor-Timur ke Indonesia mengorbankan ribuan anggota TNI dan bahkan eks pejuang Timor-Timur mendapatkan "penghargaan Bintang Seroja". Kejadian lepasnya provinsi termuda tersebut pada waktu itu "kesalahan" ditimpakan kepada BJ Habibie.

Ketika kebijakan politik Presiden BJ. Habibie, memajukan jadwal penyelenggaraan Pemilu dipercepat pada tahun 1999 merupakan tanggal sejarah dibukanya kran demokrasi yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia, meskipun menyebabkan kesempatan BJ Habibie menjadi presiden realitanya hanya satu tahun lebih. Padahal kesempatan BJ Habibie menjabat sebagai "presiden" sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, bisa sampai habis masa jabatan presiden sampai lima tahun, berarti akan berakhir tahun 2002. Namun rupanya keinginan BJ Habibie menghendaki supaya beban politik masa lalu bisa lepas, harus diselenggarakan pemilu dipercepat. Akan tetapi rupanya perhitungan BJ Habibie meleset, ketika pertangungjawaban Presiden di

tolak melalui pemungutan suara *(voting)* pada sidang paripurna di lembaga legislatif. Pada waktu itu aroma konflik antara Presiden BJ Habibie dengan anggota DPR RI muncul pada saat penolakan "pertanggungjawaban Presiden tersebut, terutama oleh anggota DPR dari Golongan Karya yang pada waktu itu menguasai mayoritas kursi di legislatif. Padahal BJ Habibie adalah sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar, sedangkan Ketua Umum Golkar adalah "Akbar Tanjung". Sejak peristiwa politik tersebut, karier politik BJ Habibie berakhir dan hari kemudian BJ Habibie kembali ke habitatnya menekuni dunia IPTEK yang memang sejak awal ditekuninya di samping kegiatan sosial lainnya. Bangsa Indonesia sangat membutuhkan manusia-manusia hebat selain Bung Karno adalah juga sosok seorang BJ.Habibie, yang telah muncul ditengah masyarakat. Era reformasi secara ideal mampu melahirkan manusia Indonesia yang barangkali jauh lebih hebat dari tokoh-tokoh yang sudah ada. Peran partai politik, ormas dan organisasi profesi, di era demokrasi diharapkan mampu menghadirkan ditengah-tengah masyarakat Indonesia "pemimpin" yang hebat yang mampu mengemban tugas berat yaitu mengatasi krisis yang melanda Indonesia yakni krisis moral. Indonesia memerlukan "pemimpin yang visioner dan demokratis", seperti kedua sosok tokoh tersebut di atas. Oleh sebab itu, Indonesia menanti dengan cemas munculnya anak bangsa untuk menyelematkan "agenda Indonesia mendesak" *(Amien Rais, 2007)*.

### 4.5.5 Awal Konflik Legislatif dan Eksekutif

Pembahasan yang terkait dengan konflik antara legislatif dengan eksekutif diawali dengan fenomena BJ Habibie selaku "Presiden" yang pertanggungjawaban Presiden ditolak melalui voting dalam sidang paripurna MPR/DPR selanjutnya. Penolakan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie tersebut mengakhiri karier politik seorang anak bangsa yang hebat, penuh dedikasi yang tinggi di bidang Iptek, akan tetapi karya dan pengabdiannya pada puncak kekuasaan sebagai presiden hanya berumur satu tahun lebih sehingga karya agung di bidang Iptek dan memajukan SDM yang berkualitas tersebut tidak dapat dilanjutkan seiring dengan peristiwa politik yang memilukan yaitu pertanggungjawaban sebagai presiden selama satu tahun lebih "ditolak" oleh legislatif. Peristiwa politik menjelang kejatuhan karier presiden secara konstitusional tersebut merupakan catatan sejarah tentang kelembagaan politik, dapat dikategorikan sebagai wilayah konflik antara eksekutif dan legislatif. Artinya dalam proses politik dimasa B.J. Habibie sebagai Presiden yang membawahi lembaga eksekutif dengan dukungan partai politik yang menguasai mayoritas kursi di lembaga legislatif, namun dalam sidang paripurna pertanggungjawaban B.J. Habibie sebagai presiden yang berjalan tiga belas bulan ditolak menyebabkan harus diberhentikan dari jabatan presiden.

Mengawali era reformasi sebagai transisi dari masyarakat yang tertekan, represif dari rezim yang lama kemudian berubah menjadi "demokrasi" barangkali butuh waktu yang cukup. Ketika hasil pemilu tahun 1999, pada waktu itu PDI Perjuangan mendapat suara paling besar yaitu sekitar 23%. Pada waktu itu terjadi peristiwa politik yang penting untuk dicatat walaupun sudah banyak ditulis oleh para pemerhati politik. Peristiwa tersebut yaitu ketika pemilhan "presiden" dari hasil pemilu 1999, masih dipilih oleh anggota legislatif (MPR/DPR). Kejadian tersebut sesungguhnya di luar kelaziman, karena pada umumnya partai pemenang pemilu seharusnya mampu menggandeng partai lain untuk berbagi kekuasaan memberikan dukungan kemenangan kepada calon presiden PDI Perjuangan (PDIP) yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Akan tetapi mungkin diluar perhitungan para pimpinan teras PDI Perjuangan (PDIP) dalam adu suara ternyata dalam arena pemungutan suara antara calon presiden Megawati Soekarno Putri yang didukung oleh PDIP dan sekutunya dengan calon presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) yang didukung oleh "poros tengah" teridiri dari PKB, PBB, PPP, PAN, PK, sebagian suara dari Golkar dan partai Islam lainnya. Padahal pada waktu itu kondisi fisik Gus Dur yakni kesehatannya sedang mengalami gangguan serius. Namun diluar dugaan, kemungkinan sebuah kemukjizatan, dalam pemungutan suara tersebut dimenangkan oleh Gus Dur. Dengan demikian hasil pemilu tahun 1999 yang terpilih sebagai "Presiden" yaitu Abdurahman Wahid (Gus Dur) dan sebagai Wakil Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri.

Dalam perjalanan selama Presiden Gus Dur menjabat, banyak peristiwa politik yang cukup menegangkan urat syaraf dan sekaligus juga dibuat situasi menjadi cair ketika dalam pidato Presiden Gus Dur menyampaikan dalam gaya humor. Demikian pula dengan gaya Gus Dur yang lugas, bersahaja dan "*nyeleneh*" sering banyak pejabat tinggi dan juga termasuk anggota DPR dibuat kebakaran jenggot oleh pernyataan Gus Dur yang sering diluar perkiraan banyak orang. Sebagai contoh hubungan menjadi kurang harmonis antara legislatif dengan eksekutif di era reformasi yaitu diawali oleh Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur), sering kali menyindir atau mengkritik DPR dengan gaya berkelakar dikatakan bahwa anggota DPR seperti "taman kanak-kanak".

Puncak konflik antara legislatif dengan eksekutif yaitu, ketika para elite politik di legislatif yang didukung oleh kekuatan di luar "senayan" terutama kelompok "militer" yang sudah tidak cocok dengan kebijakan dikeluarkan pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur, mengenai "demiliterisasi" pada jabatan pemerintahan sipil", yang dianggap terlalu cepat, serta membuat polarisasi kekuatan ditubuh TNI/Polri. Oleh sebab itu banyak elemen masyarakat sudah mengalami kekecewaan yang mengkhawatirkan "efektifitas" penyelenggaraan pemerintahan di bawah "Presiden Gus Dur". Upaya untuk melengserkan Gus Dur dari kursi kepresidenan mulai muncul

dipermukaan. Oleh sebab itu berbagai cara dilakukan untuk mencari celah yang dinilai tetap konstitusional upaya pelengseran semakin gencar baik oleh lawan politik maupun teman-teman Gus Dur di "poros tengah" yang juga mulai semakin meragukan kemampuan kepemimpinan Gus Dur untuk melanjutkan sampai lima tahun, karena disamping kondisi kesehatan yang kurang stabil juga kebijakan pemerintah mulai tidak terkontrol. Dalam perjalanan kepresidenan Gus Dur kurang dari dua tahun terjadi peristiwa "skandal Bullog Gate", kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh para anggota legislatif sebagai pintu masuk "melengserkan atau memakzulkan" Gus Dur dari kursi Presiden, padahal fakta hukum kurang mendukung keterlibatkan Gus Dur tentang "Bulog Gate". Tetapi issue tersebut digerakan terus oleh para politisi senayan sehingga isue soal hukum bergeser menjadi isue politik. Gempuran yang luar biasa baik dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa serta dari para wakil rakyat, mendesak untuk diadakan sidang "Istimewa" dengan melakukan "mosi tidak percaya" terhadap kepemimpinan "Presiden Abdurahman Wahid", yang dianggap telah melanggar undang-undang. Tekanan yang sangat luar biasa agar meminta Gus Dur mengundurkan diri dari jabatan "Presiden", namun Gus Dur tetap tidak bergeming. Beberapa tokoh penting seperti "Menko Polkam waktu itu "Agum Gumelar", berupaya meredam situasi yang genting, dengan membujuk "Gus Dur" supaya mengundurkan diri dari kursi kepresidenan, namun Gus Dur tetap bertahan. Oleh karena tekanan demontrasi mahasiswa dan didukung dari berbagai kekuatan massa dari elemen-elemen masyarakat, mendesak supaya diadakan "sidang istimewa MPR". Setelah anggota MPR yang hadir telah mencapai quorum 2/3 dari jumlah anggota MPR, maka diadakan "sidang istimewa" untuk memutuskan "pemberhentian" Abdurahman Wahid dari jabatan "Presiden", selanjutnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku maka digantikan oleh "wakil presiden" ibu Megawati Soekarno Putri sebagai pejabat "Presiden" sampai habis masa jabatan presiden hasil pemilu tahun 1999 yaitu sampai dengan tahun 2004.

Uraian penjelasan di atas menggambarkan konflik yang tidak bisa terhindarkan antara legislatif dan eksekutif, baik berdasarkan sistem pemerintahan parlementer maupun sistem pemerintahan presidential. Kedua sistem tersebut pada hakekatnya mengandung potensi konflik yang sesungguhnya memiliki bobot yang sama. Fakta empiris telah terjadi pada diri Presiden Gus Dur, walaupun secara hukum tidak memiliki fakta hukum untuk membuktikan bahwa Gus Dur melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan. Oleh sebab itu konflik antara lembaga politik dipastikan akan merugikan rakyat, karena rakyat yang menanggung akibatnya ketika stabilitas politik terganggu, pembangunan ekonomi akan terpengaruh terutama minat para investor yang berkurang, pada akhirnya kesempatan kerja semakin berkurang.

### 4.5.6 Konflik Legislatif dengan Eksekutif Pasca Amandemen UUD 1945

Seiring dengan perjalanan waktu, dalam sejarah politik di Indonesia pada era reformasi yang sudah berjalan "lima belas tahun", memang konflik antara legislatif dan eksekutif yang dirasakan paling keras adalah terjadi pada waktu "pemakzulan" terhadap "Abdurahman Wahid" (Gus Dur) dari kursi Presiden. Namun ketika tahun 2002 kebijakan politik pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pada dasarnya merupakan perubahan yang fundamental terhadap fungsi-fungsi eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Perubahan di lembaga eksekutif yang paling fundamental yaitu "presiden" sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, diplih secara "langsung oleh rakyat dalam pemilu". Artinya ada perubahan dari model demokrasi perwakilan ke demokrasi langsung, masa jabatan presiden dibatasi hanya dua periode jabatan. Kemudian di bidang legislatif beberapa perubahan yang terjadi yaitu pada fungsi legislasi; kewenangan DPR diberi penguatan yang lebih yakni "setiap anggota DPR saat ini memiliki kewenangan "Hak Inisiatif". Dalam pengesahan dari Rancangan Undang-Undang (RUU) disetujui dan ditetapkan oleh DPR menjadi Undang-Undang (UU), jika dalam jangka waktu 30 hari Presiden tidak menanda-tangani persetujuan pengesahan undang-undang tersebut, maka undang-undang tersebut tetap sah dan secara otomatis harus dicatat dalam lembaran negara. Penguatan lembaga legislatif dimaksudkan sebagai langkah untuk mengimbangi akselerasi kegiatan yang dinamis dari lembaga eksekutif sehingga rakyat melalui lembaga legislatif mampu secara seimbang melakukan kontrol yang efektif terhadap jalannya pemerintahan. Di lembaga yudikatif, telah dibentuk lembaga tinggi negara yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yaitu yang disebut "Mahkamah Konstitusi", sedangkan lembaga yang telah ada yaitu "Mahkamah Agung" melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan setingkat di bawah "undang-undang".

Perubahan dibidang politik ketatanegaraan tersebut sebagai upaya melakukan penyempurnaan kelemahan pelaksanaan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan yang selama ini dianut yaitu antara sistem parlementer dengan presidensiil. Desain sistem politik di masa yang akan datang dengan telah diamandemen UUD 1945 tersebut serta didukung beberapa undang-undang bidang politik misalnya undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, undang-undang Susduk MPR/DPR/DPD, undang-undang pilpres, diharapkan mampu menjadi tonggak sejarah politik Indonesia yang lebih stabil dan harmonis dalam rangkaian penataan hubungan antar lembaga politik tersebut. Perubahan politik era reformasi terutama pasca amandemen UUD 1945 (2002) jika menganalisis relasi antara lembaga legislatif dan eksekutif, aroma konflik kedua lembaga tersebut tetap timbul dengan dinamika cukup massif, seperti yang telah banyak diuraikan pada bab terdahulu mengenai beberapa peristiwa

misal "Kasus Bank Century dan Korupsi di perpajakan yang dilakukan oleh "Gayus Tambunan", pada hakekatnya menimbulkan konflik antara eksekutif dan legislatif. Fragmentasi politik di parlemen boleh jadi akan terus dimainkan menjelang tahun 2013 agar upaya menggiring "kasus Bank Century" ke arah "Hak menyatakan Pendapat". Jika hak DPR tersebut tetap digelindingkan oleh para politisi senayan dalam rangka mencari simpati publik terkait dengan isu pemberantasan korupsi, maka bisa dipastkan ketegangan hubungan antara legislatif dan eksekutif tetap akan memanaskan konstelasi politiksampai menjelang pemilu tahun 2014.

Sesungguhnya tujuan reformasi dalam bidang politik adalah memberikan penguatan terhadap pemerintah sipil melalui basis *"Civil Society"* dengan membuka kran demokrasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Oleh sebab itu amandemen UUD 1945 salah satunya diberikan legitimasi bagi kedudukan presiden/wakil presiden yaitu dengan cara dipilih langsung (Demokrasi Langsung).

Dengan kedudukan presiden yang kuat sebagaimana dikatakan *Yudi Latif (2012)* maka mampu memberikan berbagai keputusan politik yang notabene untuk menyelesaikan persoalan kenegaraan dan kebangsaan serta kemasyarakatan yang cepat dan tuntas, termasuk persoalan kemacetan politik antara eksekutif dan legislatif, sehingga hubungan keduanya selalu dalam suasana tegang. Dalam ulasannya menarik untuk disajikan sebagai penutup pembahasan topik ini yaitu terkait dengan legitimasi presiden yang dipilih secara langsung yaitu sebagai berikut;

Dipilih secara langsung oleh rakyat, dengan dukungan jumlah pemilih meyakinkan, secara prinsipal dan kondisionalitas, Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) memiliki basis legitimasi yang kuat, dengan legitimasi yang kuat, SBY dalam mengemban tugasnya itu bisa mewujudkan diri sebagai *"Active President"*. Nyatanya, presiden SBY cenderung mengembangkan kepresidenan secara pasif, kecuali dalam merespon dalam hal-hal yang menyangkut citra diri. Dalam menyusun kabinet Presiden membiarkan di dikte pilihan partai politik.

Pendapat di atas kata kunci yang penting yaitu *"Active President"* jika presiden yang secara konstitusional dipilih oleh rakyat langsung dan mendapatkan legitimasi yang kuat maka presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara menjalankan fungsi kepresidenan secara aktif mampu membentuk kepemimpinan yang kuat dan juga kharismatik, dapat dipastikan konflik legislatif dan eksekutif dapat segera dihentikan. Hubungan kedua lembaga politik tersebut tetap dinamis dan positif dalam arena *"Balances of Political Power"*. Jika kedua lembaga politik dalam kondisi yang menunjukkan hubungan kerjasama dalam rangka "keseimbangan kekuasaan" maka dinamika politik yang ditimbulkan adalah untuk kepentingan publik, kepentingan negara dan bangsa.

## STUDI KASUS 5

Sebagaimana uraian penjelasan topik di atas mengenai konflik "eksekutif dengan legeslaitf" yang sering terjadi dengan berbagai latar belakang kepentingan politik. Untuk itu pada sesi diskusi kelima (5) mengambil kasus konflik legeslatif dan eksekutif mengenai penetapan APBD. Walaupun penetapan anggaran dilakukan setiap tahun anggaran, tetapi jika penetapan anggaran tertunda hanya karena konflik kepentingan antara para anggota dewan sebagai representasi partai politik dengan pemerintah, maka yang dirugikan masyarakat secara luas.

### Politikus Dinilai Hambat APBD

*REPUBLIKA, 21 Januri 2014*

JAKARTA - Tertahannya penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 di beberapa provinsi dinilai tak lepas dari kepentingan politis yang melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sementara, lambannya penyelesaian APBD berpotensi mengganggu pembangunan provinsi yang bersangkutan.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Agus Pambagio, menjelaskan, sejatinya APBD dibuat oleh pemerintah daerah dan disahkan oleh legislatif (DPRD). Akan tetapi dalam praktiknya, legislatif kerap mengintervensi kandungan dalam RAPBD.

Tujuannya, agar proyek-proyek kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dikerjakan oleh anggota keluarga hingga kolega sang legislator. "Ini menjadi sumber korupsi. Pemda yang keras tentu tak mau bermain-main," ujar Agus, Senin (20/1).

Agus mencontohkan lambannya penyelesaian APBD DKI Jakarta. Sejak awal, ia mengatakan telah memperingatkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo agar mendekati partai-politik yang mendominasi kursi di DPRD. Terlebih, kursi partai pendukung mantan walikota Solo ini yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan termasuk partai minoritas. Berbeda dengan Partai Demokrat maupun Partai Keadilan Sejahtera yang menjadi mayoritas.

"Ini politik. *Gimana* caranya agar *win-win*. Jangan sampai main sogok, kalau bisa main cantik," papar Agus. Lebih lanjut, Agus menyebut tertundanya penyelesaian APBD berimbas pada terganggunya pembangunan.

Misalnya, APBD rampung akhir Januari, proses ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk disetujui hingga anggaran disalurkan ke SKPD-SKPD paling tidak membutuhkan waktu satu bulan.

Setelah itu, dilakukan tender oleh SKPD terkait, misalnya Dinas Pekerjaan Umum, yang paling tidak dimulai Maret. "Setelah itu, kegiatan baru dimulai akhir Maret, sementara Desember sudah harus tutup buku. Semakin mundur, semakin merugikan," kata Agus.

Sejauh ini, empat provinsi terancam terkena pengurangan dana alokasi umum (DAU) sebesar 25 persen dari

besaran yang seharusnya diterima. Hal tersebut disebabkan belum rampungnya penyelesaian APBD. Keempat provinsi itu antara lain DKI Jakarta, Sumatra Barat, Sumatera Utara, dan Papua Barat.

**Sanksi**

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, sampai saat ini, keempat provinsi belum juga menyelesaikan APBD. Kemendagri dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), ujar Gamawan, terus berkoordinasi terkait permasalahan ini.

"Tujuannya, agar aturannya tetap dijalankan. Tenggat waktunya sampai akhir tri wulan pertama ini," kata Gamawan kepada *Republika*, kemarin. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, batas akhir penetapan APBD provinsi yang harus dilaporkan kepada Kemendagri paling lambat 31 Januari 2014.

Jika, melebihi 15 hari sesudah tanggal yang ditetapkan, empat provinsi tersebut akan dijatuhi sanksi penundaan dan penahanan pencairan anggaran DAU. Pencairan maupun penahanan DAU itu dilakukan Kemenkeu merujuk petunjuk Kemendagri.

DAU adalah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja dalam APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan dalam APBD.

Jumlah DAU setiap tahun ditentukan berdasarkan Keputusan Presiden. Besaran DAU sampai saat ini belum bisa diketahui. Menurut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo, tentang DAU 2014 masih diproses di Sekretariat Negara. Sedangkan, dana alokasi khusus (DAK) diatur dalam PMK yaitu PMK Nomor 180/PMK 07/2013 dan telah diterbitkan, Selasa (31/12).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, alokasi transfer ke daerah dalam APBN 2014 mencapai Rp 592,6 triliun atau naik dibanding alokasi dalam APBNP 2013 sebesar Rp 529,4 triliun. Transfer daerah terdiri dari dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. Dalam APBN 2014, dana perimbangan tercatat sebesar Rp 487,9 triliun (APBNP 2013 Rp 445,5 triliun) dan dana otonomi khusus dan penyesuaian sebesar Rp 104,6 triliun (APBNP 2013 Rp 83,8 triliun).

Mempelajari sajian kasus di atas mengenai konflik kepentingan antara legislatif dengan eksekutif pada keputusan penetapan APBD Provinsi DKI Jakarta Raya, menunjukkan wilayah konflik pada sektor strategis sangat merugikan rakyat secara langsung. Fungsi pengawasan bidang anggaran oleh DPR/D sampai dengan satuan tiga menyebabkan situasi kedua lembaga tersebut terjebak pada persoalan yang sangat teknis. Padahal belum tentu setiap anggota legeslatif memahami dan menguasai detail program program pembangunan. Pengawasan anggaran sampai satuan tiga telah berakhir ketika Mahkamah Konstitusi telah membatalkan peraturan perundangan yang

mengatur satuan tiga. Untuk mendalami kasus di atas akan disampaikan beberapa pertanyaan di bawah ini:

1. Apakah dengan pengawasan DPR/D terhadap anggaran sampai dengan satuan tiga selama ini telah terbukti efektif dalam penyelenggaran pemerintahan terutama tentang pelaksanaan pembangunan?
2. Mengapa kecenderungan saat ini anggota legeslatif lebih menonjol orientasi kepemtingan partai politik ketimbang memeperjuangkan kepentingan nasional dalam polltik anggaran sehngga alokasi anggaran kurang fokus untuk mengatasi problem pokok seperti pembangunan infrastruktur dasar di berbagai wilayah dan daerah?
3. Apakah setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan fungsi DPR/D dalam pengawasan anggran satuan tiga dapat mengendalikan terhadap intervensi anggaran?
4. Bagaimana strategi mengurangi konflik antara legeslatif dan eksekutif terutama penggunanaan "hak menyatakan pendapat" dan "hak angket" menghadapi dinamika politik pada masa yang akan datang dalam proses demokrasi yang cenderung libaral?

## 4.6 QUO VADIS DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

Dewan Perwakilan Daearah (DPD) merupakan lembaga baru dari hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kehadiran DPD sebagai penjelmaan utusan daerah dimana keanggotaan DPD dipilih melalui mekanisme demokrasi langsung. Persyaratan menjadi anggota DPD cukup berat dan proses pemilihan sama dengan DPR namun kewenangannya tidak seluas DPR. Jika DPD mewakili daerah atau wilayah sedang DPR mewakili rakyat atau penduduk. Sebagai lembaga baru cukup menarik untuk dilakukan kajian sejauh mana eksistensi DPD yang kewenangannya masih terbatas. Untuk itu topik kajian tentang DPD berjudul "*quo vadis* DPD", dengan uraian penjelasan seperti di bawah ini.

### 4.6.1 Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Pada masa era reformasi terjadi perubahan konstitusi Negara Republik Indonesia yang cukup fundamental yaitu dengan perubahan yang disebut Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 (empat) kali, sebagaimana yang diuraikan di atas. Salah satu pembentukan lembaga baru dan juga dengan nama yang baru dari hasil amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2001 adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kelahiran DPD meskipun sudah berjalan dua periode pemilu, kehadirannya dalam ketatanegaraan kita belum secara utuh diketahui, dipahami, dan dimengerti oleh masyarakat Indonesia. Apa, siapa, mengapa, dan bagaimana sosok dan wajah DPD (Dewan Perwakilan Daerah).

Pengertian secara konseptual DPD adalah suatu lembaga yang pembentukannya bertujuan memperkuat kedudukan daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keanggotaan DPD merupakan perwakilan *(representative)* daerah yang mengemban tugas; mengembangkan dan mengakomodasi aspirasi dan kepentingan serta mengagregasikan keinginan dan kepentingan daerah tersebut dalam konteks kebijakan nasional. Oleh karena itu, terkait dengan kedudukan DPD dalam lembaga negara kita yaitu di lembaga legislatif. Adapun sesuai konstitusi lembaga legislatif adalah MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Jika DPD keanggotaannya mewakili daerah sedangkan DPR keanggotaanya mewakili penduduk atau rakyat di suatu daerah tertentu. Meskipun DPD dan DPR dalam penetapan keanggotaannya memiliki kesamaan yaitu melalui pemilu, namun dalam konstitusi kita keduanya mempunyai peran dan fungsi yang berbeda. Peran dan fungsi yang berbeda dimaksud adalah bahwa DPD memiliki kewenangan yang terbatas. Dalam hal mekanisme hubungan kerja dengan DPR kedudukan DPD seolah menjadi subordinasi DPR. Di lain pihak lembaga legislatif di Indonesia termasuk menganut sistem dua kamar atau disebut *bicameral*, yaitu kamar satu DPR dan kamar yang lain DPD.

### 4.6.2 Analogi DPD dengan Kongres di Amerika Serikat

Pemikiran pembentukan DPD merupakan konsekuensi logis ditiadakannya anggota legislatif yang diangkat dari unsur golongan fungsional maupun utusan daerah. Namun tetap masih diperlukan perwakilan di luar partai politik sebagai kondisi realistis bahwa tidak seluruh penduduk atau warga negara sudah merasa terwakili oleh partai politik, sehingga perlu ada perwakilan dari unsur non partai atau independen, akan tetapi tidak mengatasnamakan mewakili kepentingan rakyat namun mewakili daerah. Setiap daerah diwakili sebanyak 4 (empat) anggota DPD baik daerah yang besar maupun kecil atau disebut prinsip *equal representative.* Sebagaimana disampaikan oleh *Bambang Cipto (2000)*, sesungguhnya secara konseptual sistem legislatif di Indonesia dengan di Amerika hampir sama. Jika di Amerika lembaga legislatif adalah kongres yang terdiri atas anggota senat dan anggota *house of representative*. Akan tetapi yang membedakan adalah antara senat dan house atau disebut DPR mempunyai fungsi yang sama. Senat mewakili negara bagian sedangkan *house* atau DPR mewakili penduduk di negara bagian. Jumlah anggota senat sebanyak 2 (dua) orang yang mewakili masing-masing negara bagian, prinsip *equal representative* juga digunakan di Amerika, yaitu antara negara bagian yang luas dan berpenduduk padat dengan negara bagian yang kecil dengan jumlah penduduk yang sedikit jumlah wakil anggota senat sama, yaitu 2 (dua) orang. Adapun sistem pemilihan *house* yang mewakili masing-masing negara bagian tergantung jumlah penduduknya. Apabila jumlah penduduk besar maka jumlah anggota DPR atau *house* juga lebih banyak. Masa jabatan senator adalah 6 (enam) tahun, tetapi setiap dua tahun dilakukan pemilihan untuk sepertiga anggota senat. Sedangkan masa jabatan *house* (DPR) dipilih oleh rakyat setiap dua tahun sekali. Kongres merupakan gabungan senat dan *house of representative,* antara keduanya mempunyai fungsi yang sama. Dengan fungsi yang sama tersebut, senat dan house (DPR) keduanya memiliki tugas yang banyak dan kegiatan yang tinggi. Bahkan kegiatan harian seorang anggota *house* (DPR) rata-rata setiap hari menghabiskan waktu 11 jam 18 menit. Perbandingan kedua lembaga legislatif di Indonesia dengan di Amerika Serikat yangmemiliki kemiripan dimaksudkan sebagai referensi terkait dengan pembahasan mengenai Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dengan demikian DPD sama dengan senat, hanya kalau di Indonesia antara DPD dengan DPR memiliki fungsi yang berbeda.

### 4.6.3 Fungsi Dewan Perwakilan Daerah

Meskipun DPD mempunyai fungsi di bidang legislasi dan pengawasan, akan tetapi kewenangannya sangat terbatas. Seperti misalnya, tugas dan wewenang DPD dalam bidang legislasi yakni; DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang

yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sedangkan dalam hal fungsi pemberian pertimbangan atas rancangan undang-undang adalah menyangkut RUU anggaran pendapatan dan belenja negara dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. Adapun dalam hal melakukan pengawasan adalah terhadap pelaksanaan undang-undang tertentu yaitu yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama. Kemudian mekanisme hubungan kerja DPD dengan DPR yaitu; DPD mengajukan kepada DPR mengenai RUU; DPR mengundang DPD untuk membahas RUU yang diusulkan sesuai tata tertib DPR; pembahasan RUU antara DPR dengan pemerintah dan pandangannya mengenai RUU yang diusulkannya pada pembahasan tahap awal pembicaraan tingkat I; pandangan, pendapat, dan tanggapan dijadikan sebagai masukan untuk pembahasan lebih lanjut antara DPR dan pemerintah; DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU, diberikan dalam bentuk tertulis, sebelum memasuki tahapan pembahasan antara DPR dan pemerintah. Berdasarkan tugas dan wewenang serta fungsi DPD tersebut di atas, meskipun substansi tugas dan yang menjadi kewenangannya cukup memadai sesuai tanggung jawab sebagai wakil daerah, namun pemikiran dan aspirasi para anggota DPD sesuai substansinya tidak diberikan kekuasaan yang memadai. Kewenangan hanya sebatas mengajukan usulan kepada DPR dan melakukan pembahasan usulan DPD dengan DPR dan pemerintah pada tahap awal pembicaraan tingkat I. Memberikan pertimbangan yang diberikan dalam bentuk tertulis, serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Jika ditelaah lebih dalam, maka tugas dan fungsi serta wewenang DPD menjadi tidak sebanding dengan tugas dan fungsi yang luhur dan mulia dalam upaya mengembangkan daerah, sehingga ada kecenderungan kedudukan DPD tidak efektif. Sebab mekanisme kerja seperti tersebut di atas jelas tidak terjadi umpan balik mengenai substansi yang diusulkan DPD, apakah pemikiran, gagasan, dan ide-idenya diperhatikan atau dipergunakan atau tidak. Hal tersebut tidak dapat diikuti perkembangannya oleh DPD.

### 4.6.4 Kinerja Dewan Perwakilan Daerah

Menurut data yang bersumber dari DPD RI tahun 2008 disebutkan dalam perjalanan DPD selama 2 (dua) periode pemilu tahun 2004-2009 sudah cukup banyak keputusan-keputusan yang diambil DPD, seperti RUU yang berasal dari DPD sebanyak 12 buah, padangan dan pendapat DPD sebanyak 80 buah, pertimbangan DPD sebanyak 5 buah, hasil pengawasan DPD sebanyak 39 buah, pertimbangan DPD yang berkaitan

dengan anggaran sebanyak 2 buah, jadi total keseluruhan keputusan DPD selama 4 tahun sebanyak 160 buah sebanyak 160 buah. Adapun dari aspek anggaran DPD mendapat dukungan yang tercatat dalam tahun 2006 sebesar 192 miliar dan terus meningkat bahkan dalam tahun 2009 sebesar 481 miliar. Berbagai pandangan memang memberikan respon dan pendapat yang saling berbeda atas peran dan fungsi DPD. Ada yang mengatakan bahwa peran DPD sengaja dimarjinalkan, di kebiri, di mandulkan. Di lain pihak beberapa kalangan mengatakan bahwa sesungguhnya bukan soal tugas dan fungsi serta kewenangan yang ada, akan tetapi faktor kesanggupan, kemampuan, dan kesungguhan para anggota DPD dalam menjalankan tugas dan fungsi DPD. Karena ternyata anggota DPD periode 2004 s/d. 2009 diisi oleh mantan pejabat lokal, tokoh ormas, tokoh agama, atau tokoh tradisional seperti raja dan keluarganya. Dengan formasi anggota DPD seperti digambarkan dalam kelompok-kelompok tersebut, dengan kemungkinan kalangan profesional relatif sedikit, sudah barang tentu optimalisasi kegiatan DPD tidak efektif. Namun sesungguhnya sepanjang peran DPD masih di bawah subordinasi DPR, peran dan fungsi DPD tetap hasil kerjanya tidak akan sebanding dengan beban yang menjadi tanggung jawab sebagai wakil daerah.

### 4.6.5 Upaya Peningkatan Peran Dewan Perwakilan Daerah

Padahal untuk menjadi anggota DPD tingkat kesulitannya lebih besar dibandingkan menjadi anggota DPR. Di samping keanggotaan DPD dari calon independen, disamping itu persyaratan pencalonan harus mendapatkan dukungan minimal 5000 KTP. Agar bisa menjadi calon jadi seperti misalnya untuk daerah pemilihan Jawa Barat harus mendapatkan suara 1,8 juta. Dengan kenyataan seperti di atas dan mekanisme proses anggota DPD sangat kompleks, sudah wajar jika tugas dan fungsi DPD perlu dioptimalkan perannya seperti Senat dan *House* (DPR) di Amerika, keduanya mempunyai fungsi yang sama, meskipun secara politis harapan tersebut sulit terwujud, namun perjuangan jalan terus. Perubahan konstitusi sesungguhnya sudah diperjuangkan selama periode berjalan dengan beberapa skenario yang pada intinya bagaimana DPD menjadi partner DPR, kedudukannya kuat dan efektif sesuai dengan substansi tugas dan fungsi mewakili kepentingan daerah. Namun upaya itu kandas karena dukungan yang semula 238 anggota MPR posisi dukungan sudah melebihi sepertiga anggota MPR, akan tetapi pada saat penentuan, dukungan menjadi berkurang dari sepertiga jumlah anggota MPR yaitu menjadi 216 anggota MPR pada posisi Agustus 2007. Dengan indikasi menurunnya dukungan dari DPR sebagai seniornya di lembaga legislatif, menunjukkan bahwa kedudukan DPD sebagai kekuatan politik belum diberi peran, sebab DPD kuat di legislatif memunculkan dilema baru dan peta kekuatan politik akan berubah sehingga dapat mengganggu agenda

partai-partai politik di legislatif tersebut. Oleh karena itu, pasca pemilu tahun 2009 pada kenyataannya masih tetap melakukan tuntutan agar DPD memiliki peran yang lebih besar dan bahkan dalam perkembangan dewasa ini sedang berupaya menggolkan pembangunanan Gedung DPD di seluruh wilayah Indonesia.

## STUDI KASUS 6

Pembahasan mengenai DewanPerwakilan Daerah (DPD) yang berjudul Quo Vadis DPD, mengisyaratkan bahwa lembaga yang baru mengalami persoalan yang bersifat struktural. Walaupun persoalan yang dihadapi cukup banyak, namun yang dianggap strategis untuk ke depan yaitu "kompetensi para anggota DPD" yang belum sesuai dengan peran yang diembannya. Pada hal syarat menjadi anggota DPD sangat berat, melebihi persyaratan menjadi anggota DPR. Namun tugas dan fungsinya yang diatur dalam konstitusi kurang berbobot dan berwibawa. Untuk menambah pendalaman tentang lembaga ini, topik diskusi yang disajikan pada kesempatan ini yaitu mengenai "upaya peningkatan kompetensi anggota DPD". Studi kasus ini diambil dari media massa Kompas, yang mencoba mendiskusikan berbagai persoalan eksistensi lembaga DPD dengan para nara sumber yang kompeten. Misalnya Laode Ida sebagai anggota DPD, Ahmad Yani anggota DPR dan Yudi Latif dosen dan pengamat politik. Ketika tokoh ini memperbincangkan peran dan eksistensi DPD sebagaimana yang dimuat di media massa di bawah ini.

### Kompetensi DPD Perlu Ditingkatkan

*KOMPAS, 1 Oktober 2013*

Anggota Dewan Perwakilan Daerah perlu meningkatkan kompetensi dirinya sehingga buah-buah pemikiran yang bagus dari anggota DPD diharapkan dapat mendorong lahirnya sebuah kebijakan pembangunan yang tepat.

DPD itu seharusnya punya kewenangan untuk menentukan kebijakan. Lalu, anggota DPD juga seharusnya berasal dari orang-orang yang mumpuni dan diakui publik. Bila tidak, hanya akan menjadi kumpulan orang, & rdquo; kata Wakil Ketua DPD Laode Ida, Senin (30/9), di Gedung DPD, dalam seminar Penguatan DPD sebagai Simpul Pembangunan Nasional. "Tanpa peningkatan kompetensi, anggota DPD terus akan berdiam di dalam sunyi," juga sekadar menjalankan administrasi-administrasi politik saja" kata Laode.

Menurut Laode, anggota DPD juga harus mempertahankan independensinya "Anggota DPD ini dipilih masyarakat, tetapi kenapa takut mengkritik pemerintah dan juga DPR," katanya.

Laode menyayangkan ketakutan anggota DPD mengkritik pemerintah

hanya karena khawatir tidak mendapat anggaran. Anggota DPD juga tidak cukup hanya menggelar rapat-rapat, tetapi harus turun ke masyarakat. Bila tidak, anggota DPD merasa sudah sibuk tetapi publik sama sekali tidak memahami kesibukannya. Terkait dengan kewenangan DPD yang terbatas, menurut anggota Komisi III DPR, Ahmad Yani, hal itu karena mandat yang diberikan dalam konstitusi memang setengah hati. Saya sebenarnya berharap Ketua DPD lebih mendorong pengembangan DPD. Namun, ternyata lebih tertarik ikut konvensi," katanya.

Yani mengatakan, peran DPD sebenarnya sangatlah penting ” Undang-undang di bidang sumber daya alam, misalnya, sejauh ini menafikan peran-peran daerah. Nah, sebenarnya di situlah peran dari DPD," ujarnya.

Pengamat politik Yudi Latif juga mengingatkan peran penting DPD."Kehadiran DPD sebenarnya mengingatkan keterwakilan pada ruang tidak hanya pada orang. Apalagi bila keterwakilan hanya didasarkan pada orang, Indonesia hanya akan diperintah orang-orang Jawa," ujarnya. Namun, ditegaskan Yudi, dalam sembilan tahun kiprahnya ternyata DPD seolah tiada. Lucunya, butuh dukungan besar untuk menjadi anggota DPD, tetapi kewenangannya nyaris tiada, katanya.

Yani menambahkan, bila ingin serius menguatkan peran DPD, seharusnya DPD berhasrat kuat untuk ikut membahas undang-undang tertentu. Juga sesekali menveto pembahasan suatu undang-undang tertentu," katanya. (Sumber: Kompas)

Setelah membaca teks studi kasus di atas, pada intinya para tokoh di atas sepakat bagaimana meningkatkan peran DPD yang lebih besar dan kompetensi masing-masing anggota, agar mampu memberikan kontribusi yang lebih strategis dalam konteks pembangunan wilayah di Indonesia.

Untuk menambah pengembangan pemikiran dan pendalaman materi studi kasus disampaikan beberapa pertanyaan di bawah ini.

1. Jika dalam kontitusi negara secara sengaja kurang memberikan peran yang signifikan terhadap lembaga DPD, apa sebenarnya motif pemikiran yang ada pada para anggota MPR/DPR hasil pemilu tahun 1999 yang membuat amandemen UUD 1945, mendirikan lembaga baru ini jika memang lembaga DPR tidak mau tersaingi adanya DPD ini?
2. Dalam pemberitaan di media massa lembaga DPD sering dianalogikan atau disamakan dengan "Senat" seperti di Amerika Serikat, bagaimana perbandingan antara Senat di Amerika Serikat tersebut dengan DPD di Indonesia dan apa urgensinya bagi kepentingan masyarakat Indonesia?

3. Apabila para anggota DPD telah memiliki peningkatan kompetensinya namun tidak seiring dengan keinginan melakukan perubahan dalam konstitusi tentang peningkatan peran DPD ini, apakah masih efektif kedudukan DPD?
4. Sejauh mana pemahaman para elit politik di Indonesia terhadap upaya peningkatan peran DPD dalam hal ikut melakukan pembahasan perundangan tertentu dan melakukan veto dalam pembahasan undang-undang tertentu?
5. Jika terbesit keeangganan para elit politik yang duduk sebagai anggota MPR/DPR untuk memberikan peran yang lebih kepada DPD, sebagaimana yang didiskusikan di atas, apa sebaiknya DPD dibubarkan sekaligus dengan keinginan para tokoh masyarakat yang akan berjuang mengamandemen kembali UUD 1945?

## 4.7 POLITIK UANG MENCIDERAI DEMOKRASI

Praktek demokrasi di Indonesia pada masa era reformasi telah banyak dibahas dan diteliti oleh berbagai kalangan akedemisi dan praktisi. Ketertarikan mereka terhadap demokrasi di Indonesia yang berpenduduk 230 juta orang lebih, seolah terkesima oleh keunggulan demokrasi dalam masyarakat yang majemuk berjalan tanpa konflik yang massif. Pelaksanaan demokrasi telah berjalan melalui pemilu legeslatif mulai tahun 1999, 2004, 2009 dan tahun 2014. Sedang pemilu presiden dan kepala daerah dimulai sejak pemilu 2004 dan 2009 sampai dengan pemilihan umum tahun 2014. Setelah proses demokrasi berjalan selama ini, menurut penilaian berbagai kalangan masyarakat belum memenuhi harapan masyarakat, terutama terkait dengan perbaikan ekonomi, penegakan hukum dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Jika dicermati Kekecewaan masyarakat dan juga berbagai kalangan bahwa praktek demokrasi langsung ditengarai banyak hal yang bersifat anomali. Misalnya pertama; hasil pemilukada ternyata sebanyak 318 kepala daerah terlibat korupsi. Kedua; konflik horizontal sering terjadi.Ketiga; kepala daerah yang terpilih banyak yang tidak memiliki kompetensi bidang manajemen pemerintahan. Keempat; sering timbul ketegangan antara Bupati/Walikota dengan Gubernurnya dan juga dengan pemerintah pusat. Kelima; merebaknya politik uang. Ekses negatif demokrasi langsung tentang ”merebaknya politik uang” yang menciderai demokrasi akan dibahas khusus dan mendalam di bawah ini.

### 4.7.1 Impian Tentang Demokrasi

Ketika era reformasi telah berhasil diwujudkan melalui perjuangan para aktifis dan reformis yang tidak pernah mengenal lelah selama bertahun-tahun, akhirnya dengan diledakan melalui “krisis moneter” oleh para pialang barat melalui agennya yang canggih di Singapura, mampu memicu kehancuran rezim orde baru yang otoriter dan korup. Idealisme para reformis pada waktu itu bahwa cita-cita reformasi adalah membangun tatanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilandasi semangat “demokrasi” yakni lebih terbuka, terkontrol, dinamis dan penuh dengan rasa solidaritas serta memegang teguh etika dan moral. Para elit politik dan tokoh reformasi telah berhasil menata kehidupan politik melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan beberapa paket undang-undang bidang politik yang dirancang sedapat mungkin sudah memenuhi norma, nilai, kriteria dan standard dan prosedur “demokrasi”. Konsolidasi kekuasaan juga telah dilakukan melalui media infrastruktur politik dan supra struktur politik, menuju pada titik keseimbangan stabilitas politik yang relatif mapan dan mantap. Bahkan selama era reformasi bangsa Indonesia mampu menyelenggarakan “pemilu” dari tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014 mampu

dilaksanakan dengan aman, lancar, terkendali dan demokratis. Demikian pula sesuai amanat undang-undang dasar bahwa memilih presiden dan wakil presiden melalui mekanisme demokrasi, maka sejak tahun 2004, 2009 dan 2014 presiden dan wakil presiden telah terpilih dengan menggunakan model "demokrasi langsung" *(direct democracy)*.

Gelombang besar proses demokratisasi di Indonesia yang mampu mencakup dua ratus juta lebih penduduk, dengan model "demokrasi langsung", memang membuat decak kagum negara-negara barat dan negara tetangga Asia. Oleh sebab itu negara berkembang yang telah menerapkan ide demokrasi seakan bermimpi melalui demokrasi maka kehidupan rakyatnya makmur dan sejahtera seperti di negara-negara barat akan segera terwujud.

### 4.7.2 Impor Demokrasi dari Amerika Serikat

Gambaran normatif tersebut di atas tentang proses pembangunan sistem politik demokrasi seratus persen mengadopsi model barat yaitu impor dari Amerika Serikat. Penerapan demokrasi langsung sebagaimana diuraikan di atas menimbulkan anomali maka mencoba memahami demokrasi langsung tidak hanya pada aspek formalitas saja yang bisa menyesatkan, akan tetapi harus dilakukan evaluasi dengan fakta empiris berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dalam proses kehidupan politik di Indonesia. Fenomena yang terjadi seperti digambarkan di atas, boleh jadi para elit politik mungkin menyadari atau tidak menyadari bahwa implikasi "proses demokratisasi" yang berjalan dengan tempo cepat namun kurang didukung landasan yang paling fundamental membawa implikasi yang mematikan. Landasan fundamental tersebut antara lain; "norma, nilai, moral dan prosedur" serta kurangnya dukungan *rule of law and law of enforcement*. Kurangnya sosialisasi politik tentang nilai-nilai di atas menyebabkan proses demokratisasi terciderai. Implikasi terhadap proses demokratisasi di Indonesia pada era reformasi seperti disebutkan di atas *pertama;* munculnya gejala di tengah masyarakat sikap pragmatisme melalui politik uang, *kedua;* cenderung secara massif konflik horizontal, *ketiga;* sikap apatis dan antipati masyarakat terhadap partai politik, *keempat;* munculnya para elit politik dadakan yang berlatar belakang pengusaha, pengacara, profesional yang kurang berbasis massa, *kelima;* para politisi dari anggota DPR/D banyak yang tersangkut korupsi.

Sebagaimana dijelaskan di atas, pembangunan dan desain politik demokrasi di Indonesia mungkin para pembuat undang-undang bidang politik tidak akan menyangka bahwa muara dari sebuah proses politik terbilang sangat rumit dan mahal serta seluruh proses politik syarat dengan uang. Dengan demikian kondisi dan situasi dalam kehidupan politik di Indonesia para pelaku politik akan mengatakan "harga

sebuah demokrasi mahal karena beban biaya politik secara keseluruhan ditanggung pribadi aktor politik, sedang sistem donasi belum berjalan secara kelembagaan.

### 4.7.3 Demokrasi yang Rumit dan Mahal

Jika kita mencoba mengurai mulai dari pendirian partai politik, pencalonan menjadi anggota legislatif sampai dengan pencalonan menjadi Presiden, Gubernur, dan Bupati/ Walikota, semuanya memerlukan biaya yang besar dari mulai miliaran rupiah, puluhan dan ratusan bahkan mungkin triliunan. Persoalannya jika keseluruhan proses politik tersebut dikelola secara organisasional minded, mungkin bagi para anggota dan kader akan terasa lebih ringan. Akan tetapi trend yang yang terjadi justru sebagian besar menjadi tanggung jawab anggota atau kader, tergantung posisi mana yang diinginkan oleh kader. Menjadi anggota legislatif dan pejabat publik saat ini bukan atas dasar penugasan dari partai politik dan juga bukan berdasarkan pada pola karier yang jelas dan teratur. Padahal suatu organisasi partai modern yaitu penerapan merit sistem merupakan keniscayaan bahwa sistem tersebut dilaksanakan dengan baik. Namun secara empiris menjadi pengurus partai politik bukan atas dasar kompetensi dan integritas melainkan seberapa besar sesorang akan menjadi politisi tergantung dari investasi yang ditanamkan kepada partai politik. Oleh sebab itu fenomena yang terjadi dewasa ini para elit yang memiliki uang banyak berbondong-bondong masuk partai politik melalui pintu sebagai anggota legislatif (DPR/DPRD) atau sebagai pejabat publik mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati, dan walikota. Mereka kebanyakan terdiri dari para pengusaha, *lawyer*, dan artis serta mantan birokrat dan purnawirawan TNI/Polri yang berduit. Konsekuensi dari desain dan skenario proses politik tersebut muncul beberapa fenomena di atas yang sebagian telah diuraikan di atas dan pada kesempatan ini dijelaskan kembali sebagai berkut:

**4.7.3.1**. Dengan sistem pemilu yang saat ini berjalan terbilang rumit yaitu antara lain; masuk arena kekuasaan sebagai anggota "legislatif" atau menjadi "pejabat publik", hanya orang yang punya cukup uang, untukmembiayai proses pencalonan yang memerlukan dana miliaran rupiah sebagai calon anggota legislatif pusat dan daerah. Apalagi untuk menjadi pejabat negara/publik dalam pencalonan sebagai Gubernur atau Bupati/Walikota, misalnya untuk mendapat dukungan salah satu partai politik atau beberapa partai politik harus dengan biaya tertentu. Kemudian kebutuhan biaya kampanye pemilu sampai dengan selesai perhitungan suara, sudah dipastikan mengeluarkan biaya yang lebih besar. Apabila para calon anggota legislatif maupun calon Gubernur/Bupati/Walikota, sosoknya sudah popular kemungkinan relatif pengeluaran lebih rendah, akan tetapi bagi yang belum dikenal sudah dapat dipastikan

akan mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar. Oleh sebab itu hanya orang yang kaya atau memiliki cukup dana yang dibutuhkan tersebut di atas kemungkinan bisa masuk arena kekuasaan baik di legislatif maupun eksekutif. Dengan demikian pada masa yang akan datang posisi atau kedudukan pejabat negara di legislatif dan eksekutif hanya akan dijabat orang kaya, yang sangat mungkin kurang memiliki kompetensi di bidang manajemen pemerintahan. Tidak hanya para pejabat negara yang kaya tetapi juga kemungkinan di legeslatif hasil pemilihan umum tahun 2014 diisi oleh para anggota legeslatif yang memiliki pertalian darah dengan presiden atau mantan presiden, gubernur dan bupati/walikota. Dengan demikian sistem pemilihan umum campuran antara sistem proporsional terdaftar dengan sistem distrik, telah menghasilkan profil pejabat negara dari kalangan elit dan orang kaya dan kemungkinan juga kalangan bangsawan lokal. Ciri-ciri negara yang para pejabatnya diisi oleh orang kaya dan para bangsawan dalam teori politik disebut sebagai negara "*oligarchi* atau *theokrasi*".

**4.7.3.2.** Terkait dengan butir satu di atas, yang mempunyai kesempatan besar memasuki arena kekuasaan, berdasarkan hasil pemilu tahun 1999, 2004, 2009 dan tahun 2014 pada umumnya mereka itu sebagian besar dari kalangan "pengusaha, artis, para birokrat" kaya dan pengacara *(lawyer)* memasuki dunia politik. Secara empiris mereka pada umumnya memasuki dunia politik bukan atas dasar visi dan misi ideologi politik yang ingin diperjuangkan. Akan tetapi sebagian besar bisa diduga lebih cenderung orientasi nilai-nilai yang bersifat pragmatis dengan latar belakang sifat ambisius, *avonturir* dan frustasi. Seiring dengan pernyataan di atas, trend dimasa yang akan datang masuk dunia politik pada umumnya diminati di samping para pengusaha, juga diminati pula oleh para artis dan mantan preman yang sukses menjadi orang kaya baru (OKB). Adapun kalangan birokrat, militer, ulama, kalangan profesional relatif lebih sedikit karena tidak memiliki dana yang cukup untuk memasuki dunia politik tersebut. Padahal kalangan birokrasi, militer, profesional, ulama yang memiliki integritas moral, kompetensi di bidang pemerintahaan dan profesional di bidang teknis bisa melengkapi kelemahan para politisi yang berlatar belakang pengusaha, artis dan *lawyer*.

**4.7.3.3.** Situasi dan kondisi para politisi saat ini cenderung berhaluan ideologi pragmastisme. Pada umumnya sifat pragmatis mengindahkan nilai ideologis dan kurang militan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Tetapi lebih mementingkan kelompok partainya bahkan tidak sedikit yang mementingkan dirinya sendiri. Perjuangan mereka lebih bersifat transaksional seperti memanfaatkan peluang transaksional dalam proses legislasi misalnya menyusun dan membahas

RUU, persetujuan anggaran dan pelaksanaan pengawasan. Oleh sebab itu ketika BIN menyampaikan informasi secara terbuka kepada media massa (Rakyat Merdeka) pada bulan Mei tahun 2010, membuat pernyataan yang mengejutkan bahwa terdapat 73 undang-undang pesanan asing. Berdasarkan informasi tersebut mencerminkan anggota dewan dalam melaksanakan tugas di bidang legislasi sudah dipengaruhi oleh pihak tertentu atau kelompok tertentu bahkan pihak asing. Kecenderungan pragmatisme tersebut sudah bisa dipastikan didorong oleh "motif ekonomi". Pada gilirannya kepentingan rakyat banyak boleh jadi bukan acuan utama dalam mereka bekerja. Sedangkan bagi anggota legislatif yang kritis dan idealis kurang mendapat tempat baik dalam posisi maupun liputan media massa, sedangkan sebagian besar mereka yang lebih bersifat pragmatis lebih berperan pada posisi strategis. Pengaruh yang kuat terhadap para anggota legislatif ketika menyusun undang-undang di bidang ketenagakerjaan misalnya mengenai "*out sourcing*" pada kenyataannya sampai saat ini masih mendapat perlawanan dari kaum buruh melalui demonstrasi besar-besaran. Apabila aparat keamanan lengah bisa timbul tindakan yang cenderung radikal dan anarkis. Peraturan tersebut jika dicermati dengan seksama lebih berorientasi pada kepentingan pengusaha dengan alasan efisiensi tanpa memperdulikan aspek bahwa buruh adalah manusia yang bukan semata mesin atau barang modal. Manusia pada hakekatnya memiliki berbagai motif kebutuhan sesuai dengan dimensi martabat kemanusiannya. Kedudukan buruh atau karyawan sebagai tenaga "*outsourcing*" memiliki posisi yang lemah, apalagi sebagian besar buruh di Indonesia tidak memiliki keahlian sehingga sulit melakukan mobilitas pekerjaan di saat kesempatan kerja yang relatif rendah.

**4.7.3.4.** Ketika mereka memasuki dunia politik baik sebagai ketua partai politik maupun sebagai pejabat publik (anggota legislatif atau Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota), telah menghabiskan biaya yang besar (miliaran s/d ratusan miliar) dan pada dasarnya perilaku politik yang demikian disebut "pragmatisme". Sudah barang tentu cara berpikir seperti itu paradigma yang dibawanya adalah *"return of investiment"*(ROI), artinya cara berpikir mereka setelah menduduki posisi kekuasaan adalah "pengembalian modal". Oleh sebab itu fakta empiris menunjukkan "mereka" yang telah menduduki kekuasaan sebagai; anggota legislatif, Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota dan Wakil, sudah tidak terhitung lagi mereka masuk penjara atau berurusan dengan penegak hukum karena melakukan tindak pidana korupsi. Sebagai contoh dalam tahun 2012 Menteri Dalam Negeri memberikan *press release* bahwa tercatat sejumlah 474 pejabat daerah terjerat kasus korupsi dan separuh (237) diantaranya adalah para Kepala Daerah mulai dari Gubernur dan Bupati/Walikota sebagian besar sudah masuk penjara dan sebagian yang lain masih dalam proses persidangan.

**4.7.3.5.** Sebagian besar Kepala Daerah yang berlatar belakang "pengusaha, politisi, atau aktifis, ketika memasuki dunia politik kebanyakan kurang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang manajemen pemerintahan, sehingga "tata kelola" pemerintahan kurang menunjukkan kinerja yang baik dan optimal dalam memberikan pelayanan publik. Hanya beberapa daerah atau kota yang sukses dalam menjalankan "tata kelola" pemerintahan misalnya; kota Solo, Yogyakarta, Sragen, Jembrana Bali, Kutai Kerta Negara Kaltim, Kota Palembang Sumsel, dan lain-lain. Artinya kurang dari 10% dari sejumlah 493 kabupaten/kota dan 33 provinsi yang meraih sukses dalam menjalankan roda pemerintahan di era reformasi. Artinya bahwa peran partai politik dalam menyiapkan kader atau pola rekruitmen yang dilakukan kurang mempertimbangkan aspek kualitas kader yang memiliki kompetensi di bidang penyelenggaraan pemerintahan. Disamping aspek lainnya seperti integritas, kredibilitas, moralitas dan loyalitas.

### 4.7.4 Politik Uang dalam Praktik Demokrasi

Catatan fenomena tersebut di atas sudah menunjukkan lampu merah dalam satu dasawarsa lebih membangun pemerintahan demokrasi yang kecenderungannya kurang menggembirakan. Oleh sebab itu patut dipertanyakan yaitu apakah "sistem" yang salah atau faktor manusianya yang berada di lingkungan yang salah. Fenomena yang digambarkan di atas bisa dikatakan sebagai anomalisehingga menimbulkan justifikasi masyarakat yang selama ini mempersepsikan terhadap "demokrasi" liberal belum berorientasi terhadap perubahan ekonomi menuju "kesejahteraan rakyat". Peristiwa politik yang dipertontonkan oleh para elite politik membuat masyarakat jenuh dan bosan, serta apatis bahkan menilai "politik adalah kotor". *Trademark* konstelasi arena poltik dewasa ini menjadi "politik adalah uang atau politik serba uang", merupakan fenomena permainan yang sulit dihentikan.

Walaupun implikasi praktek demokrasi menyuburkan politik uang, namun bagi kalangan akademisi sudah dipastikan bahwa secara teoritis sistem politik demokratis dan terutama penerapan model demokrasi langsung secara ideal sudah benar. Adapun memiliki implikasi yang negatif di masyarakat dikarenakan para pelaku politik menjadi faktor kunci dalam di semua lini kekuasaan kurang memiliki sikap konsistensi terhadap norma, standar, dan nilai serta kriteria yang dipersyaratkan demokrasi. Demikian pula pengertian "politik" secara konseptual berkenaan dengan "negara, kekuasaan, kebijakan atau pengambilan keputusan dan alokasi nilai-nilai dalam masyarakat. Untuk itu politik sesungguhnya menyangkut suatu proses penyelenggaraan kekuasaan negara dengan melalui kebijakan dan pengambilan keputusan yang tepat sesuai kehendak masyarakat, dalam rangka mencapai tujuan stabilitas negara yang

mantap, pemerintah yang bersih dan masyarakat yang sejahtera menuju terwujudnya keadilan sosial. Dengan demikian kesenjangan antara teori dengan praktek akan selalu terjadi merupakan suatu kesenjangan. Oleh karena suatu teori dibangun berdasarkan dukungan berbagai variabel yang saling mempengaruhi secara positif dan signifikan. Jika beberapa variabel negatif dan tidak signifikan maka teori tersebut akan gagal diterapkan. Misalnya teori demokrasi gagal diterapkan di Indonesia dikarenakan partisipasi politik rendah, masih ada perlakuan diskriminatif, nilai-nilai sportivitas dan moralitas kurang dijunjung tinggi oleh masyarakat, penegakan hukum lemah, masih kuatnya sikap feodalisme, kuatnya budaya panutan dan lain-lain.

Sebagaimana diuraikan di atas mengenai antara teori dengan praktek demokasi di Indonesia, secara yuridis formal suka atau tidak suka model ”demokrasi liberal” sudah menjadi pilihan. Arena diskusi yang menarik dan terkadang profokatif menilai konsep demokrasi terkadang bersifat *“abrsurd”* dan bahkan mencoba menggugat efektifitas penerapan demokrasi langsung terhadap “pemilukada Gubernur dan Bupati/Walikota”. Seperti diketahui hasil demokrasi yaitu pemimpin yang terpilih sebagian besar kurang memiliki kompetensi di bidang manajemen pemerintahan. Di samping itu dalam praktek demokrasi memerlukan biaya sangat besar dan sarat dengan politik uang. Oleh sebab itu para elit politik baik yang duduk sebagai anggota DPR dan yang di luar parlemen, perlu menganalisis dan mempertimbangkan untuk menata kembali desain sistem politik yang efisien dan efektif melalui penyempurnaan undang-undang politik. Misalnya“pemilu” dengan sistem campuran antara proporsional dan distrik, penerapan demokrasi langsung, sistem multi partai, didukung pembangunan politik yang mampu menumbuhkan partisipasi politik dan budaya politik yang egaliter. Untuk itu kondisi masyarakat harus dipersiapkan dengan tepat sesuai dengan prasyarat dan kriteria demokrasi. Supaya dampak negatif yang saat ini sudah berlangsung yaitu; fenomena politik uang, korupsi para kepala daerah dan politisi berorientasi terhadap transaksional kekuasaan, konflik antar lembaga politik, konflik horizontal, tidak akan terjadi. Jika dampak negatif meluas dan sulit dikendalikan merupakan sinyal lampu kuning menuju kehancuran kehidupan ketatanegaraan dan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Pembahasan “politik uang” sebagaimana diuraikan di atas, dalam konteks membangun penyelenggaraan pemerintahan demokrasi, membutuhkan kajian yang mendalam faktor-faktor yang menjadi penyebab maraknya praktek “politik uang atau politik serba uang”. Variabel-variabel yang mempengaruhi antara lain; sistem pemilu, sistem kepartaian, partisipasi politik, budaya politik, pendidikan politik masyarakat, dan lain-lain. Variabel seperti yang disebutkan di atas perlu dilakukan kajian seberapa jauh mempengaruhi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan

demikian jika pelaksanaan demokrasi langsung yang sudah berjalan lima belas tahun, penyelenggaraan praktek demokrasi di Indonesia perlu kajian yang mendalam agar landasan teori dan konsep demokrasi yang diterapkan di Indonesia dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Oleh sebab itu upaya untuk mencoba melakukan kajian topik ”politik uang menciderai demokrasi” dilakukan melalui pendekatan perbandingan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Penjelasan tentang ”demokrasi langsung” sudah dianalisis secara mendalam, dengan kesimpulan sementara bahwa demokrasi langsung lebih besar membawa ekses negatif dan cenderung massif ketimbang manfaatnya. Namun bukan berarti ”teori demokrasi langsung” itu merupakan kekeliruan secara konseptual, akan tetapi ”teori demokrasi” belum didukung oleh kebenaran secara empiristik. Sedangkan ”demokrasi perwakilan” yang sudah 6 (enam) dasa warsa dipraktekan mulai era orde lama, orde baru dan orde reformasi sebelum amandemen UUD 1945, memiliki beberapa catatan penting terhadap ”demokrasi perwakilan” yaitu *pertama;* dinilai lebih efisien dan efektif dalam hal proses pelaksanaan pemilihan para pejabat publik/kepala daerah. *Kedua;* pelaksanaannya cenderung dengan biaya yang realtif lebih rendah. *Ketiga;* dampak konflik horizontal jauh lebih kecil. *Keempat;* Demokrasi perwakilan merupakan konsep demokrasi seiring dengan sila keempat Pancasila. *Kelima*; para pemimpin pemerintahan yang terpilih relatif tidak menimbulkan resistensi publik dengan risiko politik yang relatif lebih kecil. Walaupun teori demokrasi perwakilan juga sama ketika diterapkan di Indonesia belum didukung oleh kebenaran empiristiknya. Oleh sebab itu, pilihan sulit yang menjadi kondisi dilematis dalam arah politik masa depan negara dan bangsa Indonesia. Sebab kedua model demokrasi tersebut sudah sama-sama dipraktekkan dan hasilnya kedua model tersebut “belum memuaskan” masyarakat dalam menjaring para pemimpin mulai dari pimpinan nasional, regional, dan daerah. Sesuai kajian yang diuraikan di atas, faktor yang dominan antara lain: pertama; peran dan fungsi partai politik yang belum optimal, kedua; partisipasi politik yang rendah, ketiga; budaya politik yang masih primordial, keempat; perubahan sosial yang cenderung praktis dan pragmatis. Dengan demikian pembangunan politik harus mampu mewujudkan eksistensi partai politik dalam menjalankan peran dan fungsinya yang benar, didukung oleh partisipasi politik yang tinggi dari masyarakat serta budaya politik yang egaliter dan nilai-nilai masyarakat yang berorientasi pada kepentingan bersama dan solidaritas masyarakat yang kuat. Jika kondisi tersebut dapat sukses dibangun dengan landasan yang kuat maka untuk mempraktekkan baik model demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan niscaya akan mampu menjaring pemimpin pemerintahan yang handal dan negarawan, pemimpin yang tegas dan berani.

### 4.7.5 Mempertanyakan Eksistensi Demokrasi

Seperti diketahui bersama bahwa negara modern di dunia hampir seluruhnya dalam penyelenggaraan kekuasaan negara menerapkan demokrasi, kecuali beberapa negara komunis seperti Cina, Kuba, dan Cile.

Negara-negara yang menganut faham demokrasi tersebut membawa implikasi yang cukup beragam terhadap kehidupan terutama ekonomi dan sosial budaya. Di Negara Eropa, Amerika Serikat, Inggris dan Jerman yang telah lebih dulu menerapkan demokrasi, mengalami kemajuan ekonomi yang mampu memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya. Demikian pula di beberapa negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Malaysia. Namun di negara-negara berkembang lainnya seperti Amerika Latin, Afrika, Indonesia, Philipina, dan Thailand belum secara signifikan mampu membawa ke arah kemajuan ekonomi yang lebih sejahtera secara merata.

Ketika Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945, dalam penyelenggaraan kekuasaan negara telah menetapkan demokrasi dalam sistem pemerintahan yang telah dijalankan. Dalam perjalanan perkembangan demokrasi, meskipun telah berganti beberapa rezim pemerintahan, masih tetap setiap mengawal eksistensi demokrasi selama 6 (enam) dasawarsa sampai dengan saat ini. Artinya demokrasi sebagai suatu sistem dalam kehidupan politik pemerintahan dipersepsikan sebagai obat mujarab untuk mengatasi berbagai persoalan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara dalam mencapai cita-cita kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Model demokrasi yang dianut Indonesia merupakan model yang di impor dari Amerika Serikat. Di negara asalnya demokrasi berhasil membuat sejahtera rakyatnya dalam kurun waktu yang cukup lama. Meskipun saat ini Amerika Serikat sedang mengalami krisis ekonomi. Namun sebagai kampiun demokrasi orientasi politik luar negeri sering menggunakan standar ganda. Bagi negara-negara yang menjadi sasaran kepentingan ekonomi maupun ideologi, maka "demokrasi" tidak lagi menjadi haluan politiknya. Kehancuran negara seperti Irak dan Afganistan merupakan hasil invasi dan penyerbuan Amerika Serikat.

Penjelasan di atas senada dengan pemikiran yang disampaikan William Blum (2013) dalam bukunya *America's Deadliest Export Democracy; The Truth About Us Forreign Policy and Everything Else*, mengatakan; "Ambisi Washington untuk mendominasi dunia bukan didorong oleh tujuan untuk membangun demokrasi yang mendalam ataupun kebebasan, dunia yang lebih adil, menghentikan kemiskinan atau kekerasan, atau planet yang lebih layak untuk dihuni, melainkan lebih karena ekonomi dan ideologi".

Selanjutnya Blum (2013) mengatakan dengan mengutip catatan "Michael Parenti menjelaskan bahwa,"Tujuan tersebut tidak hanya demi kekuasaan saja, tetapi kekuasaan untuk menjamin kontrol plutokrasi atas planet, kekuasaan untuk memprivatisasi dan menderegulasi perekonomian setiap negara di dunia untuk menunggangi punggung orang di mana-mana, termasuk orang di Amerika Utara, berkah dari pasar bebas, kapitalisme korporasi yang tidak terbatas. Pertarungannya ada di antara mereka yang percaya bahwa tanah, tenaga kerja, modal, teknologi, dan pasar devisa harus harus didedikasikan untuk memaksimalkan akumulasi modal bagi segelintir orang dan mereka yang percaya bahwa hal-hal tersebut harus digunakan untuk keuntungan bersama dan pembangunan sosial ekonomi bagi orang banyak".

Trend atau kecenderungan praktek demokrasi yang diusung Amerika Serikat sebagaimana telah dikutip di atas semakin dipahami dan dipercaya bahwa dibalik mendorong agar dunia ketiga atau negara berkembang melaksanakan konsep demokrasi bahkan dengan cara memaksa sesungguhnya semata-mata untuk mengambil kepentingan "ekonomi dan ideologi" negara paman Sam tersebut.

Kepentingan di bidang ekonomi atas nama demokrasi, pemerintah suatu negara harus melakukan privatisasi dan deregulasi perekonomian serta mengikuti arus pasar bebas. Sedangkan di bidang "ideologi" setiap negara harus menerapkan dan membangun masyarakat kapitalisme. Berdasarkan penjelasan di atas maka bangsa ini sudah merasakan bahwa seiring dengan mempraktekkan demokrasi selama 6 (enam) dasawarsa, namun belum mampu membangun kedaulatan politik, kemandirian ekonomi serta karakter bangsa sudah barang tentu berdampak terhadap kesenjangan ekonomi dan semakin jauh dari upaya meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Praktek demokrasi yang gagal mendorong tehadap peningkatan kesejahteraan masyarakat alih-alih justru menimbulkan konflik yang melebar menjadi konflik horizontal semakin massif. Contoh aktual fenomena sejarah kelam demokrasi dipertontonkan dalam televisi dipertengahan tahun 2013 yaitu di Mesir. Seorang presiden Mohamad Moursi yang dipilih secara demokratis, digulingkan oleh junta militer walaupun atas nama masyarakat melalui *people power* yang belum genap berumur 1 (satu) tahun. Apa dan siapa dibalik penggulingan presiden Moursi sesungguhnya sangat mudah dianalisis jika kita menggunakan analisis dari Blum (2013) sebagaimana diuraikan di atas. Apabila dicermati di belakang penggulingan Moursi adalah kelompok liberal, moderat, dan kristen ortodok. Sudah dipastikan ada keterlibatan baik langsung maupun tidak langsung negara barat seperti Amerika Serikat. Urusan penggulingan terhadap pemerintahan yang sah di luar negeri oleh Amerika Serikat bagi Blum (2013) tidak asing lagi. Dalam catatan Blum disebutkan bahwa sejak berakhirnya Perang Dunia II, Amerika Serikat telah:

- Berupaya keras untuk menggulingkan lebih dari 50 pemerintahan luar negeri yang kebanyakan dipilih secara demokratis.
- Secara kotor, ikut campur tangan dalam pemilihan umum di lebih dari 30 negara.
- Mencoba membunuh lebih dari 50 orang pemimpin negara-negara asing.
- Mengebom orang-orang di lebih dari 30 negara.
- Mencoba untuk menekan gerakan rakyat atau nasionalis di 20 negara.

Catatan Blum (2013) menambah informasi dan pemahaman bagi kita bahwa pada kenyataannya penerapan ide negara demokrasi pun tanpa kecuali masih dikendalikan oleh negara-negara maju termasuk AS sebagaimana terjadi di negeri piramid Mesir.

Sesungguhnya Negara Mesir hampir mirip dengan Indonesia, dimana mayoritas penduduk beragama penduduk beragama Islam, akan tetapi pemerintahan tidak berdasarkan agama atau sekuler. Indonesia juga pernah mengalami dominasi kekuasaan militer selama orde baru tahun 1967 s/d 1998. Tergulingnya presiden Moursi yang didukung oleh penduduk Islam dan Ikhwanul Muslimin, bagi analis atau penganut Islam tidak mengherankan dan bahkan sudah menduga kemenangan yang hanya 51% tidak cukup kuat jika kebijakan pemerintahan yang baru mau mengubah konstitusi secara fundamental. Arah kebijakan presiden Moursi yang berbau Islami sudah dipastikan akan mengundang protes kelompok liberal yang didukung oleh kelompok-kelompok lain termasuk kelompok militer. Jika mengikuti jalan pemikiran Blum (2013) di atas sudah tidak diragukan lagi keterlibatan barat terutama Amerika Serikat dibalik penggulingan pemimpin Mesir yang dipilih secara demokratis. Contoh peristiwa tersebut dalam catatan sejarah yaitu di Aljazair, presiden Muhammad Ben Bella yang dipilih melalui pemilu demokratis juga digulingkan.

Fenomena di atas jika dianalogikan kasus di Indonesia barangkali bisa mengungkapkan pada masa era reformasi hasil pemilu tahun 1999 dimana saat itu kekuatan politik "Poros Tengah" yang digagas partai-partai politik Islam mengusung tokoh reformasi yang paling berpengaruh saat itu Amin Rais untuk menjadi presiden pilihan MPR/DPR. Akan tetapi Amin Rais menolak secara halus dengan alasan tidak diijinkan oleh ibundanya. Amin Rais sebagai ahli pengamat internasional sangat memahami arah politik global jika dirinya terpilih menjadi presiden Republik Indonesia saat itu, tidak akan jauh nasibnya dengan presiden Mohamad Moursi, alih-alih bisa jadi sasaran pembunuhan.

Sesungguhnya banyak kalangan menilai bahwa demokrasi sebagai konsep dan teori merupakan pemikiran politik yang tetap lebih baik jika dibandingkan dengan sistem *monarchi* maupun *oligarchi*. Contoh konsep "demokrasi substansial (Heyness, 1997) memberikan pemahaman bahwa "demokrasi" tidak hanya berhenti pada wilayah

politik atau kekuasaan melainkan memiliki dimensi yang lebih luas yaitu "demokrasi sosial dan demokrasi ekonomi. Artinya ketika konsolidasi demokrasi sudah mapan maka mengalir terhadap kehidupan sosial mewujudkan solidaritas masyarakat dan partisipasi politik masyarakat serta tumbuh budaya politik yang egaliter. Demikian pula demokrasi ekonomi mampu digerakan oleh kekuasaan demokrasi dengan mewujudkan distribusi kekuasaan ekonomi terhadap semua lapisan masyarakat secara adil dan merata. Adapun demokrasi model Robert Dahl (1982) adalah demokrasi yang mampu membangun nilai-nilai demokrasi yaitu nilai-nilai persamaan, partisipasi, akuntabilitas publik dan transparansi, kontrol masyarakat terhadap agenda pemerintah. Demikian pula Antony Gidden memilih jalan tengah yaitu yang disebut "demokrasi sosial". Artinya bahwa proses demokratisasi tidak hanya berhenti pada wilayah politik yaitu bagi-bagi kekuasaan dan ekonomi yaitu melibatkan semua lapisan masyarakat dalam mengelola ekonomi namun juga di wilayah sosial yaitu terwujudnya solidaritas social, hubungan antar manusia yang lebih egaliter dan akses politik dan ekonomi yang merata di semua lapisan masyarakat.

Oleh sebab itu berdasarkan penjelasan di atas manakala konsep dan teori Heyness, Dahl dan Antony Gidden menjadi referensi dalam memantapkan eksistensi demokrasi di Indonesia, niscaya demokrasi akan menemukan jati dirinya sebagai acuan dan pedoman kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa menuju integrasi nasional yang kuat, solidaritas masyarakat yang mantap serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

## STUDI KASUS 7

Kajian politik uang menciderai demokrasi telah dibahas secara mendalam sebagaimana diuraikan di atas, pada intinya politik uang dan mahalnya biaya politik terjadi terkait banyak persoalan yang dihadapi masyarakat. Kondisi masyarakat saat ini yang tengah menghadapi berbagai persoalan misalnya; pergeseran nilai gotong-royong ke nilai pragmatis, sikap apolitik masyakat akibat sisa kebijakan *floating* massa, partisipasi politik yang rendah digantikan oleh mobilisasi, dan lain-lain. Kondisi politik yang serba uang mengakibatkan efek domino yang terus terjadi misalnya pasca pemilu banyak caleg yang terlilit hutang. Untuk mendiskusikan topik di atas maka studi kasus yang dipilih yaitu "pasca pemilu banyak caleg yang terlilit hutang". Materi studi kasus diambil dari media massa yang memuat hasil wawancara dengan mantan Kepala PPATK Yunus Husein dan Marwan Djafar anggota DPR Fraksi PKB serta Arwani Thomafi dari PPP. Ketiga tokoh menceritakan bahwa banyak caleg yang mengalami stres berat karena pasca pemilu tidak sanggup membayar hutang di Bank, sehingga terjadi *non-performance loan*. Bahkan ada beberapa Bank yang bangkrut pasca pemilu

seperti Bank Bali tahun 2004 dan Bank Century tahun 2008. Untuk mendalami studi kasus ini dapat dibaca pada kutipan berita media massa di bawah ini.

## Pasca Pemilu Banyak Caleg Terlilit Hutang

*JAKARTA, RAKYAT MERDEKA Kamis 3 Oktober 2013*

**Mahalnya ongkos politik mengharuskan caleg rela utang di Bank. Akibatnya pasca pemilu banyak caleg yang terbelit utang.**

Fenomena banyak calon legislatif (caleg) yang terbelit utang, pasca hajatan pemilu legislatif, diungkapkan bekas Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein.Para caleg yang terbelit utang, biasanya adalah anggota caleg yang gagal menjadi angota parlemen.

Tidak sedikit caleg partai politik mencari dana kampanye dari perbankan. Karena mereka belum tentu terpilih, akhirnya ada yang tidak bisa melunasi kreditnya, kata Yunus di Jakarta. Pasca musim pemilu banyak bank mengalami persoalan nasabah yang gagal membayar pinjaman (*non-performance loan*).

Kasus yang mengganggu kesehatan perbankan ini melibatkan pula kejahatan kerah putih. PPATK dimasa kepemimpinannya, kata Yunus, mencatat banyaknya kepentingan memainkan pinjaman, dengan menekan direksi bank. Termasuk juga kejahatan perbankan seperti penggelapan, sampai pemalsuan kredit memang meningkat menjelang pemilu.

Ironisnya lanjut Husein ada fenomena lain yang terjadi di mana setiap pemilu ada bank yang mengalami masalah dan akhirnya bangkrut. Kasus itu misalnya Bank Bali pada 2004, lantas Bank Century pada 2008.

Yunus memastikan, aliran dana tidak wajar maupun pinjaman yang bermasalah memang selalu terlacak jelang pemilu. Hal itu pun sempat merepotkan Badan Penyehatan Perbakan Nasional (BPPN).

Misalnya pada waktu Bank Bali dan kasus Bank BNI 2003-2004, indikasinya ada yang cari-cari masalah, lantas tagihanya nyangkut di BPPN, ungkap pria yang kini menjadi Direktur Analisis Sumber Daya Manusia Bank Indonesia ini.

Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arwani Thomafi mengatakan banyak politisi periode 2009-2014 yang kesulitan membayar utang kampanye pemilu lantaran pengelolaan kampanye yang tidak baik. Mereka jorjoran mengeluarkan dana agar bisa terpilih. Padahal tidak sedikit dana yang dihabiskan para caleg ini di dapat dari pinjaman.

Caleg jadi saja ada yang mengalami kesulitan bayar utang. Gaji yang diterima langsung dipotong bank. Apalagi caleg yang tidak terpilih. Banyak utang tidak bisa bayar cicilan. Banyak caleg gagal yang stress" katanya.

Arwani mengatakan, partainya juga berkepentingan pengaturan belanja kampanye. Dia sangat mendukung peraturan KPU soal pembatasan dana kampanye, selama konsepnya jelas dan

tidak menyulitkan caleg. Misalnya, harus dibedakan nomimal maksimal biaya kampanye di tiap dapil, mengingat cakupan wilayah setiap dapil itu berbeda-beda.

"Transportasi di dapil Jakarta pakai mobil sudah bisa mobilitas. Di dapil saya (Jawa Tengah III) harus naik pesawat, sewa mobil. Apalagi di kawasan timur harus transit dulu, naik kapal," tutur anggota Komisi V DPR ini.

Marwan Jafar, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bahkan mempelopori Gerakan Indonesia Untuk Pemilu Bersih. Dia prihatin dengan kondisi pemilu sekarang, dimana visi dan misi calaeg tak lagi dianggap penting. Banyak caleg bahkan lebih senang menabur uang ketimbang menyodorkan visi-misi.

Setelah mempelajari kasus di atas tentunya dapat menjadi inspirasi guna mengembangkan pemikiran tentang bagaimana implementasi konsep demokrasi yang efektif dan tepat sasaran. Sebab kasus di atas merupakan ekses praktek demokrasi yang cukup memilukan bagi masyarakat. Oleh sebab itu untuk mencari solusi terbaik masih diperlukan diskusi melalui pengantar pertanyaan yang diajukan di bawah ini.

1. Sejauhmana hubungan antara rendahnya partisipasi politik dan sikap apolitik masyarakat dengan merebaknya politik uang dan mahalnya biaya politik?
2. Apakah sudah menjadi keniscayaan dalam fatsun politik di Indonesia bahwa partai politik membiarkan kader partainya memenuhi sendiri biaya politik termasuk politik uang dalam menghadapi realitas politik pada setiap penyelengaraan pemilu?
3. Sejauh mana manajemen partai politik menghadapi terjadinya politik uang dan mahalnya biaya politik dalam setiap kegiatan politik?
4. Mengapa dan motif apa masyarakat atau kader partai politik memaksakan diri sebagai caleg walaupun mengetahui adanya politik uang dan biaya politik yang besar sampai melakukan pinjaman uang di Bank untuk biaya kegiatan politik tersebut?
5. Apa kebijakan pemerintah mengatasi merebaknya politik uang dan biaya politik yang mahal, terkait dengan kemungkinan tidak digunakannya alokasi anggaran tahun 2014 untuk saksi di TPS, yang diperlukan oleh para caleg guna mengurangi biaya politik?.
6. Bagaimana nasib demokrasi ke depan jika politik uang dan biaya politik yang besar masih terus berlangsung? Apakah sistem politik dan manajemen partai politik yang salah?

## 4.8 FENOMENA RONTOKNYA KEKUATAN PARTAI POLITIK ISLAM

Indonesia terkenal dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia seharusnya memiliki partai politik yang besar dengan pendukung umat Islam yang signifikan. Pada masa orde lama peta perpolitikan tahun 1945 sampai dengan 1966, kekuatan politik umat Islam yang disalurkan melalui Partai Masyumi, Partai NU, PSII dan PERTI mencapai 43,7%. Dalam perkembangan politik mulai era orde baru pada pemilu tahun 1977 tergabung dalam PPP memperoleh 29,1% dan era reformasi kekuatan partai politik berbasis massa Islam pada pemilu tahun 1999 memperoleh 35,5%, pada pemilu 2004 naik menjadi 37,5%, namun pada pemilu 2009 menurun tajam menjadi 24,15%. Menghadapi pemilu tahun 2014 banyak pakar politik memberikan prediksi perolehan partai politik yang mengusung ideologi Islam mengalami penurunan di bawah 20%. Namun hasil pemilihan umum tahun 2014 cukup mengejutkan perolehan suaranya meningkat menjadi 30% lebih. Kontribusi peningkatan suara dari PKB sebesar 4%, PAN sebesar 1% lebih dan PPP 1% lebih, tetapi di lain pihak yang mengalami penurunan yaitu PKS sebesar 1% dan PBB hanya 1,5% tidak lolos persyaratan *electoral parlementary threshold*.

Pada hakekatnya jika kekuatan politik Islam melemah di lembaga politik formal, maka aspirasi politik umat Islam sudah dipastikan tidak akan tersalurkan. Perjuangan politik umat Islam melalui partai nasionalis sekuler maupun nasionalis religius, akan mengalami kesulitan dalam melakuakn artikulasi dan agregasi kepentingan umat Islam dan bahkan tenaga dan pikiran akan sia-sia belaka. Oleh sebab itu menarik untuk melakukan kajian kecenderungan melemahnya daya tawar kekuatan partai politik Islam dalam sistem politik di Indonesia. Seperti diketahui bersama dalam menghadapi pemilihan presiden tahun 2014 kekuatan partai politik Islam sebesar 30% tidak dimanfaatkan untuk mengajukan calon presiden dari kalangan partai politik Islam atau dukungan terhadap calon diluar partai politik yang menjadi pilihan partai-partai politik Islam. Padahal jika partai-partai politik Islam bersatu mampu mengusung calon presiden sendiri. Dengan demikian jika partai-partai politik Islam bersatu maka pertarungan dalam pemilihan presiden akan menjadi tiga yang masing-masing memiliki kekuatan suara berimbang. Ketiga kubu secara ideologis yaitu dari kubu nasionalis sekuler, nasionalis sosio demokarasi atau nasionalis religius dengan nasionalis Islam. Akan tetapi secara empiristik kekuatan partai politik islam tidak berhasil menyatukan partai politik Islam dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden. Oleh sebab itu kekuatan partai politik Islam terbelah dengan munculnya hanya dua (2) kandidat Presiden dan wakil presiden yaitu Prabowo-Hatta yang didukung oleh PPP, PAN, PKS dan PBB sedang pasangan Jokowi-JK didukung oleh PKB. Terbelahnya kekuatan partai politik Islam bukan karena perbedaan ideologis tetapi semata-mata

karena pernbedaan kepentingan yang bersifat pragmatis. Kegagalan para tokoh elit politik umat Islam untuk mempersatukan partai politik Islam merupakan pertanda semakin melemahnya perjuangan yang dilakukan selama ini. Untuk itu yang dimaksud dengan rontoknya kekuatan partai politik Islam adalah ketidakmampuan para elit politik Islam dalam mempersatukan partai politik Islam. Demikian pula lemahnya daya tawar partai politik Islam terhadap aspirasi dan agregasi kepentingan umat Islam terutama perjuangan kemaslahatan umat yang masih banyak berada di bawah garis kemiskinan dan kebodohan.

### 4.8.1 Kekuatan Politik Islam

Topik di atas menjadi bagian dari analisis terhadap potret buram politik Indonesia, dengan pertimbangan bahwa penduduk Indonesia yang berjumlah 240 juta dengan 80% lebih adalah umat Islam. Meskipun mayoritas penduduk beragama Islam akan tetapi dukungan terhadap partai Islam politik justru cenderung menurun mulai sejak orde baru dan orde reformasi seperti disebutkan di atas. Walaupun Indonesia bukan Negara Islam dan lebih cenderung sekuler, namun pada masa orde lama partai politik Islam cukup memilki kekuatan yang signifikan di bawah Partai Masyumi dan Partai NU, mendapatkan hampir 40% dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia mayoritas berpenduduk Islam terbesar di dunia dan sebagian besar penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan beragama Islam maka jika kekuatan politik yang menguasai pemerintahan dari partai politik Islam sudah barang tentu berorientasi pada upaya pengentasan kemiskinan bisa sukses niscaya mayoritas penduduk muslim akan sejahtera. Dengan demikian jika kesejahteraan ekonomi masyarakat lebih meningkat dipastikan stabilitas politik akan bertambah mantap. Demikian pula jika penduduk miskin yang sebagian besar muslim ikut menikmati hasil pembangunan ekonomi sehingga meningkatkan kesejahteraannya, dipastikan para generasi muda tidak akan mudah tergoda oleh ajakan para petualang organisasi terorisme yang berkembang di Indonesia. Perburuan terorisme di Indonesia terus berlangsung selama sepuluh tahun lebih belum ada tanda-tanda berakhir. Meskipun para tokoh dan gembong teroris dianggap kaliber dunia dan ditakuti oleh negara Paman Sam sudah ditembak mati. Bahkan perburuan terorisme pada tahun 2013 sudah dinisbatkan sebagai terorisme generasi baru. Apa hubungan antara Islam dengan terorisme di Indonesia bermula dari peristiwa pengeboman di menara kembar *World Trade Center* (WTC) di Washington DC. Pelakunya diduga dari kelompok Al Qaida pimpinan Osama Bin Laden. Sejak peristiwa tersebut maka perburuan terhadap Osama Bin Laden dan pengikutnya dilakukan ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. Oleh sebab itu terorisme yang tertangkap di Indonesia selalu teridentifikasi dari kalangan aktivis Islam dan dari pesantren tertentu. Sehingga sampai dengan saat ini,

segala bentuk terorisme menjadi stigma bagi kalangan aktivis Islam yang salah dalam pemahaman tentang jihad. Oleh sebab itu fenomena politik Islam di Indonesia masih terus diperhitungkan dan bahkan kecenderungan membendung kekuatan politik Islam agar tidak menjadi besar, upaya tersebut secara sistematis terus berlangsung.

### 4.8.2 Melemahnya Kekuatan Partai Politik Islam

Penjelasan fenomena di atas dalam konteks topik ini dimaksudkan bahwa ketika ekspektasi aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat muslim yang mempunyai banyak kepentingan. Artikulasi kepentingan tersebut akan efektif jika disalurkan melalui kekuatan partai politik Islam. Secara hipotesis jika kekuatan partai politik Islam semakin lemah maka artikulasi kepentingan umat Islam akan mengalami stagnasi. Pada gilirannya aspirasi yang kurang tersalurkan dapat menjadi pemicu munculnya radikalisasi dikalangan umat Islam terutama generasi mudanya, sehinga dapat mengganggu stabilitas politik. Dalam sejarah politik di Indonesia konflik yang terjadi dengan mengkaitkan kepentingan Islam selalu mengalami pasang surut. Ketika era orde lama, Islam dihadapkan dengan komunis, ketika orde baru, Islam dihadapkan dengan azas tunggal Pancasila dan politik SARA. Ketika era reformasi, Islam dihadapkan dengan terorisme.

Penjelasan di atas merupakan fenomena percaturan politik Islam selalu mewarnai arena kekuasaan. Oleh sebab itu, menarik untuk dilakukan kajian terhadap trend melemahnya kekuatan politik Islam yang direpresentasikan partai politik Islam. Bahkan ada kecenderungan pergeseran ideologi ke arah nasionalisme religius dan kemungkinan malah sekuler. Kecenderungan pilihan politik mayoritas umat islam terhadap partai politik yang bukan berbasis Ideologi Islam; seperti terhadap partai Golkar, PDIP, Gerindra, Hanura, Demokrat, menarik untuk dikaji secara mendalam.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim dan memiliki kultur yang kuat terhadap nilai-nilai religius. Para *founding fathers* pada saat memproklamirkan negara republik Indonesia sebagai negara demokrasi, mengingat Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Oleh sebab itu aspirasi sebagian besar umat Islam harus disalurkan melalui mekanisme demokrasi. Walaupun hasil pemilihan umum legeslatif partai politik mengalami sedikit peningkatan perolehan suara legeslatif, tetapi melakukan Kajian terhadap lemahnya daya tawar kekuatan partai politik Islam tetap menarik. Sebagai dasar kajian yaitu fenomena dan kendala yang dihadapi oleh Partai Islam secara internal yaitu; *pertama;* manajemen parpol yang belum efisien dan efektif. *Kedua;* konsistensi yang kurang terhadap perjuangan garis ideologi Islam. *Ketiga;* kurangnya ketokohan para pemimpin partai. Adapun kendala secara eksternal yaitu *pertama;* kuatnya pengaruh ideologi

pragmatisme yang mempengaruhi para elit partai. *Kedua;* upaya secara konspiratif dengan tujuan agar partai politik Islam tidak menjadi besar dan kuat di Indonesia. *Ketiga;* issue islamophobia yang terus dipublikasikan di media massa, termasuk isu terorisme.

Kajian mengenai rontoknya kekuatan partai politik Islam dimulai dari hasil pemilu legislatif tahun 2009 yang sudah ditetapkan tanggal 9 Mei 2009 tidak jauh berbeda dengan perhitungan cepat *(quick count)* oleh lembaga survei. Berdasarkan perolehan suara masing-masing partai politik tersebut kita mencoba mencermati perolehan suara yang berazaskan Islam seperti PPP, PKS, PBB, PBR dan lain-lain serta partai politik yang berbasis massa Islam seperti PAN dan PKB, memiliki trend yang menurun seperti yang disebutkan di atas. Walaupun dalam hasil pemilihan umum legeslatif tahun 2014, patai politik yang mengalami peningkatan suara yaitu PPP 1%, PKB 4% dan PAN 1% lebih.

Sebagai refleksi pada masa Pemilu 2009 ini seluruh partai politik Islam mengalami penurunan yang sangat drastis seperti PPP dan PKB dan bahkan ada yang tidak lolos *Parlementary Threeshold* yaitu PBB dan PBR. Adapun PKS yang dianggap potensial dan prospektif juga mengalami penurunan ratusan ribu dan PAN mengalami penurunan satu juta lebih. Apakah penurunan tersebut karena, *pertama;* berpindah partai atau menentukan pilihan ke partai lain seperti munculnya partai-partai baru yang potensial yaitu Gerindra, Hanura atau ke Partai Demokrat yang mengalami kenaikan spektakuler hampir tiga ratus persen (300%) atau *kedua;* ada kemungkinan penurunan tersebut karena para kader, konstituen dan simpatisan tidak mencoblos (Golput) atau *ketiga;* tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). *Keempat;* kemungkinan lain termasuk suara tidak sah, sebab jumlah yang tidak sah sebesar 17 juta dan Golput sebesar 49 juta orang. Kemudian perolehan kursi partai-partai tersebut di atas yang lolos dari *Parlementary Threeshold* yaitu: PKS; 59, PAN 42, PPP 39 dan PKB 26. Dengan rontoknya kekuatan Politik Islam pada Pemilu 2009 ini beberapa Pengamat Politik mencoba menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya animo masyarakat muslim tidak memilih partai Politik Islam yaitu sebagai berikut:

*Pertama;* faktor kepemimpinan, yaitu figur yang dikedepankan oleh beberapa partai politik tersebut dianggap tidak popular atau belum memiliki kapasitas nasional maupun internasional yang terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Kedua;* program-program yang ditawarkan terkait dengan penjabaran nilai-nilai dan syariat Islam tidak jelas dan mungkin belum langsung menyentuh solusi masyarakat miskin. *Ketiga;* faktor perpecahan di dalam umat Islam yang sering diekspose dalam media massa. *Keempat;* upaya pihak luar memberikan citra Islam yang kurang baik, dari ketakutan yang dirasakan dan disebut Islamophobia. Faktor menurunnya animo masyarakat terhadap Partai Islam atau yang berbasis massa Islam jika dijadikan

bahan introspeksi hampir seluruhnya benar. Namun yang perlu dicermati secara mendalam adalah faktor yang ketiga yaitu potensi konflik yang masih dianggap laten. Sepertinya umat Islam di Indonesia sangat bosan dengan situasi yang dihinggapi oleh para pemimpin atau elite umat Islam, yang sulit bersatu. Oleh sebab itu pada akhirnya mereka merasa nyaman jika berada di rumah orang lain, meskipun perasaan aqidah terganggu tetapi harus dipendamnya dengan kompensasi yang sudah menjadi pilihannya. Supaya tidak salah pengertian yang dimaksud rumah orang lain di sini adalah partai politk yang berazaskan Nasionalis dan Sekuler. Mengapa umat Islam di Indonesia sulit dipersatukan baik melalui organisasi maupun dalam perjuangan membela dan mempertaruhkan aqidah dan syariah bagi kehidupan umat Islam di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan di atas barangkali jika kita menengok refleksi sejarah masa lalu dapat memberikan penjelasan yang cukup rational atas pertanyaan tersebut.

### 4.8.3 Refleksi Sejarah Partai Politik Islam

Berdasarkan sejarah di Indonesia sesungguhnya sejak zaman penjajahan atau sebelum Indonesia merdeka potensi kekuatan Islam yang memliki peranan yang besar dalam perjuangan melawan penjajah pada waktu itu baik yang terbentuk dalam Ormas seperti Muhamadiyah yang didirikan pada tahun 1912 dan Nahdatul Ulama (NU) yang berdiri pada tahun 1926. Demikian pula dengan berdirinya Serikat Islam yang merupakan organisasi cukup berpengaruh dan ditakuti oleh Hindia Belanda. Namun sejarah juga mencatat bahwa dalam tubuh Serikat Islam dalam perkembangannya mengalami perpecahan menjadi SI Merah dan SI Putih. SI Merah merupakan hasil penyusupan yang dilakukan dan digerogoti oleh Sneevleet seorang Belanda Yahudi yang dibantu oleh Alimin, Muso dan Semaun yang menjadikan SI merah sebagai cikal bakal partai Komunis di Indonesia.

Dalam sejarah masa Indonesia merdeka atau sering disebut jaman orde lama, kekuatan partai Islam yang tergabung dalam partai Masyumi juga didera perpecahan setelah NU keluar dari Masyumi. Bahkan Presiden Soekarno membubarkan partai Masyumi pada tahun 1960-an. Sedangkan dalam sejarah orde baru kekuatan partai-partai Islam melalui kebijakan pemerintah memaksa partai-partai islam melakukan "fusi" menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Namun sesungguhnya ketika partai-partai Islam dipersatukan dalam satu partai tersebut merupakan kesepakatan yang baik untuk menggalang persatuan umat islam menjadi kekuatan yang solid dan signifikan dalam perjuangkan aqidah dan syariah di bumi Indonesia yang majemuk ini. Akan tetapi kekuatan politik Islam di Indonesia memang tidak bisa terhindar dari penyusupan pihak luar yang memecah belah keutuhan partai. Salah satu peristiwa yang

menjadi catatan sejarah partai politik Islam pada jaman Orde Baru yaitu masuknya HJ Naro sebagai Ketua Umum PPP mengingatkan kembali pada catatan sejarah Serikat Islam pada zaman sebelum merdeka tersebut. Upaya dalam catatan sejarah yang bisa kita amati sebenarnya upaya untuk mengkerdilkan atau membonsai kekuatan politik Islam dari masa ke masa masih terus berlanjut. Strategi yang lebih canggih justru diterapkan oleh pihak luar, oleh penulis disebut sebagai tangan siluman atau *"invisible hand"* dengan kata lain meminjam istilah dalam buku Epperson (1990) yang berjudul *The Unseen Hand* di era reformasi ini.

### 4.8.4 Bermunculan Partai Politik Islam

Dengan dibukanya kran demokrasi pada tahun 1999 bermunculah partai-partai Islam lebih dari sepuluh partai. Sudah menjadi konsekuensi logis bahwa dengan dipecahnya ke dalam partai-partai akan menjadi semakin kecil kekuatan politik Islam dan semakin sulit untuk dipersatukan. Masing-masing pemimpin umat atau para tokoh Islam merasa memiliki kemampuan mendirikan partai sehingga sadar atau tidak sadar telah terperangkap dalam permainan para *"invisible hand"*. Untuk mempersatukan potensi kekuatan Islam di Indonesia tersebut membutuhkan energi yang besar. Umat Islam di Indonesia sesungguhnya semakin merasa lelah memikirkan hal tersebut dan menjadikan sebagian besar umat Islam apriori terhadap kepentingan kemaslahatan bersama. Wajarlah jika kita mencermati kekuatan politik Islam yang lemah membawa implikasi lemahnya posisi tawar dalam berbagai kebijakan terutama di bidang ekonomi, sehingga problem ekonomi yang dihadapi masyarakat Indonesia yang masih belum mampu mengangkat penduduk miskin yang ironisnya adalah sebagian besar umat Islam. Terkait dengan hasil Pemilu Tahun 2009 menempatkan partai politik Islam dan partai yang berbasis massa Islam yang lolos *Parlementary Threeshold* yaitu; PKS, PAN, PPP dan PKB. Adapun dalam Pemilu Presiden,partai-partai politik Islam tersebut sudah menyatakan berkoalisi dengan Partai Demokrat sebagai pemenang Pemilu Legislatif, yang mengusung sebagai pemenang dalam pilpres 2009 yaitu pasangan SBY dengan Budiono.

Partai-partai Islam yang ikut bergabung dalam koalisi besar tersebut, maka dukungan pemerintah eksekutif menjadi sangat kuat. Secara teoritis legislatif yang sebagian besar pendukung pemerintah mencapai 70% maka kecenderungan kontrol terhadap eksekutif akan lemah dan pada gilirannya sejarah pada jaman orde baru yaitu apa yang disebut *"Excecutive heavy"* akan terulang kembali. Namun yang menarik adalah dalam perkembangan pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II koalisi besar, menghadapi kasus Bank Century dan Korupsi Pajak Gayus Tambunan justru membuat suhu politik memanas dan bahkan konflik legislatif dan eksekutif

semakin meruncing ketika digunakan "Hak Angket" oleh para politisi di parlemen seolah membuat kegaduhan politik yang mengancam keretakan kabinet koalisi. Di penghujung akhir masa tugas presiden SBY tahun 2014, selama dua periode menjadi presiden banyak menilai SBY dianggap gagal dalam melaksanakan perubahan sebagaimana yang diharapkan oleh para pendukung reformasi. Beberapa kegagalan yang mendasar yaitu pertama; korupsi yang semakin massif masih berlangsung dan bahkan banyak dilakukan oleh para kadernya sendiri. Kedua; penegakan hukum masih lemah. Ketiga; di bidang ekonomi belum mampu mewujudkan kemandirian dalam membangun sistem dan struktur ekonomi yang tangguh karena belum bisa terlepas dari ketergantungan kekuatan ekonomi asing (neo liberalisme). Keempat: kesenjangan sosial semakin lebar, sehingga muncul konflik sosial di berbagai daerah sering terjadi. Kelima; penguasaan sumber-sumber daya alam oleh pemodal asing masih belum mampu dikendalikan dengan baik untuk kesejahteraan rakyat. Beberapa catatan di atas menjadi indikator kualitatif yang menyebabkan Partai Demokrat sebagai partai utama pendukung kekuasaan pemerintahan Presiden SBY gagal mencapai kemenangan dalam pemilihan umum dan turun perolehan suara sampai 13%.

### 4.8.5 Pergeseran Ideologi Partai Politik Islam

Menghadapi pemilu tahun 2014 kekuatan politik Islam yang direpresentasikan oleh beberapa partai politik seperti PPP, PKS dan partai politik yang sebagian besar massa Islam yaitu PKB dan PAN diprediksi akan mengalami penurunan perolehan suara. Namun prediksi tersebut meleset karena partai-partai politik Islam perolehan suara meningkat, seperti yang telah disebutkan di atas. Walaupun terjadi peningkatan suara akan memiliki korelasi yang positif dengan peran kontrol terhadap kepentingan besar umat Islam. Sebagaimana diketahui agenda kepentingan umat Islam terutama menyangkut harkat dan martabat hidup baik di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya terutama di bidang ekonomi yang masih lemah. Selama ini kelompok marginal misalnya di daerah yang sebagian besar bekerja sebagai buruh di sektor pertanian dan nelayan, kedua sektor tersebut sebagian besar tinggal di pedesaan, dan sebagian yang lain di perkotaan jika disensus sebagian besar beragama Islam, kondisinya masih tergolong ekonomi lemah. Jika sistem ekonomi Indonesia yang cenderung liberal kapitalis, dipastikan distribusi sumber-sumber kekayaan tidak mengalir terhadap kelompok ini. Oleh sebab itu sesungguhnya jika kekuatan politik Islam yang diwakili PKS dan PPP serta PAN dan PKB menjadi harapan dalam memperbaiki kesejahteraannya. Demikian pula dalam menjalankan ajaran Islam berkembang lebih luas secara kondusif, melalui perjuangan politik di legislatif dan eksekutif.

Namun fenomena partai politik islam dalam perkembangan terakhir menunjukkan ke arah pemikiran pragmatis dan sekuler mulai melanda para elit politiknya. Fakta empiris pada awal tahun 2013 ujian berat bagi salah satu partai politik Islam harus merelakan dan melepas Ketua Partainya karena berurusan dengan hukum. Harapan umat Islam Indonesia yang mayoritas masih kuat, pada gilirannya akan semakin skeptis terhadap peran partai politik tersebut.Ketika partai politik islam mulai surut peran artikulasi dan agregasinya maka pada akhirnya fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan umat Islam lebih menggantungkan terhadap kekuatan ormas-ormas Islam besar seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan lain-lain. Sesungguhnya peristiwa politik pada penghujung akhir tahun 2012 dengan dibubarkannya BP. Migas oleh Mahkamah Konstitusi, merupakan hasil *Judicial Review* yang sebagian besar penggugatnya adalah tokoh-tokoh ormas Islam terbesar di Indonesia. Fungsi artkulasi dan agregasi yang seharusnya diperankan atau dimainkan oleh partai politik, akan tetapi gugatan pembubaran BP. Migas dilakukan oleh kekuatan poltik sebagian besar oleh ormas Islam. Menurut pandangan para penggugat peran BP. Migas yang seharusnya berpihak kepada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia, akan tetapi justru memberikan peluang yang besar seluruh wilayah eksplorasi sumberdaya mineral dikuasai oleh investor asing. Dengan alasan investor dalam negeri tidak memiliki teknologi dan finansial yang cukup. Oleh sebab itu ketika peran partai politik Islam (PPP dan PKS) dan partai politik yang memilih basisi massa Islam (PAN dan PKB) tidak mampu menjalankan peran artikulasi dan agregasi kepentingan, maka fenomena pembubaran BP. Migas merupakan momentum bagi kekuatan politik Islam yang justru diperankan oleh ormas Islam walaupun para penggugat mengatasnamakan pribadi, tetapi mereka bertindak sebagai tokoh ormas Islam.

## STUDI KASUS 8

Penjelasan hasil kajian seperti di uraikan di atas, mengenai rontoknya kekuatan partai politikIislam pada pemilu tahun 2014, pada intinya umat Islam menghadapi berbagai persoalan baik bersifat internal maupun eksternal. Persoalan tersebut sangat mempengaruhi terhadap dukungan umat Islam kepada partai politik yang berideologi Iislam maupun partai politik yang berbasis massa Islam. Semakin cair warna ideologi umat Islam terhadap partai politik nasionalis sekuler maupun nasionalis religius, mengancam turunnya perolehan suara partai politik Islam seperti PPP, PKS dan PBB. Sedangkan PAN dan PKB sudah menjadi partai terbuka dan inklusif, perolehan suara dari pemilu tahun 2004 menurun pada pemilu tahun 2009. Salah satu menurunnya pengaruh partai politik Islam dikarenakan memudarnya ketokohan dan kurangnya elektabilitas para tokoh Islam yang berada di PPP,PKS dan PBB. Oleh sebab itu

untuk lebih mendalami persoalan fenomena eksistensi kekuatan partai politik Islam menjelang pemilu tahun 2014, materi diskusi pada studi kasus ke 8 yang diambil dari media massa Kompas berjudul "Partai Berbasis Islam Butuh Capres Kuat". Topik diskusi pada sesi ini yang menjadi nara sumber yaitu pakar politik seperti; Siti Zuhro dari LIPI, Bima Arya Sugiarto politisi dari PAN, Bachhtiar Effendi dari UIN Syarif Hidayatullah dan Marwan Jafar dari PKB. Perbincangan mengenai eksistensi partai politik Islam, para pakar sepakat bahwa partai politik Islam membutuhkan figur yang kuat dan memiliki elektabilitas tinggi sebagai pemimpin nasional. Kebutuhan koalisi partai politik yang berbasis Islam dalam menghadapi pemilu tahun 2014, ditentukan seberapa jauh figur calon presiden bisa diterima oleh seluruh partai politik Islam. Artinya jika partai politik Islam memiliki calon presiden yang memiliki elektabilitas tinggi seperti " Yusuf Kalla, Mahfud MD dan Hidayat Nurwahid, maka membangun kembali poros tengah jilid 2 bisa saja terwujud. Tetapi kalau partai politik Islam mengusung Ketua Umum partainya yang belum memiliki elektabilitas yang bagus, niscaya partai politik Islam sulit untuk dipersatukan dalam koalisi. Pada akhirnya partai politik Islam atau berbasis massa Islam akan berkoalisi dengan partai nasionalis sekuler. Pengalaman hasil pemilu tahun 2009 berkoalisi dengan partai nasionalis yang dihasilkan justru banyak kader partai yang melakukan *abuse of power* dan menjadi terpidana korupsi. Misalnya mulai dari PPP, PAN, PKB dan PKS beberapa kadernya terkena kasus pidana korupsi, bahkan PKS ketua umumnya sendiri. Untuk melengkapi perbincangan topik kasus di atas, disajikan studi kasus di bawah ini.

**Partai Berbasis Islam Butuh Capres Kuat**

*KOMPAS, 9 Oktober 2013*

Wacana koalisi partai politik berbasis massa Islam pada pemilu 2014 kembali mencuat beberapa pekan terakhir. Namun, di saat bersamaan, muncul keraguan karena ideologi parpol di Indonesia kian cair. Kesediaan sejumlah parpol berbasis massa Islam untuk bergabung dalam satu koalisi juga menjadi pertanyaan. Bagaimana peluang koalisi itu?

Mari kita lacak perjalanan parpol berbasis massa Islam dalam sejarah politik di Indonesia. Pada Pemilu 1955, total suara parpol Islam mencapai 43,7 persen. Suara itu terutama disumbang Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Nahdlatul Ulama (NU), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), serta Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Masyumi dengan 20,92 persen suara bahkan menduduki peringkat kedua di bawah perolehan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang memenangi pemilu dengan 22,3 persen suara. Orde Baru menggabungkan parpol berbasis massa Islam dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada Pemilu 1977, PPP ada di peringkat dua dengan 29,2

persen suara, di bawah Golkar dengan 62,1 persen suara. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di peringkat tiga. Reformasi 1998, memunculkan kembali parpol berbasis massa Islam, meski sebagian dari parpol itu tidak mencantumkan Islam dalam asasnya. Sebut saja Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan (PK)- yang lalu bermetamorfose menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PPP tetap bertahan.

Pada Pemilu 1999, sembilan partai berbasis massa Islam lolos ke parlemen dengan total perolehan 35,45 persen suara Itu antara lain mencakup PKB dengan 12,6 persen suara, PPP (10,7 persen), PAN (7,1 persen), PBB (1,9 persen), dan PK (1,3 persen). Perolehan ini meningkat menjadi 37,56 persen di Pemilu 2004, ketika ada enam partai Islam lolos-di parlemen. Di Pemilu 2009, hanya empat parpol berbasis massa Islam di parlemen dengan total perolehan suara 24,15 persen. Meski belum pernah memenangi pemilu, tetapi parpol berbasis massa Islam pernah berhasil membangun koalisi. Pada Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil Pemilu 1999, mereka bergabung dalam "Poros Tengah" dan sukses mendudukkan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai presiden. Padahal, pemilu dimenangi PDI-P dengan 33,7 persen suara. Namun, koalisi itu buyar seiring lengsernya Gus Dur pada pertengahan tahun 2001.

**Pemilu 2014**

Di Pemilu 2014, ada lima parpol berbasis massa Islam yang bertarung, yaitu PPP, PKS, PAN, PKB, dan PBB. Mereka telah memasang kuda-kuda dan mulai berderap memikat hati pemilih. Pemilu 2014 bakal mempertahankan Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden (Pilpres) dengan *presidential threshold* atau ambang batas pengajuan presiden sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. Gagasan koalisi parpol berbasis massa Islam kembali muncul akhir September lalu, ketika PPP mencanangkan ketua umumnya, Suryadharma Ali, sebagai calon presiden (capres) di Pemilu 2014. Untuk memuluskan langkah itu, PPP melontarkan gagasan koalisi. Sebelumnya parpol menengah—yang kebetulan sebagian besar berbasis massa Islam—memang cukup rutin bersilaturahim. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Romahurmuzy mengatakan, kesadaran akan realitas politik membuat koalisi menjadi niscaya Apalagi, parpol menengah ini rata-rata belum memastikan capresnya. Sementara, beberapa partai besar sibuk dengan agenda "pencapresan" masing-masing. Partai Golkar mengusung Aburizal Bakrie, PDI-P dengan Megawati Soekarnoputri atau Joko Widodo, dan Partai Demokrat mencari capres lewat konvensi.

"Saya optimistis, total suara parpol berbasis massa Islam akan memenuhi *presidential threshold*. Jika bisa bergabung, tentu akan memberikan tiket tersendiri untuk mengajukan' capres," katanya. Namun, gagasan itu tak begitu saja diamini. Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto, menilai, peta Pilpres 2014 tidak ditentukan faktor ideologis, tetapi elektabilitas. Hasil survei kian, berperan dalam formasi capres-cawapres. Tiga capres tertinggi elektabilitasnya akan mencari pasangan

yang pas. Idealnya, keduanya saling menguatkan secara elektoral, tetapi komunikasi dan kesepakatan juga bisa menentukan. Dalam konteks ini, lanjut Bima, poros altematif bisa jadi relevan karena cairnya komunikasi yang dibangun jauh-jauh hari. Namun, koalisi agamis-nasionalis lebih penting ketimbang poros parpol berbasis massa Islam yang secara elektoral kurang prospektif. Lagipula, kini banyak tokoh dari parpol nasionalis yang agamis, atau parpol Islam yang nasionalis. Bagi Ketua Fraksi PKB di DPR, Marwan Jafar, koalisi itu masih sebatas wacana. Pasalnya, masih belum jelas figur capres yang bisa diterima semua partai, punya kemampuan, popularitas, dan elektabilitas yang tinggi." Secara rasional politik, koalisi akan dilakukan setelah diketahui hasil perolehan suara setiap parpol di pemilu legislatif," kata Marwan.

**Figur kuat**

Menurut Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Bahtiar Effendy, parpol berbasis massa Islam masih potensial berkoalisi karena punya kesamaan ideologis. Jika perolehan suara mereka di Pemilu 2014 mencapai ambang batas pencapresan, ide koalisi tetap relevan. Itu sekaligus jadi sarana bagi partai-partai Islam untuk lebih berperan menentukan perjalanan bangsa "Koalisi dimungkinkan, terutama jika ditemukan figur kuat dan diterima semua pihak. Tidak mudah, tetapi itu tetap bisa diupayakan," kata Bachtiar.

Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, berpandangan, dalam sejarah politik Indonesia, koalisi parpol berbasis massa Islam mengalami pasang surut. Koalisi bisa terwujud jika mereka menemukan kebutuhan dan ancaman bersama yang perlu dihadapi secara bersama.Relevan tidaknya koalisi Poros Tengah jilid II memang sangat dipengaruhi oleh sosok capres yang Kompetitif dan laku jual, bukan sekadar menonjolkan isu aliran. Parpol berbasis massa Islam harus dapat menyamakan persepsi dalam merespons isu-isu krusial bangsa Indonesia. "Mereka harus lebih cerdas mengakomodasi kehendak rakyat. Tokoh parpol harus memahami kebhinekaan masyarakat Indonesia," kata Siti. (Ilham Khoiri)

Setelah membaca teks di atas mengenai "partai Islam butuh capres kuat, memberikan beberapa pandangan yang pada intinya bahwa partai Islam berkeinginan membangun koalisi seperti poros tengah jilid 2 pada pemilu tahun 2014 sulit diwujudkan. Kecuali ada figur calon presiden yang kuat dan mampu menjadi magnet semua partai politik Islam untuk bersatu. Fakta empiristik menunjukkan bahwa dalam pemilihan presiden pada tanggal 1 Juni 2014 telah ditetapkan dua pasang calon presiden yaitu; Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK. Pada kenyataannya prediksi para pengamat terbukti bahwa partai-partai politik Islam tidak dapat bersatu untuk mengusung calon presidennya. Kekuatan partai-partai Islam sebesar 30% dalam memberikan dukungan terhadap

calon presiden terbelah. Kedua calon presiden dan wakil presiden yaitu pasangan Prabowo-Hatta didukung oleh PAN, PKS, PPP dan PBB, sedang pasangan Jokowi-JK didukung oleh PKB. Kegagalan partai-partai politik Islam dalam mengusung calon presiden dikarenakan tidak memiliki calon presiden yang kuat.

Untuk melengkapi diskusi mengenai "partai Islam butuh capres yang kuat, dilengkapi dengan pertanyaan di bawah ini.

1. Sejauhmana para pemimpin Islam lebih peduli terhadap persatuan umat Islam atau lebih mementingkan pribadi, dalam menghadapi pemilu tahun 2014?
2. Sejauhmana respon umat Islam terhadap artikulasi yang diperankan oleh partai-partai Islam?
3. Sejauhmana kesadaran umat Islam terhadap bahayanya pengaruh ideologi sekularisme dan pragmatisme yang berkembang di Indonesia berkolerasi dengan pengaruh penyaluran aspirasi politik kepada partai politik Islam?
4. Bagaimana strategi partai politik Islam menghadapi pemilu tahun 2014, di tengah kelesuhan masyarakat terhadap eksistensi partai politik?
5. Sejauhmana partai-partai politik Islam mampu mengusung tokoh yang dicalonkan sebagai calon presiden/wakil presiden yang memiliki elektabilitas tinggi?

## 4.9 PARTAI POLITIK MELANGGENGKAN KEKUASAAN TRANSAKSIONAL

Dalam kajian ilmu politik, kekuasaan merupakan konsep dan teori yang selalu diperbincangkan oleh para pakar maupun praktisi dan masyarakat. Kekuasaan selalu dipersepsikan sebagai tujuan bukan sebagai alat. Oleh sebab itu banyak yang justru terjebak oleh persepsi yang keliru tersebut, sehingga untuk mendapatkan kekuasaan dilakukan dengan berbagai cara. Kekuasaan dan partai politik seperti botol dengan tutupnya, sebab partai politik merupakan organisasi di mana tempat berkumpulnya para elit politik menjalankan kekuasaan yang didukung oleh rakyat untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan. Jika kekuasaan yang diperolehnya dari hasil pemilihan umum itu besar maka partai politik tersebut akan memgendalikan roda kekuasaan pemerintahan. Untuk itu tidak mengherankan jika banyak orang yang haus kekuasaan mencoba masuk dalam arena partai politik untuk mendapatkan kekuasan. Melalui partai politik kekuasaan yang akan diperoleh misalnya sebagai anggota legeslatif, presiden atau gubernur dan walikota/bupati. Kekuasaan ibarat "gula" maka menjadi daya tarik semut-semut yang ingin mengerumuni mulai dari para aktifis, pebisnis, birokrat, seniman, artis dan kalangan profesional serta militer. Oleh sebab itu kecenderungan banyak kalangan ingin masuk partai dengan berbagai motif. Misalnya ada kalangan yang idealis partai politik sebagai alat perjuangan, namun tidak sedikit partai politik menjadi kendaraan omprengan dan bahkan ada dijadikan kendaraan sewa antau rental. Kecenderungan fenomena terjadinya anomali peran dan fungsi partai politik tersebut maka opini publik menilai bahwa masuk sebagai pengurus inti partai politik pada umumnya dilakukan dengan cara transaksional. Pembahasan fenomena yang manarik yaitu istilah transaksional kekuasaan dalam diri partai politik akan dianalisis secara mendalam pada uraian selanjutnya di bawah ini.

### 4.9.1 Hakekat Partai Politik

Sebagai negara yang menganut faham demokrasi, eksistensi peran partai politik pada hakekatnya adalah usaha-usaha membangun pilar demokrasi yang kokoh, sebagai perwujudan komitmen para reformis ingin membangun kekuatan sipil (*civil society*) dalam rangka mengawal proses demokratisasi politik. Terbentuknya "masyarakat madani" (*civil society*) merupakan modal sosial yang mampu untuk menggerakan partisipasi politik masyarakat secara efektif. Partisipasi politik yang efektif tersebut secara teoritis di samping mampu mengeliminir "politik uang", "politik dagang sapi", "transaksional kekuasaan", juga mampu melahirkan para politisi atau elite politik yang telah dipersiapkan oleh "sebuah partai politik". Salah satu fungsi partai politik

menyiapkan kadernya menjadi "pemimpin" yang handal, visioner dan demokratis dan berjiwa negarawan. Sebab pada hakekatnya "partai politik" merupakan organisasi yang didalamnya terdiri dari para elite politik, berfungsi mengendalikan pemerintahan negara serta mendapat dukungan rakyat yang harus berkompetisi dengan partai politik lainnya dalam pemilihan umum. Oleh sebab itu jika para pemimpin partai politik memiliki jiwa negarawan maka para politisi yang menjadi pejabat publik sebagai presiden, menteri, anggota legislatif, dan kepala daerah mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mengendalikan pemerintahan yang efektif.

### 4.9.2 Lahir Partai Politik Baru di Era Reformasi

Pada era reformasi yakni pasca tumbangnya rezim Orde baru tahun 1998, mulai lahirnya partai-partai baru dari berbagai macam basis ideologi atau aliran mulai dari ideologi nasionalisme, sosialisme, ideologi agama baik Islam maupun Kristen dan katholik, ideologi sekuler dan lain-lain. Kelahiran partai politik baru tersebut berjumlah puluhan merupakan perwujudan dari bentuk euphoria masyarakat yang mulai bergairah atau bersemangat ingin menata kehidupan kenegaraan yang lebih berorientasi kepada kepentingan rakyat atau publik secara hakiki. Ketika pemilu pertama di era reformasi pada kenyataanya hanya belasan partai politik yang mampu mengusung kadernya menduduki kursi di lembaga Legeslatif. Adapun partai politik baru yang masuk dalam persyaratan *"electoral threeshold"* pasca pemilu tahun 1999 yaitu PAN, PKB, PK, PBB, PKNU, PDS, PBR, dan lain-lain ditambah dengan partai lama yang masih eksis yaitu Partai Golkar, PPP dan PDIP. Pembentukan partai baru pada tahun 1998 relatif masih dipenuhi dengan semangat idealisme yang tinggi dan tidak didominasi oleh praktek "politik uang" walaupun mendirikan sebuah partai politik memerlukan biaya yang sangat besar. Terbukti yang terpilih menjadi "pemimpin" partai politik adalah mereka yang telah melalui proses perjuangan yang cukup panjang dalam mengawal perjuangan "reformasi" dan mereka berasal dari para aktifis yang tidak memiliki kekayaan yang berlimpah, berjuang di bawah tanah maupun secara terbuka ketika era Orde Baru yang represif, misalnya Amien Rais, Abdurahman Wahid (Gus Dur), Yusril Ihza Mahendra, Megawati Soekarno Putri, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Hidayat Nur Wahid, dan banyak tokoh-tokoh reformasi yang lainnya tidak disebutkan, mereka sebagian besar juga menjadi Ketua Umum Partai Politik. Oleh sebab itu harapan masyarakat terhadap hasil pemilu tahun 1999 sangat besar terjadinya perubahan ekonomi bagi masyarakat secara luas dan merata kesemua lapisan masyarakat.

Namun dalam perkembangannya harapan yang besar tersebut belum sepenuhnya terwujud dengan perubahan sistim politik yang lebih demokratis tersebut. Proses

demokrasi yang sedang berjalan tidak serta merta diikuti perbaikan kondisi ekonomi yang mampu memberikan akses ekonomi kepada masyarakat luas. Akan tetapi justru tingkat kesenjangan pendapatan serta kesenjangan sosial semakin tinggi. Di samping itu penyelenggaraan pemerintahan belum menunjukkan terwujudnya pemerintahan yang "*good coorporate governance*". Padahal seharusnya perubahan sistim politik yang lebih demokratis tersebut, dengan diikuti oleh "partisipasi politik" masyarakat yang lebih efektif, mampu mendorong penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik atau "*good goverenance*"*(Muchlis Hamdi 2003)*. Sebab dengan tumbuhnya "partisipasi politik" masyarakat yang benar, dengan sendirinya akan melahirkan para elite politik dan pemimpin politik yang handal. Sebab dukungan rakyat bisa dipastikan akan lebih selektif, terukur dan terkontrol dengan baik. Walaupun pada kenyataannya hasil pemilu yang sudah dilaksanakan selama era reformasi belum melahirkan para "pemimpin dan anggota legeslatif" yang memuaskan masyarakat. Bahkan ditengarai munulnya para pemimpin melalui mekanisme demokrasi tersebut banyak sosok yang tidak jelas asal usulnya, kredibilitas, kompetensi dan profesionalismenya, pendek kata pemimpin politik yang diklasifikasikan belum memiliki jiwa negarawan.

### 4.9.3 Manajemen Partai Politik yang Buruk

Dalam konsolidasi kekuasaan melalui pendirian partai politik, ada kecenderungan yang menguasai atau yang mendominasi kepengurusan partai politik dari kalangan pebisnis dan *lawyer*, aktifis dan LSM serta ormas, sedang dari birokrat dan militer relatif sedikit. Dalam perkembanganya kecenderungan dewasa ini para politisi cenderung menonjolkan perilaku praktis pragmatis. Oleh karena dalam proses konsolidasi kekuasaan pada masa reformasi, terdapat kesalahan yang cukup signifikan adalah "keengganan" para intelektual dan profesional, memasuki dunia politik, sehingga ketika konsolidasi kekuasaan dilakukan, jatuh ketangan para elite politik yang minim idealisme dan semangat patriotisme seperti yang telah diuraikan di atas. Bahkan perkembangan dalam satu dasawarsa lebih, justru manajemen partai politik cenderung berorientasi pada pendekatan pragmatis dan materialistik. Artinya sistem rekruitmen dan pengkaderan keanggotaan parpol tidak berdasarkan pada jenjang karier secara sistimatis, akan tetapi lebih berorientasi pada nilai-nilai transaksional. Seseorang menjadi pemimpin partai politik harus menyediakan dana yang besar agar bisa terpilih dalam musyawarah pemilihan ketua partai politik baik melalui musyawarah daerah, musyawarah wilayah dan konggres partai. Besarnya biaya untuk menjadi ketua atau pengurus inti lainnya bisa mencapai ratusan juta sampai miliaran rupiah, tergantung jabatan apa yang akan dikehendaki. Pendek kata untuk menjadi pemimpin partai atau pengurus sudah dipastikan tidak gratis atau sering menjadi pameo "tidak ada makan siang gratis". Argumentasi para elite politik partai dalam mencari pembenaran sering

dikatakan menjadi hal yang wajar sebagai "biaya politik" dan secara permisif dikatakan bukan sebagai "politik uang". Padahal dalam prakteknya seringkali sulit dibedakan antara biaya politik dan politik uang. Keduanya sama-sama memiliki tujuan untuk membujuk para pemilik suara *(voter)* supaya memberikan dukungan agar menjadi ketua parpol atau pengurus inti. Oleh sebab itu budaya "politik uang" seolah menjadi *trade mark* atau ciri dalam sistim politik di Indonesia pada masa reformasi. Contoh empiris dalam fenomena politik tersebut ketika terpilihnya seorang pengusaha besar yang menduduki posisi Ketua Partai politik pada tahun 2006 mengalahkan pesaing 2 (dua) orang tokoh politik yang lebih dahulu dan berpengalaman. Namun dalam perjalanan selama satu periode kepemimpinannya kurang mencapai sasaran yang sesuai dengan yang dicita-citakan. Kegagalan memimpin sebuah partai politik yang cukup besar atau peringkat menengah, pada kenyataannya membuat pengusaha besar tersebut kecewa dan mengundurkan diri dari dunia politik dan kembali ke habitat semula sebagai *businessman*. Namun tidak sedikit pengusaha besar yang tetap berada di dunia politik karena memiliki kemampuan penyesuaian diri yang lebih baik. Fenomena para pengusaha terjun ke dunia politik pada hakekatnya hak politik setiap warga negara. Dunia politik memiliki karakteristik yang pada dasarnya lebih berorientasi kepada tujuan sosial yang diikuti dengan sikap dan perilaku: pengabdian, loyalitas dan pengorbanan. Sedangkan dunia bisnis bertujuan mencari keuntungan dengan prinsip pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Managemen partai politik sebagaimana yang terjadi dewasa ini tanpa disadari mendorong tumbuh suburnya praktek politik uang, dianggap sebagai hal yang wajar, boleh jadi terpengaruh oleh paradigma bisnis. Oleh sebab itu partai politik bukan lagi sebagai alat perjuangan kepentingan rakyat, melainkan berperan melanggengkan kekuasaan transaksional. Artinya bahwa kekuasaan yang seharusnya digunakan sebagai alat perjuangan membangun stabilitas politik dan kesejahteraan ekonomi masyarakat luas, akan tetapi karena cara memperoleh kekuasaan melalui praktek dagang sapi, maka kekuasaan cenderung digunakan untuk kepentingan ekonomi yakni usaha mengembalikan modal *(return of investment)* yang dikeluarkan saat membeli kekuasaan.

### 4.9.4 Kecenderungan Kekuasaan yang Transaksional

Fenomena para politisi baik yang menjadi anggota legeslatif maupun menjadi gubernur dan bupati/walikota mulai periode pemilu tahun 1999, pemilu 2004 dan pemilu 2009, banyak di antara mereka yang terkena kasus tindak pidana korupsi dan masuk penjara. Sesungguhnya merupakan bukti empiristik dampak buruk praktek "kekuasaan transaksional" dan ironisnya hampir secara merata dihadapi oleh para elit partai politik yang lolos *"electroral threeshold"* (ET). Desain sistem politik yang

cenderung melanggengkan politik uang atau "kekuasaan sebagai komoditi" yang secara permisif sudah masuk dalam arena pasar dan harus mengikuti hukum permintaan dan penawaran, maka lambat laun dan pasti dapat menghancurkan eksistensi negara. Bentuk atau wujud dari kehancuran negara yaitu *pertama;* mulai dari lemahnya peran negara terhadap nasib rakyat yang berada pada posisi marjinal seperti kaum buruh, nelayan, petani dan PKL. *Kedua;* semakin hilangnya kepercayaan *(trust)* rakyat terhadap pemerintah, pergolakan politik yang terus-menerus baik melalui konflik yang bersifat vertikal maupun konflik horizontal lambat laun memiliki potensi terjadi disintegrasi bangsa. *Ketiga;* konflik politik secara laten di Nanggroe Aceh Darusalam dan konflik sporadis di Papua sesungguhnya merupakan bagian dari permainan kepentingan politik asing yang tanpa disadari mempengaruhi desain sistem politik yang kini sudah berjalan. Implikasi pembangunan politik tersebut mendorong menuju pada kecenderungan terjadinya potensi disintegrasi negara. *Keempat;* dengan demikian tidak mustahil efek domino kelak akan meluas terhadap kawasan lain melalui "konflik" masyarakat yang dilatar belakangi oleh berbagai macam kepentingan baik ekonomi, sosial politik dan hukum.

### 4.9.5 Disorientasi Fungsi Partai Politik

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai peran partai politik yang diwujudkan dalam fungsi-fungsi partai pada kenyataannya belum membawa manfaat banyak terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat selama masa pemerintahan era reformasi berlangsung. Fungsi-fungsi partai politik antara lain: sosialisasi politik, komunikasi politik, rekruitmen politik, artikulasi politik, agregasi politik, dan pengedalian konflik dalam masyarakat. Jika fungsi partai politik dapat dijalankan dengan baik yakni terprogram dan terlaksana secara berkelanjutan, niscaya akan mengurangi sikap dan tindakan para elite partai yang cenderung berorientasi pada transaksional kekuasaan. Demikian pula akan mengurangi kecenderungan dominasi oligarki partai politik dan dinasti keluarga dalam partai politik. Oleh sebab itu, desain sistem politik yang terdiri dari paket undang-undang politik seperti undang-undang kepartaian, undang-undang pemilu, undang-undang pilpres dan pemilukada, undang-undang kedudukan MPR, DPR dan DPD, seharusnya merupakan sistem yang mampu membangun dan memantapkan stabilitas politik. Ideal-normatif kebijakan bidang politik di atas, sebagai bangunan kesisteman politik harus teruji di lapangan. Fenomena yang sudah berulangkali diuraikan di atas menjadi bukti empiristik misalnya; terjadinya koflik antar lembaga pemerintah, konflik vertikal antara pemerintah dengan rakyat dan konflik horizontal yaitu konflik antar masyarakat. Seperti diketahui paket undang-undang politik telah berhasil melakukan perubahan yang cukup fundamental dari rezim pemerintahan yang otoriter berubah menjadi pemerintahan

yang lebih demokratis. Oleh karena itu momentum iklim demokrasi yang sudah terbangunagar tidak kembali mundur (*setback*) sudah barang tentu mendorong pemikiran ulang terhadap kemungkinan desain sistem politik yang sudah dibangun, secara substansial terdapat ketidakcocokan dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Sesungguhnya kondisi masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya bangkit dari sikap apatis dan apolitik akibat kebijakan depolitisasi (*floating mass*) semasa orde baru. Di lain pihak gelombang era keterbukaan akibat trend globalisasi melalui teknologi informasi menghadapi gelombang perubahan sosial yang dahsyat yakni perubahan tata nilai ke arah individualisme, konsumerisme, hedonism, dan materialisme, menyebabkan perilaku masyarakat cenderung pragmatis. *Shock culture* yang sedang dihinggapi masyarakat dihadapkan dengan praktek demokrasi langsung dan euphoria partai politik pada akhirnya terjadi *anomaly* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh berdirinya banyak partai politik yang sebagian besar tidak berdasarkan oleh kekuatan riil dukungan rakyat dan bersifat spekulatif. Bahkan diduga orientasi motif ekonomi juga termasuk yang menjadi analisis banyak kalangan, terbukti dari ratusan pendirian parpol yang didaftarkan kepada pemerintah, yang mendapat dukungan rakyat cukup signifikan hanya berjumlah tidak lebih dari sepuluh parpol. Jumlah parpol yang terlalu banyak bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar berpendidikan rendah, yang tumbuh bukan "partisipasi politik" dalam arti yang sesungguhnya sebagai upaya meraih dukungan rakyat, akan tetapi pada kenyataanya yang terjadi masih bersifat "mobilisasi". Praktek mobilisasi massa untuk memberikan dukungan terhadap partai politik memiliki konsekuensi logis berupa; *pertama;* dukungan hanya bersifat semu, *kedua;* membutuhkan biaya yang besar dalam penggalangan massa, *ketiga;* pengaruh negatifnya adalah rentan dengan praktek "politik uang" seperti yang secara fenomenal terjadi dengan sebutan "serangan fajar". Meskipun manzab demokrasi memberikan ruang bagi munculnya sistem multi partai, tetapi berdasarkan pengalaman sejarah politik di Indonesia belum mampu mewujudkan stabilitas politik mantap. Jika stabilitas poltik terganggu maka berpengaruh terhadap kelancaran pembangunan ekonomi.

Sistem multi partai dalam sistim politik Indonesia belum menunjukkan kemampuannya membangun stabilitas politik yang mantap. Walaupun banyak kritik terhadap sistem multi partai namun dipihak yang lain undang-undang partai politik belum mampu membatasi jumlah patai politik. Persyaratan *electoral threshold* yang telah ditetapkan pada kenyataanya masih tetap memunculkan belasan partai politik pada pemilihan umum tahun 2014. Seperti diketahui sudah dipastikan hasil verifikasi partai politik yang lolos untuk mengikuti pemilu 2014 yaitu Partai Nasional Demokrat (NasDem), PBB dan PKPI. Dengan demikian peserta pemilihan umum pada tahun 2014 sebenyak dua belas (12) partai politik. Banyaknya jumlah partai

politik jika merupakan representasi dari aspirasi ideologis masyarakat pada dasarnya merupakan kekuatan politik yang saling melakukan kontestasi pada setiap pemilihan umum. Ketika fungsi partai politik dapat berjalan secara optimal maka banyaknya partai politik pada dasarnya mampu memperjuangkan terwujudnya kesejahteraan rakyat. Akan tetapi jika fungsi partai politik kurang berjalan dengan baik maka dipastikan disamping stabilitas politik terganggu juga berdampak terhadap efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas dalam sejarah partai politik di Indonesia setiap partai politik memiliki karakteristiknya masing-masing sesuai pada masanya. Sebelum masa kemerdekaan atau masa penjajahan Hindia-Belanda lahirnya partai politik dilandasi oleh semangat perjuangan berdasarkan ideologi yang dianutnya, misanya Serikat Islam (SI) dan Partai Nasional Indonesia (PNI). Pada masa pemerintahan pasca proklamasi atau masa "ordelama" lahir banyak partai politik baru misalnya "partai Masyumi, NU, PSI, Murba, PKI, IPKI, Parkindo dan lain-lain. Pasa masa "orde lama" ciri-ciri partai politik berbasis ideologi berdasarkan; "nasionalisme" (PNI, IPKI), agama (Masyumi, NU, SI, Parkindo), sosialisme (Murba, PSI), komunis (PKI). Sedang pada masa pemerintahan "orde baru" hanya ada tiga partai politik yaitu Golkar, PDI dan PPP yang merupakan fusi dari puluhan partai politik. Pada masa "orde baru orientasi ideologi sudah mulai mencair misalnya golongan non ideologis tapi lebih berdasarkan "kekaryaan" seperti Golkar sedang PDI dan PPP gabungan dari beberapa partai politik yang memiliki berbagi corak atau *platform* ideologi. Adapun pada masa era reformasi ketika kran demokrasi dibuka lahir ratusan partai politik namun yang memenuhi syarat *electoral trheshold* hanya puluhan partai politik. Akan tetapi yang menarik pada masa era reformasi kecenderungan basis ideologis sudah semakin longgar dan bahkan hampir seluruh partai politik terjebak oleh perilaku politik para elitnya cenderung praktis pragmatis dan transaksional. Kurangnya orientasi ideologis yang ada pada partai politik terindikasi para elit partai yang duduk di DPR/D melakukan tindak pidana korupsi.

## STUDI KASUS 9

Dalam sesi diskusi mengenai "Partai politik melanggengkan kekuasaan transaksional, seperti yang telah diuraikan secara mendalam di atas, akan dilengkapi dengan materi diskusi. Pengembangan pemikiran mengenai praktek traksaksi kekuasaan mengambil kasus dari pemberitaan mengenai "symposium pemilu 2014" dengan judul berita "politik transaksional libatkan modal". Dalam symposium di Universitas Pelita Harapan, dihadiri para tokoh sebagai pembicara yaitu; Mahfud MD mantan Ketua MK, Husein Kamil Ketua KPU, Muhamad Ketua Bawaslu, Chalid Muhamad dari Direktur

Institut Hijau Indonesia, Anton Supit, Pengusaha. Dalam diskusi pada umumnya sepakat bahwa "politik transaksional" selalu hadir ketika peristiwa politik berlangsung, misalnya pemilu, dimana kehadiran pengusaha berkepentingan membangun jaringan bisnis bersama dengan pemimpin yang didukungnya. Keterlibatan pengusaha dalam peristiwa politik, dianggap sebagai investasi setiap pemilu berlangsung.

## Politik Transaksional Libatkan Modal

*KOMPAS, 8 Oktober 2013*

Setiap peristiwa politik di Indonesia, seperti pemilihan umum, selalu melibatkan kekuatan modal. Oleh para pemilik modal, peristiwa politik kerap dipandang sebagai bagian dari investasi lima tahunan.

"Tak dapat dimungkiri, setelah kandidat yang didukung terpilih, akan diikuti langkah-langkah berikutnya berupa kemudahan izin pemanfaatan sumber daya alam atau ada sebuah kepastian menjadi pemenang tender proyek-proyek pemerintah. Walaupun dalam setiap tender, pemilik modal tetap harus mengeluarkan sejumlah *fee* untuk memperlancar pelaksanaan proyek," kata Direktur Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad, di Jakarta, Senin (7/10).

Chalid menjelaskan, dalam konteks sumber daya alam, persoalan jadi makin rumit karena hampir setiap jengkal wilayah Indonesia telah dikuasai korporasi.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Anton Supit secara terpisah mengatakan, "Sebenarnya menjadi politisi adalah pekerjaan luhur sepanjang hal itu dipandang sebagai panggilan hidup, menyadari sebagai pejuang rakyat. Bukan malah diam-diam menjadikan bahan aspirasi rakyat dengan tolok ukur sejumlah uang lewat pola-pola transaksional."

**Masif dan Meluas**

Dalam simposium Pemilu 2014 Bebas Korupsi Menuju Indonesia Baru, di Kampus Universitas Pelita Harapan (UPH), Karawaci, Mahfud MD mengatakan, korupsi di Indonesia sudah semakin masif dan menyebar luas. "Kita harus menampilkan pemimpin yang bersih dan kuat, yang bisa mengatasi persoalan bangsa, pada pemilu mendatang," katanya.

Acara diselenggarakan Pusat Studi Konstitusi dan Anti-Korupsi (Pusaka) UPH bersama Mahkamah Konstitusi, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Kemitraan, dan TIRI Integrity Action. Hadir pula Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad.

Mahfud mengatakan, pemimpin yang baik harus diciptakan dari proses pemilihan yang baik. Pemilu selama ini belum menghasilkan pemimpin yang baik karena marak dengan politik transaksional. "Yang ditawarkan tak hanya jabatan, tetapi juga uang," ujarnya.

Husni mengatakan, pemilu tidak bisa disalahkan ketika melahirkan pemimpin yang tidak bersih. Menurut dia, yang salah bukan pemilunya, melainkan pelaku-pelaku di dalam pemilu, yaitu para kontestan pemilu.

Menurut Muhammad, berbagai upaya preventif perlu dilakukan untuk mencegah kecurangan dan pelanggaran pemilu dengan melibatkan masyarakat secara lebih luas.
(Sumber: Kompas)

Setelah kita membaca teks di atas memberikan pengetahuan bahwa pada kenyataannya kehidupan politik tidak bisa dipisahkan peran para pengusaha dalam keterlibatannya menentukan pemilihan para pemimpin di semua level atau tingkatan. Mulai dari pemimpin puncak negara seperti "Presiden dan Gubernur dan Bupati/Walikota, pengaruh dan keterlibatan para pebisnis sebagai pemodal dalam melakukan investasi politik. Walaupun motif dan tujuan melakukan investasi banyak ragam alibinya, namun sudah dipastikan para pebisnis tetap tidak mau rugi dan kekuasaan dianggap sebagai sumber kekuatan dalam ekspansi bisnisnya. Bahkan di berbagai tempat mereka berperan sebagai aktor politik misalnya menjadi Presiden, Gubernur dan Bupati/ Walikota. Pada kenyataanya para pebisnis yang bereksperimen menjadi aktor politik, sering menghadapi kekecewaan mulai dari modalnya yang habis, bisnis berantakan, bahkan tidak sedikit yang masuk penjara, misalnya mantan Bupati Sragen Untung Wiyono. Para pemodal tersebut selain menjadi aktor politik, juga ada yang tetap merambah menjadi pebisnis di lahan bisnis plat merah, seperti menjadi Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Misalnya Emirsyah Satar sebagai Dirut PT. Garuda Indonesia dan Ignasius Jonan sebagai Dirut PT. Kereta Api Indonesia (KAI). Pada umumnya cara berpikir pebisnis adalah "Hutang" sebagai instrument dalam melakukan ekspansi bisnis. Oleh sebab itu wajar jika kedua BUMN tersebut sebagai contoh memiliki hutang yang besar. Bagi seseorang yang profesional seperti kedua orang tersebut "hutang" sebesar apapun tidak merasa was-was, perusahaan akan menjadi bangkrut atau pailit. Karena mereka ahli dalam menghitung neraca rugi laba perusahaan atau menyulap perusahaan yang rugi menjadi untung, dengan berbagai teknik dan metode *financial* yang mereka kuasai, dengan kepala dingin. Apalagi perusahaan yang mereka kelola adalah perusahaan plat merah atau pemerintah, sudah dipastikan negara akan tetap turun tangan jika perusahaan bangkrut. Pada era pemerintahan Orde Baru dan era reformasi, sangat sedikit pemerintah menutup BUMN, kecuali PT. Merpati Air Line. Dalam analisis ilmu ekonomi-politik, para pemodal juga tidak sedikit yang hanya berorientasi sebagai "pembonceng gratis" (*Free Rider*) atau sebagai "pemburu rente (*Rent Seeker*). Kejahatan kooporasi pada umumnya sangat nyaman bermain di perusahaan plat merah, dalam konteks kepentingan politik yang telah di agendakan. Oleh sebab itu ketika muncul fenomena forum direksi mengajukan uji materi tentang peraturan perundangan yang mengatur mengenai "aset BUMN sebagai keuangan negara", mengusulkan agar "aset BUMN bukan sebagai

keuangan negara, boleh jadi memiliki agenda tersembunyi dalam melakukan ekspansi bisnisnya. Aset BUMN yang ribuan trilun dan keuntungan BUMN yang juga terus naik, sesungguhnya menjadi harapan publik agar kontribusi peran BUMN lebih nyata dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu sebenarnya rakyat kalangan menengah ke bawah sering mendiskusikan peran BUMN dalam memperkuat ketahanan ekonomi negara di tengah era global dan pasar bebas. Membanjirnya barang produk luar negeri, melonjaknya harga bahan kebutuhan pokok dan barang primair lainnya, pada hakekatnya kegagalan BUMN sebagai fondasi ekonomi nasional. Ditengah daya beli masyarakat yang rendah, sudah barang tentu akan merugikan masyarakat luas. Produk barang publik (*public good*) seperti listrik, BBM, jalan Tol, Air Bersih, Transportasi; pesawat udara, kereta api, yang semuanya dikelola oleh BUMN, harganya terus naik bahkan kenaikan ada yang di payungi peraturan perundangan. Misalnya jalan TOL walaupun pelayanan jalan tol buruk tetapi tariff tol terus naik, karena mandat peraturan perundangan. Di kalangan kelas menengah ke bawah sebenarnya rakyat hidup terus menderita dan rakyat banyak menjerit tetapi pemerintah hanya berucap "prihatin dan agar rakyat bersabar, karena sedang terjadi fluktuasi ekonomi global yang melanda negara maju. Fakta empiristik di atas pada hakekatnya sebagai konsekuensi logis perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan.Dalam konstitusi negara dikatakan bahwa sektor publik yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Secara konstitusional mandat rakyat kepada negara dan pemerintah adalah negara dan pemerintah harus kuat dan memiliki peran yang utama dalam mengatur perekonomian nasional. Perkembangan dewasa ini telah terjadi pergeseran paradigma dari pemerintahan yang kuat atau sentralistik menuju pemerintahan demokrasi. Ketika kewenangan atau otoritas negara sudah diserahkan kepada BUMN atau swasta, maka kebenaran atas nama negara sudah dikalahkan oleh kebenaran otoritas pasar. Dengan kata lain jika sektor publik atau yang disebut "*public good"* telah bergeser menjadi barang komoditi atau *private good*" yang penggunaannya ditentukan melalui mekanisme pasar, maka rakyat yang daya belinya rendah akan dirugikan. Secara perlahan tapi pasti rakyat semakin tidak mampu mengkonsumsi barang publik tersebut. Misalnya rakyat semakin tidak mampu makan daging sapi, rakyat semakin sulit naik kereta api ekonomi yang sudah nyaman karena harganya sudah mencapai di atas seratus ribu. Dewasa ini yang menikmati kereta ekonomi tersebut yang dahulu kereta rakyat, kini sudah bergeser kelas ekonomi banyak diminati oleh kelas menengah. Bahkan sistem tiketing "*on line*" semakin menjadikan harapan rakyat akan dapat naik kereta api ekonomi.

Uraian penjelasan tambahan di atas yang cukup mendalam atas tanggapan topik mengenai "tarnsaksional kekuasaan", tiba giliran pada pertanyaan atau kuis sebagai pelengkap kajian topik tersebut di bawah ini.

1. Sejauhmana para pejabat publik mampu menjaga kewibawaan kekuasaanya dari pengaruh dominasi para pebisnis yang semata-mata hanya untuk kepentingan ekspansi bisnis yang dapat merugikan kepentingan publik?
2. Peran partai politik sebagai representasi masyarakat luas dalam memperjuangkan aspirasi kepentingan publik, tetapi kecenderungan saat ini manajemen partai justru menumbuhkan terjadinya "transaksional kekuasaan", mengapa?
3. Ciri kehidupan partai politik di era reformasi diisi oleh para pebisnis menjadi pengurus inti partai politik, sejauh mana perubahan karakter para pebisnis yang berorientasi profit menjadi orientasi nonprofit ketika menjadi negarawan mereka memegang kekuasaan di pemerintahan?
4. Kehidupan politik pada era reformasi kekuasaan transaksional menjadi trend dalam percaturan politik akan membentuk perilaku politik para elit, sejauh mana kebijakan pemerintah di bidang politik mampu membendung kecenderungan negatif tersebut?
5. Seperti diketahui bahwa hasil dari perilaku transaksional kekuasaan terutama dalam pemilihan umum kepala daerah, sebanyak 318 kepala daerah terlibat kasus pidana korupsi, apa langkah dan tindakan pemerintah dan juga msyarakat terhadap kasus tersebut di atas?

## 4.10 MATINYA POLITIK IDEOLOGI

Mengantarkan kajian tentang ideologi menjadi suatu keniscayaan di tengah kehidupan hiruk pikuk yang lebih berorientasi pada nilai pragamatisme ketimbang nilai idealisme. Dewasa ini kajian mengenai ideologi semakin jarang terdengar, bahkan sayup-sayup menghilang. Kajian mengenai ideologi sudah barang tentu syarat dengan teori filsafat, nilai-nilai, norma, etika dan moral yang seolah jauh dari realita yang ada dalam masyarakat. Sebenarnya dalam kajian ideologi tidak hanya dibahas pada dimensi idealisme akan tetapi juga dibahas mengenai dimensi realitas dan dimensi fleksibilitas. Namun dalam kehidupan yang serba materialistik kecenderungan kehidupan lebih didominasi oleh cara berpikir dan bertindak pragmatis. Oleh sebab itu pergeseran ideologi yang dianut oleh partai politik sangat mudah terjadi. Misalnya partai politik yang pada awalnya menghusung ideologi Islam, dalam perjalanannya melakukan eksperimen menjadi partai yang terbuka dan lebih inklusif dan prulalistik. Contoh seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang semula kenggotaannya secara totalitas adalah dari kalangan islam tradisional atau sering disebut kalangan nahdiyin, tetapi saat ini sudah terbuka menerima dari kalangan non muslim menjadi anggotanya. Demikian pula haluan ideologi partai politik sudah mulai cendrung meluntur, tergerus oleh nilai-nilai hedonis dan materialistik serta pragmatis. Fenomena yang terjadi dikalangan elite partai sebagai "orang kaya baru" (OKB) bahkan banyak anggota parlemen dan kepala daerah yang berasal dari partai politik yang melakukan korupsi dan menjadi narapidana. Fenomena tersebut mencerminkan kehidupan partai politik sudah kehilangan "ruh" ideologi alias matinya politik ideologi.

### 4.10.1 Eksistensi Sebuah Ideologi

Sekitar abad 19-an Politik Ideologi menjadi episentrum bagi negara-negara besar maupun negara yang baru merdeka. Negara tanpa ideologi seolah kehilangan "ruh"nya, artinya ideologi merupakan jiwa dan nyawa bagi kehidupan suatu negara. Pada waktu itu dua kutub ideologi besar yang seolah-olah berhadapan satu sama lain yaitu ideologi Liberal-Kapitalis dan Komunis-Sosialis. Bahkan di Indonesia, para *Founding Fathers* antara lain Bung Karno mencoba merumuskan gagasan ideologi yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran *Karl Marx, Hegel dan Engel* yang disebut "Marhaenisme" diuji cobakan atau dipraktekkan sebagai dasar ideologi "Partai Nasionalis Indonesia" (PNI). Kemudian di masa awal kemerdekaan Indonesia, PNI menjadi partai yang cukup kuat dan berpengaruh terhadap kebijakan Pemerintah di masa kepemimpinan Pemerintahan Ir. Soekarno. Menjelang Indonesia merdeka ketika BPUPKI dan kemudian menjadi PPKI gagasan Bung Karno tentang ideologi negara dibahas bersama dengan gagasan Moh. Yamin dan Surpomo merumuskan falsafah negara

dan dasar negara yang selanjutnya oleh Bung Karno disebut "Pancasila". Ideologi "Pancasila" sebagai ideologi negara Indonesia mampu sukses membawa Indonesia bersatu ditengah-tengah masyarakat yang majemuk, plural atau heterogen tapi bisa dipersatukan dalam semboyan "Bhineka Tunggal Ika". Pada waktu itu "Politik Ideologi" menjadi "sumbu" yang mampu memberikan "Inspirasi", semangat dan sumber energi dalam membangun bangsanya menuju pada cita-cita "kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur baik lahir maupun batin".

Namun dalam perkembangannya di tengah pergaulan dunia, pertarungan *global ideology* besar antara liberal-kapitalis yang diwakili oleh negara Amerika Serikat, Eropa, dan Inggris berhadapan dengan Komunis-Sosialis yang diwakili oleh Uni Soviet, membawa ketegangan dan bahkan konflik yang menyeret negara lain berada pada perang antar negara bahkan perang saudara. Keberadaan "ideologi Pancasila" berada pada Tarikan dua kutub tersebut, realitanya "Ideologi Pancasila" berada di persimpangan jalan pada masa era orde lama di bawah kepemimpinan Bung Karno, pengaruh "Komunis-Sosialis" cukup kuat dan ketika pada masa orde baru pengaruh Liberal Kapitalis sangat kuat, sehingga secara perlahan dan pasti "Pancasila" mulai berkurang sinar ruhnya. Surutnya pengaruh politik ideologi pada kenyataannya terjadi pada ideologi Komunis-Sosialis yaitu menjelang berakhirnya abad 20 (1986-an) di Uni Soviet ideologi Komunis-Sosialis diganti dengan gerakan *"Prestorika" Gorbachev* yang merupakan lonceng kematian ideologi Komunis-Sosialis, maka pada saat itu negara-negara yang tergabung dalam Uni Soviet dan bahkan berpengaruh ke Negara "Yugoslavia" memisah diri dan menyatakan "merdeka" sehingga praktis negara Adidaya tersebut bubar, kembali menjadi Negara "Rusia" sebagaimana pada tahun 1918 yang lalu. Berakhirnya pertarungan ideologi besar tersebut yang dimenangkan oleh ideologi Liberal-Kapitalis diabadikan dalam tulisan *Francis Fukuyama (1994)* dalam Buku "*The End History In The Last Man*". Memasuki abad 21 yang disebut abad Milenium pemegang kekuasaan dunia di bawah pengaruh ideologi "Liberal Kapitalis" di bawah kendali "Amerika Serikat". Akan tetapi ketika "krisis global" yang melanda Amerika Serikat di tahun 2008 dan bahkan sudah merambah ke negara Eropa lainnya, merupakan fenomena yang menarik "apakah tanda-tanda lonceng kematian akan terjadi pada ideologi Liberal Kapitalis juga, yang akan mengalami nasib yang sama dengan keruntuhan ideologi "Komunis". Sedang dilain pihak negara-negara yang menganut ideologi Komunis-Sosialis seperti Brazil, Rusia, dan Cina ditambah India, justru sudah mulai bangkit kemampuan ekonominya menjadi negara yang maju yang mampu melepaskan diri dari bantuan IMF dan Bank Dunia. Bagaimana posisi ideologi Pancasila, dalam perkembangan masih tetap berada di persimpangan jalan diantara dua kutub tersebut. Pergeseran kutub ke kiri dan ke kanan kemudian bergeser ke kiri kembali, bukankah hal yang aneh, karena sesungguhnya hanya pergantian

peran dan tugas saja, yang menentukan adalah sang sutradara atau dalangnya. Siapa sang sutradara penguasa dunia sesungguhnya? Menjawab pertanyaan tersebut, John Perkin (2006) dalam bukunya *"Secreet History of An American Empire"*, membeberkan sinyal bahwa sesungguhnya penguasa dunia adalah bukan negara Amerika Serikat sebagaimana yang dikatakan *Fukuyama(1992)* melainkan sekelompok kekuatan yang tidak tunduk kepada rakyat (dipilih melalui demokrasi) dan merasa jabatan tidak dibatasi hukum.

## 4.10.2 Haluan Ideologi Partai Politik

Dalam konsep negara modern, peranan partai politik memiliki posisi sangat vital dan strategis, sebab negara yang tidak memiliki partai politik maka negara tersebut berbentuk kerajaan atau monarchi, negara totaliteir atau facisme. Pendek kata partai politik merupakan keniscayaan keberadaannya dalam suatu negara. Partai politik sebagai organisasi pada hakekatnya sama dengan jenis organisasi-organisasi lainnya, namun yang membedakan adalah bahwa partai politik memiliki kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan, dan kewenangan ini tidak dimiliki oleh organisasi jenis manapun. Esensi penyelenggaraan pemerintahan melalui hasil pemilu inilah mau tidak mau, suka atau tidak suka, negara harus berdiri kokoh dan ditopang oleh partai politik yang kuat, solid dan besar dukungan rakyatnya. Negara yang pemerintahannya tidak didukung oleh partai besar dan kuat, maka akan sering terjadi ketidakstabilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Partai politik besar dan kuat lazimnya karena memiliki sistem nilai yang dipegang teguh oleh para pengikutnya. Sistem nilai yang menjadi pedoman sering disebut sebagai *Ideologi*. Oleh karena itu menurut *Alfian (1980)*, partai politik berbasis ideologi yang mengakar, biasanya partai tersebut pandai dan mampu memelihara keseimbangan antara dimensi realita, dimensi idealisme dan dimensi fleksibilitas.

Namun dalam perkembangan globalisasi dewasa ini sesungguhnya juga tidak terlepas pula terjadi pertarungan ideologi besar dunia, sebagaimana dijelaskan *Fukuyama (1994)*. Sejak perang dingin *(détente)* berakhir maka sejarah telah selesai dan sejak ideologi sosialisme dan komunisme dikalahkan oleh liberal kapitalisme maka dunia dikuasai liberalisme-kapitalisme. Ketika dunia secara global dikendalikan oleh kapitalis liberal maka pergeseran kompetisi justru terjadi antara kapitalisme dengan kapitalisme, seperti dikatakan *Lesther Thurow (1996)* dalam *Nugroho (2006)*. Ketika ideologi kapitalisme liberal berekspansi ke hampir seluruh penjuru dunia melalui konsep globalisasi dan pasar bebas dijadikan instrument untuk menguasai dunia, maka seperti dikatakan *Hamel (1997)* dalam *Nugroho (2006),* kini persaingan dunia

tidak lagi antara negara dengan negara tapi persaingan antara pelaku bisnis yang satu dengan pelaku bisnis yang lain.

Sejak saat itu ekspansi tunggal ideologi liberal kapitalisme ke seluruh dunia menciptakan pengaruh globalisasi dan sistem pasar bebas. Penerapan ekonomi liberal kapitalismeytanpa disadari membawa implikasi terhadap sistem nilai masyarakat ke arah perilaku masyarakat yang materalisme, individualisme, sekularisme dan pragmatisme. Bahkan pengaruh nyata yang bisa dirasakan yaitu perilaku pragmatisme sudah sangat nyata dipertontonkan oleh para elit politik kita yang banyak tersangkut perkara korupsi. Kecenderungan yang muncul saat ini, partai politik sedang bermetamorfosa dengan perilaku pragmatisme yang banyak dilakukan para kader partai politik.

### 4.10.3 Ideologi Pragmatisme Menjadi Trend

Oleh karena itu peranan partai politik yang sedemikian strategisnya, jika tidak diurus dengan benar, sesungguhnya negara dan pemerintahan lambat laun sedang mengalami situasi yang kritis. Memang ada kecenderungan timbulnya banyak partai yaitu saat ini 10 partai dan kemungkinan ada 3 atau 4 partai baru pada pemilu tahun 2014. Namun manajemen partai sebagian besar tidak diurus dengan benar, fungsi-fungsi partai politik tidak berjalan efektif, hasil rekruitmen kader partai politik yang menjadi pejabat negara kurang berkualitas dan cenderung memiliki watak koruptor, terbukti hampir 300 kepala daerah tersebut terlibat kasus pidana korupsi. Jika basis ideologi partai politik mengakar kepada seluruh kader sudah barang tentu para pemimpin pemerintahan yang terpilih akan mewakili partai politik niscaya tidak akan ada kader terjerat oleh tindak pidana korupsi. Jumlah partai politik yang sulit dikurangi berpengaruh terhadap efektifitas penyelenggaraan pemerintahan yang dikendalikan oleh pemerintahan koalisi besar. Padahal jumlah partai yang banyak tersebut jika diidentifikasi berdasarkan basis ideologi, maka saat ini sebagai konstestan pemilihan umum 2014 sejumlah 12 partai politik. Jika diklasifikasi terbagi dalam ideologi nasionalis-sekuler (PDIP, Golkar, dan PKPI), nasionalis-demokrasi (NasDem), nasionalis-religius (PAN, PD, dan PKB), sosialis-demokrasi (Gerindra dan Hanura), dan Islam (PPP, PBB, dan PKS). Menengok sejarah perkembangan ideologi di Indonesia pada masa penjajahan, cikal bakal partai-partai politik berbasis ideologi nasionalis, sosial-komunis, dan agama. Dalam perkembangan dewasa ini muncul istilah dalam fragmentasi ideologi seperti disebutkan di atas, yaitu: nasionalis-sekular, nasionalis-religius, sosialis-demokrasi, nasionalis-demokrasi, dan agama (Islam, katholik, kristen protestan). Sebagai catatan partai politik yang menghimpun umat katholik dan kristen protestan kedalam "Partai Damai Sejahtera (PDS) pada pemilihan umum tahun 2009

sebagai peserta pemilu, namun tidak lolos *electoral trheshold*. Pembatasan jumlah partai politik sesungguhnya dapat diarahkan menjadi kesepakatan yang disetujui seluruh rakyat Indonesia berdasarkan pembagian dan pengelompokan ideologi. Oleh sebab itu dalam sistem politik Indonesia cukup memiliki 6 (enam) partai politik berdasarkan pengelompokan platform ideologi yang sama. Penyederhanaan jumlah partai politik berdasarkan basis ideologis merupakan tawaran yang ideal normatif. Ketika pada masa orde baru penggabungan partai politik dipaksa melalui penggabungan (fusi) menjadi 3 (tiga) partai politik.

Undang-Undang Kepartaian, Nomor 2 Tahun 2008 dan telah disempurnakan di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, ternyata belum efektif mengendalikan terhadap berdirinya sejumlah partai politik meskipun seperti disebutkan di atas, dalam pemilu tahun 2014 dipastikan tambah 3 (tiga) parpol yang boleh mengikuti sebagai peserta pemilu, yaitu Partai Nasdem, PBB dan PKPI. Namun persoalan pengendalian jumlah parpol ke depan masih tetap menjadi kendala dalam upaya mengendalikan berkurangnya jumlah partai dalam setiap menghadapi pemilu. Apakah berkurangnya partai lambat laun akan berjalan secara alami atau sebaliknya. Sebab dengan banyaknya partai, seperti dikatakan di atas dengan koalisi besar penyelenggaraan pemerintahan kurang efektif sehingga potensi silang sengketa antar partai politik kelak akan semakin tajam dan tidak mustahil justru akan menghancurkan bangsanya. Peran parpol dalam melakukan konsolidasi kekuasaan belum tuntas, sehingga tidak optimal dalam melakukan kaderisasi atau regenerasi. Pada akhirnya ketika rekruitmen pemimpin untuk jabatan publik seperti kepala daerah tidak dipersiapkan dengan baik. Para pemimpin terutama pada level Gubernur dan Bupati/Walikota terpilih melalui demokrasi langsung, sebagaimana yang telah dianalisis pada bab terdahulu pada kenyataannya membawa implikasi, *pertama;* banyak yang tidak kompeten dan menunjukkan kepemimpinan yang buruk, *kedua;* banyak pula yang tersangkut tindak pidana korupsi, *ketiga;* dengan tidak memiliki kompetensi yang cukup sebagai pemimpin, maka tidak serius mengurus penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu fenomena yang muncul yaitu istilah politisasi birokrasi, raja kecil di daerah, jika hal tersebut terus berlangsung boleh jadi akan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi ”demokrasi langsung” sebagai model demokrasi yang oleh para elite politik dianggap mampu menyelesaikan problem penyelenggaraa kenegaraan dan pemerintahan. Secara teoritis kualitas demokrasi berkorelasi dengan partai politik yang kuat dan mapan dalam menjalankan peran dan fungsinya. Jika partai politik mampu memelihara peran dan fungsi dengan baik maka akan mendorong pelaksanaan demokrasi yang berkualitas.

Dalam konteks ”demokrasi langsung” yang dilaksanakan pada era reformasi, maka sejarah kelahiran partai politik dapat dijelaskan bahwa partai-partai politik yang

kelahirannya pada tahun 1998 baru berusia 10 (sepuluh) tahun lebih dan masih eksis menjalankan perannya bahkan termasuk yang sedang menggeliat perkembangannya, menghadapi dilema yang sama dengan kebanyakan partai-partai lain, yaitu berada di tengah tarikan arus idealisme dan pragmatisme. Kesibukan kegiatan partai yang cenderung tidak substansial, padahal seharusnya melakukan agregasi kepentingan rakyat, seperti terhadap pengangguran, PHK, nasib buruh industri, penggusuran PKL, kelangkaan pupuk, korupsi BLBI, semakin membumbung harga-harga kebutuhan pokok, pengelolaan yang buruk mengenai BBM dan energi, kehidupan petani dan nelayan yang tidak kunjung mengalami perbaikan dan lain-lain. Di lain pihak para politisi masih tergoda oleh kesibukan materi, dengan ikut mengurusi permainan tender proyek-proyek besar di lembaga instansi pemerintah akibat kontrol anggaran sampai satuan tiga. Sehingga pergeseran nilai-nilai ideologis tersebut mudah terjadi jika manajemen partai tidak efektif memelihara dimensi idealisme, realita dan dimensi fleksibilitas. Ketidakpatuhan para pengikutnya terhadap nilai-nilai ideologis akan mudah terjebak oleh sikap dan perilaku pragmatisme. Padahal setiap partai politik harus mempersiapkan diri untuk memimpin dan mengendalikan pemerintahan pada setiap periode hasil pemilihan umum. Oleh karena partai politik merupakan produsen pemimpin-pemimpin negara, maka pola rekruitment dan pola kaderisasi harus tertata dengan baik dan harus berjalan secara sistematis, teratur dan terprogram.

### 4.10.4 Melemahnya Ideologi Partai Politik

Partai-partai politik yang ingin cepat besar akan menghadapi situasi dilematis, karena obsesinya memenangkan pemilu hanya berorientasi pada kekuasaan tanpa landasan ideologi yang mapan mendorong mengambil kebijakan yang pragmatis. Fenomena yang cukup menghebohkan adalah direkrutnya para artis untuk dijadikan disamping sebagai *vote getter* atau calon jadi. Popularitas keartisan menjadi *trend* untuk ramai-ramai dijadikan sebagai obsesi untuk menarik simpati masyarakat. Oleh sebab itu para pejabat publik saat ini banyak dari kalangan artis seperti; Rano Karno Wagub di Provinsi Banten, Dede yusuf di Provinsi Jawa barat dan terakhir Dedy Mizwar menggantikan posisi Dede Yusuf dan lain-lain. Fenomena ini memang secara normatif sah-sah saja sebagai warga negara yang memiliki hak politik yang sama dengan warga negara lainnya. Sebab sebagaimana dijelaskan di atas bahwa sumber rekruitmen pemimpin pemerintahan atau pejabat publik dari partai politik yang ditopang oleh kekuatan pendukung yaitu ormas, LSM dan organisasi profesi yang menjadi *underbow* partai politik. Sedangkan organisasi profesi keartisan seperti PARFI pada hakekatnya tidak untuk mempersiapkan para anggotanya menjadi pemimpin pemerintahan dan pejabat negara. Sejatinya ini menunjukkan betapa bangsa ini sedang menghadapi krisis

pemimpin. Ketokohan para pemimpin partai politik pada saat ini berada pada titik nadir. Akibat pola rekruitment yang salah dan kaderisasi yang tidak berjalan baik, menyebabkan para pemimpin partai berada di menara gading.

Di samping itu tidak mengakarnya para kader partai, disebabkan pola rekruitment yang belum mantap, sehingga ketika partai politik memutuskan kebijakan calon legislatif terpilih dengan berdasarkan suara terbanyak menimbulkan kompetisi tajam. Para kader yang dipasang nomor 1 (satu), tetap merasa khawatir jika tidak mampu mendapatkan suara terbanyak, karena di daerah pemilihan reputasi dan pamornya kalah dengan kader di tingkat daerah, sehingga kompetisi tidak sehat terjadi di internal partai dan justru menjadi tidak produktif bagi perjalanan partai politik tersebut.

Demikian pula fenomena artis yang menjadi Caleg seperti diuraikan di atas, mendapat respon masyarakat yang beragam ada pro dan kontra. Sesungguhnya pada prinsipnya sumber kepemimpinan baik di legislatif maupun eksekutif, bisa bersumber dari berbagai potensi bangsa. Namun kalau dicermati karakteristik sosial budaya keartisan yang khas yaitu; santai, cuek, lebih berpikir personal, glamour, suka hura-hura, gaya hidup yang tidak teratur. Jika ada artis yang capable dan kompeten di bidang politik sifatnya sangat kasuistis dan sedikit, karena lembaga keartisan bukanlah sumber rekruitment pemimpin secara kolektif. Berbeda dengan Ormas dan LSM lebih bersifat kolektif yang keseharian bergelut melakukan advokasi terhadap mesyarakat yang marginal. Jiwa pejuang dan kepedulian terhadap nasib rakyat yang kurang beruntung merupakan modal sosial dalam menyiapkan kaderisasi sebagai pemimpin sesuai profesi dan kompetensinya. Fenomena di atas terjadi oleh kaena sistem pemilihan umum campuran antara proporsional dengan sistem daftar dan suara terbanyak menuntut persyaratan popularitas bagi seorang calon legeslatif maupun calon kepala daerah. Kondisi masyarakat Indonesia dewasa ini peran tokoh informal dan ulama popularaitasnya sudah mulai bergeser ke arah para artis dan selebriti. Popularitas yang mudah terangkat melalui peran sebagai artis atau selibritis karena peran media massa yang banyak mengeksploitasinya untuk kepentingan bisnis hiburan. Oleh sebab itu melemahnya kadar ideologi partai politik menyebabkan rendahnya kemampuan partai politik dalam menyiapkan kader pemimpin yang populer juga disukai dan diidolakan masyarakat luas (elektabilitas). Kekosongan kader pemimpin pada akhirnya diisi oleh para artis yang diuntungkan oleh sistem pemilihan umum model campuran tersebut.

### 4.10.5 Apatisme Masyarakat terhadap Partai Politik

Apabila penjelasan di atas dijadikan sebagai rujukan untuk evaluasi eksistensi peran parpol selama ini, memang ada kecenderungan kuat sedang mengalami pergeseran

dan perubahan nilai-nilai ideologis yang cukup signifikan. Pendekatan pragmatisme yang dilakukan di era sekarang memang cukup mengalami perubahan persepsi masyarakat terhadap peran partai politik yaitu; pertama; kesan di masyarakat bahwa parpol lebih banyak mengurus dirinya sendiri ketimbang mengurus rakyatnya, kedua; rakyat sudah tidak mempercayai lagi peran parpol sebagai artikulasi dan agregator aspirasi masyarakat, ketiga; kondisi rakyat saat ini appriori dan apatis terhadap kegiatan politik terutama dalam pemilihan kepala daerah, keempat; jika parpol gagal melakukan konsolidasi internal, maka ada kecenderungan dalam pemilu tahun 2014 menjadi golput atau tidak menggunakan hak suara melampaui 40% atau lebih, seiring dengan hasil pemilihan kepala daerah. Partai politik sesungguhnya telah berjuang keras dalam upaya penggalangan massa, bahkan mendeklair sebagai partai terbuka dan juga partai kader. Namun ketika kecenderungan pendekatan pragmatis baik secara institusi maupun perorangan karena menghadapi situasi yang dilematis sebagai kebijakan pragmatis lebih menonjol, sangat dimungkinkan bangunan partai akan rapuh. Sebab dengan pragmatisme tersebut anggota tidak memiliki militansi, sebagai kader partai, terutama dalam ikatan nilai ideologis relatif lebih kendor, lebih berorientasi kepada kepentingan sesaat.

## 4.10.6 Memperkuat Nilai Ideologis pada Partai Politik

Oleh karena itu menjadi tanggung jawab para pemimpin partai untuk memperbaiki citra partai di mata masyarakat yang sudah pada tahap cukup mengkhawatirkan. Mengingat peran parpol sebagai sumber lahirnya para pemimpin negara, maka manajemen dan fungsi partai politik sudah saatnya dibenahi secara profesional. Mengembalikan eksistensi peran parpol meskipun tidak mudah dalam kondisi arus pragmatisme yang kuat. Namun jika tidak dilakukan dengan tekad kerja keras maka akan sangat berpengaruh terhadap eksistensi negara, sebab negara berdiri kokoh jika didukung oleh seluruh rakyatnya sedang parpol merupakan representasi dari seluruh rakyat. Meskipun ditengah kuatnya nilai pragmatisme yang mempengaruhi terhadap para elit politik di Indonesia, akan tetapi partai politik tetap menjunjung tinggi dan mengusung nilai-nilai ideologis sebagai sumber perjuangan dalam mengangkat harkat dan martabat rakyat menuju kesejahteraan dan kemakmuran dalam kehidupan sehari hari, merupakan dasar dan landasan moral, ideologi dan nilai-nilai yang tetap ditegakkan oleh seluruh anggota partai politik.

### STUDI KASUS 4.10

Pada studi kasus yang kesepuluh (10) mengangkat topik " koalisi aliran tak relevan", topik ini terkait dengan judul di atas yaitu tentang "matinya politik ideologi". Topik

studi kasus ini dimabil dari diskusi politik yang dimuat oleh media massa "Kompas". Para pembicara dalam studi kasus yaitu A Malik Haramain dan Marwan Jafar dari PKB, Romahurmuzy dari PPP, Hidayat Nurwahid dari PKS, Agung Laksono dari Partai Golkar serta Tjatur Sapto Edi dari PAN dan dari kalangan militer yaitu Luhut Panjaitan. Dari diskusi para elite partai masih terdapat silang pendapat antara perlu dilakukan koalisi partai politik berdasarkan kesamaan ideologi namun pihak lain koalisi partai politik sudah tidak relevan berdasarkan kesamaan ideologi. Misalnya dalam pemilihan presiden pada tahun 2014 perlu digalang kembali partai-partai politik Islam berkoalisi. Untuk lebih bersemangat dalam kajian topik di atas perlu di baca dengan seksama topik diskusi dari media massa di bawah ini.

**Koalisi Aliran Tak Relevan**

*KOMPAS, Rabu 2 Oktober 2013*

Jakarta - Koalisi partai politik berdasarkan ideology atau aliran tidak relevan lagi diterapkan pada Pemilihan Umum 2014. Selain parpol sudah terbuka, koalisi berdasarkan ideologi juga diyakini sulit mewujudkan pemerintahan yang baik Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) A Malik Haramain, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10), mengatakan, koalisi parpol merupakan fakta politik yang tidak bias dihindari pada Pemilu Presiden 2014. Apalagi, syarat pencalonan presiden dan wakil presiden kemungkinan besar tidak berubah, yaitu oleh parpol atau gabungan parpol yang memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. Namun, kata Malik, koalisi seharusnya tidak dibangun berdasarkan kesamaan ideology atau aliran tertentu. "Koalisi harus inklusif, bukan eksklusif, terkotak-kotak berdasarkan ideology tertentu. Koalisi harus melintasi sekat-sekat eksklusivisme karena tujuannya membentuk pemerintahan yang baik," tutur Malik.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy menuturkan, partainya mendorong terbentuknya koalisi parpol berbasis Islam. Pernyataan ini disampaikan Romahurmuziy setelah PPP menggelar rapat konsultasi, Senin (30/9). Rapat itu juga merekomendasikan mendorong KetuaUmum PPP Suryadharma Ali sebagai capres 2014. Namun, Ketua PKB Marwan Jafarmenegaskan, koalisi parpol Islam tidak lagi relevan. Sebab, tidak ada lagi perbedaan antara parpol berbasis massa Islam dan partai nasionalis. PKB, kata Marwan, bukanlah partai Islam meski basis massanya adalah kaum nahdliyin. PKB merupakan partai terbuka dengan asas nasionalis religius.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR Hidayat Nur Wahid juga berpendapat, koalisi parpol harus terbuka dan tidak didasarkan pada kesamaan ideology atau aliran tertentu. Hidayat juga berpendapat, semua parpol akan realistis, memikirkan koalisi setelah tahu hasil pemilu legislatif diketahui. Ketua

Partai Amanat Nasional (PAN) Tjatur Sapto Edy juga mengatakan, belum memikirkan koalisi untuk mengusung capres dan cawapres. Menurut Tjatur, saat ini, PAN fokus memenangkan pemilu legislatif dengan harapan dapat mengusung Hatta Rajasa dalam pilpres mendatang.

**Dua Pasang**

Letnan Jenderal (Purn) Luhut Panjaitan memperkirakan, dengan semakin sedikitnya parpol peserta Pemilu 2014, kemungkinan hanya duacapres yang muncul tahun depan. "Ada yang unggul secara popularitas tetapi belum tentu kuat secara eligibilitas seperti Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Sebaliknya ada yang kuat secara suara partai seperti Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Nama lain adalah Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri, dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla," kata Luhut. Luhut juga memperkirakan, parpol di Indonesia akan mengerucut menjadi 6 atau 7 buah. Dari jumlah itu, hanya sedikit yang lolos persyaratan untuk dapat mengajukan pasangan capres dan cawapres sendiri.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menegaskan, pencalonan Aburizal Bakrie sebagai capres tidak akan dievaluasi pada Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar, Oktober ini. Dalam rapimnas itu, Golkar justru ingin menyerap masukan-masukan untuk semakin meningkatkan elektabilitas Aburizal. Agung juga menepis kemungkinan rapimnas menjadi ajang untuk mendorong adanya musyawarah nasional luar biasa. Begitu juga dengan wacana menggunakan rapimnas untuk mendorong adanya konvensi capres untuk menggantikan Aburizal sebagai capres. "Sudah diputuskan, capres Golkar adalah Aburizal. Meski elektabilitasnya belum setinggi Prabowo atau Jokowi, belum waktunya untuk evaluasi," ujarnya.

Berdasarkan teks topik diskusi yang dimuat media massa tentang koalisi antar partai politik dalam menyongsong pemilhan presiden pada tahun 2014, semua partai politik melakukan strategi yang tepat agar memiliki posisi yang lebih baik pada era pemerintahan yang akan datang. Strategi koalisi berdasarkan kesamaan ideologi, hampir semua pimpinan partai politik yang hadir dalam diskusi menolak gagasan tersebut. Kondisi saat ini koalisi berdasarkan kesamaan ideologi dalam arti politik aliran dianggap tidak relevan lagi. Ideologi partai tidak lagi dijadikan landasan kebijakan dalam koalisi partai politik dalam pemilihan presiden. Akan tetapi kesamaan kepentingan yang menjadi acuan dalam melakukan koalisi. Jika koalisi partai politik dalam pembentukan kabinet pemerintahan tahun 2014, berdasarkan pada "kesamaan kepentingan", maka dasar perjuangan partai politik akan tereduksi. Bangunan koalisi akan mudah rapuh seperti pengalaman kabinet pemerintahan hasil pemilu 2009, berjalan penuh dengan friksi dan kurang efektif. Untuk selanjutnya beberapa pertanyaan akan diajukan pada sesi diskusi ini yaitu sebagai berikut di bawah ini.

1. Sejauh mana dampak dari kehidupan partai politik yang sudah tidak mengindahkan garis-garis ideologi terhadap kepentingan rakyat?
2. Apa keuntungan dan kerugian pembentukan kabinet pemerintahan dari beberapa koalisi partai politik yang tidak berdasarkan kesamaan ideologi?
3. Mengapa kecenderungan partai politik di Indonesia kurang kuat basis ideologi dan lebih dominan unsur pragmatisme, meskipun partai politik tersebut pada awalnya memiliki basis ideologi?
4. Percaturan politik global memberikan indikasi adanya pertarungan ideologi besar dunia yang berpengaruh terhadap konstelasi eksistensi ideologi partai politik di Indonesia, bagaimana pendapat Saudara atas penyataan di atas?
5. Sejauh mana Ideologi Pancasila menjadi inspirasi dalam meletakan dasar garis ideologi partai-partai politik di Indonesia?

## 4.11 POLITISASI KONFLIK MASYARAKAT

Pada hakekatnya dalam kehidupan masyarakat yang saling berinteraksi memiliki tiga bentuk interaksi yaitu; "kerjasama, kompetisi dan konflik". Ketiga bentuk interaksi bersifat laten, artinya suatu ketika terjadi konflik antar masyarakat yang datangnya secara tiba tiba tanpa diketahui sebab musababnya. Kalau di negara maju koflik di masyarakat dikelola dengan baik, yang disebut manajemen konflik. Terkait dengan percaturan politik global dan politik nasional, konflik sering menjadi ajang perebutan kekuasaan. Latar belakang konflik di berbagai belahan dunia masing-masing negara saling berbeda. Konflik terbuka melalui serangan dari luar seperti di Irak dan Afganistan, dilatarbelakangi oleh motif ekonomi dan politik yaitu penguasaan ladang minyak dan pengendalian kekuatan negara-negara Islam. Sedangkan konflik melalui perang saudara di Mesir, Libya, Suriah, Libanon dan bebarapa negara Timur-Tengah lainnya juga dilatarbelakangi oleh motif yang sama dengan kedua negara tersebut di atas. Demikian pula di Indonesia fenomena konflik juga cukup beragam misalnya dilatarbelakangi oleh motif "suku, agama dan ras serta konflik pembebasan lahan, perselisihan tanah garapan serta konflik horizontal dalam pemilihan kepala daerah". Penjelasan di atas sebagai pengantar dalam melakukan kajian kemasyarakatan terutama mengenai "konflik di masyarakat" yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

### 4.11.1 Konflik Global

Apabila kita cermati dengan seksama perkembangan dunia akhir-akhir ini, konflik warga antar negara maupun konflik di dalam negeri suatu negara yang mengakibatkan terbunuhnya ratusan dan bahkan ribuan manusia tidak berdosa, merupakan tindakan kekejaman yang sudah di luar batas kemanusiaan. Peristiwa tahun 2004 ketika Irak diserbu oleh Tentara Amerika Serikat telah menghancurkan seluruh infrastruktur kehidupan warga Irak dan terbunuhnya puluhan ribu manusia. Kejadian itu belum reda, di penghujung akhir tahun 2008 di Palestina terjadi peristiwa yang sama yaitu "Serangan Israel terhadap penduduk Palestina di Jalur Gaza", juga memporak-porandakan infrastruktur kehidupan manusia dan sudah terbunuhnya ribuan orang lebih. Meskipun antara Amerika dan Israel dalam melakukan agresi atau penyerbuan terhadap negara lain memiliki alasan yang berbeda; kalau Amerika Serikat berdalih bahwa Irak menyimpan "Senjata Pembunuh Massal" yang sampai saat ini belum terbukti, sedangkan Israel berdalih "Sedang memburu Kelompok HAMAS" merupakan kelompok yang dianggap berbahaya bagi Israel karena mengganggu keinginan atau ambisi Israel menguasai wilayah Palestina.

Tragedi dua peristiwa yang mengenaskan, bagi kita di Indonesia, sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan sudah barang tentu menimbulkan rasa solidaritas. Oleh karena itu sesungguhnya ketika dunia sudah mengglobal, maka hubungan dunia internasional merupakan suatu keharusan bagi eksistensi suatu negara. Peristiwa yang terjadi di Palestina punya pengaruh terhadap kebijakan strategis yang harus diambil oleh pemerintahan suatu negara. Apalagi tragedi Palestina bisa memperluas konstelasi konflik menuju Perang Dunia III, tidak hanya di wilayah Timur-Tengah tapi sudah meluas ke peta konflik sampai di Asia ketika di awal tahun 2013 lagi-lagi persoalan "penggunaan nuklir" oleh Korea Utara, memicu konflik dan kemarahan negara Paman Sam yaitu Amerika Serikat.

Dua fenomena tentang peristiwa perang yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel tersebut di atas, kedua bangsa ini seolah tidak pernah mendengarkan opini dunia. Masyarakat internasional meminta untuk menghentikan segera peperangan yang mengakibatkan tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Namun keduanya tetap pada pendirian masing-masing melanjutkan kebijakan pemerintahannya. Amerika dan Israel memang memiliki hubungan simbiose mutualistis dalam rangka ambisi menguasai dunia menuju *"New World Order"*. Sehingga ketika situasi merasa sudah bisa dikendalikan, maka mereka seperti bersikap biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu.

## 4.11.2 Perang Dunia ke III Sudah Dimulai

Situasi akhir-akhir ini yang terjadi di "Irak, Palestina, Afganistan, kemelut di dalam negeri di Pakistan, India terutama di Mumbai, Thailand, Korea Utara dan peristiwa tragedi kemanusiaan lainnya juga dialami di negara lain termasuk Indonesia". Rangkaian peristiwa konflik kekerasan tersebut merupakan sinyal sebagai pra kondisi menuju perang dunia ketiga. Meskipun oleh*Samuel P. Huntington tahun 1996 dalam buku The Clash of Civilization and The Remaking of World Order, memberikan sinyal bahwa "Perang Dunia Ketiga" akan ditandai oleh adanya perang peradaban (The Clash of Civilization) antara dunia Barat dan Timur. Dunia Barat diwakili oleh Amerika Serikat dan sekutunya dan Dunia Timur diwakili oleh Koalisi Islam dan Konfusius (Cina).* Namun sesungguhnya dalam catatan sejarah lainnya berbicara tentang perang dunia ketiga sebenarnya sudah sejak lama telah dirancang perang dunia, yaitu oleh seorang Jenderal Amerika; *"Albert Pike"* pada tahun 1871, merancang pemikiran tiga perang dunia yaitu; *Pertama;* tujuan Perang Dunia I adalah untuk menjatuhkan sistem Cysar di Rusia dan menjadikan negeri itu benteng komunis. *Kedua;* tujuan Perang Dunia II meningkatkan kekuasaan politik Zionisme hingga ia mampu mendirikan negara Israel di Palestina. Demikian pula mendukung komunisme internasional

hingga dapat berkembang menjadi sesuatu kekuatan yang dapat mengimbangi dunia Masehi. *Ketiga;* sedangkan Perang Dunia III adalah bertujuan untuk menyampaikan dunia kepada suatu keadaan; ketidakberdayaan total dalam kehidupan pemikiran, kerohanian dan perekonomian, di samping itu penghancuran manusia di seluruh penjuru dunia.

> *Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Albert Pike mempersiapkan dengan teliti yaitu Pertama; Perisapan untuk Perang Dunia I adalah dengan mengeksploitasi pertikaian antara Inggris dan Jerman yang telah ditimbulkan kelompok cahaya dalam kedua negara itu. Kedua; persiapan untuk Perang Dunia II adalah perselisihan antara fasisme (yang mencakup fasisme dan nazisme), dan gerakan Zionisme politik dan akan berakhir dengan dihancurkannya yang pertama sesuai dengan apa yang direncanakan. Ketiga; sedangkan persiapan untuk Perang Dunia III akan merupakan pertarungan yang dikobarkan orang-orang cahaya antara Zionisme politik dengan pemimpin-pemimpin dunia Islam, dimana yang satu akan menghancurkan yang lainnya.* (Muhammad Safwat as - Saqa Amini dan Sa'adi Abu Habib, Al Musuniyah (*Gerakan Freemasonry*), alih bahasa Mahtab Rabitah Jakarta, 1982, hal.15).

Skenario perang dunia III sebagai penggerak utama adalah gerakan Zionisme Internasional, yang hingga saat ini tetap melanjutkan perjuangannya untuk menguasai dunia dalam satu pemerintahan yang disebut *"Super Government"*. Keinginan atau ambisi melalui gerakan yang kadang kala terselubung dan penuh kerahasiaan dalam membangun sebuah kerajaan atau Imperium dunia, dilakukan dengan berbagai cara melalui kaki tangan Amerika Serikat. Bahkan dunia sesungguhnya dikendalikan oleh suatu imperium yang oleh *John Perkins (2007)* seperti yang ditulis oleh Budiarto Shambazy dalam kata pengantar buku *"The Screet History of The American Empire"* dijelaskan bahwa, Imperium *(Empire)* adalah negara bangsa yang mendominasi negara bangsa lainnya dan menunjukkan satu atau lebih ciri-ciri berikut:

> 1). Mengeksploatasi sumber daya dari negara yang didominasi, 2). Menguras sumber daya dalam jumlah yang tidak sebanding dengan jumlah penduduknya jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, 3). Memiliki angkatan Militer yang besar untuk menegakkan kebijakannya ketika upaya halus gagal, 4). Menyebarkan bahasa, sastra, seni dari berbagai aspek budayanya ke seluruh tempat yang berada di bawah pengaruhnya, 5). Menarik pajak bukan hanya dari warganya sendiri, tetapi juga dari orang-orang dari negara lain, dan 6). Mendorong penggunaan mata uang nya sendiri di negara-negara yang berada di bawah kendalinya. Ciri yang ke 7). Imperium ini dikuasai sekelompok orang yang secara kolektif bertindak seperti Raja, mereka menjalankan korporasi. Korporasi terbesar

dan secara tidak langsung, pemerintahan (Amerika Serikat), lewat korporasi terebut. Mereka bisa bergerak leluasa diantara bisnis dan pemerintahan. Karena merekalah yang mendanai kampanye-kampanye politik dan media, maka mereka mengendalikan para pejabat yang terpilih dan informasi yang diterima warga, orang-orang inilah (Korporatokrasi) yang memegang kekuasaan, terlepas apakah gedung putih atau kongres dikendalikan oleh partai Republik atau Demokrat. Mereka tidak tunduk kepada rakyat dan masa jabatan mereka tidak dibatasi hukum.

Apabila diteliti secara seksama yang dimaksud ciri ke tujuh sebagai sebuah negara *imperium* seperti yang disampaikan "*John Perkins;* diduga kuat bahwa kekuasaan hegemonik yang tersembunyi tersebut adalah gerakan Zionisme Internasional yang digerakkan oleh orang Yahudi dengan organisasi rahasianya yang disebut *Freemasonry*. Hubungan yang simbiose mutualistis atau kepentingan yang berhimpitan antara Amerika Serikat dengan Zionisme Israel juga dijelaskan secara lengkap oleh *Amien Rais (2008, h. 59)* dalam Buku *"Agenda Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia"*, dikatakan:

*"Pada masa kepemimpinan Clinton (1993-2001) Tata Dunia Baru itu tidak sering dibicarakan. Namun pada masa itulah sebuah cabal atau komplotan yang terdiri dari sejumlah intelektual, wartawan, dan politisi Amerika mengembangkan sebuah impian "Pax Americana". Dalam istilah akademik maupun jurnalistik kumpulan tokoh yang mendambakan Pax Americana itu disebut sebagai kaum "Neocons" atau kaum "Neo Konservatisme". Pada pokoknya kaum Neocons itu meyakini perlunya supremasi militer yang tidak terkejar oleh negara manapun juga. Amerika "ditakdirkan" menjadi penjaga stabilitas Internasional. Konsep keseimbangan kekuatan/kekuasaan (balance of power), konsep détente (peredaan ketegangan) dan konsep keseimbangan teror (Balance of Terror) seperti dipraktekkan pada masa perang dingin dianggap sudah usang. PBB juga tidak perlu dihiraukan bila ternyata menjadi sandungan bagi politik imperialisme Amerika. Dengan kata lain bila PBB terutama "Dewan Keamanannya", mau mengikuti Amerika itu yang diharapkan. Bila sebaliknya yang terjadi, PBB bisa dilupakan. Ciri lain dari kaum Neocons itu adalah paralelismenya dengan pandangan Israel dalam hampir semua hal, banyak pakar politik Internasional berkesimpulan bahwa kekuasaan politik Internasional kaum neocons berimpit dengan wawasan Zionisme Israel".*

Dengan demikian ide Pax Americana yang diusung oleh kaum *neocons* tersebut seiring dengan ambisi bangsa Yahudi dengan gerakan Zionisme Internasionalnya, untuk menguasai dunia melalui ideologi liberal kapitalisme, maupun sosialisme-

komunisme yang telah menelan banyak korban dan penderitaan di berbagai negara terutama di negara dunia ketiga atau negara berkembang. Terjadinya serangan Israel ke Jalur Gaza yang sudah berjalan dua pekan yang mendapat kecaman dari masyarakat Internasional di hampir tiap negara di dunia. Juga merupakan rangkaian dari perilaku merealisasikan ambisinya. Seperti yang di ilustrasikan oleh *Azyumardi Azra (dalam Resonansi, di Harian Republika tanggal 8 Januari 2009)* tentang peristiwa perang di Palestina dikatakan:

Tragedi terkini bangsa Palestina di Jalur Gaza karena keganasan Israel jelas tidak hanya telah menimbulkan banyak korban Palestina, tetapi menambah panjang lingkaran kekerasan yang telah, sedang dan dapat terjadi di hari-hari esok. Lingkaran kekerasan itu pada gilirannya dapat melimpah ke wilayah-wilayah lain, di Timur-Tengah dan wilayah-wilayah muslim lainnya, juga bahkan di luar kedua kawasan ini.

Prediksi Azra yang ditulis pada tahun 2009, perluasan konflik sudah terjadi pada tahun 2013 atau 4 (empat) tahun kemudian di wilayah Korea Utara, dimana sikap politik Korea Utara yang melawan Amerika Serikat seperti diuraikan di atas. Munculnya konflik baru di kawasan asia ini membuktikan statement Azra di atas.

Pernyataan kecaman senada dari para tokoh masyarakat terus bermunculan, sebagaimana yang disampaikan oleh *Ahmad Syafii Maarif (dalam resonansi, harian Republika tanggal 6 Januari 2009)* dikatakan:

> "*Brutalitas Zionisme sudah berlaku puluhan kali, puluhan tahun. Dunia tidak berdaya, kemanusiaan seolah tidak peduli. Seperti tak ada lagi kekuatan duniawi yang bisa menghalangi kejahatan genosida itu. Cita-cita kemerdekaan Palestina telah ditempuh melalui jalan panjang sarat dengan penderitaan dan pengorbanan yang nyaris tanpa batas. Tetapi apakah rakyat Palestina pada akhirnya harus musnah dari muka bumi di tangan Zionisme!*".

Namun sesungguhnya keganasan Zionisme Internasional telah direncanakan terhadap sesama umat manusia non Yahudi yang disebut "*Qoyim*". Pembasmian secara sitimatis tersebut tertuang dalam strategi Zionis yang sudah menjadi doktrin di dalam protokol zionis yang disusun pada Kongres I tahun 1879 di Bazel. Senada dengan yang ditulis oleh Asro Kamal Rokan, dalam Resonansi, di Harian Republika tanggal 7 Januari 2009, yang di kutip dari Buku karya *Henry Ford* yang berjudul "*The Internasional Jew*", dikatakan bahwa:

> "Melalui *Dearborn Independent*, surat kabar kecil yang dibelinya di Michigan", Ford menurunkan hasil investigasinya yang membeberkan kebusukan Yahudi Internasional di Amerika. Salah satu temuan Ford adalah "Protokol Zionis". Dokumen ini berisi strategi Yahudi Internasional menguasai dunia, politik

Internasional, keuangan dan bisnis, media dan juga budaya. Publikasi terhadap protokol Zionis tersebut menuai kecaman, Ford dianggap anti semit. Dokumen itu oleh kalangan Yahudi di nilai palsu. Ford tidak ingin terjadi perdebatan asli atau palsu. Ia mengatakan "…. dari apa yang saya ketahui, semua yang terjadi sekarang ini di dunia, sesuai dengan isi dokumen itu". Lebih lanjut Asro Kamal Rokan mengatakan "Kini Zionis Israel, yang tangannya merambah ke seluruh dunia, menghancurkan Palestina, anak-anak menunggu ajalnya". Dunia Arab hampir tidak melakukan apa-apa. Mereka menjadi penonton Palestina dihancurkan. Dan kita di sini sibuk dalam urusan politik dan bertengkar antara kita. Jangan-jangan bagian dari protokol itu".

Penjelasan di atas berdasarkan kutipan dari beberapa sumber tentang peta konflik data skala global sesungguhnya merupakan suatu tragedi kemanusiaan sepanjang abad modern. Artinya dalam sejarah modern yang seharusnya menjunjung tinggi nilai peradaban yang lebih humanis tapi justru tetap masih dikotori oleh berbagai konflik kemanusiaan yang trendnya semakin masif.

### 4.11.3 Konflik yang Tidak Berkesudahan

Penjelasan yang cukup panjang dan mencoba mendalami anatomi upaya penghancuran sesama manusia di muka bumi oleh suatu bangsa yang disebut Yahudi Israel melalui gerakan Zionisme nya sudah hampir bisa menguasai dunia dari berbagai celah antara lain menguasai ekonomi, pemerintahan, media massa, suatu negara. Sehingga praktis seluruh aspek kehidupan masyarakat sadar atau tidak sadar sudah berada di bawah kendali gerakan Zionisme Internasional. Bahkan pergantian pemimpin pemerintahan melalui pemilu di negara-negara di dunia tidak lepas dari campur tangan mereka. Misalnya secara halus melalui bantuan teknis penyelenggaraan pemilu dan bantuan pemantauan pemilu maupun pengiriman peninjauan pelaksanaan pemilu. Kalau perlu dengan cara yang lebih keras, seperti misalnya kejadian pemilu di "Aljazair", dimana hasil pemilu tidak sesuai yang dikehendaki mereka, dengan berbagai cara "Presiden atau Pemimpin Negara yang telah terpilih secara demokratis bisa digulingkan kembali". Demikian pula kejadian di Mesir, ketika *people power* pada tahun 2011 telah berhasil menggulingkan rezim otoriter Housni Mobarak, dalam pemilu yang dimenangkan oleh Muhammad Mursi yang didukung oleh Ikhwanul Muslimin. Kemenangan Mursi secara demokratis tersebut saat ini terus digoyang oleh kelompok sekuler supaya bisa dijatuhkan atau stabilitas terganggu sehingga lambat laun terjadi delegitimasi pemerintahan Moursi. Pada bulan Juli 2013 melalui *people power* yang didukung oleh kelompok liberal, Islam Moderat, dan Kristen Ortodok atau Kristen Koptik,

serta dukungan militer, maka pada saat itu Mohamad Moursi dipaksa turun oleh kelompok militer.

Terkait dengan kondisi bangsa Indonesia yang telah menyelenggarakan Pemilihan umum legislatif dan Pilpres tahun 2014 bangsa Indonesia perlu mengantisipasi terjadinya konstelasi global yang memungkinkan terjadinya Perang Dunia III. Oleh karena itu patut menjadi perhatian terutama pendapat beberapa pakar di atas seperti pendapat *Azyumardi Azra*, mengatakan bahwa "Tragedi Pelestina" di Jalur Gaza, dapat memperluas eskalasi kekerasan di wilayah-wilayah Islam lainnya tidak hanya di wilayah Timur-Tengah saja. Pendapat ini seiring dengan prediksi *Samuel P. Huntington* dan Skenario *Albert Pike* tentang Perang Dunia III, apakah akan diawali dari kejadian tragedi Palestina tersebut. Demikian pula skenario *Albert Pike* yang menarik adalah tahapan atau fase-fase dari perang dunia III yang direncanakan oleh *Albert Pike* seratus lima puluh tahun yang lalu (1871), pada fase ketiga dunia dikondisikan ketidakberdayaan total di bidang perekonomian. Terkait dengan krisis keuangan global tersebut, dampak dari krisis tersebut di negara berkembang termasuk Indonesia akan terasa di tahun 2014 yaitu adanya menurunnya kegiatan ekonomi, terjadinya PHK besar-besaran, melemahnya nilai rupiah, menurunnya daya beli masyarakat dan pendek kata pada tahun ini masyarakat akan menghadapi krisis ekonomi kedua setelah tahun 1997 yang lalu. Kemudian pada fase keempat dari skenario *Albert Pike* yaitu "penghancuran massal terhadap manusia di seluruh penjuru dunia". Fase ini oleh Israel Zionis telah dimulai melalui tragedi Palestina di Jalur Gaza yang kini mungkin sudah ribuan yang tewas dan puluhan ribu lainnya luka-luka dan menjadi pengungsian di tempat lain walaupun upaya di meja perdamaian atau perundingan antara Palestina dan Israel, sudah dipastikan hasilnya tidak akan efektif. Jika perluasan eskalasi kekerasan menjalar di wilayah Timur-Tengah dan wilayah lain, maka apa yang dikatakan *Albert Pike*, dua kubu antara Ziosnime politik dengan pemimpin dunia Islam saling berhadapan. Adapun versi *Samuel P. Huntington* adalah perang peradaban Barat diwakili Amerika dan peradaban Timur diwakili oleh Koalisi Islam dan Konfuisme (Cina). Dengan demikian Perang Dunia III sudah diambang pintu tinggal menunggu peluit tanda aba-aba. Bagaimana respon kesiapan Bangsa Indonesia! seperti dikatakan oleh *Asro Kamal Rokan*, "bangsa Indonesia sedang sibuk urusan politik dan bertengkar antar kita memperebutkan kursi jabatan politik", jangan-jangan merupakan strategi dari zionis itu.

### 4.11.4 Konflik Masyarakat Indonesia

Gambaran di atas dari Tragedi Palestina kita coba tarik dalam perpekstif kepentingan bangsa Indonesia mengkaitkan persoalan dunia internasional sesungguhnya

merupakan refleksi dari kegamangan kita terhadap para pemimpin yang masih asyik dengan mainannya sendiri. Sehingga sangat mungkin respon dan kepekaan terhadap situasi apa yang akan terjadi tidak begitu diperdulikan. *Sense of Crysis* atau bahaya yang sedang mengancam di sekitar kita, jika tidak terantisipasi, barangkali negeri ini akan semakin redup sinarnya. Peran di dunia Internasional sudah tidak terlihat lagi dan bahkan kalah dengan negeri tetangga kita Malaysia yang lebih memiliki pamor di dunia internasional. Oleh karena itu pasca pemilihan umum legeslatif tahun 2014dan terpilihnya "Presiden baru" merupakan sosok pemimpin yang memiliki kapasitas dalam menghadapi situasi global yang di masa datang semakin suram dan tidak berkepastian *(Uncertainty)*.

Mencermati berbagai konflik dalam skala global di atas mulai dari tragedi konflik Palestina-Israel, serta upaya skcenario konflik tingkat dunia, memberikan pelajaran bagi kita sesungguhnya apapun konflik yang terjadi di tengah masyarakat tidak terlepas dari upaya skenario tertentu yang jauh hari telah dipersiapkan, sehingga konflik ditengah masyarakat dengan bermacam macam motif pada ujungnya untuk kepentingan agenda politik rezim maupun oposisinya. Oleh sebab itu efek domino dari konflik pada skala global memiliki kecederungan membawa pengaruh terhadap negara-negara lainnya. Perang terhadap "terorisme" yang dikumandangkan oleh Amerika Serikat pada kenyataannya berdampak terhadap kebijakan pemerintah Indonesia menjadi agenda besar melawan terorisme. Agenda terorisme di Indonesia muncul kembali rasa saling curiga antar umat Islam dengan pemerintah sebagaimana pada zaman orde baru. Dalam perburuan terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 Polri selalu yang menjadi sasaran yaitu kelompok santri dan pondok pesantren seolah menjadi stigma atau citra sebagai sarang terorisme. Perburuan terorisme tersebut yang menjadi korban baik tertangkap hidup atau ditembak mati selalu dikaitkan dengan aktifitas ke-Islaman. Bahkan sejumlah tokoh dan ormas islam pada bulan Februari 2013 melayangkan protes meminta Densus 88 Polri dibubarkan karena dalam perburuan menangani aksi terorisme dinilai melanggar HAM sebagaimana yang dipertontonkan dalam rekaman video kasus di Poso. Jika melihat fenomena tersebut dan dalam konteks penjelasan di atas sesungguhnya tidak terlepas dari skenario global yang sudah digariskan dalam doktrin protokol zionis sebagaimana yang dibenarkan oleh *Henry Ford* dalam buku, *"The International Jew"*. Walaupun berbagai informasi yang terkait dengan gerakan global dalam konteks perluasan hegemoni dunia sering dipublikasikan dalam banyak media dan *teks book* namun pemahaman terhadap diagnosis konflik masyarakat internasional, regional, dan nasional kurang menjadi perhatian masyarakat luas. Sehingga ekspansi perluasan konflik tersebut di depan mata kita sering luput dari para pengamat atau analis untuk menjadi bagian dari variabel yang mempengaruhi terhadap suatu peristiwa poleksosbudhankamnas.

Karena pandangan para pengamat atau analis dan juga praktisi masih belum menerima sebagai variabel yang bermakna fenomena ilmiah karena sulitnya dukungan data sehingga baru dianggap sebagai rangkaian peristiwa yang bersifat konspiratif atau diklasifikasikan sebagai teori konspirasi yang bersifat nafsi-nafsi. Padahal gerakan zionisme internasional berada di belakang suatu peristiwa besar isu konflik di belakang dunia sebagaimana yang telah diskenariokan atau direncanakan dalam protokol zionis yang berisi 24 protokol. Keyakinan itu diamini oleh Henry Ford (1977) dan bahkan telah dilakukan penelitian secara ilmiah dalam desertasi doktor Abdullah Al-Thail dari Universitas Al Azhar, Kairo (2008). Oleh sebab itu sistuasi dan kondisi kawasan global dan regional maupun nasional di Indonesia secara sistemik problem bangsa, negara dan pemerintahan dapat dicermati dengan tepat melalui kajian protokol di atas sebagai instrumen analisisnya. Melakukan kajian terhadap protokol tersebut dengan maksud mencoba mendapatkan diagnosa yang tepat mengenai masalah pokok di bidang "Ipoleksosbud hankamnas". Sebab banyak peristiwa tragedi kemanusiaan misalnya kekacauan, pembunuhan massal, perang seringkali tidak dapat diketahui latar belakang yang jelas dan pasti. Artinya dibalik peristiwa tersebut tidak dapat diketahui siapa yang melakukan perbuatan pelanggaran hak azasi yang terjadi hampir disemua belahan dunia.

### 4.11.5 Politisasi Konflik Masyarakat

Dalam sejarah Indonesia persoalan konflik sesungguhnya selalu timbul tenggelam dalam kurun waktu yang panjang. Misalnya di penghujung akhir kekuasaan Orde Baru pasca pemilu tahun 1997 juga telah diwarnai berbagai konflik terutama yang menyangkut "sara" dan beberapa konflik sosial lainnya. Sedangkan di era reformasi yang telah berjalan sepuluh tahun lebih eskalasi konflik di tengah masyarakat justru semakin meluas dan massif. Konflik masyarakat dari yang melibatkan massa ratusan sampai dengan ribuan orang memiliki kecenderungan yang laten. Jika mencoba diurai peristiwa konflik yang menjadi perhatian publik yang disorot berbagai media mulai dari; konflik sara di Ambon, Poso, Kalimantan Barat, konflik hasil "pemilukada" di berbagai daerah, konflik pemekaran wilayah, konflik perebutan lahan, konflik eksekusi hasil keputusan pengadilan, konflik antar pelajar dan mahasiswa, konflik antar warga atau antar kampung. Jenis konflik yang disebutkan di atas mewarnai peristiwa politik di era reformasi ditengah konsolidasi kekuasaan menuju proses demokratisasi masyarakat. Namun ketika kondisi "pemerintah lemah", dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tindakan tegas sehingga konflik yang bersifat massif akan terus terjadi. Oleh sebab itu perlu diwaspadai terhadap politisasi konflik masyarakat oleh para pembonceng gratis *(free rider)* yang memiliki agenda "*devide at impera*" bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indikasi konflik vertikal dan horizontal sudah

mulai tampak, bahkan tidak disadari antar lembaga pemerintahan sudah mulai terjadi baik lembaga eksekutif dengan legislatif, eksekutif dengan yudikatif dan internal pemerintah eksekutif, yang dipicu dari berbagai kebijakan yang tidak harmonis.

Potensi konflik yang sudah multi dimensi, harus segera ditangkal dengan cara membangun kembali solidaritas sosial melalui strategi menumbuhkan hubungan yang harmonis di tengah masyarakat yakni melalui semboyan ”orang kaya menyayangi orang miskin” dan orang miskin menghormati orang kaya. Modal sosial tersebut jika dipupuk dengan baik akan menjadi kekuatan soliditas masyarakat yang hebat. Diharapkan mampu memfilter atau menangkal pengaruh sisi buruk dari nilai-nilai faham liberal-kapitalisme dan sosialisme-komunisme sekaligus.

## STUDI KASUS 4.11

Membahas mengenai konflik yang ada dalam masyarakat selalu menarik perhatian karena konflik bisa terjadi dengan berbagai macam latarbelakang. Persoalan yang sepele tidak mustahil mampu menjadi pemicu meledaknya koflik yang besar. Konflik “sara” misalnya di Ambon lima belas tahun yang lalu berawal dari masalah yang sepele. Pada kesempatan ini diskusi akan mengambil topik yang dimuat media massa dengan judul “ Konflik partai lahirkan teror”. Setiap terjadi konflik di berbagai daerah terutama di Aceh menjadi perhatian khusus para pejabat tinggi di pusat. Karena secara geo politik wilayah Nanggroe Aceh Darusalam sangat strategis dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh sebab itu ketika terjadi konflik di masyarakat harus segera dipadamkansupaya stabilitas kawasan tetap terkendali. Untuk itu materi diskusi yang mengambil kasus “konflik Partai di Aceh menarik menjadi bahan diskusi sebagaimana disajikan di bawah ini.

### Konflik Partai Lahirkan Teror

*Esthi Maharani, ErdyNasrul*
*REPUBLIKA, Kamis 3 April 2014*

**Aceh Merupakan Provinsi yang Pengalamannya Paling Berat**

Jakarta - Penembakan yang terjadi terhadap mobil calon anggota legislatif dari Partai Aceh di Kabupaten Bireuen pada Senin (31/3) malam diyakini bermotif persaingan antar partai politik menjelang pemilu legeslatif (pileg) di Provinsi Aceh. Kepala Polri Jenderal Sutarman mengatakan, lembaganya sudah mengirim lantam bahan personel keamanan, termasuk Densus 88, untuk mencari pelaku penembakan yang menewaskan tiga orang tersebut.

“Yang jelas ini masih persaingan antar parpol,” kata Kapolri di kantor Presiden,

Jakarta Rabu (2/4). Sutarman berharap pelaku penembakan bias segera ditangkap sehingga pelaksanaan demokrasi di Bumi Serambi Mekkah bias berjalan lancar. Kepada para peserta pemilu di Aceh, Kapolri menghimbau agar semua parpol ikut menciptakan suasana yang kondusif. Parpol diminta tidak mempengaruhi rakyat dengan kekerasan karena hal tersebut akan mencederai proses demokrasi yang sedang dibangun.

Menjelang pelaksanaan Pemilu Legislatif, 9 April 2014, aksi kekerasan di Provinsi Aceh terus meningkat. Dalam satu bulan terakhir, ada lima kasus kekerasan terkait pemilu yang terjadi di Bumi Rencong. Penembakan mobil yang berstiker bertuliskan dukungan terhadap seorang Partai Aceh di Kabupaten Bireuen adalah peristiwa terakhir yang menggangu keamanan Aceh.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Budiman mengakui, Aceh merupakan provinsi yang pengalamannya paling berat saat pelaksanaan Pileg 2014. Satu pandangan dengan Kapolri, Budiman menyatakan, aksi-aksi kekerasan yang terjadi tak lain karena persaingan antar partai politik. KSAD melanjutkan, meski situasi di Aceh memanas, pengamanan belum akan diperketat.

Menurut pengamat politik Universitas Syah Kuala Aryos Nivada, konflik yang terjadi antara Partai Aceh (PA) dan Partai Nasional Aceh (PNA) bermuara pada sejumlah persoalan. Penyebab konflik yang paling utama adalah distribusi proyek pembangunan di Aceh yang terooptasi kepada segelintir kader dan petinggi PA.

Selain itu kata Aryos, semangat memajukan Aceh juga sudah menyimpang. Semula, pembangunan Aceh ditujukan untuk mensejahterakan seluruh rakyat Aceh. Namun, yang terjadi sekarang adalah kesejahteraan bagi segelintir orang saja.

Dia melanjutkan, ketimpangan pembangunan dan tingkat kesejahteraan membuat para kader PA sakit hati. Sebagian kader ini pun berpindah ke PNA, seperti yang dilakukan Muhammad bin Zainal Abidin yang kemudian menjadi anggota Tameng Nasional Aceh (TNA), organisasi sayap PNA.

Setelah membaca bahan studi kasus tentang penembakan anggota partai politik, menjadi perhatian publik dan para petinggi. Ketika konflik terjadi di wilayah NAD menjadi sangat sensitif dan menyadari bahwa persaingan partai politik tersebut jika tidak segera dituntaskan dapat menjadi pemicu konflik lainnya bertambah meluas. Oleh sebab itu untuk mendalami kasus ini dikembangkan dengan beberapa pertanyaan di bawah ini:

1. Sejauhmana peta konflik global yang saat ini masih berlangsung di belahan dunia yang terakhir gerakan separatis di "Ukraina" menjadi refleksi kebijakan keamanan dalam negeri di tengah fenomena konflik masih sering terjadi di daerah daerah?
2. Mengapa di Indonesia konflik yang melibatkan massa besar sering terjadi dengan berbagai latar belakang terutama menyangkut isu-isu sara masih merebak?

3. Sejauh mana di wilayah yang rentan konflik seperti di Aceh, Ambon, NTB dan Papua dan lain-lain menjadi perhatian utama dalam kebijakan keamanan dalam negeri?
4. Apakah terdapat korelasi antara peristiwa konflik global seperti di Timur-Tengah, Afganistan dan Ukraina serta di Asia Selatan dan Afrika dengan peta konflik yang terjadi di Indonesia?
5. Menurut pendapat Samuel P. Huntinton dan M. Safaat, sesungguhnya dunia saat ini sedang mengalami masa Perang Dunia (PD) ke Tiga (3), dengan ditandai ciri-ciri sesuai versi masing-masing pakar di atas, jelaskan pendapat Saudara pernyataan di atas disertai argumentasi yang logis?

## 4.12 LANGKANYA PEMIMPIN YANG NEGARAWAN

Pemimpin adalah sosok yang memiliki penampilan yang berbeda dengan lainnya, karena pemimpin bagi orang lain sebagai panutan dan teladan serta pengarah dalam kehidupan masyarakat. Seorang pemimpin seperti "*hero*" dipuja dan puji oleh para bawahannya atau rakyatnya, memiliki kapabilitas dan asseptabilitas dalam mengatasi semua masalah yang dihadapi. Seorang pemimpin adalah seorang "*problem solver*", seorang yang memiliki karakter dan juga seorang humanis. Diskripsi pemimpin di atas merupakan pemahaman yang alamiah dalam konteks kehidupan masyarakat yang kompleks. Kelahiran seorang pemimpin di tengah masyarakat baik yang sedang bergejolak maupun sedang melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan rakyatnya, membutuhkan seorang pemimpin yang kuat (*strong leader*). Dalam konteks Indonesia dalam tahun 2014 telah mendapatkan seorang pemimpin baru, baik di "legeslatif maupun di eksekutif" melalui pemilihan umum. Selama ini banyak kalangan dimasyarakat baik dari akedemisi, praktisi dan aktifis serta masyarakat umum menilai bahwa para pemimpin saat ini sedikit yang memiliki jiwa "negarawan", sebagian besar masih sebagai "politisi". Langkanya pemimpin yang negarawan sedang menjadi persoalan besar di republik ini. Buruknya performance pemimpin pemerintahan tercermin pada data dan fakta yaitu sejumlah kurang lebih 318 kepala daerah, gubernur dan bupati/walikota menjadi terpidana kasus korupsi. Oleh sebab itu akan dikaji secara mendalam persoalan tersebut yang diuraikan di bawah ini.

### 4.12.1 Pemimpin Pemerintahan

Kepemimpinan pemerintahan merupakan kunci pokok berjalannya suatu organisasi negara. Fungsi utama pemimpin yaitu "mengambil keputusan" untuk menyelesaikan persoalan negara, pemerintahan, dan masyarakat. Pemimpin pemerintahan di legislatif dan eksekutif dipilih melalui pemilu. Sedangkan pemimpin di yudikatif dipilih oleh legislatif atas usul lembaga eksekutif. Sumber-sumber rekrutmen pemimpin pemerintahan yaitu para politisi dari partai politik. Adapun pemilihan pemimpin pemerintahan di Indonesia melalui demokrasi langsung sesuai dengan peraturan perundangan. Tuntutan publik pemimpin pemerintahan harus memiliki jiwa kenegarawanan. Untuk itu para politisi yang menjadi pemimpin pemerintahan harus merubah dirinya menjadi pemimpin yang negarawan. Langkanya pemimpin yang negarawan disebabkan oleh perubahan nilai-nilai dalam masyarakat yaitu nilai pragmatisme, materialisme, dan sistem demokrasi langsung belum berjalan optimal.

Politik pada hakekatnya suatu proses yang menghasilkan Kekuatan *(strong)* dan Kekuasaan *(power)* yang digunakan untuk mengatur, mengelola dan mengurus

secara tertib, teratur, stabil dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagaimana diketahui bahwa lahirnya seorang pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan pada umumnya melalui proses pergulatan politik dengan mekanisme sistem demokrasi. Jika seorang "Politisi" menjadi Pemimpin Negara dan Pemerintahan melalui proses demokratisasi maka disebut sebagai "Negarawan". Karakteristik seorang "Negarawan" yaitu, berwawasan luas, berjuang untuk kepentingan negara, berjiwa pengabdian yang tulus, integritas dan loyal terhadap negara lebih tinggi, adil dan bijaksana, serta komitmen yang tinggi untuk membela kepentingan rakyat misalnya, "Bung Karno dan Bung Hatta Pahlawan Proklamasi bangsa Indonesia.

Namun prakteknya salah satu kelemahan "manusia" sering dihinggapi oleh *"Moral Hazzard"*, dan mudah tergoda yang mengundang syahwat dan hawa nafsu, dengan memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan diri pribadi atau golongan dan kelompoknya. Seorang pemimpin dengan kekuasaannya seperti menjadi "Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota", dalam sistem ketatanegaraan diperoleh melalui pemilu.

Secara empiristik politik lebih banyak berorientasi pada kekuasaan, jika kekuasaan tanpa batas akan mudah melakukan penyimpangan *(abuse of power)*. Seiring dengan kegiatan politik praktis, pada umumnya para politisi cenderung menuruti hawa nafsu yang bertentangan dengan *Qolbu* atau Hati Nurani. Gambaran "Politisi" yang demikian memiliki tiga sifat yaitu; ambisius, avonturir, dan frustasi. Seperti diketahui bersama bahwa rekrutmen pemimpin negara semua berasal dari "para politisi". Para politisi yang telah menjadi pejabat negara melalui mekanisme demokrasi, merupakan keharusan mutlak melakukan perubahan gaya dan karakter sebagai "pemimpin yang negarawan". Karakter politisi yang pada umumnya "ambsius, avonturir atau frustasi, sifat-sifat tersebut harus berubah menjadi sifat dan karakter; pertama; jiwa pengabdian yang lebih besar kepada bangsa dan negara. Kedua; integritas dan loyalitas yang tinggi. Ketiga; jiwa pengorbanan yang lebih besar dibanding dengan kepentingan pribadi. Keempat; rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Kelima; bersikap bijaksana dan bertindak adil. Keenam; berwawasan luas dan tidak memiliki sifat diskriminatif. Dengan demikian pemimpinan pemerintahan harus memiliki beberapa sifat dan karakter seperti diuraikan di atas.

### 4.12.2 Fenomena Kegagalan Pemimpin

Melihat perkembangan kehidupan kenegaraan dan pemerintahan yang penuh dengan ketidakpastian, banyak kalangan baik para cerdik pandai maupun masyarakat luas, mengkhawatirkan kondisi bangsa dan negara saat ini belum dapat memuaskan masyarakat luas. Fenomena yang sehari-hari dilihat misalnya mencari pekerjaan

sulit, lapangan kerja yang semakin sempit, sekolah gratis tapi kenyataannya masih banyak pungutan, kesehatan mahal, menyekolahkan anak semakin sulit, harga kebutuhan pokok semakin naik terus, penghasilan masyarakat semakin tertinggal dengan harga kebutuhan pokok, stabilitas keamanan cenderung menurun, konflik ditengah masyarakat semakin massif dan laten. Berbagai macam fenomena yang sering terdengar melalui berita di media massa maupun diskusi para pakar tidak jauh berbeda dengan ulasan di atas. Indikator kualitatif seperti disebutkan di atas dapat dijadikan tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja para pemimpin pemerintahan. Namun, sesuai dengan fenomena yang telah disebutkan di atas menunjukkan indikasi kinerja yang kurang memenuhi harapan publik. Hal tersebut sesuai dengan berita di berbagai media bahwapara kepala daerah baik Bupati/Walikota dan Gubernur sebanyak ± 311 orang serta beberapa mantan menteri terjerat kasus "korupsi", baik yang statusnya masih tersangka, terdakwa, dan terpidana. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa para pemimpin pemerintahan masih diliputi oleh "hawa nafsu" dalam menjalankan roda pemerintahan.

Perilaku para pemimpin pemerintahan yang lebih cenderung praktis-pragmatis,diduga akibat praktek demokrasi langsung *(direct democracy)* yang telah terdistorsi oleh banyak faktor yang mempengaruhi. Relasi demokrasi langsung dengan perubahan perilaku para politisi menjadi praktis-pragmatis dipengaruhi beberapa faktor di atas seperti kondisi masyarakat yang masih rendah kesadaran politiknya, budaya patrimonial yang masih kuat, sistem rekruitmen politik yang kurang efektif, manajemen partai politik yang buruk. Menganalisis hubungan antara praktek demokrasi langsung *(direct democracy)* dengan lahirnya "kepemimpinan pemerintahan yang negarawan", memerlukan dukungan konsep dan teori yang relevan dan data yang akurat melalui proses penelitian yang mendalam. Demokrasi langsung sesungguhnya mampu menghasilkan pemimpin yang negarawan jika para pemilih memiliki wawasan dan kesadaran politik tinggi. Kesadaran politik warga negara yang tinggi tersebut didukung oleh nilai-nilai egaliter dan nilai-nilai budaya politik yang sehat.

### 4.12.3 Konsep dan Teori Kepemimpinan

Kepemimpinan secara umum merupakan kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain sehingga mau mengikuti keinginan secara sukarela terhadap seseorang tersebut. Pengaruh melahirkan "kewibawaan" sehingga seorang pemimpin yang berpengaruh pada umumnya "sosoknya berwibawa". Bagi yang menganut faham bahwa "kepemimpinan" itu merupakan bakat dan bawaan sejak lahir (*lead is born*) maka teori ini akan menjadi penjelas terhadap konsep "kepemimpinan kharismatik".

Misalnya seorang "pemimpin" yang dikenal "kharisma"nya seperti "Bung Karno", presiden pertama Republik Indonesia. Ciri seorang pemimpin kharismatik pada umumnya lahir dalam situasi di tengah masyarakat yang sedang mengalami suatu "tragedi atau pergolakan". Sedangkan bagi penganut faham teori yang mengatakan bahwa pemimpin itu bisa dibentuk atau dibuat *(lead is make)*, mengatakan bahwa pemimpin itu akan menjadi matang dan mumpuni harus melalui proses "kaderisasi" baik melalui pendidikan dan latihan maupun melalui penempatan dalam jabatan secara berjenjang.

Proses lahirnya "pemimpin" yang dibentuk pada umumnya muncul melalui proses "pengangkatan" oleh pejabat formal karena diberikan kepercayaan dan sekaligus kewenangan yang melekat pada jabatan tersebut. Akan tetapi dalam realitanya perpaduan antara dua teori tersebut akan saling simbiose mutualistis, karena bagaimanapun juga bakat "kepemimpinan" seseorang perlu juga dibina melalui proses kaderisasi yang terarah dan terukur sehingga memberikan nilai tambah dan energi positif bagi dirinya. Berbagai macam konsep dan teori tentang kepemimpinan dari literatur para ahli sudah barang tentu tidak secara keseluruhan bisa ditulis pada kesempatan ini. Namun suatu hal yang paling utama seseorang dikatakan sebagai "pemimpin" yaitu "mengambil keputusan". Jadi tugas inti seorang pemimpin adalah "kemampuan dengan cepat dan tepat" dalam pengambilan keputusan.

Dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan negara kehadiran seorang pemimpin merupakan keniscayaaan dalam mengemban amanat rakyat. Bahkan di masa depan seorang pemimpin di Indonesia harus memenuhi syarat yaitu seorang "pemimpin yang visioner dan demokratis" dan sekaligus "negarawan". Sebagaimana dikatakan oleh Wasistiono (2003) bahwa "karakter dan kemampuan intelektual akan menjadi kualitas utama bagi pemimpin pemerintahan masa depan. Masyarakat pemilih yang semakin cerdas dan terdidik akan memilih pemimpinnya atas dasar dua kualitas tersebut. Kualitas kekuatan fisik dari dukungan massa bukan lagi merupakan faktor yang menentukan. Pendapat di atas merupakan harapan mencari pemimpin yang berkualitas yaitu pemimpin itu harus memiliki karakter dan didukung oleh kemampuan intelektual. Pemimpin yang berkarakter misalnya tegas dan berani serta adil dan bijaksana. Sebab pemimpin sebagian besar tugasnya dihadapkan pada situasi yang genting dan krisis maka para pakar sering mengatakan bahwa fungsi pokok pemimpin adalah "pengambilan keputusan". Agar pemimpin mampu menjalankan fungsi pokok tersebut, seorang pemimpin harus memiliki karakter tegas dan berani. Demikian pula seorang pemimpin harus memiliki kemampuan intelektual yang cukup supaya keputusan tersebut berkualitas.

Suatu keputusan yang berkualitas adalah hasil keputusan tersebut mampu mengatasi masalah secara tuntas dan tepat sasaran serta risiko yang ditimbulkan

relatif kecil. Adapun seorang pemimpin harus memiliki karakter adil dan bijaksana, karena masyarakat yang dihadapi pada umumnya masyarakat yang heterogen baik berdasarkan suku, ras, agama dan perbedaan status sosial ekonomi. Seorang pemimpin yang adil dan bijaksana memang sesuatu yang sulit didapatkan. Namun kriteria tersebut mutlak diperlukan.

Pendapat tersebut seiring dengan perubahan yang berkembang dewasa ini bahwa peran pemerintah dituntut lebih memprioritaskan kepada pelayanan publik. Pada era tersebut pemimpin dituntut tidak hanya visioner dan demokratis saja, akan tetapi pemimpin harus mampu menjadi teladan dan menjadi pelayan masyarakat. Pemimpin sebagai pelayan masyarakat adalah sesuai dengan hakekat tujuan negara yaitu tercapainya kesejahteraan umum. Oleh sebab itu, kebijakan negara harus ditujukan kepada kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau partai politiknya apalagi untuk kepentingan asing. Selanjutnya pemikiran tentang kepemimpinan dari pakar lainnya yaitu dalam konteks manajemen publik yang berkiblat pada *era new public service* (Denhart, 2003) membutuhkan seorang pemimpin yang menurut Peter Sange (1990) menyatakan bahwa kriteria sang pemimpin harus memiliki kemampuan sebagai "*designer* atau perancang yang baik, *teaching* atau sebagai guru atau pembimbing yang baik dan sebagai steward atau sebagai pelayan yang baik". Selanjutnya dalam konteks kepemimpinan yang diangkat berdasarkan pemilihan (pilpres dan pilkada) melalui demokrasi langsung, mereka berasal dari para elite partai politik atau yang diusung oleh partai politik. Kepemimpinan model di negara demokrasi menurut Ndraha (2003) pemimpin tersebut memiliki dua posisi yaitu posisi sebagai "pejabat pemerintah dan posisi sebagai kader partai.

Pemimpin pemerintahan yang menduduki jabatan presiden, Gubernur, Bupati/Walikota menurut NDRaha tersebut, dihadapkan pada suatu dilema konflik kepentingan (*conflict of interest*). Di satu sisi sebagai pejabat pemerintah harus bersikap adil dan tidak diskriminatif terhadap kepentingan publik. Di lain pihak sebagai kader partai memiliki tujuan dan kepentingan politik tertentu. Harmonisasi terhadap dua posisi tersebut memang memerlukan jiwa kenegarawanan, yaitu kepentingan negara dan bangsa harus mengalahkan kepentingan partai politik yang dengan kata lain seorang politisi ketika diberi mandat oleh rakyat melalui mekanisme demokrasi merupakan keniscayaan politisi tersebut harus hijrah menjadi negarawan.

### 4.12.4 Proses Seleksi Pemimpin Pemerintahan

Penjelasan konsep dan teori tentang kepemimpinan di atas merupakan kepemimpinan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara dibidang "legislatif, eksekutif dan yudikatif". Pemimpin pemerintahan tersebut "keberadaannya" dipilih melalui mekanisme

demokrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Apabila "pemimpin di legislatif sebagai "anggota dewan" dipilih melalui "pemilu legislatif", sedangkan "pemimpin di eksekutif seperti " Presiden/Wakil Presiden, Gubernur dan Bupati/ Walikota dipilih melalui "pemilu presiden dan pemilukada". Adapun para pemimpin di bidang Yudikatif baik hakim Mahkamah Agung (MA) maupun hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dipilih oleh DPR. Maju dan mundurnya suatu negara berada di tangan para pemimpin yang telah disebutkan di atas. Akan tetapi kajian mengenai "langkanya pemimpin yang negarawan, lebih difokuskan terhadap "kepemimpinan dibidang eksekutif". Sebab tugas dan fungsi lembaga eksekutif sebagai "pelaksana kebijakan negara" yang ditetapkan oleh "legislatif", merupakan kunci pokok oleh penyelenggara pemerintahan untuk tercapainya tujuan negara yaitu salah satunya kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Artinya jika para pemimpin eksekutif yang terpilih "berkualitas" yakni pemimpin yang "visioner dan demokratis serta negarawan", niscaya tujuan negara akan lebih cepat terwujud.

Sebagaimana diketahui bahwa sumber sumber rekruitmen calon pemimpin pemerintahan eksekutif adalah terdiri para "politisi" yang diusung oleh satu atau dua partai politik atau lebih. Untuk menyiapkan kader partai menjadi pemimpin merupakan agenda penting bagi partai politik melalui mekanisme rekrutmen berdasarkan sistem merit. Dengan demikian peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif sangat dipengaruhi oleh eksistensi "partai" politik. Jika partai politik mampu menawarkan dengan baik para kader partai (politisi) sesuai dengan persyaratan secara umum di atas yang dikehendaki oleh publik, maka rakyat akan merasakan kepuasannya. Tetapi jika sebaliknya para kader partai (politisi) yang diusung partai kurang berkualitas, maka yang paling dirugikan adalah masyarakat luas. Misalnya fenomena yang terbaru tahun 2011 terdapat banyak daerah terutama daerah pemekaran mengalami "kebangkrutan" dalam mengelola APBD, artinya belanja pegawai mencapai di atas 50 sampai 60% APBD sehingga angaran untuk pembangunan relatif lebih kecil, maka terjadi "difisit anggaran".

Fenomena tersebut menunjukkan indikasi bahwa terpilihnya para "pemimpin pemerintahan" kurang memiliki visi dalam manajemen pemerintahan. Kurang pandai dan kreatifnya para pemimpin daerah dalam mengelola PAD-nya masing-masing, menyebabkan tidak memuaskan masyarakat luas atas kinerja para kepala daerah tersebut. Demikian pula fenomena sebanyak ± 311 kepala daerah baik Gubernur maupun Bupati/Walikota tersangkut perkara pidana. Oleh sebab itu "konsep demokrasi langsung" yang telah dipraktekan dalam kurun waktu hampir sepuluh tahun atau dalam dua kali pemilu, belum mampu menghasilkan para "pemimpin pemerintahan" yang berkualitas tersebut yaitu "pemimpin yang visioner dan demokratis serta negarawan". Artinya seleksi kepemimpinan pemerintahan melalui demokrasi langsung selama

ini telah gagal mendapatkan sosok pemimpin yang berkualitas. Jika lima ratus lebih kepala daerah yang menonjol dan sering disorot media massa tentang keberhasilannya hanya Gubernur DKI Jakarta dan Walikota Surabaya, sehingga dapat disimpulkan mekanisme seleksi pemimpin pemerintahan melalui pemilukada harus dievaluasi secara jernih dan objektif serta menghindari kepentingan politik.

### 4.12.5 Faktor yang Mempengaruhi Langkanya Pemimpin yang Negarawan

Beberapa faktor yang mempengaruhi hasil pelaksanaan demokrasi langsung melalui "pemilukada" terhadap sulitnya mendapatkan "pemimpin negarawan" dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut: *pertama;* kondisi masyarakat yang taraf pendidikan masih rendah, sebagian besar di bawah SMU. Pada umumnya belum memiliki kemandirian dalam menentukan suatu pilihan, masih minta bantuan patronnya atau sesorang yang menjadi panutannya, misalnya tokoh masyarakat, ulama, untuk mendapatkan petunjuk sebelum mengambil keputusan memilih. Kedua; kesadaran politik rendah akan berpengaruh terhadap partisipasi politik, menyebabkan angka golput cenderung meningkat dalam pemilukada. Demokrasi memberikan ruang yang lebih luas dan kebebasan bagi seseorang individu atau kelompok dalam menetukan pilihan-pilihan. Berdemokrasi menuntut di samping kemandirian atau sikap indepensi seseorang dalam mengambil keputusan juga dukungan partisipasi politik masyarakat.

Demokrasi salah satu esensinya menentukan pilihan terhadap seseorang yang akan dipilih sebagai "pemimpin" dalam pemilu. Dengan demikian bagi seseorang atau sekelompok orang yang berbasis pendidikan rendah kurang memiliki sikap kemandirian yang kuat.Untuk itu pada dasarnya "demokrasi" memerlukan tingkat kecerdasan masyarakat, jadi masyarakat yang berpendidikan rendah sulit untuk mengikuti permainan "demokrasi". Dengan kata lain demokrasi masih menjadi alat permainan para elit politik. Rakyat sebagai angkar rumput dijadikan sebagai objek pengumpul suara para elite politik pada setiap agenda pemilu berjalan. *Kedua;* budaya patriamonial yang masih kuat juga mempengaruhi terhadap independensi sikap dan tindakan dalam menentukan pilihan. *Ketiga;* meluasnya pemahaman nilai-nilai pragmatism yang dihinggapi terhadap para elit politik mempengaruhi terhadap persepsi para pemimpin bahwa kekuasaan yang dimiliki merupakan aset yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok serta untuk melanggengkan kekuasaannya. Keempat; partai-politik dalam melakukan sistem rekrutmen kurang efektif dalam menjamin kepastian lahirnya seorang pemimpin yang handal dan populis. Pola rekruitmen yang kurang dilakukan secara sistematis dan terprogram dengan baik, maka hanya melahirkan pemimpin yang kurang matang, karbitan dan

kurang memiliki jiwa negarawan. *Kelima;* manajemen partai politik yang belum mantap, artinya partai politik yang memiliki fungsi melahirkan kader-kader partai menjadi pemimpin pemerintahan baik di legislatif, eksekutif dan yudikatif. Manajemen partai politik kurang efektif dalam menggerakkan seluruh fungsi-fungsi partai politik, dipastikan partai politik tersebut mengalami kendala dalam menggalang kekuatan massa sebagai kader inti, penggerak, pendukung loyalis, dan partisan. Sehingga sulit menjamin lahirnya pemimpin yang memiliki integritas, handal, dan berjiwa negarawan.

Berdasarkan kelima analisis di atas dapat menjadi bahan kajian lanjutan yang lebih mendalam bahwa jika kelima faktor-faktor tersebut benar maka demokrasi langsung yang saat ini sedang diterapkan sulit diharapkan partai politik mampu melahirkan pemimpin pemerintahan yang memiliki jiwa negarawan sebagaimana yang telah diuraikan secara mendalam di atas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurang berhasilnya demokrasi langsung dalam memperoleh pemimpin yang negarawan sebaiknya dilakukan penelitian objektif. Diharapkan hasil penelitian tersebut mendapatkan rekomendasi yang tepat apakah demokrasi langsung akan terus dijalankan atau kembali pada pemerintahan melalui demokrasi perwakilan (*representative democracy*).

## STUDI KASUS 12

Dalam sesi diskusi yang kedua belas (12) dengan mengambil studi kasus yang dimuat di media massa dengan judul "Pejabat Harus BebasPolitik". Topik diskusi kali ini cukup relevan dengan tema di atas yaitu "langkanya pemimpin yang negarawan". Seorang pemimpin yang negarawan adalah seorang pemimpin yang perhatiannya dicurahkan untuk kepentingan negara dan bangsa serta masyarakatnya. Oleh sebab itu menjadi logis dan rasional jika seorang "negarawan" terbebas dari pengaruh politik. Topik ini didiskusikan dengan nara sumber dari para elit partai politik yaitu: Tjahjo Kumolo dari PDIP, Malik Haramain dari PKB dan Armani Thomafi dari PPP.

Ketiga nara sumber sepakat bahwa para pejabat negara di lembaga tinggi negara sebaiknya terbebas dari politik. Artinya seorang politisi yang menjadi pejabat negara seperti "presiden" dengan jajaranya yaitu menteri dan kepala daerah, tidak lagi menjadi pemimpin partai politik. Tetapi kecenderungan para politisi menjadi pejabat negara banyak yang tersangkut pidana korupsi, jangan yang disalahkan partai politiknya. Demikian pula bukan berarti politisi tidak boleh sebagai pejabat negara. Untuk lebih mendalami topik diskusi dipersilahkan membaca materi diskusi tentang "pejabat harus bebas politik", di bawah ini.

## Pejabat Harus Bebas Politik

*JAKARTA, REPUBLIKA Senin 7 Oktober 2013*

**PPP menilai jika lembaga negara tak diisi politikus maka lembaga presiden pun harus terbebas dari orang parpol**

Banyaknya kasus yang menimpa pejabat tinggi negara memunculkan usulan agar lembaga tinggi negara tidak dipimpin oleh orang dari parpol. Usulan yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini didukung oleh sejumlah partai di parlemen.

PDI Perjuangan menilai, idealnya pejabat lembaga tinggi negara di luar DPR, MPR dan DPD terbebas dari parpol. "Memang sebaiknya pemimpin lembaga tinggi negara sudah tidak aktif menjadi anggota manapun pengurus parpol. Setidaknya, selama 10 tahun ini untuk menghindari dari konflik kepentingan, "kata Sekjen PDI Perjuangan Tjahajo Kumolo".

Dengan tak adanya kepentingan politik diharapkan segala konflik kepentingan oleh pejabat negara bisa dihindari. Bila itu terjadi, Tjahajo Kumolo yakin, angka pelanggaran atau kasus yang dilakukan petinggi negara bisa ditekan. Di sisi lain, iklim politik pun bisa tumbuh secara sehat. Menurutnya, perlu komitmen bersama, termasuk dari presiden, untuk mendorong agar tak ada politisasi di sejumlah lembaga tinggi negara. "Saya kira Presiden pasti sudah mengkajinya," katanya. Dukungan agar lembaga tinggi Negara terbebas dari orang politik juga disampaikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Wakil Sekjen PKB Malik Haramain mengatakan, pemimpin negara terutama di bidang hukum setidaknya harus non aktif dari keanggotaanya dan kepengurusan parpol minimal lima tahun.

Sebab lembaga tinggi negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Konstitusi (MK), atau Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga yang kerap bersinggungan langsung dengan kepentingan partai.

Bisa saja calon hakim harus berhenti dari keanggotaan atau pengurus partai selama lima tahun sejak mencalonkan. Ini menghindari konflik kepentingan," kata Malik. Kendati mendukung lembaga negara bebas dari parpol, Malik tetap menerangkan pentingnya keterlibatan DPR menyeleksi para petinggi negara tersebut. Malik mengatakan tetap melalui uji kepatutan dan kelaikan di DPR. Ia mencontohkan syarat keanggotaan KPU. Anggota KPU kata Malik salah satu syaratnya sudah bukan anggota partai selama lima tahun. "Meski demikian untuk menjadi anggota KPU harus melalui *fit and propertest* di DPR. Kata Malik. Syarat serupa ia harap diterapkan di sejumlah lembaga tinggi negara, seperti MK, MA atau BPK.

Sebaliknya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai banyaknya kasus yang menjerat pejabat tinggi negara sebaiknya tak dikaitkan dengan latar belakang politik sang pejabat. PPP merujuk kasus ketua MK Akil Mochtar yang menurut mereka tak terakit dengan latar belakang Akil sebagai eks politikus. Ketua DPP PPP Arwani Thomafi mengatakan kalau ada petinggi negara yang tersangkut kasus pidana, jangan parpol yang disalahkan. Menurutnya kasus personal

harus dipisahkan dengan institusi yang menaunginya.

Menurutnya, lembaga tinggi negara tidak masalah dipimpin oleh orang dari parpol. Sebab banyak orang dari parpol yang memiliki integritas. "Kalau lembaga negara tidak boleh dipimpin orang dari parpol, apa presiden juga tidak boleh tidak boleh dari parpol?" tanyanya. Seharusnya kata Arwani jangan karena ada petinggi lembaga dari parpol yang terkena kasus lalu ada vonis seolah-olah semua orang dari parpol tidak baik. "Jangan karena kasus semacam itu, lalu parpol di tuding sebagai penyebabnya," katanya.

Kalau menggunakan logika seperti itu, ujar Arwani, ketika ada seorang profesor doktor yang tersangkut kasus pidana di lembaga tinggi negara, disimpulkan profesor doktor tidak boleh memimpin lembaga tinggi negara.

Setelah membaca teks studi kasus tentang "pejabat harus bebas politik" maka untuk melengkapi materi diskusi diajukan beberapa pertanyaan di bawah ini.

1. Peran dan fungsi partai politik salah satunya yaitu melahirkan pemimpin untuk menduduki jabatan di lembaga tinggi negara, sejauh mana partai politik mampu menjalankan perannya dalam melahirkan "pemimipin yang negarawan"?
2. Salah satu persyaratan sebagai pemimpin pemerintahan yang banyak diminta berbagai kalangan yaitu "terbebas dari partai politik" atau dengan kata lain tidak menjadi pemimpin partai politik, apa yang menjadi penyebab usulan tersebut sulit diwujudkan?
3. Penduduk Indonesia sebesar 230 juta lebih, mengapa sampai dewasa ini di antara jumlah penduduk tersebut sedikit lahir pemimipin yang negarawan?
4. Sejauhmana hubungan atau korelasi antara "demokrasi langsung dengan lahirnya atau munculnya pemimpin yang negarawan?
5. Kecenderungan praktek politik transaksional menyebabkan kerusakan terhadap kelahiran para pemimpin pemerintahan pada akhir-akhir ini, sejauh mana partai politik mampu mengendalikan praktek politik transaksional?

## 4.13 PERANMILITER DALAM SISTEM POLITIK ERA REFORMASI

Terminologi militer pada umumnya digunakan dalam situasi konflik antar negara atau juga antar kelompok di masyarakat, peran dan fungsi militer yaitu untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan demikian militer merupakan suatu unit sosial, terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan terlatih untuk melawan atau mempertahankan negara dari serangan musuh. Kelahiran militer di setiap negara berbed-beda baik dari aspek sejarah, kondisi sosial budaya masyarakat di negara tersebut. Pembentukan organisasi militer ada yang terlahir dari kancah perjuangan melawan penjajahan. Tetapi ada suatu negara memiliki organisasi militer yang dibentuk secara profesional dengan tujuan untuk menaklukan negara lain. Bahkan terdapat negara yang memberikan kewenangan kepada swasta untuk membentuk unit organisasi militer bayaran seperti di Amerika Serikat yang disebut "*Black Panter*". Oleh sebab itu mempelajari "organsasi militer" di suatu negara harus dikaji secara lebih komprehensif, agar tidak keliru dalam menempatkan posisi militer terutama peran dan fungsinya dalam suatu negara.

### 4.13.1 Eksistensi Peran Militer

Topik tentang peran militer dimasukan sebagai kajian dalam pembangunan sistem politik, karena organisasi militer sebagai salah satu kekuatan politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap konstelasi politik nasional dan internasional. Dalam sejarah, militer pada awal kelahiran kelompok bersenjata oleh Huntington disebut sebagai kelompok penakluk *(warrior)* yang kemudian berkembang sebagai militer profesional. Selanjutnya paradigma tersebut menjadi landasan dalam konsep negara modern saat ini bahwa teori militer menurut manzab barat, menjalankan fungsi "Pertahanan Negara". Penyelenggara kekuasaan pemerintahan sehari-hari dilaksanakan oleh rezim pemerintahan sipil dan sebagai konsekuensi era *civil society*, posisi militer di tempatkan di barak atau pangkalan militer. Indonesia sedang menghadapi hal yang sama pada masa era reformasi, dimana kelompok militer melakukan *repositioning* dengan mengurangi peran "Fungsi sosial politik dan bisnis atau lebih dikenal peran dwifungsinya". Program *repositioning* akan menempatkan peran dan posisi militer sebagai militer profesional merupakan keniscayaan dalam era *civil society* tersebut.

### 4.13.2 Pendekatan Konsep dan Teori Militer

Berdasarkan uraian di atas mengenai hubungan sipil dan militer akan dikaji melalui beberapa pendekatan teori dari para pakar tentang militer baik dari Indonesia maupun dari barat. Misalnya pandangan para pakar tahun 1970-an atau 1980-an dari Indonesia

seperti Nugroho Notosusanto dan A.H. Nasution, keduanya memiliki pandangan bahwa peran militer dalam politik pemerintahan di Indonesia sebaiknya berbeda dengan pandangan barat *(western)*. Oleh karena fakta sejarah maka peran militer di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan pemerintah atau meminjam istilah *Nordlinger (1977)* dikatakan *"The armed forces of all countries event considerable political influence"*. Oleh sebab itu ketika masa orde baru pengaruh militer sangat kuat dalam percaturan politik nasional dan memiliki peran ganda militer (dwifungsi ABRI) yaitu dalam penyelenggaraan pemerintahan sipil baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Perdebatan pemikiran teoritis antara paradigma keterlibatan militer dalam pemerintahan sipil dengan profesionalisme militer di pihak yang lain merupakan tuntutan perkembangan globalisasi yang berpengaruh terhadap cara-cara mengelola negara. Walaupun pada hakekatnya kelahiran militer dipengaruhi oleh sejarah dan ideologi masing-masing negara. Sehingga pemikiran sampai saat ini militer ada di bawah kontrol pemerintahan sipil (militer profesional) atau militer melakukan intervensi terhadap pemerintahan sipil, secara implisit dan eksplisit tetap menjadi kajian yang menarik. Para pemikir barat yang banyak menjadi sumber referensi dalam tulisan tentang militer seperti; *Samuel P. Huntington, Eric A. Nordlinger, Morris Janowitz, Herbert Feith, Amos Perlmutter, Edward Shells, Lucian Pye*. Para pakar ini dalam kajian teoritis lebih berpijak pada paradigma *"praetorian state"* yang mendapat justifikasi hasil studi di negara dunia ketiga seperti; Amerika Latin, Asia, Afrika termasuk Mesir Aljazair dan lain-lain. Oleh sebab itu dalam kajian topik ini tidak terlepas dari referensi para pakar di atas dan ditambah referensi lainnya seperti beberapa penulis tentang militer pada era Reformasi.

Di Indonesia perkembangan dan perjalanan sejarah militer seperti disebutkan di atas pada era pasca reformasi sudah melakukan repositioning menuju militer profesional. Fenomena tersebut menarik untuk dicermati bahwa pada akhjir akhir ini para pensiunan Jenderal memasuki dunia politik praktis sebagai "Pendiri Partai Politik" maupun sebagai pejabat publik yaitu sebagai Kepala Daerah maupun anggota DPR/DPRD melalui proses mekanisme demokrasi. Oleh sebab itu kehadiran militer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama di Indonesia, tidak bisa terlepas dari sejarah yang telah dilalui pada waktu setengah abad lebih. Sebagaimana dikatakan oleh sesepuh TNI Jenderal Besar Soedirman mengatakan dalam *Noto Susanto (1980)*, dalam gagasan mereka telah terdapat benih-benih bagi apa yang kelak dengan sebutan "Dwi Fungsi ABRI", yakni fungsi militer dan fungsi sosial politik. Mereka tidak mengatakan bahwa tentara tidak boleh berpolitik, melainkan bahwa politik tentara adalah politik negara.

Berdasarkan uraian di atas landasan konsep dan teori dalam kajian topik ini yaitu peran militer di Indonesia dalam sistem politik era Reformasi, dengan melakukan pengamatan dan mencermati perkembangan antara *das sein dan das sollen* serta dalam konteks kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik di masa yang akan datang terutama bagi generasi selanjutnya.

Militer adalah suatu unit organisasi yang dipersenjatai dan menjalankan fungsi menjaga, memelihara pertahanan negara dan memberikan perlindungan kepada warga negara dari serangan musuh baik dari dalam maupun dari luar. Oleh sebab itu di negara modern unit organisasi militer merupakan organisasi yang memiliki karakteristik yakni *pertama;* memiliki garis komando yang jelas dan tegas, *kedua;* jenjang hirearchi yang ketat, *ketiga;* memiliki standarisasi personil dan perlengkapan yang terukur, tertib dan teratur, *keempat;* unit organisasi militer dipersenjatai dan setiap anggota organisasi militer dibekali kemahiran menggunakan senjata api, *kelima;* selalu mengikuti dan cepat beradaptasi dengan organisasi dan manajemen modern, *keenam;* selalu menjaga dan memelihara disiplin yang tinggi para anggotanya, *ketujuh;* memiliki nilai-nilai ”mengedepankan kepentingan negara” di atas segalanya.

Sebagaimana diketahui bersama dalam kontekssejarah kelahiran militer pada masing-masing negara di dunia sangat beragam dan berbeda satu sama lain. Di negara-negara yang memperoleh kemerdekaan dari tangan penjajahan negara lain, lahir suatu organisasi militer yang lebih berbasis pada dukungan rakyat secara luas dari berbagai unsur dan kelompok masyarakat yang ikut andil dan dipersenjatai baik yang tradisional maupun yang modern dalam perjuangan mengusir penjajah untuk mencapai kemerdekaan negara tersebut. Tipe negara seperti ini pada umumnya peran militer dalam penyelenggaraan negara memegang peranan penting dan cukup berpengaruh baik pada masa yang lalu maupun sampai saat ini. Sedangkan negara-negara yang belum pernah dijajah oleh negara lain atau negara itu sendiri sebagai negara penjajah sumber-sumber kekuatan militer di samping dari dukungan warga negara baik secara sukarela maupun dipaksa dan dapat bersumber dari militer yang profesional atas dasar pada transaksional berdasarkan kontrol jangka pendek atau jangka panjang atau dengan kata lain sebagai “tentara bayaran”. Sehingga ilustrasi sejarah militer di beberapa negara termasuk Indonesia yang dianalisis *Morris Janowitz*, dalam tulisan *“The Military In The Political Development of Nation”*; *An Essay in Comparative Analysis,* dalam*(Nugroho, 1980)*, mengatakan baik di Indonesia, Vietnam dan Aljazair, tentaranya lahir di dalam perjuangan bersenjata dan karenanya dapat digolongkan ke dalam jenis “Tentara Pembebasan Nasional” atau *“Army of National Liberation”*. Jenis-jenis tentara yang lain pada negara baru, menurut *Janowitz* adalah yang *“Ex-Colonial”* (misalnya seperti Muangthai dan Ethiopia), karena kedua negara

itu tidak pernah di jajah dan yang *post liberation* (seperti Nigeria, Zaire dan berbagi negara di Afrika Lainnya). Menurut *Nugroho (1980),* andaikata tentara kita dulu merupakan transformasi dari Peta suatu tentara dari kolonial misalnya KNIL, atau tentara PETA maka sudah barang tentu tentara Indonesia pun dapat masuk jenis *"Ex-Colonial"* dan kiranya kepribadian TNI atau ABRI sebagai keseluruhan akan lain dari pada kenyataannya sekarang. Selanjutnya pada bagian lain *Nugroho* mengatakan bahwa "jika angkatan bersenjata keempat negara ini diteliti dengan seksama, maka akan dapat dikatakan bahwa angkatan bersenjata "Indonesia dan Aljazair" mempunyai sifat yang lain dibandingkan dengan Angkatan bersenjata "Vietnam dan Israel". Angkatan bersenjata Indonesia dan Aljazair memainkan peranan politik disamping fungsi militernya, sedangkan angkatan bersenjata Vietnam dan Israel tidak, artinya di kedua negara tersebut terdapat "*Civilian Supremacy* atau Supremasi Sipil".

Contoh sejarah militer keempat negara di atas berdasarkan analisis *Janowitz* dan *Nugroho* menunjukkan bahwa kelahiran militer dalam suatu negara sebagian besar semua berjuang melawan kolonialisme sehingga profil militer masing-masing negara berbeda jenis yakni jenis "tentara pembebasan atau jenis *Ex Colonial* dan Non Kolonialisme (Muangthai dan Ethiopia). Akan tetapi pendapat penulis menempatkan Israel sebagai sebuah negara yang merdeka melawan penjajah dan melalui tentara pembebasan yang digerakkan oleh partai pelopor atau disebut gerakan "Zionis". Analisis *Janowitz* kurang proporsional, sebab sampai saat ini oleh sebagian besar negara-negara di dunia, secara internasional Israel belum diakui sebagai sebuah negara, hanya didukung oleh Amerika Serikat. Walaupun dalam kenyataannya bahwa bangsa Yahudi melalui penaklukan (*warrior*) mendiami wilayah Palestina, dengan gerakan zionisnya mendeklarasikan diri sebagai negara yang disebut Israel. Selanjutnya melakukan "pendudukan di Tanah Palestina dan secara bertahap memperluas wilayah pendudukan hingga Jalur Gaza.Secara historis kembalinya bangsa Yahudi ke tanah Palestina dimulai sebelum PD II dan semakin eksis menduduki wilayah Palestina pasca PD II melalui dukungan Inggris. Oleh sebab itu kurang tepat jika tentara Israel dikatakan sebagai tentara pembebasan *(Army of Liberation)*, akan tetapi yang lebih tepat digolongkan sebagai tentara kolonial *(army of Colonial)* atau penaklukan *(warrior)*. Sedangkan analisis *Nugroho (1980)* mengenai kesamaan peran militer Aljazair dengan Indonesia yang menjalankan fungsi sosial politik. Ketika era orde baru, konsep dwi fungsi ABRI/TNI berjalan selama 32 tahun, militer menikmati kekuasaan sipil dalam waktu yang cukup lama, mempengaruhi terhadap praktek demokrasi. Artinya demokrasi yang diberi label "Demokrasi Pancasila", tapi yang lebih dirasakan adalah *"authoritarian"*. Pada masa orde baru oleh para pengamat sering dikatakan sebagai sitem pemerintahan yang cenderung *"military oligarchy"* atau pemerintahan rezim militer. Hampir semua kekuasaan baik di legislatif, eksekutif dan yudikatif dijabat

oleh militer aktif maupun purnawirawan. Penjelasan di atas hampir senada dengan yang diutarakan *Nordlinger (1977)* yaitu; *"All military regimes are authoritarian in that they eliminate or extensively limit political right, liberties and competitive, at least until the officers are getting ready to return to the baracks"*. (Semua rezim militer yang otoriter mereka menghilangkan atau membatasi hak politik secara luas, kebebasan dan persaingan, setidaknya sampai petugas bersiap-siap untuk kembali ke barak).

### 4.13.3 Sejarah Militer di Indonesia

Selanjutnya jika melihat latar belakang sejarah militer di Indonesia dapat dikatakan bahwa (TNI) dalam sejarah militer sering disebut sebagai "Tentara Rakyat" artinya kelahiran militer dari berbagai unsur dan komponen rakyat yang bahu membahu dengan menggunakan berbagai senjata modern maupun tradisional seperti yang terkenal disebut "bambu runcing". Unsur dan komponen rakyat yang ikut berjuang secara kemiliteran yang sering disebut dalam sejarah yaitu sebutan *Pasukan Hisbulah* dari unsur ulama dan santri, Tentara Pelajar (TP) dan Mastrip dari unsur pelajar, dan dari unsur masyarakat luas yang dididik secara militer misalnya dari PETA yang dididik secara militer oleh Jepang dan KNIL didikan Belanda. Oleh sebab itu proses kelahiran militer di Indonesia berasal dari rakyat yang heroik. Sebagai contoh dalama sejarah militer di Indonesia melahirkan seorang Putra Indonesia yang berasal dari rakyat yang pada awalnya berprofesi sebagai guru dan juga ulama yaitu "Sudirman" yang kelak diabadikan sebagai Bapak Tentara Nasional Indonesia. Dalam sejarah berkat jasanya mengantarkan militer Indonesia melalui perjuangan gerilya naik turun gunung melawan kolonialisme Belanda. Sehingga menginspirasi lahirnya teori dan strategi "Perang Rakyat Semesta". Atas jasanya beliau dianugerahi sebagai "Panglima Besar Jenderal Sudirman". Selanjutnya apa yang disampaikan oleh Jenderal Sudirman sebagimana yang ditulis oleh *AH. Nasution, dalam Nugroho (1980)* yaitu sebagaimana dikatakan oleh pak Dirman; yaitu dengan percaya pada kekuatan sendiri, dengan tidak mengenal menyerah. Dalam rangka ini sejarah sejak 1945 telah menggambarkan "Perjuangan rakyat dan tentara yang selalu berkobar, bahkan beberapa kali tanpa hadirnya pemerintah, kemudian Nasution menggambarkan "Dalam hal ini dicatat berkali-kali kepemimpinan dari TNI dengan kuasa penuh dari pemerintah seperti pada masa pemberontakan PKI Muso, PRRI, G 30 S PKI. Pernyataan di atas menegaskan bahwa sesungguhnya hubungan antara sipil-militer di Indonesia merupakan simbiosis mutualisme dalam menegakkan kemerdekaan bangsa dan negara baik dari serangan dari dalam seperti oleh PKI maupun dari luar seperti para kolonial dan kompradornya. Oleh sebab itu dalam pandangan tersebut melahirkan dikotomi antar sipil dan militer pada dasarnya tidak sesuai dengan realitas sejarah kelahiran militer di Indonesia.

Pandangan ini juga dipertegas dari analisis tentang posisi militer oleh *Nugroho (1980)* dikatakan; Sejak lahirnya tentara kita sudah berjiwa politik sebagai pejuang, sedangkan jiwa itu lestari sampai sekarang. Sehingga dari sudut kaca mata ilmiah, harus bisa dilepaskan penerapan model-model asing yang tidak tepat terhadap realitas TNI/ ABRI.

Mempelajari sejarah tentang militer secara teoritis terdapat dua bentuk hubungan sipil-militer yang menurut *Samuel P. Huntington* dalam judul *"The soldier and the state"; The theory and Political of Civil-Military Relations, (1964)*yaitu disebut; *pertama;Subjective Civilian Control* (Pengendalian Sipil Subjektif), *kedua;Objective Civilian Control* (Pengendalian Sipil Objektif). Pengendalian sipil subjektif dilakukan dengan; *Maximalizing Civilian* Power atau memperbesar kekuasaan sipil dibandingkan dengan kekuasaan militer. Sedangkan pengendalian sipil objektif yaitu memperbesar profesionalisme militer, kekuasaan akan diminimkan, namun tidak sama sekali melenyapkan kekuasaan kaum militer melainkan tetap menyediakan kekuasaan terbatas tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan profesionalitas.

Dalam konteks teori di atas, untuk kasus Indonesia yaitu militer Indonesia sejak merdeka pada tahun 1945, kekuasaan pemerintahan justru diserahkan kepada pemerintahan Syahrir sebagai Perdana Menteri dan pada saat itu Indonesia menganut paham demokrasi liberal. Sejak terbentuknya pemerintah Republik Indonesia dijalankan berdasarkan demokrasi parlementer tahun 1945-1959 dan demokrasi terpimpin tahun 1959-1966, posisi militer di bawah kekuasaan sipil. Namun dalam catatan sejarah militer ketika era kekuasaan sipil terjadi peristiwa pada tahun 1952 upaya setengah kudeta yang gagal yaitu ketika istana di kepung dengan tank dan meriam yang siap ditembakkan ke arah istana yang dipimpin oleh Nasution. Sedangkan sejarah militer dimana peran militer melakukan intervensi terhadap pemerintahan sipil sebagaimana contoh antara lain; Mesir, Libya, Thailand, pengaruh militer memegang peran yang strategis dan pemegang peran utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan dalam waktu yang cukup lama. Sedangkan di Indonesia peran militer mulai berkuasa terhadap pemerintahan sipil dimulai pada era orde baru tahun 1967 sampai dengan tahun 1998. Pada masa pemerintahan orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto ciri dan watak pemerintahannya yaitu sentralistik dan otoriter melalui konsep "Dwi Fungsi ABRI". Pada waktu itu hampir di seluruh posisi strategis pemerintahan dan juga BUMN dikuasai oleh militer aktif, mulai pangkat terendah sampai Jenderal. Konsolidasi kekuasaan dalam rangka menata kembali kehidupan ekonomi, politik dan kemasyarakatan, secara empiris dapat berjalan dengan baik. Bahkan perubahan yang cukup mencolok yaitu pertumbuhan pembangunan ekonomi yang tinggi sampai mencapai rata-rata di atas 7%. Stabilitas keamanan politik dan ekonomi relatif terpelihara dengan baik.

Pada era orde baru disamping kekuatan ekonomi mulai tumbuh dan posisi Indonesia menjadi negara berkembang *(developing country)* yang didukung oleh stabilitas politik dan keamanan relatif stabil tersebut. Disamping itu gerakan radikal dan ekstrim dari beberapa kelompok masyarakat dapat dikendalikan dengan baik oleh militer. Kondisi keamanan yang relatif kondusif mampu memberikan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat yang sudah cukup lama didambakan.

Akan tetapi dalam perkembangannya pada masa orde baru hanya dapat bertahan 3 (tiga) Pelita, selanjutnya tahun 1980 an ke atas kekuatan ekonomi Indonesia mulai menghadapi krisis akibat dari pengaruh krisis global. Struktur ekonomi Indonesia yang belum tangguh menghadapi krisis ekonomi terutama ketika menghadapi krisis moneter, secara perlahan dan pasti mulai menggangu stabilitas politik dan keamanan. Munculnya berbagai demonstrasi dari elemen-elemen masyarakat menuntut perbaikan dan tuntutan dari dalam dan luar yang menyangkut demokratisasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup serta keadilan sosial, semakin memperlemah kewibawaan pemerintah. Selama pemerintahan orde baru yang lebih cenderung menonjol sifat-sifat militeristik ketimbang pemerintahan demokratis, serta tindakan pemerintah yang represif sering mulai melanggar hak asasi manusia seperti contoh kasus yang cukup legendaris yaitu kasus "Marsinah". Dalam kasus ini yang menjadi terdakwa dari kalangan militer. Fenomena tersebut secara tepat dikatakan oleh *Robert P. C Clark (1996)* dalam *Hendiziko Firman*, "Naiknya kekuasaan militer merupakan gejala umum di dunia ketiga sebagimana maraknya otoriterisme. Clark mengidentifikasi munculnya rezim militer di suatu negara senantiasa bersamaan dengan menjauhnya demokrasi dari negara yang bersangkutan. Pendapat tersebut dipertegas oleh *Nordlinger (1977)* mengatakan bahwa jika sebuah pemerintahan dikusai oleh militer,maka hampir pasti akan melahirkan otoriterisme. Berkenaan dengan rezim militer cenderung pro otoriterisme, selanjutnya *Hendriko*, menjelaskan bahwa dalam kasus Indonesia Ideologi dalam konsepsi kenegaraan, yang dipedomani militer Indonesia, untuk mengarahkan posisi dan peran dalam kedudukan kenegaraan ialah "Doktrin Tri Ubaya Sakti dan Catur Dharma Eka Paksi", maka konsep kenegaraan integralistik yang "dipedomani" dan "diperintah" militer merupakan bagian dari "Ideologi Militer". Menurut Ong Hok Ham *(1980)* menjelaskan pula bahwa dunia modern menganggap militer campur tangan dalam politik negara sebagai *"Praetorianisme"* yang bertentangan dengan konsep kedaulatan rakyat, demokrasi bahkan dengan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan negara. Selanjutnya dikatakan bahwa menarik juga dalam perkembangan sejarah dunia di mana kekuatan-kekuatan masyarakat muncul, maka terjadi pembatasan kekuasaan militer. Sehingga menimbulkan konsep mengenai "Militer Profesional" yakni militer yang tidak ikut campur tangan secara langsung dalam urusan politik. Oleh sebab itu perdebatan yang panjang antara rezim militer

dalam pemerintahan dan di pihak lain pemerintahan sipil yang didukung dengan prinsip demokrasi dan *civil society* terus muncul menjadi perbincangan dan diskusi sampai saat ini yang sudah memasuki abad 21 yaitu era demokratisasi negara-negara di dunia. Peristiwa di Mesir pada bulan Juli 2013 dimana seorang Presiden Muhammad Mursi yang terpilih melalui pemilu demokratis dipaksa mundur melalui *people power* yang didukung militer. Walaupun peran militer lebih cenderung menjalankan mandat dari sebagian kelompok masyarakat pada akhirnya penggulingan kekuasaan tetap terjadi. Bahkan pendukung mantan Presiden Mursi masih melakukan perlawanan sampai menimbulkan korban yang cukup besar dan bahkan pemerintah yang didukung militer memberlakukan jam malam atau negara dalam keadaan darurat. Peristiwa politik tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara sipil-militer dalam penyelenggaraan negara tetap menjadi persoalan yang cukup pelik. Dalam konteks di Indonesia, hubungan sipil dan militer masih dalam posisi yang kondusif. Dalam memperebutkan jabatan publik konsentrasi antara kalangan sipil dan militer yang direpresentasikan para jenderal purnawirawan melalui proses demokrasi berjalan relatif lancar, aman, dan terkendali. Proses demokratisasi dalam memilih pemimpin pemerintahan berjalan dengan baik. Walaupun hasil dari keberhasilan demokrasi di Indonesia tidak selalu seiring atau korelatif dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### 4.13.4 Militer pada Era Reformasi

Ketika muncul gerakan reformasi tahun 1990-an, menuntut perubahan di bidang politik yaitu tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan di bidang ekonomi agar lebih pro rakyat, ditegakkan hak asasi manusia serta penegakan hukum. Perjuangan gerakan reformasi terus menggelinding seperti bola salju dan pecah ketika terjadi krisis moneter tahun 1997. Gerakan reformasi menemukan momentum yang tepat pada saat krisis moneter mengakibatkan timbul krisis politik dan pada akhirnya pada tahun 1998 kekuasaan pemerintah orde baru jatuh seiring dengan Presiden Soeharto meminta "berhenti" dari kursi kepresidenan. Pada era reformasi tersebut menuntut perubahan posisi militer sebagai tentara yang profesional terus menguat menyesuaikan dengan proses demokratisasi pada era *civil society*.

Ketika era reformasi pada tahun 1998 di bawah rezim pemerintahan Presiden Habibie dan menghantarkan pemilu tahun 1999 yang demokratis. Terjadi perubahan sistem politik yang semula sentralistik dan otoriter menuju proses demokratisasi. Seiring dengan perubahan sistem politik tersebut sudah barang tentu berpengaruh terhadap berubahnya peran militer dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dwi Fungsi ABRI di hapuskan, anggota TNI dan Polri aktif mulai meninggalkan posisi jabatan

strategis di pemerintahan sipil mulai dari jabatan politik seperti presiden, menteri, gubernur, bupati/walikota, jabatan eselon I, II, dan III pada Kementerian dan Lembaga Non Kementerian dan juga di BUMN/D. Oleh sebab itu praktis peran militer di era reformasi mulai ditata kembali *(Repositioning)* menuju pada era kembalinya militer ke barak *Basic to Barrack*, sebagai "tentara profesional". Perkembangan terminologi "tentara profesional" terkait dengan perkembangan "keamanan nasional" yang semakin kompleks menghadapi era globalisasi. Faktor ancaman yang bersifat internal dan eksternal seiring kemajuan teknologi yang semakin canggih menuntut peran "tentara profesional" berkaitan dengan kemampuan dalam memberikan kontribusi terhadap konstelasi perumusan kebijakan "keamanan nasional". Adapun pemikiran tentang "tentara profesional", *Perlmutter (1977)* dalam *Magenda (1985)* mengatakan bahwa, "model tentara profesional lebih mungkin dicapai pada negara yang berkebudayaan homogen dan sekuler ketimbang negara yang majemuk dan tradisional". Pernyataan di atas dapat menjadi dasar pertimbangan teoritis, tanpa harus menghalangi upaya membangun citra "tentara profesional" dalam negara modern dan era lingkungan masyarakat yang menginginkan demokratisasi. Namun bagi Indonesia yang merupakan negara dengan kultur yang majemuk dan tradisional, pilihan terhadap pembentukan tentara "profesional" perlu dilakukan redifinisi mengenai "tentara profesional" dengan melihat lingkungan strategis masyarakat di Indonesia. Walaupun kalangan elit politik merasa *confidence* proses demokratisasi akan berjalan mulus, sehingga pembentukan tentara profesional merupakan keniscayaan seiring dengan tujuan membangun *civil society*.

Namun demikian, menurut pandangan Mietzner (2009) seorang pengamat politik militer Indonesia memberikan pandangan tersendiri terhadap situasi perkembangan dan perubahan peran militer setelah era politik Soeharto yaitu mengatakan: *"The complexity of the military's new role in the post-Suharto polity does not only pose difficult challenges to Indonesia's Democratics qournments, but also to the theoretical debate on democratic transitions in general. The existing literature on civil-military relations in post authoritarian states has found it difficult to grasp the oscillating dynamics of military influence on envolving democratic polities."*

Pendapat di atas menyatakan bahwa pada era setelah politik Soeharto, peran baru militer pada dasarnya menghadapi persoalan yang cukup kompleks, tidak hanya menghadapi tantangan-tantangan yang sulit terhadap pemerintahan demokratis di Indonesia, akan tetapi pada umumnya merupakan perdebatan teoritikal dalam masa transisi demokrasi. Berdasarkan literatur sebenarnya hubungan antara sipil dan militer pada negara setelah era rezim otoriter mengalami kesulitan untuk memahami dinamika pengaruh militer yang berkembang terhadap politik demokrasi.

Penjelasan Mietzner (2009) di atas dalam mencermati perkembangan militer, walaupun militer pada era reformasi telah melakukan reposisioning dan mengambil jarak terhadap politik, namun dalam menempatkan peran baru militer dalam pemerintahan demokrasi sebenarnya menghadapi tantangan yang sulit baik dalam perdebatan praktis maupun dalam *teksbook*. Karena dalam pandangan teori klasik tentang militer bahwa sebagai bentuk partisipasi politik melalui mekanisme formal militer mempunyai pengaruh yang besar dalam kekuasaan pemerintahan. Jika mencermati perkembangan situasi praktek demokrasi terutama dalam pemilihan para pemimpin nasional, regional dan lokal, walaupun bentuk partisipasi politik secara institusional tidak dilakukan secara formal namun munculnya kandidat presiden dari mantan jenderal yang terjun ke dunia politik merupakan bukti kegamangan dan kegalauan kalangan militer terhadap politik demokrasi yang berkembang di Indonesia. Saat ini praktek demokrasi terbukti mengalami situasi yang rumit dan berbiaya tinggi. Disamping itu dalam era kompetisi melalui demokrasi langsung, para pensiunan jendral secara personal mengalami gregadasi pengaruh di lingkungan masyarakat.

Fenomena yang diuraikan di atas merupakan konsekuensi logis penerapan konsep dan teori politik demokrasi menurut mazhab demokrasi barat. Konsep demokrasi menurut mazhab barat bahwa era "demokrasi" adalah era *"civil society"* dimana seluruh posisi dalam penyelenggaraan pemerintahan dipegang oleh "sipil". Sedangkan posisi militer dikembalikan kepada fungsi pokok yaitu menjaga dan memelihara pertahanan negara. Untuk itu fungsi militer dioptimalkan untuk urusan pertahanan dan keamanan sedangkan urusan sehari-hari terkait kebutuhan ekonomi, sosial budaya dan politik menjadi urusan pemerintahan sipil. Dalam terminologi barat "keberadaan militer yang tepat adalah di barak bersama dengan seperangkat peralatan militer yaitu "persenjataan tempur" yang berada di pangkalan militer.

Oleh sebab itu merupakan keniscayaan bahwa kelompok militer dan para politisi sipil harus membangun saling pengertian terutama pada masa transisi perubahan era otoriterisme menuju proses demokrasi agar posisi militer dan peran militer lebih kondusif dalam mendukung proses demokratisasi. Sebagaimana dijelaskan Hendriko dalam negara demokrasi, supremasi dan kontrol sipil merupakan conditio sine quanon, demikian halnya dengan "Profesionalisme" militer itu sendiri. Premis ini telah diterima secara luas oleh dunia internasional dan menandai terjadinya progesivitas politik di negara-negara baru seperti belahan Afrika Selatan, Amerika Latin dan bahkan di bekas negara komunis Eropa Timur, termasuk di Indonesia saat ini.

Namun perkembangan konsolidasi kekuasaan pemerintahan sipil pada era reformasi ini yang sudah berjalan lima belas tahun masih menghadapi tantangan yang tidak ringan dalam menerapkan demokrasi jika desain sistem politik yang demokratis

tersebut tidak dilandasi oleh budaya politik egaliter, ekonomi yang stabil, solidaritas sosial yang kuat,penegakan hukum yang konsisten, tegas dan lugas, maka demokrasi yang bergulir justru semakin kurang terkendali dan bahkan semakin kebablasan menuju pada kondisi "mobokrasi".

Pada era pemerintahan sipil saat ini cenderung muncul fenomena antara lain: *pertama;* partai politik yang tumbuh sebagai tiang negara belum dikelola berdasarkan manajemen partai politik yang benar; *kedua;* rekruitmen kader partai politik tidak berdasarkan prinsip merithocracy system; ketiga; para politisi yang menduduki jabatan publik sebagian besar kurang memiliki sifat "kenegarawanan" bahkan makin banyak yang terlibat pidana korupsi. *Keempat;* penerapan demokrasi langsung menumbuhkan praktek politik uang secara massif. Kelima; pelaksanaan pemilukada sering menimbulkan konflik horizontal di berbagai daerah.

Beberapa fenomena yang disebutkan di atas akan berpengaruh terhadap efektifitas kepemimpinan pemerintahan sipil baik mulai dari pusat sampai ke daerah. Apabila "kepemimpinan pemerintahan sipil" yang notabene lebih banyak berasal dari "politisi" baik mereka berlatar belakang pengusaha, aktivis, artis dan lain-lain cenderung semakin tidak efektif maka pemerintahan sipil tersebut akan semakin "lemah" dan konsekuensi logisnya negara menuju pada kondisi berpotensi disintegrasi. Jika pemerintahan sipil gagal secara teoritis akan mengundang kehadiran "militer" untuk mengambil alih kekuasaan pemerintahan sipil yang mengalami chaos tersebut. Namun demikian, menurut Hendriko semua itu tergantung pada tiga entitas politik utama, yaitu para politisi sipil, petinggi-petinggi militer dan para pemimpin masyarakat sipil dituntut soliditasnya agar benar-benar kuat alias tidak terpecah-pecah. Politisi sipil yang terpecah-pecah, tidak kompak dan saling serang hanya akan membuka pintu bagi intervensi militer ke dalam politik, baik melalui kudeta, maupun intervensi prerogatif dan kekuasaan.

Meskipun secara teoritis jika pemerintahan sipil mengalami ketidakstabilan politik dan ekonomi, maka para pemimipin militer terutama panglima TNI mengambil alih kekuasaan dari kekuasaan sipil. Namun demikian diharapkan para perwira tinggi di TNI mampu mengendalikan diri agar dalam sistem politik Indonesiadihindari terjadinya *"Coup de'tat"* atau pengambilalihan kekuasaan di tangan militer. Sebab jika sekali terjadi pengambilalihan kekuasaan sipil oleh pihak militer maka peristiwa tersebut akan terus berulang kembali, seperti terjadidi Thailand dan juga di Filipina.

Oleh sebab itu kekuasaan politik militer yang dewasa ini telah melakukan reformasi untuk *"Re positioning"*, maka dalam konteks menuju hubungan yang harmonis perlu dikembangan model hubungan antara sipil dan militer dalam sistem politik yang demokratis.

Dalam model hubungan tersebut diperlukan kesepahaman antara sipil - militer atas dasar kepentingan bersama seluruh komponen bangsa dan negara. Dengan demikian dalam mengisi sumber-sumber rekruitmen pemimpin pemerintahan keduanya harus diakomodir dalam suatu posisi tawar yang proporsional adil dan tanpa saling melemahkan.

Oleh karena pada dasarnya ketika negara dan bangsa dihadapkan pada proses regenerasi, maka sumber-sumber rekruitmen pemimpin nasional dan juga daerah harus muncul dari berbagai kelompok kekuatan, termasuk kelompok militer. Semua kekuatan termasuk partai politik sebagai pintu masuk utama dan kekuatan kekuatan politik yang lainnya yaitu ormas, LSM, organisasi profesi, asosiasi, birokrasi, dan lain-lain harus mempersiapkan kadernya dengan baik sebagai pemimpin yang handal, berani dan tegas, serta visioner dan demokratis. Seperti diketahui dewasa ini banyak kalangan sudah meneriakkan bahwa negara dan bangsa ini sedang mengalami krisis pemimpin dan kepemimpinan, artinya krisis secara kuantitatif dan kualitatif. Dalam konteks yang disebutkan di atas sangat disadari bahwa di antara kekuatan politik sebagai sumber rekruitmen pemimpin, hanya dari kalangan militer, akademisi profesional yang dianggap paling siap dalam menyediakan sumber-sumber pemimpin. Sebagaimana tantangan dan tawaran yang simpatik dari kalangan militer yang disampaikan Octavian (2012) dalam bukunya yang berjudul "Militer dan Globalisasi" terkait dengan peran militer dalam negara yang selalu memiliki peran strategis ketika negara dalam keadaan genting, dikatakan "Meskipun tesis seperti ini bisa dianggap terlalu memposisikan militer lebih superior dibanding institusi lainnya, dalam perjalanan sejarah, hal itu terbukti kebenarannya, seperti pada masa transisi politik 1960-an ketika TNI menjadi salah satu institusi yang mempelopori lahirnya orde baru, serta proses reformasi 1998 yang berjalan beriringan dengan reformasi di tubuh TNI. Apakah pasca reformasi 1998 tersebut masih terjadi, belum ada satu penelaahan lebih jauh yang membahasnya. Namun dari dinamika politik terakhir, kita masih bisa saksikan bahwa institusi TNI mampu menjamin kebutuhan kepemimpinan yang dikehendaki oleh rezim reformasi sipil. Hal ini dibuktikan dengan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) seorang purnawirawan jenderal TNI yang masih dikehendaki oleh sebagian besar rakyat Indonesia meskipun diterpa beragam kritik.

Berdasarkan penjelasan di atas, hubungan sipil-militer di era reformasi pada hakekatnya masih mencari bentuk yang terbaik agar terhindar dari intrik-intrik politik yang justru merugikan kepentingan bangsa dan negara seperti peristiwa di Mesir pada era tahun 2013.

Hubungan sipil-milter melalui konteks demokrasi langsung dalam sistem politik Indonesia dewasa ini, mekanisme proses dan prosedur demokrasi langsung

tersebut bagi kalangan militer dan birokrasi yang memiliki potensi sebagai pemimpin untuk menduduki jabatan publik merupakan pilihan yang dilematis. Ketika sumber rekruitmen calon pemimpin jabatan publik dalam kurun waktu satu dasa warsa ini atau tiga kali periode pemilu tahun 1999, 2004, dan 2009 yang tampil sebagai pemimpin pemerintahan belum sepenuhnya memuaskan masyarakat sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

Banyak kalangan di masyarakat menghendaki sosok pemimpin yang populis, tegas, dan berani. Bahkan lebih tegas lagi sumber-sumber rekruitmen dari kalangan militer juga masih menjadi pilihan yang banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini juga seiring dengan hasil survei yang dilakukan oleh LIPI seperti yang dirilis oleh Ikrar Nusa Bakti dalam media "Rakyat Merdeka" yang terbit tanggal 15 Juli 2013 mengatakan bahwa "masyarakat yang memilih pemimpin dari kalangan militer ternyata lebih besar yaitu sebesar 27% dibandingkan dengan yang memilih dari kalangan sipil yaitu sebanyak 24%.

### 4.13.5 Militer dan Demokrasi

Akan tetapi ketika kelompok militer, akademisi dan profesional terdorong oleh tanggung jawab moral untuk bisa memberikan kontribusi terhadap peran kepemimpinannya, namun harus melalui mekanisme demokrasi terlebih dahulu. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku terutama bagi TNI, Polri dan akademisi untuk mengikuti "kontestansi" dalam pemilu yang demokratis harus meninggalkan status dan karier militernya. Regulasi tersebut memang menjadi dilematis dalam perjalanan karier TNI dan akademisi, artinya persyaratan tersebut cukup memberikan pilihan yang sulit antara karier dan tuntutan kepentingan negara dan bangsa, secara cepat dibutuhkan dalam jabatan publik yang dipilih melalui pemilu. Kegamangan yang dihadapi para perwira militer dan akademisi terhadap perkembangan kondisi bangsanya tercermin dari banyaknya terutama para purnawirawan jenderal pada saat ini menjadi "Ketua Partai Politik". Melalui partai politik tersebut salah satu pintu masuk utama untuk mengikuti konstelasi yang dipersyaratkan undang-undang menjadi pemimpin pemerintahan sebagai pejabat publik baik di eksekutif maupun legislatif.

Menjelang pelaksanaan pemilu tahun 2014 merupakan masa yang krusial dalam konteks pergantian pemimpin nasional yang baru. Bahkan banyak kalangan menganalisis bahwa tahun 2013 adalah tahun politik, jika tidak dikelola dengan baik maka akan terjadi krisis politik. Untuk menghindari krisis politik yang tidak terkendali pada bulan Maret 2013, Presiden Susilo bambang Yudhoyono (SBY) secara berturut-turut mengundang para tokoh yang diawali dengan para jenderal purnawirawan,

diantaranya ada yang sudah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Pertemuan dengan para tokoh dari berbagai kelompok masyarakat sudah dipastikan membahas mengenai masa depan bangsa dan negara Indonesia, terutama menghadapi suksesi kepemimpinan nasional pada tahun 2014 dapat berjalan lancar, aman dan damai. Dengan terpilihnya pemimpin yang mampu menghadapi tantangan Bangsa Indonesia di era pasar bebas. Kehadiran calon presiden dari kalangan militer dan akademisi sudah mulai diperhitungkan. Bahkan calon pemimpin nasional yang dipasangkan selalu merupakan perpaduan tokoh militer dan sipil.

Walaupun dalam proses politik bagi kalangan militer dan akademisi harus melalui mekanisme demokrasi yang rumit memang memerlukan energi tenaga dan pikiran serta pengorbanan materi yang besar. Situasi dan kondisi politik Indonesia sedang menghadapi masa transisi "Demokrasi", dipastikan memerlukan pengorbanan besar seluruh komponen bangsa menuju pada titik puncak *equilibrium* dengan harapan memperoleh figur pemimpin yang demokratis dan visioner. Proses demokrasi yang rumit tersebut diharapkan mampu untuk membangun sebuah negara yang besar, modern, berdaulat dan demokratis.

Bagi kelompok militer yang sudah pernah memegang tampuk kekuasaan cukup lama dalam sejarah politik Indonesia, barangkali dibutuhkan kesabaran jika para kader potensial dari kelompok militer diminta atau tidak diminta berkontribusi dalam kepemimpinan pemerintahan mengikuti atau melalui mekanisme demokrasi,seperti yang diatur dalam Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu. Oleh sebab itu pada era reformasi ini melalui dukungan *civil society* yang kuat, netralitas peran militer, merupakan kondisi ideal sebagai sebuah negara yang kuat, mandiri dan berdaulat. Dukungan militer tersebutmerupakan keniscayaan dalam menjalankan politik negara. Hubungan sipil-militer yang harmonis dalam sistem politik yang demokrasi diharapkan mampu membangun stabilitas politik dan keamanan yang mantab, sebab stabilitas politik dan keamanan yang mantab tersebut mampu mendukung pembangunan ekonomi yang tangguh di tengah arus globalisasi dan pasar bebas. Pada gilirannya menghantarkan negeri ini pada pintu gerbang kesejahteraan dan kemakmuran yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu diperlukan kearifan dan kesabaran dari kalangan militer yang dibutuhkan kehadiran kepemimpinannya oleh negara harus melalui demokrasi yang rumit dan mahal. Pengabdian dan pengorbanan sesungguhnya merupakan doktrin militer yang paling utama sehingga ketika dihadapkan dengan sistem politik demokrasi, bukan suatu halangan bagi kalangan militer. Dengan demikian pada masa depan era *civil society* akan semakin kuat dengan didukung oleh militer yang profesional menuju negara dan bangsa yang mandiri, berdaulat, dan sejahtera.

## STUDI KASUS 4.13

Dalam sesi diskusi ke 13 mengenai milter di era reformasi dengan mengambil kasus yang dimuat di media Kompas dengan judul "TNI Netral Buah Demokrasi". Sejak era reformasi posisi TNI ditempatkan pada posisi "netral" dengan kekuatan politik manapun, merupakan upaya serius menuju stabilitas negara yang dinamis. Netralitas posisi TNI tersebut tidak mudah dilakukan, karena setiap menjelang "pemilihan umum" Panglima TNI harus menegaskan kembali di depan publik bahwa anggota TNI yang tidak memiliki hak pilih, menghadapi pelaksanaan pemilihan umum harus netral. Walaupun upaya reposisioning TNI telah berjalan dengan baik yaitu TNI sebagai militer profesional. Akan tetapi di mata publik masih meragukan netralitas TNI tersebut. Sebab pada kenyataannya terdapat kecenderungan para mantan jendral ramai ramai terjuan kedunia politik praktis sebagai "ketua partai, menjadi anggota legeslatif dan juga sebagai kepala daerah. Meskipun secara normatif hubungan antara TNI aktif dengan organisasi purnawirwan TNI tidak ada hubungan subordinasi, tetapi hubungan emosional menjadi kekuatan yang cukup signifikan dalam menunjang karier politiknya. Untuk mengembangkan diskusi yang lebih mendalam di bawah ini disajikan bahan kasus yang dimuat di media massa dengan judul " TNI netral buah demokrasi".

### TNI Netral Buah Demokrasi

*JAKARTA, KOMPAS Kamis 9 Januari 2014*

Kemampuan para pemimpin Tentara Nasional Indonesia menjaga jarak dengan kekuasaan politik selama ini telah menuai simpati masyarakat. Publik yakin, secara institusional TNI mampu menjaga netralitas lembaganya dari intervensi politik dari kekuatan politik mana pun, termasuk pengaruh sejumlah mantan perwira yang kini aktif berpolitik.

Persoalan netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) selalu mengemuka ketika mendekati pemilihan umum (pemilu) karena ada kekhawatiran TNI mempunyai kepentingan dengan kontestan pemilu tertentu. Atau bahkan memiliki agenda khusus untuk memengaruhi hasil pemilu. Kekhawatiran ini tidak berlebihan karena sejarah telah mencatat, selama 32 tahun Orde Baru berkuasa, tentara merupakan salah satu unsur terpenting yang menyokong dan memengaruhi hasil pemilu.

Interaksi TNI dengan politik sebetulnya sudah ada sejak zaman perjuangan kemerdekaan. Menurut pengamat politik militer Salim Said, tentara Indonesia itu membentuk dirinya sendiri mulai dari panglima, anak buah, senjata, sampai logistik. Baik pemerintahan Soekarno maupun tokoh-tokoh pergerakan tidak mempunyai konsep militer dalam perjuangan. Dalam perkembangannya, tentara tidak saja menjadi komponen pejuang kemerdekaan, tetapi berubah

menjadi organisasi dan memiliki kekuatan dalam proses politik di Indonesia (Kompas, 5/1/2014).

Peran TNI dalam politik semakin kuat ketika tahun 1958 Presiden Soekarno mengakui tentara sebagai kekuatan politik.Pengakuan ini yang menjadi dasar bagi tentara untuk duduk di parlemen dan kabinet. Setelah peristiwa G30S/ PKI, semua kekuatan politik di libas oleh pemerintah kecuali tentara.

Keinginan untuk terlibat dalam politik praktis tidak bisa hilang begitu saja dari TNI meskipun secara regulasi semua peluang TNI untuk kembali ke arena politik telah ditutup. Ini karena pergulatan TNI dengan politik yang telah berlangsung dalam waktu yang lama. Salah satu indikasinya adalah keterlibatan sejumlah mantan perwira atau petinggi TNI dalam partai politik entah sebagai pendiri, pimpinan atau pengurus inti. Langkah tersebut tidak lain sebagai akses mendapatkan jabatan publik atau jalan menuju puncak kekuasaan politik dengan mengajukan diri sebagai calon presiden (capres).

**Tetap netral**

Ambisi sejumlah mantan perwira TNI untuk terjun ke politik praktis jadi dilema institusi TNI sejak reformasi. Di satu sisi, ambisi tersebut diakui sebagai hak pribadi setiap warga negara. Namun, di sisi lain, posisi para mantan petinggi TNI ini dianggap potensial untuk memecah soliditas sikap TNI terhadap politik. Kondisi inilah yang kerap membuat tiap panglima TNI menyatakan netralitas TNI sebagai sikap politik untuk menjaga soliditas institusi.

Publik tidak menafikan adanya mantan petinggi TNI yang sekarang terlibat aktif dalam politik praktis. Bagi publik, keterlibatan tersebut tidak mengurangi sedikit pun netralitas TNI. Keyakinan TNI mampu menjaga netralitas institusinya terekam dalam jajak pendapat pada Desember 2013. Dua dari tiga responden menyatakan, TNI mampu menjaga netralitasnya pada Pemilu 2014, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden.

Indikasi dari netralitas ini adalah kemampuan TNI menjaga sikap dan posisinya terhadap partai politik dan capres. Bahkan, 69,4 persen responden menyatakan yakin, TNI bisa bersikap netral menjelang Pemilu 2014.Tingginya apresiasi publik terhadap kemampuan TNI menjaga netralitasnya dalam pemilu mengindikasikan keinginan publik agar TNI tetap menjaga fungsinya sebagai tentara negara secara profesional.

Semangat utama dari gerakan reformasi 1998 adalah menegakkan kembali otoritas sipil sebagai prasyarat menuju sistem politik yang demokratis. Dalam negara demokrasi tentara harus tunduk kepada otoritas sipil. Sistem politik Indonesia hasil reformasi sukses membawa TNI ke baraknya dalam rangka membentuk tentara yang benar-benar profesional. Secara internal, TNI berhasil mereformasi dirinya sebagai tentara negara dengan fungsi utama sebagai penjaga keamanan dan kedaulatan negara.

Dalam beberapa kali jajak pendapat tentang hubungan sipil-militer di Indonesia, kebanyakan responden masih mengidolakan kepemimpinan militer karena dianggap lebih tegas ketimbang sipil. Meskipun gaya kepemimpinan militer lebih diidolakan, dalam menangani

persoalan bangsa publik lebih percaya kepada sipil.

Dalam jajak pendapat Oktober 2012, mayoritas responden lebih percaya jika persoalan-persoalan bangsa Indonesia ditangani oleh sipil ketimbang militer. Pasalnya, penyelesaian persoalan-persoalan tersebut akan efektif jika pendekatannya dilakukan dengan cara-cara dialog dan mengutamakan kepentingan rakyat. Cara-cara ini diakui responden merupakan karakter utama dari gaya kepemimpinan sipil.

Dua dari tiga responden percaya, otoritas sipil mampu mengentaskan rakyat dari kemiskinan dan memperbaiki layanan publik. Selain itu, mayoritas responden juga memercayai otoritas sipil dalam menyelesaikan persoalan konflik horizontal dan kekerasan terhadap kelompok minoritas. Otoritas sipil dipercaya mampu menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM dan korupsi oleh separuh bagian responden.

Tingginya kepercayaan terhadap otoritas sipil ini mencerminkan kuatnya dukungan publik terhadap legitimasi pemerintahan sipil. Sayangnya, pemerintahan selama ini belum bisa mewujudkan harapan publik secara optimal.

Dalam materi diskusi di atas memberikan harapan menuju kehidupan politik yang lebih demokratis ketika TNI memberikan jaminan netralitasnya dalam pemilihan umum. Era reformasi sedang meletakan landasan kekuatan "*civil society*." Persoalan bangsa yang pelik dan berat mencoba diselesaikan dengan kekuatan demokrasi. Proses dialog lebih di kedepankan ketimbang dengan pendekatan stabiltas artinya kekuatan sipil didorong agar mampu menyelesaikan persoalan bangsa dibidang ipleksosbud. Untuk mengembangkan gagasan tentang hubungan sipil-militer di era reformasi melalui beberapa pertanyaan di bawah ini.

1. Sejauhmana TNI atau militer memberikan komitmen dan dukungan terhadap upaya membangun kekuatan *civil society*?
2. Netralitas TNI dalam kegiatan politik praktis misalnya dalam pemilihan umum merupakan jalan yang lapang menuju proses demokratisasi dalam kehidupan masyarakat. Sejauhmana netralitas TNI dapat dijamin pelaksanaanya dengan baik pada pemilihan umum tahun 2014 dan pemilihan umum selanjutnya, mengingat beberapa jenderal menjadi Calon Presiden atau calon wakil Presiden?
3. Seberapa jauh korelasi antara netraltas TNI dengan terwujudnya masyarakat sipil (*civil society*) yang kuat?
4. Pemerintahan sipil di era reformasi sudah berjalan limabelas (15) tahun justru cenderung menunjukkan semakin lemah dan memiliki potensi disintegrasi, apakah momentum tersebut kemungkian dapat diambil alih oleh militer?

5. Sejauhmana konsistensi dukukungan masyarakat luas terhadap terwujudnya masyarakat madani (*civil society*), mengingat hasil survei LIPI menunjukkan 27% masyarakat masih menginginkan pemimpin dari militer dan 24% masyarakat menginginkan pemimpin dari sipil?

# Bab 5

## Penutup

Dalam bab penutup penulis mencoba membuat catatan penjelasan dari uraian panjang pada bab sebelumnya untuk menegaskan kembali pernyataan atau preposisi yang mengandung analisis terhadap beberapa variabel dalam relasi terhadap pembangunan politik sebagai upaya mewujudkan sistem politik yang demokratis.

Perkembangan sejarah politik di Indonesia menjadi studi yang menarik, sebab dalam upaya membangun sistem politik yang mapan dan stabil selama kurun waktu enam dasawarsa masih belum menunjukan tanda tanda yang kondusif. Sejak para *founding fathers* Bangsa Indonesia menginginkan Negara Republik Indonesia berdiri dengan pilar demokrasi yang kokoh dan kuat menopang kedaulatan dan kemandirian sebagai sebuah bangsa dan negara yang merdeka. Berbagai macam desain sistem politik telah dipraktekan berdasarkan konsep barat, namun belum menunjukan hasil yang cukup memadai baik dalam mendukung stabilitas pembangunan ekonomi maupun solidaritas sosial yang kuat. Pada masa Orde Lama sebagai orde transisi dari berakhirnya perang melawan penjajahan Hindia Belanda menuju berdirinya sebuah negara yang merdeka, maka meletakan dasar pembangunan ekonomi, sosial politik dan aspek lainnya merupakan tonggak sejarah yang harus menjadi catatan penting. Meskipun dalam penataan sistem politik dan ekonomi belum memberikan hasil yang mengarah pada keberhasilan stabilitas politik yang mantap dan pembangunan ekonomi yang kuat, akan tetapi telah berhasil mengusung Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat serta disegani oleh berbagai negara di dunia. Pada era Orde Baru dalam waktu tiga dasawarsa stabilitas politik cukup terkendali dan mampu memberikan rasa aman terhadap rakyatnya, namun sangat disayangkan pembangunan ekonomi yang dijalankan justru menimbulkan ketimpangan ekonomi yang cukup tajam dan pada kenyataanya soko guru ekonomi yang dibangun oleh Orde baru pada kenyataanya rapuh ketika ditempa oleh krisis ekonomi di kawasan Asia, menyebabkan rezim Orde Baru tumbang. Kedua variabel antara politik dan ekonomi memiliki korelasi yang kuat. Menata keseimbangan antara pembangunan politik dan pembangunan ekonomi memang tidak mudah dan seringkali menghadapi persoalan yang dilematis. Pembangunan politik menghasilkan demokrasi, tetapi demokrasi yang tidak didukung dengan *law of enforcement* akan mengakibatkan terjadinya mobokrasi. Ketika kebebasan tidak terkendali (mobokrasi) maka menimbulkan tindakan anarki dan *chaos*. Kondisi tersebut sudah dipastikan akan mengganggu stabilitas ekonomi. Demikian pula sebaliknya jika stabilitas ekonomi terganggu maka stabilitas politik juga akan menimbulkan *chaos* dan seterusnya. Dua pengalaman sejarah politik yang memilukan tersebut pada dua masa atau periode, sesungguhnya dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan bangsa dan negara di masa depan. Oleh sebab itu di era reformasi yang mulai berjalan pada tahun 1999 mencoba melakukan evaluasi kritis terhadap desain sistem politik melalui beberapa kebijakan

yang mendasar yaitu melakukan perubahan terhadap konstitusi negara melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak empat kali. Perubahan tersebut pada dasarnya melakukan perubahan yang cukup fundamental dibidang politik yaitu antara lain; lahirnya lembaga politik baru yang disebut Mahkamah Konstitusi (MK) yang berfungsi melakukan perubahan Undang-Undang Dasar dan undang-undang yang bersifat final dan mengikat, melakukan pertimbangan hukum terhadap usulan pemberhentian presiden yang dianggap melanggar undang-undang oleh sidang istimewa MPR. Kemudian masa jabatan presiden dibatasi hanya dua periode masa jabatan, presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu presiden. Tugas dan fungsi DPR lebih diperkuat yakni setiap anggota DPR memiliki kewenangan hak inisiatif dalam membuat undang-undang, demikian pula pengawasan di bidang anggaran DPR memiliki kewenangan menetapkan anggaran dan melakukan pembahasan anggaran dengan pemerintah eksekutif sampai dengan detail "satuan tiga". Selanjutnya perubahan yang lain yaitu lahirnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang menggantikan fungsi utusan daerah dan golongan fungsional yang pada masa Orde Baru diangkat oleh Presiden selaku kepala negara. Kedudukan DPD merupakan perwakilan dari wilayah yang kedudukannya juga melalui pemilhan bersamaan dengan pemilihan anggota legeslatif, hanya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masih terbatas pada melakukan koordinasi dan pengawasan dalam pembangunan di wilayah yang diwakilinya. Perubahan sistem politik di era reformasi cenderung meniru dengan desain sistem politik di Amerika Serikat yaitu presiden dipilih secara langsung, masa jabatan presiden juga dua periode. Kemudian kalau di Indonesia disebut DPD sedang di Amerika disebut Senator hanya perbedaanya senator di Amerika serikat mewakili negara bagian atau di Indonesia provinsi baik wilayah besar dan kecil terwakili hanya dua (2) senator, sedangkan di Indonesia setiap provinsi berbeda maksimal empat (4) orang. Desain sistem politik yang diawali dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut telah dijabarkan kedalam paket Undang-Undang Politik yaitu antara lain Undang-Undang tentang Pilpres, Undang-Undang tentang susduk MPR/DPR/DPD, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Partai Politik. Paket Undang-Undang Politik tersebut pada umumnya setiap lima tahun sekali dilakukan perubahan. Oleh sebab itu dengan melalui paket Undang-Undang Politik tersebut memberikan ciri dan corak atau warna terhadap desain sistem politik yang sedang dibangun. Ciri dan corak desain politik tersebut pada dasarnya bertujuan membangun suatu kehidupan politik yang demokratis dengan ditopang oleh pilar pilar lembaga lembaga politik yang kuat dan solid, mampu menggerakan partisipasi politik warga negara yang lebih meningkat secara hakiki, menumbuhkan budaya politik masyarakat Indonesia yang lebih egaliter dan terbuka serta demokratis. Desain sistem politik tersebut secara konseptual dan teoritis pada hakekatnya mencerminkan sebagai sebuah sistem poltik yang demokratis. Dalam perjalanan selama sepuluh tahun

lebih menerapkan desain sistem politik tersebut pada kenyataannya menghasilkan situasi dan kondisi dalam kehidupan politik yang berbeda dengan yang menjadi dasar tujuan tersebut diatas. Beberapa catatan fenomena peristiwa politik yang menunjukan ketidak sesuaian dan bahkan anomali dengan konsep dan teori yang telah didesain dalam paket undang-undang politik tersebut mendorong para ahli ilmu politik mencoba melakukan evaluasi dan penelitian terhadap faktor yang dominan mempengaruhi kegagalan penerapan "konsep demokrasi" dalam menciptakan stabilitas sosial dan politik serta stabilitas ekonomi dewasa ini. Beberapa fenomena yang dapat menjadi bahan analisis yaitu terutama aspek yang paling menonjol adalah *pertama*; terpilihnya figur pemimpin politik yang kurang kredibel, artinya yang dimaksud pemimpin politik adalah mereka para elit politik yang dipersiapkan atau mempersiapkan diri menjadi pejabat publik atau memimpin pemerintahan misalnya; sebagai anggota DPR/D, menjadi Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota. Sebagaimana telah diutarakan diatas di era reformasi justru terjadi fenomena yang sangat ironis dimana para anggota DPR/D, Gubernur dan Bupati/Walikota banyak yang terkena kasus tindak pidana korupsi dan mereka menjadi nara pidana. Padahal jiwa dalam undang-undang partai politik mendorong peranan partai politik sebagai sumber kaderisasi pemimpin politik yang handal dan negarawan. Akan tetapi dalam prakteknya ditengarai ada sesuatu yang salah *(some think wrong)*, apakah yang salah manajemen parpolnya atau *human resources* kader politik yang kurang baik, ataukah terjadi perubahan nilai-nilai dalam masyarakat yang lebih berorientasi nilai pragmatisme dan materialism dengan segala dampaknya. Sudah barang tentu fenomena tersebut perlu diteliti lebih mendalam oleh para ahli ilmu politik. *Kedua*; menimbulkan perluasan konflik antar lembaga politik dan konflik horizontal terutama yang diakibatkan oleh sengketa pemilukada, artinya bahwa penerapan demokrasi yang telah menjadi wajib bagi negara modern seharusnya ditengah era kompetisi antar kekuatan politik dalam memperebutkan simpati masyarakat tetap harus menjaga etika dan moral serta seminimal mungkin terjadi tindakan kekerasan. Namun dalam prakteknya fenomena konflik antar lembaga negara kerap dipertunjukan melalui media massa, misalnya konflik antara lembaga eksekutif dengan legeslatif tentang "Bank Century", konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan POLRI yang terkenal dengan sebutan "Cicak vs Buaya" jilid I dan II, konflik antara Komisi Yudisial (KY) dengan Mahkamah Agung (MA) terkait dengan tindakan hakim yang melanggar kode etik, konflik antara Mahkamah Konstitusi (MK) dengan lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang sengketa manipulasi suara yang dilakukan melalui surat palsu dari hakim MK, konflik antara Ketua MK dan lembaga Kepresidenan tentang pemberian grasi terhadap gembong narkoba Nola dan lain-lain. Beberapa fenomena konflik antar lembaga politik di lingkungan pemerintahan dan apalagi meluas sampai pada konflik horizontal yang sering terjadi terutama mengenai sengketa

pemilu kepala daerah, dimana potensi konflik menunjukan skala yang cukup besar antara beberapa kubu calon bupati/walikota. Dengan demikian proses demokratisasi yang diterapkan dibidang politik pada dasarnya perlu dipersiapkan dengan dukungan nilai-nilai masyarakat yang lebih kuat misalnya nilai-nilai "keterbukaan, kedewasaan dan kematangan berpikir (rasionalisasi) masyarakat, membangun komitmen bersama dalam menegakan nilai-nilai demokrasi, membangun nilai sportifitas dalam masyarakat. *Ketiga*; partai politik tidak lagi dipercaya oleh masyarakat, artinya kencenderungan masyarakat ketika pada awal era reformasi (tahun 1999) sangat antusias membangun dan mewujudkan sistem politik yang demokratis, namun pada akhir-akhir ini kepercayaan masyarakat terhadap peran partai politik yang diandalkan agar mampu menjalankan fungsinya dengan baik semakin menurun. Adapun fungsi partai politik yang lain kurang dioptimalkan secara serius yaitu fungsi rekruitmen poltik, optimalisasi fungsi agregasi kepentingan dan fungsi pengendalian konflik, sedangkan yang menonjol dewasa ini ditengarai partai politik justru berfungsi menjadi ajang jual beli kekuasaan atau yang sedang trend disebut "transaksional kekuasaan". Fenomena tersebut mengemuka disebabkan pengaruh pemikiran pebisnis yang tidak bisa dipungkiri para pebisnis dewasa ini menjadi Ketua Partai Politik yang langsung mengendalikan partai politik baik secara langsung menjadi pengurus partai politik maupun di belakang layar sebagai pebisnis maupun penasehat partai yaitu fenomena "transaksional kekuasaan". Oleh sebab itu ditenggarai motivasi para pemimpin politik yang menjadi pejabat publik lebih berorientasi pada tindakan dengan cara berpikir bisnis yaitu *"return of investment"*. Dengan cara berpikir tersebut berpengaruh terhadap *abuse of power* sehingga trend terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para elit politik yang menjadi pemimpin pemerintahan terutama kepala daerah. Fenomena para pengusaha memasuki dunia politik pada prinsipnya merupakan hak setiap warga negara dalam partisipasi di bidang politik. Akan tetapi ketika pengusaha terjun ke ranah politik harus melakukan perubahan mindset sebagai politisi, sebab *mind stream* sebagai pengusaha dan politisi berbeda. Sebab dunia politik pada umumnya berkaitan dengan "kekuasaan" yang digunakan untuk mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan sedangkan fungsi pemerintahan adalah menyelenggarakan pelayanan publik menuju kesejahteraan setiap warga negara. Sedangkan mindset seorang pebisnis adalah berorientasi pada keuntungan, oleh sebab itu ketika menjadi pejabat negara atau pejabat publik, walaupun cara berpikir pebinis dapat saja digunakan sebagai acuan strategi, namun mindset harus berubah yakni menuju orientasi kepentingan sosial dan pelayanan publik. *Keempat;* merebaknya politik uang dalam pemilukada, pemilu legeslatif dan pemilihan ketua partai politik, artinya bahwa pada kenyataanya sulit membedakan antara "*cost politic* (biaya politik) dengan *money politic* (politik uang)". Sebenarnya yang disebut *"cost politic"* adalah segala pembiayaan yang terkait dengan kegiatan untuk kepentingan partai politik oleh

karena menjalankan misinya menjadi tanggung jawab institusi. Adapun sumber pendapatan parpol sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu seseorang kader atau elit dipersiapkan menjadi pengurus atau anggota legeslatif atau sebagai pejabat publik semata mata karena membawa misi tugas parpol, sehingga konsekuensi logisnya kader parpol seharusnya tidak dibebani diluar kemampuannya dalam menjalankan tugas partai tersebut. Pada kenyataannya yang berkembang justru beban pembiayaan yang cukup besar ditanggung atau bahkan menjadi kewajiban masing masing kader sebagai bentuk loyalitas dan partisipasinya terhadap partai politik, atau yang sering disebut setiap kader harus "berkeringat" melalui proses transaksional. Dengan demikian perubahan nilai dan budaya politik dewasa ini yakni loyalitas dan pengabdian seorang kader dinilai seberapa besar kontribusi finansialnya terhadap partai politik. Sedangkan "politik uang" adalah pembiayaan yang dikeluarkan sebagai upaya mempengaruhi untuk memperoleh dukungan terhadap seseorang yang memiliki nilai tawar sebagai *votegetter* atau pemilik suara dikala pada pemilihan pengurus partai politik maupun pada saat pemilihan umum. Walaupun politik uang sebagai tindakan yang dikategorikan melanggar hukum akan tetapi dalam prakteknya sulit untuk menghindar cara seperti tersebut. Oleh sebab itu nilai dan moral politik warga negara perlu ditumbuhkan kembali secara lebih sehat melalui peningkatan pendidikan kewarganegaraan yang lebih melembaga. *Kelima*; merebaknya perilaku KKN yang dilakukan oleh elit partai politik secara massif, artinya bahwa elit partai politik yang seharusnya menjadi "tauladan" karena mereka adalah menduduki jabatan sebagai pemimpinan pemerintahan, jika secara massif masih terjadi perilaku KKN maka pola rekruitmen kader pemimpin pemerintahan yang berasal dari partai politik perlu ditata ulang kearah yang lebih kredibel, terbuka dan menggunakan kriteria yang lebih unggul. *Keenam;* menumbuhkan politisasi birokrasi yang cenderung mengabaikan kompetensi dan profesionalisme serta netralitas aparatur birokrasi, artinya seharusnya pilar birokrasi yang menjadi pendukung utama dalam membangun kinerja kepala daerah. Akan tetapi politisasi birokrasi yang semakin meluas yakni campur tangan para elit partai dalam penempatan pejabat karier di birokrasi pemerintahan, dengan mengabaikan unsur-unsur kompetensi dan profesional sesungguhnya menjadi buah simalakama bagi kinerja pemimpin pemerintah seiring dengan lemahnya kualitas aparatur birokrasi. Bahkan yang cukup mengkhawatirkan adalah kecederungan "politisasi birokrasi" justru semakin menonjol unsur KKN dan bahkan cara cara dagang sapi semakin kurang kondusif terhadap sistem kerja aparatur birokrasi yakni menjadi kurang produktif. Oleh sebab itu kesadaran para elit politik yang menjadi pejabat publik tersebut akan pentingnya dukungan aparatur birokrasi yang kompeten dan profesional melalui "merithokrasi sistem". Ataukah para elit politik tersebut akan membiarkan dirinya tergerus arus "pragmatisme kekuasaan" yang pada akhirnya akan menghantarkan para elit partai

masuk penjara karena melakukan tindakan KKN itu sendiri. *Ketujuh;* kecenderungan ketidak percayaan masyarakat semakin massif kepada pemerintahan yang sedang berjalan, artinya puncak gunung es dari rangkaian peristiwa fenomena politik sebagaimana diuraikan diatas pada gilirannya bermuara pada "ketidakpercayaan masyarakat semakin meluas terhadap pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun daerah, akan kemampuan pemerintah secara signifikan menyelesaikan berbagai persoalan terutama yang terkait dengan "korupsi", penegakan hukum dan perbaikan ekonomi untuk kalangan rakyat miskin dan masalah konflik sosial yang massif. Indikasi ketidak percayaan masyarakat disampaikan baik melalui hasil survei oleh lembaga survei maupun yang disuarakan oleh para ahli, tokoh masyarakat dan sinyal letupan konflik yang meluas serta tindakan anarkis masyarakat secara massif. Jika ketidak percayaan masyarakat *(trust)* semakin tinggi maka "legitimasi " pemerintahan juga akan semakin menurun. Oleh sebab itu jika terjadi proses "deligitimasi pemerintahan" terus berjalan maka tinggal menunggu kehancuran pemerintahan dan negara, sebagaimana peristiwa tahun 1998 yang lampau.

Penjelasan uraian di atas secara cukup mendalam sebagai hasil analisis berdasarkan fenomena yang terjadi dalam kehidupan politik di Indonesia, maka skenario perubahan sistem politik seperti yang disebutkan di atas, pada kenyataannya disadari atau tidak menghasilkan dampak yang cukup kritis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu maka perlu ada kesadaran kolektif untuk melakukan renungan atau kontempelasi secara signifikan bagaimana membuat skenario desain sistem politik yang lebih sesuai dengan kondisi realitas yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara ini. Walaupun ciri sistem politik pada kenyataannya tidak pernah tunggal akan tetapi lebih cenderung bersifat *mix* atau campuran, untuk itu menemukan kembali basis utama nilai-nilai dasar masyarakat Indonesia kemungkinan akan lebih arif dibanding terburu-buru dengan uji coba sistem politik yang sepintas modern akan tetapi kurang cocok untuk digunakan dalam menata dan mengatur integrasi masyarakat yang majemuk, alih-alih malah bisa memporak-porandakan nilai dasar yang sudah dibangun dengan susah payah oleh para *founding fathers* kita, yaitu Pancasila.

Dengan demikian pembangunan politik yang saat ini memasuki era demokratisasi, maka sebagaimana benang merah kajian seperti yang diuraikan para ahli terdahulu pada kesempatan ini disampaikan beberapa sumbang saran yakni sebagai berikut:

*Pertama;* penyederhanaan sistem kepartaian melalui fusi yang berdasarkan atas kesamaan ideologis melalui kesadaran kolektif bangsa secara sukarela masing-masing elit politik yang bisa ditetapkan jumlah partai maksimal 6 (enam) partai politik, apabila strategi melalui *electoral threshold* (ET) berjalan tidak efektif. Dalam perkembangannya pada pemilu 2014 sudah dipastikan peserta pemilu bertambah 3 (tiga) partai yaitu PBB, NasDem dan PKPI ditambah 2 (dua) partai politik lokal di Nanggroe Aceh

Darussalam, menjadi sebanyak 14 (empat belas) partai. Meskipun model ET cukup berhasil baik mengandalikan jumlah partai dari peserta pemilu tahun 2009 sebanyak 24 (dua puluh empat) parpol maka pemilu tahun 2014 diikuti oleh 14 (empat belas) parpol. Namun sejumlah kalangan dari masyarakat luas masih menganggap jumlah partai terlalu banyak mengingat dari garis ideologi banyak yang memiliki kesamaan yaitu antara pengelompokan ideologi nasionalisme sekuler, nasionalime religius dan sosial demokrasi, serta religius (agama).

*Kedua;* sebagaimana dalam kajian fenomena hasil pemilu selama era reformasi belum mampu menghasilkan pemimpin pemerintaham yang negarawan, maka sistem pemilu yang merupakan kombinasi antara sistem proporsional dan sistem distrik yaitu berdasarkan sistem daftar urut berdasarkan suara terbanyak, dipandang cukup efektif maka harus didukung dengan penetapan calon legislatif yang kredibel, profesional dan memiliki integritas sebagai negarawan melalui manajemen kepartaian yang efektif yakni sistem rekruitmen dan pola karier kader yang teratur, tertib dan transparan. *Ketiga;* penerapan demokrasi langsung yang membawa implikasi terhadap meluasnya wilayah konflik yang disebabkan oleh pilkada, hasil pemilu yang belum mampu menghasilkan para pemimpin yang negarawan dan penyelenggaraan pemilukada yang meyedot biaya sangat besar perlu dikaji lebih mendalam dengan menerapkan kembali demokrasi perwakilan *(representative democracy)* secara lebih berkualitas yang juga sama-sama memiliki landasan konstitusional, terutama untuk pemilukada gubernur.

*Keempat;* seluruh elemen kekuatan politik baik pada tataran suprastruktur politik dan infrastruktur politik, diberikan ruang yang lebih fleksibel sebagai sumber-sumber rekruitmen dari pemimpin nasional dan daerah terutama kelompok militer, birokrasi dan akademisi untuk mengikuti kontestasi demokrasi dalam memilih pemimpin pemerintahan melalui penguatan undang-undang yang lebih proporsional, logis dan rasional serta tidak diskriminatif.

*Kelima*; agar masing-masing partai politik mampu menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik terutama dalam hal sosialisasi nilai-nilai, komunikasi politik dan rekruitmen politik sehingga secara simultan mampu membangun budaya politik yang egaliterisme guna mendukung proses demokratisasi berjalan dengan baik tanpa harus dilalui dengan konflik vertikal dan horizontal.

# Daftar Pustaka


Alfian, *Politik, Kebudayaan dan Manusia Indonesia,* Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1980.

Almond, Gabriel. A, *The Politics of The Developing Areas,* Princeton University Press, 1960.

Al-Thail, Abdullah, Judul Asli Indzur Al-Bala, Terjemahan "Yahudi Sang Penghancur Dunia. Alih bahasa Misbah Em Marhidi, Penerbit, Mihrab, 2008.

Baechler, Jean, *Democracy: an analytical survey*, Unesco Publishing, 1995.

Blum, William, *America's Deadliest Export Democracy;The Truth About Us Foreign Policy and Everything Else*. 2ed books Ltd, London, 2013, *Terjemahan Demokrasi; Ekspor Amerika Yang Paling Mematikan*, Penerbit PT. Bentang Pustaka, Yogyakarta, 2013.

Budi, Priyo, *Birokrasi Pemerintah Orde Baru: Perspektif Kultural dan Struktural*, RajaGrafindo Persada, 1993.

Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1997.

Cipto, Bambang, Impact of multiple political parties in Indonesia, including military involvement in politics, Pustaka Pelajar, 2000.

Dahl, Robert. A, *Dilemas of Pluralist Democracy, Autonomy vs Control*, Yale University Press, 1982, Terjemahan; *Dilema Demokrasi Pluralis antara Otonomi dan Kontrol*, Penerjemah Sahatsi Mamora, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1985.

Dahl, Robert. A, *Modern Political Analysis*, Prentice-Hall, New Jersey, 1963.

Deutsch, Karl. W, *Politics and Government,* Houghton Mifflin, New York, 1970.

Denhart, *The Public Services,* Oxford University Press, New York, 2003.

Dale Scott Peter (1985), *us and overthrow of Soekarno* 1965-1967, Pasific Affairs, 1985

Easton, David, *A Frame Work For Political Analysis,* Prentice-Hall, New Jersey, 1965.

Easton, David, *The Political System* , Prentice-Hall, New Jersey, 1965.

Epperson, A. Ralph, *The New World Order*, Penterjemah PT. Ufuk Publishing House, Jakarta, 1990.

Fukuyama, Francis, *The End History and The Last Man*, Free Press, New York, 1994.

Ford, Henry, 1977, *The Internatonal Jew*, USA, 1977.

Geertz, Clifford, *Religion of Java,* University of Chicago Press, 1976.

Giddens, Anthony, *The Third Way. The Renewal of Social Democracy*, Cambridge : Polity, 1998.

Gould, Carol. C, Demokrasi Ditinjau Kembali, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1993.

Hamdi, Muchlis, Bunga *Rampai Pemerintahan*, Yasrif Watampone, Jakarta, 2002.

Haris, Samsudin, *Birokrasi dan Demokrasi: Pengalaman Indonesia dan Thailand,* PPW-LIPI, Jakarta, 2000.

Heyness, Jeff, *Democracy and Civil Society In The Third World: Politics and New Political Movements,* Polity Press, United Kingdom, 1997*,* Terjemahan: *Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga*, Penerjemah Yayasan Obor Indonesia, 2000.

Huntington, Samuel. P*, The Clash of Civilization and The Remaking of World Order,* Simon and Schuster, 1996.

Istianto, Bambang, *Demokratisasi Birokrasi*, Penerbit Mitra Wacana Mulia bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAMI), Mitra, 2011.

Markoff, John, Waves Of Democracy: Social Movements and Political Change, Pine Forge Press, 1998.
Mas'oed, Mohtar, *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
Mitchell, Joyce, *Political Analysis and Public Policy*, Rand McNally, Chicago, 1969.
Muhammad Safwat as Saqa Amini & Sa'adi Abu Habib, *Al Musuniyah (Gerakan Freemasonry)*, alih bahasa Mahtab Rabitah, Jakarta, 1982.
Mietzner, Marcus, *Military Politics, Islam, and The State in Indonesia, Institute of Southeast Asian Studies*, Singapura, 2009.
Nord Linger A. Eric, *Soldiers in Politics, Military Coups and Government*, Prantice Hill, Inc, Englewood Cliffs, New Jersey, 1977.
Lovell, P. John. and C.I. Eugene Kim, *The Military and Political Change in Asia, Spring Summer: Pacific Affairs*, 1967.
Nugraha, Rian D, *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang*, Jakarta, 2006.
Octavian, Amarulla, *Militer dan Globalisasi*, Penerbit UI Press, Jakarta, 2012
Perkins, John, *The Screet History of The American Empire,* Penguin, 2007.
Perl Muter, *Militer dan Politik, Penerjemah Sahat Simamura,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
Rahman, Arifin, *Sistem Politik Indonesia*, SIC kerjasama dengan LPM IKIP Surabaya, 1998.
Rais, Amien, *Agenda Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia,* PPSK Press, 2008.
Robson, W.A, *The University Teaching of Social Sciences,* Unesco, Paris, 1954.
Rodee, Clymen, Carlton, dkk, *Introduction to Political Science,* Mc Graw-Hill, New York, 1976.
Sange, Peter, *The Fifth Discipline: The art and practice of the learning organization*, Doubleday, New York, 1990.

**Sumber-sumber Artikel:**

Azyumardi Azra, *Resomasi,* Harian Republik tanggal 18 Desember 2008.
Azyumardi Azra, *Resonansi,* Harian Republika tanggal 8 Januari 2009.
Syafii Maarif, Ahmad, *Resonansi,* Harian Republika tanggal 6 Januari 2009.
Yudi Latif, Kutipan, Harian Republika, tanggal 12 Desember 2012.
Nugroho Noto Sutanto, Angkatan Bersenjata Dalam Percaturan Politik Indonesia, Majalah Prisma, Desember 1980.
Ong Hok Ham, Kedudukan Politik Kaum Militer dalam Sejarah, Majalah Prisma, Desember 1980.
Hendriko Firman, Bagaimana Peranan Militer di Negara Demokrasi seharusnya dijalankan? http:/www.tni.al.mil.id/majalah/cakrawala
Evan, Golput Capai 43 Persen, KPU Diminta Evaluasi Kinerja,www.kabar6.com

# Riwayat Hidup Penulis

Penulis di lahirkan di Purwokerto Kabupaten Banyumas Jawa Tengah tanggal 8 Januari 1958, di kota tersebut Penulis menyelesaikan pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar di Sokaraja lulus tahun 1970, Sekolah Menengah Pertama Negeri I Purwokerto lulus tahun 1973 dan Sekolah Menengah Atas Negeri II Purwokerto lulus tahun 1977. Sarjana (S1) Fisip Universitas Jember lulus tahun 1982, Magister Saint (S2) dari Universitas Indonesia (UI) jurusan Ilmu Administrasi Negara Bidang Konsentrasi Kebijakan Publik tahun 1998. Gelar Doktor (S3) Ilmu Manajemen Pemerintahan pada Universitas Satyagama Jakarta tahun 2007.

Penulis bertempat tinggal di Komp. Perhubungan RT 10 RW 06 Jatiwaringin, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, DKI Jakarta (bambangistianto@rocketmail.com). Pengalaman Penulis di bidang pendidikan diawali sebagai dosen Ilmu Politik Universitas Wijayakusuma di Purwokerto pada awal tahun 1983 sampai dengan akhir tahun 1984. Menjadi PNS di Kementerian Perhubungan sejak tahun 1984 sampai dengan sekarang.

Di samping mengabdi di Pemerintahan, dan pada tahun 1986 sampai tahun 1990 melanjutkan karier sebagai dosen di Universitas Kosgoro (saat ini Sekolah Tinggi Teknik Manajemen Kosgoro). Tahun 1998 Penulis diangkat sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAMI) Jakarta. Tahun 2003 sampai sekarang sebagai dosen Pasca Sarjana di STIAMI Jakarta, dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jakarta, dosen tamu pada program Pasca Sarjana MAP Universitas Jendral Soedirman (Unsoed).

Kursus-kursus yang telah diikuti antara lain: *Job Analysis Course* (Menpan/ Depnaker, Jakarta,1989), *Management of Analysis* (LAN, Jakarta 1990), Survei Pembangunan Kapal Pelni (Belanda dan Jerman 1996), *Human Resources Development* (LAN, Jakarta 1999), Auditor Ahli (BPKP, Jakarta 2000), *Performance and Public Accountability Management Course* (Menpan Kerjasama Pemerintah Australia, Jakarta 2003), *Conversation and Presentation English Courses* (LAN, Jakarta 2001), *Assessment Course* (Lapi ITB, Bandung 2010), *Tour and Seminar Technical Course Public Private Pertnership* (Sydney, Australia 2009). *Exibition and seminar Parking, Street and Traffic Transportation* (Birmingham, Inggris, 2009), Kursus Program Pengembangan Skema Sertifikasi Competensi (BNSP, Jakarta 2010), Program Pre Visit Kerjasama Diklat Water Ways (Ho Hai University, Nanjing, China, 2010), Kursus penjenjangan Struktural Sepala (1989), Sepadya (1993) dan Spamen (2001).

Pengalaman perjalanan ke Luar Negeri mengikuti Workshop, Seminar dan Kursus di Jerman (1996), Belanda (1996), London Inggris (2009), Sydney Australia (2009) dan China (2010), *Hospitality Training In Railways* (SNCF) Prancis (2011), China (2012), Hongkong (2013), Studi tentang manajemen Rolling Stock dan Railway di Londonn, Amsterdam, Hannover, Berlin (2013), dan *Advanced Management Railways* di Seoul, Korea Selatan (2014).

Beberapa judul buku yang telah diterbitkan dan beredar di Toko Buku Gramedia yaitu: Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik (2009), Demokratisasi Birokrasi (2010), dan Privatisasi Di Indonesia Dalam Model Public Private Partnership (2011).